



ISSN : 2089-3523

PROFIL ANAK INDONESIA 2015



KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

**KERJASAMA
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK**



PROFIL ANAK INDONESIA 2015

ISSN : 2089-3523

Ukuran Buku : B5 17,5 cm x 25 cm

Naskah : Badan Pusat Statistik (BPS)

Gambar Kulit : Badan Pusat Statistik (BPS)

Diterbitkan Oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA)

Dicetak Oleh : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA)

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya



**MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

SAMBUTAN

Perwujudan anak-anak sebagai generasi muda yang berkualitas merupakan salah satu upaya memperkuat kemampuan daya saing bangsa dalam menghadapi tantangan globalisasi, dan merupakan bagian dari pembangunan nasional dalam mengedepankan pembangunan sumber daya manusia (SDM) pada umumnya. Mengingat anak merupakan masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.



Publikasi ini menyajikan data dan informasi mengenai anak Indonesia yang terbagi dalam 5 (lima) kluster hak anak, yaitu hak sipil dan kebebasan anak, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif bagi anak, pendidikan dan kesehatan anak, serta perlindungan khusus bagi anak. Hal yang menarik dalam publikasi profil Anak Indonesia 2015 dibanding tahun sebelumnya adalah adanya ulasan yang berkaitan dengan anak dan bonus demografi. Dampak sukses dari pembangunan kependudukan dan kesehatan adalah menurunnya jumlah kelahiran, jumlah kematian dan meningkatnya harapan hidup penduduk. Menurunnya jumlah kelahiran dan kematian dalam jangka panjang akan menyebabkan perubahan struktur penduduk, yaitu turunnya proporsi jumlah anak dan meningkatnya proporsi usia produktif. Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan sampai dibawah 50 persen menandakan Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi atau *demographic window of opportunity*, yaitu penduduk usia kerja lebih dominan daripada penduduk lainnya. Bonus demografi akan

memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di Indonesia, dengan catatan, dapat memanfaatkan kondisi ini dengan menyediakan lapangan kerja yang memadai dan dibarengi dengan situasi kesehatan yang membaik.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, dimana rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,6. Puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2028-2031 dan angka ketergantungan penduduk akan mencapai titik terendah, yaitu 46,9. Bonus demografi tersebut hanya akan terjadi satu kali dalam perjalanan suatu bangsa, dan Indonesia sedang berada pada kondisi tersebut. Menurunnya jumlah anak dan bertambahnya persentase penduduk usia produktif akan memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pengeluaran yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, termasuk kualitas anak diberbagai bidang pembangunan dalam upaya pemenuhan haknya.

Dengan demikian publikasi ini diharapkan dapat menambah referensi bagi pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam upaya pemenuhan hak anak.

Terima kasih dan penghargaan yang tinggi disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak terutama kepada Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) beserta jajarannya atas upaya dan kerjasamanya sehingga tersusunnya publikasi ini. Semoga kerjasama yang telah terjalin dapat terus ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Jakarta, November 2015
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Republik Indonesia

Yohana Susana Yembise

KATA PENGANTAR

Sepertiga dari penduduk Indonesia merupakan anak-anak. *Mereka adalah* generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan anak dan mempersiapkan masa depan bangsa yang lebih baik.

Publikasi Profil Anak Indonesia 2015 merupakan hasil kerjasama antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Publikasi ini mengulas tentang profil anak dan beberapa indikator yang menggambarkan pencapaian pembangunan anak-anak dari berbagai aspek.

Publikasi ini diharapkan dapat digunakan oleh KPP dan PA serta kementerian dan lembaga terkait lainnya untuk mendukung penyusunan berbagai kebijakan dalam peningkatan kesejahteraan anak-anak Indonesia.

Kepada semua pihak yang membantu dalam penyelesaian publikasi ini, disampaikan penghargaan dan terima kasih. Kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan untuk penyempurnaan publikasi ini dimasa mendatang.

Jakarta, Desember 2015
Kepala Badan Pusat Statistik



Dr. Suryamin, M.Sc



RINGKASAN EKSEKUTIF

Publikasi Profil Anak Indonesia 2015 menggambarkan keadaan anak Indonesia berumur 0-17 tahun pada tahun 2014. Sekitar 82,85 juta (proyeksi penduduk hasil SP 2010) anak Indonesia berumur 0-17 tahun yang merupakan calon-calon pemegang estafet cita-cita pembangunan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, mereka harus dipersiapkan dengan baik, guna menyongsong masa depan bangsa yang paripurna. Sementara itu, hasil Susenas 2014, menunjukkan bahwa masih ada 21,7 persen anak berumur 0-17 tahun di Indonesia yang tidak memiliki akte kelahiran, dan hampir separuh (40,1 persen) beralasan karena mahalnya pembuatan akte.

Dampak sukses dari pembangunan kependudukan dan kesehatan adalah menurunnya jumlah kelahiran, jumlah kematian dan meningkatnya harapan hidup penduduk. Perubahan struktur penduduk tersebut akan menyebabkan turunnya beban ketergantungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif. Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan sampai dibawah 50 persen menandakan Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi atau *demographic window of opportunity*. Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, dimana rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,6. Puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2028-2030 dan angka ketergantungan penduduk akan mencapai titik terendah, yaitu 46,9.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu fase pendidikan yang sangat penting peranannya bagi anak-anak. Namun, pada tahun 2014, tercatat baru 17,83 persen anak 0-6 tahun di seluruh Indonesia yang mengikuti PAUD. Bahkan di perdesaan tercatat hanya 15,34 persen yang mengikuti PAUD, dan di perkotaan sebesar 20,41 persen.

Penyebab pernikahan dibawah umur sangat kompleks, diantaranya adalah ketidaksetaraan gender, kemiskinan, praktik agama dan nilai-nilai tradisi yang negatif, kegagalan hukum, konflik, bencana dan keadaan darurat lainnya. Tahun 2014 tercatat 1,60 persen anak perempuan 10-17 tahun di Indonesia berstatus pernah kawin.

Dalam hal kesehatan dasar, Indonesia berhasil menurunkan angka kematian balita dari 97 per seribu kelahiran pada 1991 menjadi 40 per seribu kelahiran pada 2012 (SDKI 2012). Dalam hal pemberian ASI eksklusif, baru sekitar 48,38 persen anak berumur 2-4 tahun mendapatkannya. Imunisasi lengkap pada anak berumur 1-4 tahun baru mencakup 55,72 persen.

Dalam beberapa dekade terakhir, hasil pembangunan telah dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, tidak terkecuali penduduk berusia 0-17 tahun. Keberhasilan tersebut diantaranya adalah di bidang pendidikan. Pada 2014, sekitar 83,83 persen anak 5-17 tahun berstatus masih sekolah. Meskipun jika dilihat menurut kelompok umur, kecenderungannya adalah semakin meningkat umur maka semakin menurun persentase penduduk masih sekolah. Pada kelompok umur 7-12 tahun, persentase yang masih sekolah adalah 98,92 persen dan menurun sekitar 5 persen (94,44 persen) pada kelompok umur 13-15 tahun dan menurun lagi hampir 20 persen pada kelompok umur 16-17 tahun menjadi hanya 78,39 persen saja.

Sementara itu, Angka Putus Sekolah pada jenjang pendidikan SD adalah sebesar 1,41 persen pada tahun 2014, pada jenjang pendidikan SMP, angka putus sekolah mencapai 2,24 persen dan pada jenjang pendidikan sekolah menengah angka putus sekolah mencapai 1,74 persen. Ada sebesar 39,48 persen anak berumur 7-17 tahun yang putus sekolah disebabkan karena tidak adanya biaya, 9,77 persen karena bekerja, 3,92 persen karena sekolah jauh, 4,86 persen karena menikah atau mengurus rumah tangga, dan sisanya karena alasan lainnya. Selain itu, masih ada sekitar 0,30 persen anak berusia 16-17 tahun yang tidak mempunyai kemampuan baca tulis.

Di bidang ketenagakerjaan, masih ada 2,7 juta jiwa atau 7,06 persen anak berumur 10-17 tahun yang bekerja. Lebih dari separo (55,53 persen) yang bekerja, berpendidikan maksimal tamat SD. Anak yang bekerja lebih banyak terserap di sektor pertanian yaitu 45,80 persen. Di sisi lain, ada sebesar 60,27 persen anak yang bekerja merupakan pekerja keluarga tidak dibayar. Rata-rata upah/gaji/pendapatan anak-anak yang bekerja adalah sekitar 767 ribu rupiah per bulan.

TIM PENYUSUN

Pengarah :

Dr. Heru P. Kosidi, M.Sc
Dr. Suhariyanto

Penanggung Jawab :

Dr. Heru P. Kosidi, M.Sc
Dr. Suhariyanto
Drs. Razali Ritonga, MA
Budi Mardaya

Editor :

Dr. Indra Murty Surbakti, MA
Krismawati, MA
Mariet Tetty Nuryetty, MA
Ir. Meity Trisnowati, M.Si
Sumarwanto, Dip. REIS
Wachyu Winarsih, M.Si
Ir. Fx. Didiet Santoso

Penulis :

Akhsan Naim, S.Si
Armadi Setiawan, S.Pi
Ir. Bambang Ananto Cahyono, M.Si
Dendi Handiyatmo, S.ST, M.Si
Dwi Susilo, M.Si
Piping Setyo Handayani S.ST, M.S.E
Putu Wira Wirbuana, S.ST
Ririn Kuncaraning Sari, S.ST
Sigit Wahyu Nugroho, A.Md
Theresia Parwati, S.ST
Trophy Endah Rahayu, M.Si

Pengolah Data :

Akhsan Naim, S.Si
Armadi Setiawan, S.Pi
Putu Wiro Wirbuana, S.ST
Ririn Kuncaraning Sari, S.ST
Sigit Wahyu Nugroho, A.Md
Trophy Endah Rahayu, M.Si

Setting :

Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan

AKRONIM

ABH	AngkaButaHuruf
AKA	Angka Kematian Anak
AKABA	Angka Kematian Balita
AKB	Angka Kematian Bayi
APK	AngkaPartisipasiKasar
APM	AngkaPartisipasiMurni
APS	AngkaPartisipasiSekolah
ASEAN	Association of South East Asian Nations
ASI	Air Susu Ibu
BA	Bustanul Athfal
Bappenas	Badan Perencana Pembangunan Nasional
BBLR	Berat Badan Lahir Rendah
BCG	Basillus Calmatto Guenin
BKB	Bina Keluarga Balita
BKG	Balita Kurang Gizi
BPS	BadanPusatStatistik
DI	Daerah Istimewa
Dikdas	Pendidikan Dasar
DKI	Daerah KhususIbukota
DPT	Difteri Pertusis Tetanus
KB	Kelompok Bermain
KF	Keaksaraan Fungsional
KLA	Kota Layak Anak
Kemendiknas	KementerianPendidikanNasional
Kemendagri	KementerianDalamNegeri
Kemenkeu	KementerianKeuangan
Kemenag	Kementerian Agama
KPP dan PA	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
MDGs	Millenium Development Goals
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
MA	Madrasah Aliyah
Menkokesra	MenteriKoordinasiKesejahteraan Rakyat
NTB	Nusa Tenggara Barat
PAUD	Pendidikan Anak Usia Dini
PUS	Pendidikan Untuk Semua
PMS	Penyakit Menular Seksual
PNBAI	Program Nasional Bagi Anak Indonesia
Posyandu	Pos Pelayanan Terpadu
PPI	Program Pengembangan Imunisasi
PT	Perguruan Tinggi
Puskesmas	Pusat Kesehatan Masyarakat
Pustu	Puskesmas Pembantu
RA	Raudatul Athfal
Riskesdas	Riset Kesehatan Dasar

RPJM	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Sakernas	Survei Angkatan Kerja Nasional
SD	Sekolah Dasar
SDKI	Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Manusia
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
Sisdiknas	Sistem Pendidikan Nasional
Susenas	Survei Sosial Ekonomi Nasional
Sukma	Surat Keterangan Melek Aksara
TBM	Taman Bacaan Masyarakat
TK	Taman Kanak-Kanak
TPA	Taman Penitipan Anak
UU	Undang Undang
UUD	Undang Undang Dasar
Wajar	Wajib Belajar
WHO	World Health Organization

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii
ORGANISASI PENYUSUN BUKU	ix
AKRONIM	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan	3
1.3 Sumber Data	3
1.4 Sistematika Penyajian	3
BAB II STRUKTUR PENDUDUK USIA 0-17 TAHUN	5
2.1 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin	5
2.2 Tren Penduduk 0-17 Tahun	6
2.3 Bonus Demografi	7
BAB III HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	11
BAB IV PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA DINI	15
4.1 Pengasuhan Alternatif	15
4.2 Perkawinan Usia Dini	18
BAB V KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN	23
5.1 Penolong Persalinan	24
5.2 Kematian Neonatum, Bayi, dan Balita	25
5.3 Air Susu Ibu (ASI)	26
5.4 Imunisasi	29
5.5 Keluhan Kesehatan	32
5.6 Akses ke Pelayanan Kesehatan	35
5.7 Tingkat Kunjungan	35
BAB VI PENDIDIKAN ANAK	37
6.1 Partisipasi Sekolah	38
6.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK)	41
6.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)	42
6.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)	43
6.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)	45
6.3 Angka Buta Huruf	47
6.4 Putus Sekolah	49
6.4.1 Angka Putus Sekolah	50
6.4.2 Alasan Tidak Sekolah	52
6.5 Akses Internet	53
BAB VII PERLINDUNGAN KHUSUS	57
7.1 Upaya Perlindungan Anak di Indonesia	57
7.2 Implementasi Penanganan Perlindungan Anak	58
7.3 Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum	58

7.3.1	Anak Bermasalah Hukum	59
7.3.1.1	Situasi dan Kondisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	59
7.3.1.2	Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan UU No. 11 Tahun 2012	60
7.3.2	Anak Pelaku Tindak Pidana	62
7.3.3	Anak Korban Tindak Pidana	64
7.4	Profil Anak yang Bekerja	69
7.4.1	Anak 10-17 Tahun Bekerja	71
7.4.2	Anak 10-17 Tahun Bekerja Menurut Provinsi	73
7.4.3	Anak 10-17 Tahun Bekerja Menurut Pendidikan	75
7.4.4	Anak 10-17 Tahun Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan	77
7.4.5	Anak 10-17 Tahun Bekerja Menurut Status Pekerjaan	79
7.4.6	Anak 10-17 Tahun Bekerja Menurut Jam Kerja	83
7.4.7	Anak 10-17 Tahun Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Upah/Gaji	84
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	91

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Penduduk Indonesia Tahun 2014 (000)	5
Tabel 2.2	Proyeksi Penduduk Indonesia Umur 0-17 Tahun, 2010-2019 (000)	7
Tabel 4.1	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014	16
Tabel 4.2	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis PAUD, 2014	18
Tabel 5.1	Persentase Anak yang Berobat Jalan menurut Jenis Fasilitas Kesehatan dan Tipe Daerah, 2014	35
Tabel 6.1	Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2014	39
Tabel 6.2	Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014	40
Tabel 6.3	Angka Buta Huruf Anak Berumur 5-17 Tahun Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, 2014	48
Tabel 6.4	Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Masih/Pernah Sekolah Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Sekolah, 2014	50
Tabel 6.5	Angka Putus Sekolah Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014	51
Tabel 6.6	Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014	53
Tabel 6.7	Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	54
Tabel 6.8	Persentase Anak Berumur 5-6 yang Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	55
Tabel 7.1	Jumlah Narapidana Anak Menurut Statusnya, 2014	63
Tabel 7.2	Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2014	64
Tabel 7.3	Jumlah dan Persentase Penduduk Korban Kejahatan, Tahun 2012-2014	67
Tabel 7.4	Rata-rata Upah/Gaji Penduduk 10-17 Tahun yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Persentase Penduduk Menurut Kelompok tertentu, 2010-2035	8
Gambar 2.2	Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Indonesia, 2010-2035	9
Gambar 3.1	Persentase Penduduk 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akte Kelahiran, 2014	12
Gambar 3.2	Persentase Penduduk 0-17 tahun yang Tidak Memiliki Akte Kelahiran Menurut Alasan, 2014	13
Gambar 4.1	Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	17
Gambar 4.2	Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2014	20
Gambar 4.3	Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun yang Berstatus Kawin dan Cerai Menurut Umur Kawin Pertama, 2014	21
Gambar 5.1	Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran dan Tipe Daerah, 2014	25
Gambar 5.2	Angka Kematian Neonatum, Bayi, dan Balita, 1991-2012	26
Gambar 5.3	Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	27
Gambar 5.4	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	27
Gambar 5.5	Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Tanpa Makanan Tambahan dan ASI dengan Makanan Tambahan bagi Balita Menurut Tipe Daerah, 2014	28
Gambar 5.6	Persentase Anak Berumur 2-4 Tahun yang diberi ASI Saja Selama 6 Bulan Lebih Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	29
Gambar 5.7	Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	30
Gambar 5.8	Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Imunisasi, 2014	31
Gambar 5.9	Persentase Anak Berumur 1-4 Tahun yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	32
Gambar 5.10	Persentase Anak yang Sakit Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	32
Gambar 5.11	Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Keluhan Terbesar, 2014	33
Gambar 5.12	Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	34
Gambar 5.13	Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Penggunaan Obat menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengobatan, 2014	34

Gambar 5.14	Tingkat Kunjungan Anak ke Fasilitas Kesehatan, 2014	36
Gambar 6.1	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Jenis Kelamin, 2014	42
Gambar 6.2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17Tahun menurut Tipe Daerah, 2014	43
Gambar 6.3	Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Jenis Kelamin, 2014	44
Gambar 6.4	Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Tipe Daerah, 2014	45
Gambar 6.5	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Jenis Kelamin, 2014	46
Gambar 6.6	Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Tipe Daerah, 2014	47
Gambar 7.1	Komposisi Hasil Pendampingan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum, 2014	61
Gambar 7.2	Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2014	66
Gambar 7.3	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2014	66
Gambar 7.4	Perbandingan Komposisi Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014	67
Gambar 7.5	Persentase Penduduk Korban Kejahatan Yang Kasusnya Dilaporkan Ke Polisi Menurut Kategori Umur, 2014	68
Gambar 7.6	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitas Yang Bekerja, 2010-2014	71
Gambar 7.7	Persentase Anakyang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	72
Gambar 7.8	Jumlah Penduduk 10-17 Tahun dan Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja menurut Provinsi, 2014	73
Gambar 7.9	Jumlah Anak yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Provinsi (000), 2014	74
Gambar 7.10	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut PendidikanTerakhir yang Ditamatkan dan Kelompok Umur, 2014	75
Gambar 7.11	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja MenurutPendidikan Terakhir yang Ditamatkan,Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014	76
Gambar 7.12	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014	77
Gambar 7.13	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014	78

Gambar 7.14	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2014	79
Gambar 7.15	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kelompok Umur, 2014	80
Gambar 7.16	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2014	81
Gambar 7.17	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal dan Kelompok Umur, 2014	82
Gambar 7.18	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2014	83
Gambar 7.19	Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jam Kerja, dan Rata-rata Jam Kerja, 2014	84
Gambar 7.20	Rata-rata Upah/Gaji Selama Sebulan Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai Menurut Provinsi (dalam ribuan rupiah), 2014	86

A large, light orange number '1' is centered on the page, serving as a background for the title text.

BAB

PENDAHULUAN



PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Ayat 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pada Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002, menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang tersebut merupakan bentuk dari hasil ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (CRC). Konvensi ini merupakan instrumen Internasional di bidang Hak Asasi Manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. CRC terdiri dari 54 pasal yang hingga saat ini dikenal sebagai satu-satunya konvensi di bidang Hak Asasi Manusia khususnya bagi anak-anak yang mencakup baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Hasil Proyeksi Sensus Penduduk 2010, pada 2014 penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 252,2 juta jiwa, dan sekitar 82,85 juta jiwa (32,9 persen) diantaranya adalah anak-anak usia 0-17 tahun. Dapat dikatakan bahwa berinvestasi untuk anak adalah berinvestasi untuk sepertiga penduduk Indonesia. Gambaran kondisi anak saat ini menjadi dasar yang penting bagi pengambilan kebijakan yang tepat bagi anak. Anak-anak merupakan kelompok penduduk usia muda yang mempunyai potensi untuk dikembangkan agar dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan di masa mendatang. Mereka adalah kelompok yang perlu disiapkan untuk kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Salah satu aspek penting untuk melihat kualitas anak adalah dari sisi pendidikan. Hasil Susenas 2014 menunjukkan bahwa anak usia 5-17 tahun yang berstatus sekolah sebesar 83,83 persen. Pada kelompok usia tersebut terdapat 4,04 persen yang tidak bersekolah lagi dan yang belum pernah sekolah sebesar 12,13 persen. Meskipun persentase anak usia sekolah yang masih bersekolah cukup

tinggi, namun kualitas dari anak tersebut juga harus ditingkatkan demi terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas bagi bangsa dan negara di masa mendatang. Hal ini dikarenakan masih adanya permasalahan terbatasnya akses pendidikan berkualitas bagi anak, terutama bagi anak keluarga miskin dan di masyarakat terpencil. Dampaknya dapat terlihat dari semakin meningkatnya kasus-kasus kekerasan, jumlah anak yang bermasalah dengan hukum, eksploitasi (termasuk *trafficking*), dan anak yang bekerja.

Disisi lain belum terpenuhinya hak sipil anak, dimana anak yang memiliki akta kelahiran baru sekitar 77,72 persen (Susenas 2014), 21,72persen lainnya tidak mempunyai akta kelahiran. Hal ini mencerminkan belum terpenuhinya hak anak terhadap identitasnya dan masih lemahnya sistem pendataan atau registrasi kelahiran. Akta kelahiran yang tidak dimiliki oleh seorang anak menyebabkan ketidakjelasan identitas anak, yang akan membawa sejumlah implikasiseperti diskriminasi, tidak memiliki akses terhadap pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, rawan menjadi korban perdagangan manusia, mudah dijadikan pekerja anak, dan lain-lain.

Dilihat dari sisi kesehatan, angka kematian bayi (AKB) pada tahun 2012 sebesar 32 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup. Angka tersebut jauh dari target MDGs (23 kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup) yang ingin dicapai pada tahun 2015. Sementara pada tahun yang sama, Angka Kematian Balita adalah sebesar 40 per 1.000 kelahiran hidup, sedangkan target MDGs pada tahun 2015 adalah 32 kematian balita per 1.000 kelahiran hidup. Indikator lainnya adalah status gizi anak, dimanaberdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2010, prevalensi Balita Kurang Gizi (BKG) pada tahun 2010 adalah sebesar 17,9 persen yang terdiri dari 4,9 persen gizi buruk dan 13 persen gizi kurang.

Di samping itu, perlindungan anak dari berbagai tindak kekerasan, perdagangan anak, eksploitasi, dan diskriminasi masih belum optimal. Hal ini antara lain terlihat dari jumlah anak bekerja yang relatif masih tinggi. Hasil Sakernas Agustus 2014, menunjukkan bahwa 2,7 juta anak berumur 10-17 tahun yang bekerja, yaitu sekitar 7,06 persen dari total penduduk usia 10-17 tahun.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, maka diperlukan adanya data profil anak sebagai gambaran keadaan anak-anak di Indonesia secara menyeluruh dari berbagai aspek. Oleh karena itu Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS)

melakukan suatu kajian analisis deskriptif mengenai situasi dan kondisi anak-anak di Indonesia. Penyusunan profil dalam jangka pendek menjadi sangat penting untuk disusun dan dikembangkan sebagai basis data dan masukan dalam upaya pemenuhan hak-hak anak.

1.2 Tujuan

Publikasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak Indonesia yang diamati dari aspek lingkungan keluarga, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak baik terhadap masalah sosial, hukum, kekerasan, dan anak bekerja.

1.3 Sumber Data

Publikasi ini menggunakan berbagai macam sumber data, dari hasil survei dan sensus sebagai berikut:

- a. Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012
- b. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2014
- c. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2014
- d. Sensus Penduduk 2010 dan Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010
- e. Lembaga Pemasyarakatan Republik Indonesia

1.4 Sistematika Penyajian

Secara sistematis publikasi ini disajikan dalam tujuh bab. Pemilihan bab dalam penyusunan Profil Anak disesuaikan dengan lima kluster hak anak pada Konvensi Hak Anak (KHA) yakni: hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, dan perlindungan khusus. Pengelompokan tentang isi KHA ke dalam lima kluster oleh Komisi Hak Anak PBB dilakukan dengan pertimbangan mempermudah pemahaman publik serta mempermudah dalam penyusunan laporan implementasinya kepada PBB. Dalam setiap kluster telah ditentukan indikator rinci, meskipun demikian karena keterbatasan data, tidak semua indikator tersebut disajikan dalam publikasi ini.

Bab pertama menyajikan pendahuluan yang berisi latar belakang penyusunan publikasi, tujuan, sumber data, serta sistematika publikasi. Bab kedua menyajikan tentang Struktur Penduduk 0-17 tahun. Bab ke-tiga menyajikan

tentang Hak Sipil dan Kebebasan. Bab ke-empat tentang Pengasuhan Alternatif dan Perkawinan Usia Dini, Bab ke-lima Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Bab ke-enam Pendidikan Anak, sedangkan Bab ke-tujuh Perlindungan Khusus yang berisi tentang Perkembangan Perlindungan Anak di Indonesia, Implementasi Penanganan Perlindungan Anak, Perlindungan Khusus, Anak Bermasalah Hukum, dan Profil Anak yang Bekerja.

BAB

**STRUKTUR
PENDUDUK USIA
0 - 17 TAHUN**



STRUKTUR PENDUDUK USIA 0 -17 TAHUN

2.1 Jumlah dan Rasio Jenis Kelamin

Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Anak merupakan karunia yang terbesar bagi keluarga, agama, bangsa, dan negara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumberdaya manusia, jika dipenuhi semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonominya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Tabel 2.1 Penduduk Indonesia Tahun 2014 (000)

Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		Laki-laki dan Perempuan		Rasio Jenis Kelamin
	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	Jumlah (000)	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
0-17	42409	33,5	40439	32,2	82848	32,9	104,9
18+	84306	66,5	85011	67,8	169317	67,1	99,2
Jumlah	126715	100,0	125450	100,0	252165	100,0	101,0

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil SP2010

Pada tahun 2014 penduduk Indonesia yang berumur 0-17 tahun mencapai 82,8 juta (Tabel 2.1) atau sebesar 32,9 persen dari keseluruhan penduduk. Apabila dilihat dari sudut pandang ketergantungan, maka sepertiga dari penduduk Indonesia masih membutuhkan perlindungan baik oleh keluarga, masyarakat, ataupun negara.

Kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus disiapkan oleh pemerintah untuk anak terlihat masih cukup besar, misalnya dibidang kesehatan dan pendidikan. Masih sangat dibutuhkan peran serta orang tua untuk akses kepada pelayanan

kesehatan agar mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada bayi, balita, dan anak. Anak, baik bayi maupun balita membutuhkan layanan kesehatan yang baik, sehingga mereka bisa melewati tahun-tahun kritis di awal kehidupannya mengingat kesehatannya sangat rentan terhadap berbagai jenis penyakit. Usaha pemerintah meningkatkan kesehatan anak melalui layanan imunisasi, pemberian vitamin, dan makanan tambahan berperan penting dalam menurunkan kematian bayi dan meningkatkan kualitas kesehatannya.

Dibidang pendidikan juga tidak kalah pentingnya dimana pendidikan merupakan sarana untuk membentuk generasi yang berkualitas. Penyediaan penyelenggaraan pendidikan oleh pemerintah mutlak diperlukan, disamping pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Dalam hal ini perlu menjadikan pendidikan anak sebagai investasi untuk hari depan anak dan orangtua.

Pada Tabel 2.1 tampak bahwa Rasio Jenis Kelamin (RJK) kelompok umur 0-17 tahun sebesar 104,9; yang secara umum dapat dikatakan bahwa pada tahun 2014 penduduk berumur 0-17 lebih banyak berjenis kelamin laki-laki daripada perempuan. Sedangkan pada kelompok umur yang lebih tua, RJK sebesar 99,2 yang artinya proporsi penduduk laki-laki berkurang dibandingkan perempuan. Secara alami ini berkaitan dengan angka harapan hidup laki-laki yang memang lebih rendah daripada perempuan.

Walaupun jumlah laki-laki tercatat lebih banyak daripada perempuan, dalam mendukung kesetaraan gender, maka baik anak laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang setara dalam berbagai aspek seperti untuk memperoleh pendidikan atau layanan kesehatan yang baik.

2.2 Tren Penduduk 0-17 Tahun

Dalam periode 2010-2019 yang diperlihatkan oleh Tabel 2.2, diproyeksikan akan terjadi kenaikan jumlah penduduk 0-17 tahun dalam periode lima tahun ke depan, namun pada penduduk kelompok umur 15-17 tahun memiliki pola yang sedikit acak, dimana terjadi peningkatan pada tahun tertentu dan terjadi penurunan ditahun berikutnya. Perbedaan tren antar kelompok umur ini di masa akan datang harus diantisipasi oleh pemerintah dengan merencanakan program-program yang tepat agar perubahan komposisi penduduk 0-17 tahun ini tidak menjadi penghambat jalannya pembangunan.

Tabel 2.2 Proyeksi Penduduk Indonesia Umur 0-17 Tahun, 2010-2019 (000)

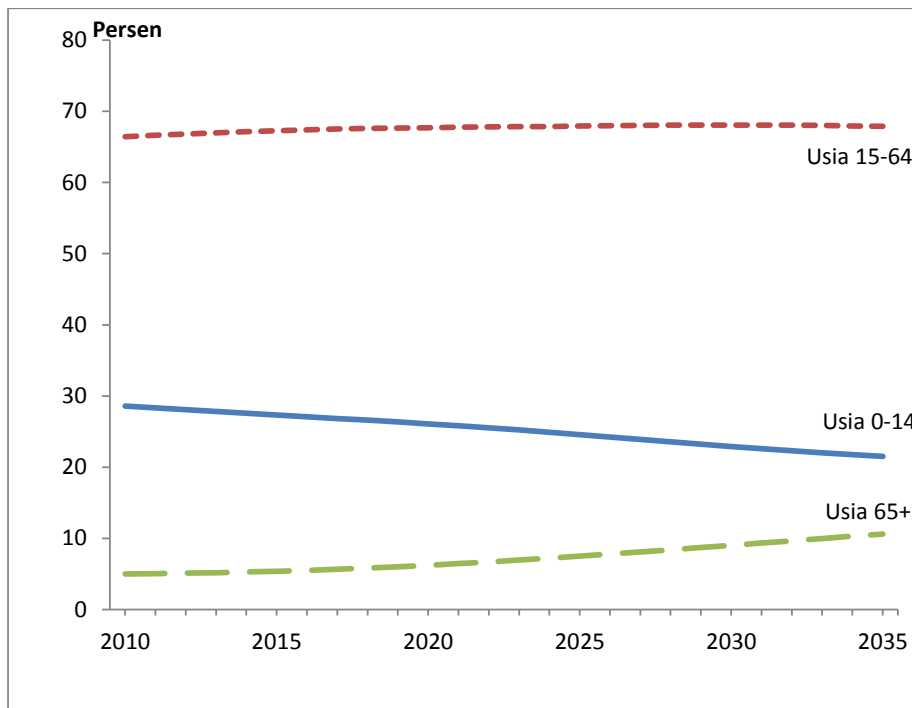
Kelompok Umur	Tahun									
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
0-4	23.454	23.681	23.853	23.994	24.087	24.066	23.960	23.848	23.730	23.605
5-9	22.518	22.632	22.767	22.932	23.110	23.330	23.560	23.734	23.879	23.974
10-14	22.166	22.230	22.281	22.310	22.360	22.462	22.577	22.713	22.879	23.057
15-17	13.003	13.086	13.182	13.262	13.292	13.286	13.316	13.369	13.409	13.424
Jumlah	81.141	81.630	82.083	82.498	82.848	83.144	83.412	83.665	83.896	84.060

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 Berdasarkan Hasil SP2010

2.3 Bonus Demografi

Dampak sukses dari pembangunan kependudukan dan kesehatan adalah menurunnya jumlah kelahiran, jumlah kematian dan meningkatnya harapan hidup penduduk. Menurunnya jumlah kelahiran dan kematian dalam jangka panjang akan menyebabkan perubahan struktur penduduk, yaitu turunnya proporsi jumlah anak dan meningkatnya proporsi usia produktif. Di sisi lain, meningkatnya harapan hidup penduduk dan meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat akan berimbas pada meningkatnya jumlah penduduk lanjut usia. Perubahan struktur penduduk tersebut akan menyebabkan turunnya bebantekergantungan yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif.

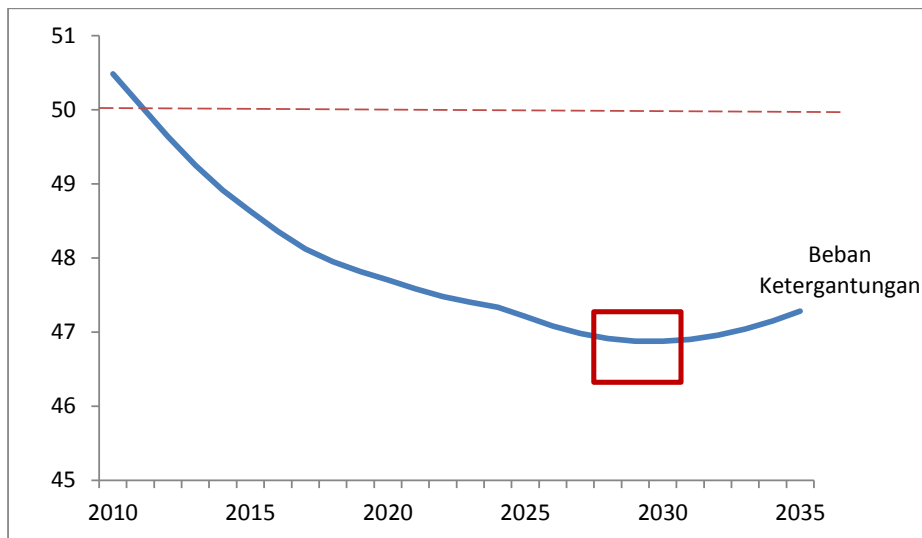
Perubahan struktur umur penduduk dan menurunnya beban ketergantungan sampai dibawah 50 persen menandakan Indonesia sudah memasuki periode bonus demografi atau *demographic window of opportunity*, yaitu penduduk usia kerja lebih dominan daripada penduduk lainnya. Bonus demografi akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan di Indonesia, asalkan kesempatan ini dimanfaatkan dengan tersedianya lapangan kerja yang memadai dibarengi oleh situasi kesehatan yang membaik.



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, BPS

Gambar 2.1 Persentase Penduduk Menurut Kelompok Umur Tertentu, 2010-2035

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2035, Indonesia sedang mengalami bonus demografi, dimana rasio ketergantungan penduduk sebesar 48,6. Puncak bonus demografi akan terjadi pada tahun 2028-2031 dan angka ketergantungan penduduk akan mencapai titik terendah, yaitu 46,9; yang artinya setiap 100 orang usia produktif (15-64 tahun) menanggung beban 47 orang usia tidak produktif. Setelah tahun 2030 diproyeksikan penduduk lansia akan terus bertambah, dan diikuti dengan menurunnya persentase penduduk usia kerja.



Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, BPS

Gambar 2.2 Rasio Beban Ketergantungan Penduduk Indonesia, 2010-2035

Bonus demografi tersebut hanya akan terjadi satu kali dalam perjalanan suatu bangsa, dan Indonesia sedang berada pada kondisi tersebut. Menurunnya jumlah anak dan bertambahnya persentase penduduk usia produktif akan memberikan keleluasaan untuk meningkatkan pengeluaran yang difokuskan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas penduduk usia produktif dapat dilakukan dengan memberikan bekal keterampilan yang sesuai dengan lapangan pekerjaan, sehingga mereka dapat lebih kompetitif di pasar kerja.

BAB 2 HAK SIPIL DAN KEBEBASAN



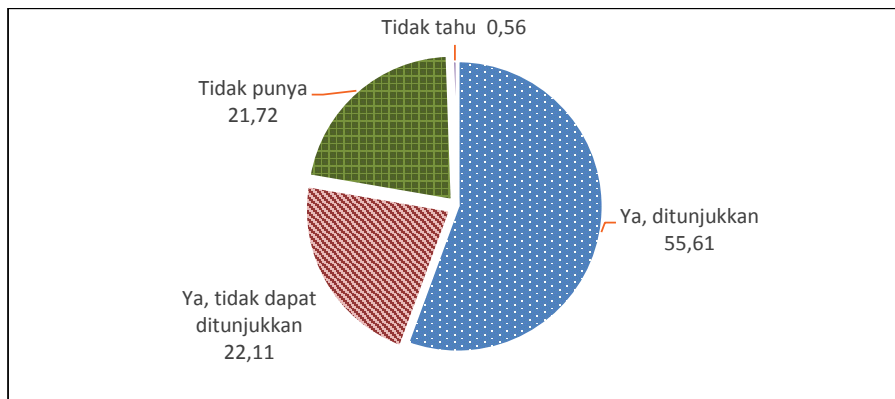
HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

Kepemilikanakta

kelahiranjugamerupakan salahsatu bukti telah terpenuhi hak memiliki identitas sebagai anak. Pasal 9 konvensi PBB mengenai hak-hak anak menentukan bahwa semua anak harus didaftarkan segera setelah kelahirannya dan juga harus mempunyai nama serta kewarganegaraan. Laporan ini menghimbau agar dilaksanakan pendaftaran kelahiran gratis bagi semua anak dan merupakan tujuan yang dapat dicapai oleh semua negara. Konvensi itu diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990.

Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta kelahiran, sehingga secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hari akan ada kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan.

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk salah satu negara yang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik. Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, mulai dari kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di tingkat kabupaten/kota.



Sumber: BPS - Susenas 2014

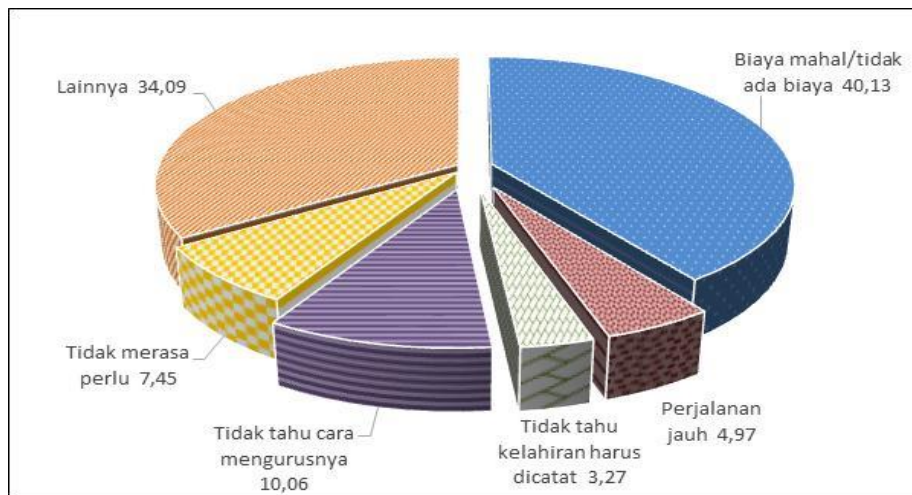
Gambar 3.1 Persentase Penduduk 0-17 Tahun Menurut Kepemilikan Akta Kelahiran, 2014

Data dari hasil Susenastahun 2014 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akta kelahiran untuk anak 0-17 tahun. Susenas 2014 (Gambar 3.1) mencatat hanya sebesar 55,61 persen dari penduduk 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dapat menunjukkannya, sedang 22,11 persen mengaku memiliki akta kelahiran namun tidak dapat menunjukkannya. Penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki akta kelahiran adalah sebesar 21,72 persen, dan sebesar 0,56 persen responden yang ditanya tentang akta kelahiran anaknya menyatakan tidak tahu tentang akta kelahiran. Rendahnya kepemilikan akta menunjukkan kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu ditingkatkan.

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak.

Realitanya keinginan sebagian penduduk untuk memiliki akta kelahiran seringkali mendapatkan hambatan karena biaya pembuatannya yang mahal, persyaratannya banyak, prosesnya yang panjang, dan butuh waktu lama, atau hambatan yang sifatnya menyangkut keturunan seseorang. Mencermati permasalahan dalam pencatatan kelahiran tersebut, maka persoalan yang lebih mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akta kelahiran juga perlu dimasukkan

dalam kurikulum pendidikan masyarakat. Tanggung jawab ini diemban oleh pemerintah pusat maupun daerah karena di dalam akta kelahiran terdapat Hak Asasi Manusia (HAM) dan sesungguhnya merupakan pelaksanaan amanat UUD 1945, serta Undang-Undang No. 23/2002 yang berkaitan keperdataan seseorang berupa hak identitas dan kewarganegaraan.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 3.2 Persentase Penduduk 0-17 tahun yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Menurut Alasan, 2014

Gambar 3.2 menunjukkan alasan orang tua yang anaknya tidak memiliki akta kelahiran 40,13 persen diantaranya adalah karena biaya yang mahal/tidak ada biaya. Alasan jarak yang jauh disebutkan oleh responden sebesar 4,97 persen. Jarak yang menjadi kendala bagi orang tua untuk mengurus dan memperoleh akta kelahiran, menunjukkan bahwa akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat masih menjadi kendala di beberapa provinsi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah jawaban tidak tahu; sebesar 10,06 persen mengaku tidak tahu cara mengurus akta kelahiran, dan 3,27 persen mengaku tidak tahu bahwa kelahiran harus dicatat. Hal ini memperlihatkan pengetahuan yang kurang pada masyarakat tentang akta kelahiran. Bagi pemerintah sangat perlu memperkenalkan hal ini berkaitan dengan tanggung jawab dalam pemenuhan hak anak.

BAB

**4
PENGASUHAN
ALTERNATIF
DAN
PERKAWINAN
USIA DINI**



PENGASUHAN ALTERNATIF DAN PERKAWINAN USIA DINI

4.1 Pengasuhan Alternatif

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini.

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak sejak usia dini dilandasai dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah masa keemasan bagi perkembangan anak (*golden age*), karena dalam rentang usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau *linguistik* seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang tidak baik.

Tabel 4.1 memperlihatkan sebanyak 17,83 persen anak umur 0-6 tahun pada tahun 2014 sedang mengikuti PAUD. Persentase anak kelompok umur 0-2 tahun yang sedang mengikuti PAUD sebesar 1,05 persen, kelompok umur 3-4 tahun sebesar 19,46 persen, dan kelompok umur 5-6 tahun sebesar 39,25 persen.

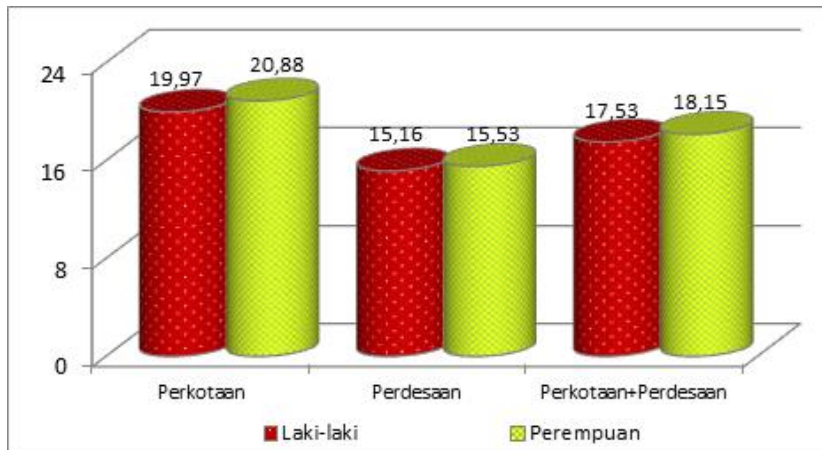
Tabel 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Umur, 2014

Tipe Daerah/Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)				
	0 - 2	3 - 4	5 - 6	3 - 6	0 - 6
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K):					
Laki-laki (L)	1,24	20,90	44,93	32,68	19,97
Perempuan (P)	1,44	23,92	44,91	34,43	20,88
L+P	1,34	22,35	44,92	33,53	20,41
Perdesaan (D):					
Laki-laki (L)	0,71	15,42	33,99	24,82	15,16
Perempuan (P)	0,82	17,92	33,71	25,71	15,53
L+P	0,77	16,65	33,85	25,25	15,34
K + D :					
Laki-laki (L)	0,97	18,15	39,27	28,67	17,53
Perempuan (P)	1,13	20,84	39,23	29,97	18,15
L+P	1,05	19,46	39,25	29,31	17,83

Sumber: BPS - Susenas 2014

Anak umur 0-6 tahun di daerah perkotaan yang sedang mengikuti PAUD lebih tinggi dibanding dengan daerah perdesaan. Anak umur 0-6 tahun di daerah perkotaan yang sedang mengikuti PAUD sebesar 20,41 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 15,43 persen.

Gambar 4.1 secara umum memperlihatkan persentase anak laki-laki umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD tidak terlalu jauh berbeda dengan anak perempuan. Persentase anak laki-laki umur 0-6 tahun yang sedang mengikuti PAUD sebesar 17,53 persen dan anak perempuan sebesar 18,15 persen. Pola yang serupa tampak di daerah perkotaan maupun perdesaan.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 4.1 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Keberadaan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini diatur oleh Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28 mengenai Pendidikan Anak Usia Dini menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, non formal, dan/atau informal. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal berbentuk TK (Taman Kanak-Kanak), RA (Raudhatul Athfal), atau bentuk lain yang sederajat. Pendidikan anak usia dini jalur pendidikan non formal berbentuk KB (Kelompok Bermain), TPA (Tempat Penitipan Anak), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, pendidikan usia dini jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Hasil Susenas tahun 2014, seperti yang terdapat pada Tabel 4.2 memperlihatkan jenis PAUD yang paling banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun adalah TK/RA/BA dengan persentase sebesar 64,61 persen. Selain TK/RA/BA, jenis PAUD yang juga banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun adalah Satuan PAUD Sejenis Lainnya dengan persentase sebesar 17,80 persen dan Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu sebesar 14,24 persen.

Tabel 4.2 Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenis PAUD, 2014

Tipe Daerah Jenis Kelamin	Jenis PAUD					Jumlah
	TK/ RA/ BA	Kelompok bermain	Taman penitipan anak	Pos PAUD/ PAUD terintegrasi BKB/ Posyandu	Satuan PAUD sejenis lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perkotaan (K):						
Laki-laki (L)	66,38	3,57	0,92	12,28	16,84	100,00
Perempuan (P)	64,25	3,00	1,22	14,36	17,17	100,00
L+P	65,32	3,29	1,07	13,32	17,00	100,00
Perdesaan (D):						
Laki-laki (L)	65,39	1,47	0,65	14,86	17,63	100,00
Perempuan (P)	61,99	1,61	0,36	15,99	20,05	100,00
L+P	63,70	1,54	0,50	15,42	18,83	100,00
K + D :						
Laki-laki (L)	65,95	2,65	0,80	13,42	17,19	100,00
Perempuan (P)	63,26	2,39	0,84	15,07	18,43	100,00
L+P	64,61	2,52	0,82	14,24	17,80	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Berdasarkan jenis kelamin, persentase anak laki-laki 0-6 tahun yang mengikuti PAUD jenis TK/RA/BA dan Kelompok Bermain lebih tinggi dibanding dengan anak perempuan. Sementara itu, pada PAUD jenis Taman Penitipan Anak, Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu dan Satuan PAUD Sejenis Lainnya, persentase anak perempuan umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD tersebut lebih tinggi dibanding dengan anak laki-laki.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase anak umur 0-6 tahun di perdesaan yang sedang mengikuti Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu dan Satuan PAUD Sejenis Lainnya lebih tinggi dibanding dengan anak di perkotaan. Sebaliknya, persentase anak 0-6 tahun di perkotaan yang sedang mengikuti PAUD TK/RA/BA, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak lebih tinggi dibanding di perdesaan.

4.2 PerkawinanUsiaDini

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun. Karena, sebuah perkawinan sejatinya dilakukan pada saat laki-laki dan perempuan sudah cukup matang sehingga kedua belah pihak siap secara fisik, mental maupun psikis untuk membina rumah tangga. Akan tetapi, tidak jarang dijumpai anak-anak berstatus kawin/cerai.

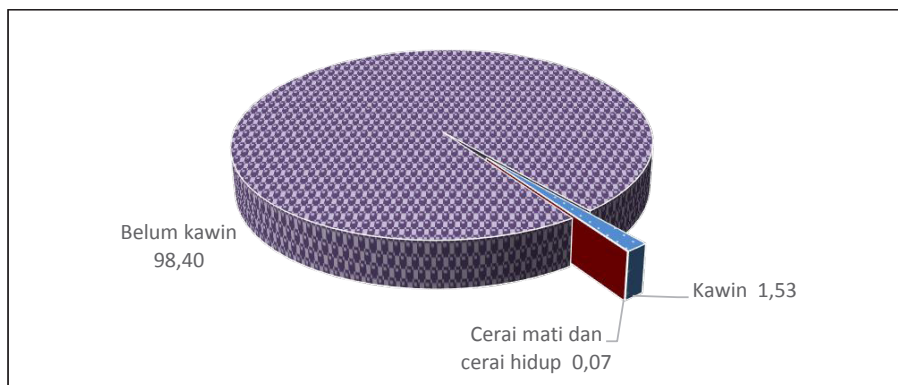
Seiring dengan waktu, terbitlah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 26 ayat 1 butir 3 menyebutkan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan usia anak-anak. Dari Undang-Undang tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang dianjurkan adalah usia minimal 18 tahun. Pada publikasi ini, yang dimaksud dengan perkawinan usia dini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak-anak usia di bawah 18 tahun yang sudah menikah, anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai, baik cerai hidup maupun cerai mati.

Pada Tabel Lampiran L-4.2 terlihat bahwa 1,60 persen anak perempuan usia 10-17 tahun di Indonesia telah melakukan perkawinan. Dan jika diperhatikan menurut tipe daerah, persentase anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin di daerah perkotaan yaitu 0,9 persen, sedangkan di perdesaan hampir tiga kali lipatnya yaitu mencapai 2,24 persen. Hal ini diduga disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah seorang atau setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat membantu perekonomian keluarga. Yang menjadi alasan sosial misalnya masih adanya sebagian masyarakat di Indonesia yang menganggap bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang perempuan. Sedangkan dari segi budaya, diduga di beberapa daerah di Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan, sehingga bukan dianggap hal yang tabu meskipun tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang perkawinan.

Sosialisasi akan pentingnya melakukan perkawinan pada usia yang tepat perlu dilakukan oleh berbagai kementerian dan lembaga, masyarakat juga harus dikomunikasikan tentang pentingnya mengatur usia perkawinan. Bagi perempuan, menikah di usia yang tepat akan mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena

melahirkan pada usia sangat muda akan sangat beresiko terhadap kematian, baik kematian ibu maupun bayinya. Dalam jangka panjang, ini juga akan menurunkan angka fertilitas dengan cara memperpendek rentang masa reproduksi perempuan melalui penundaan usia perkawinan.

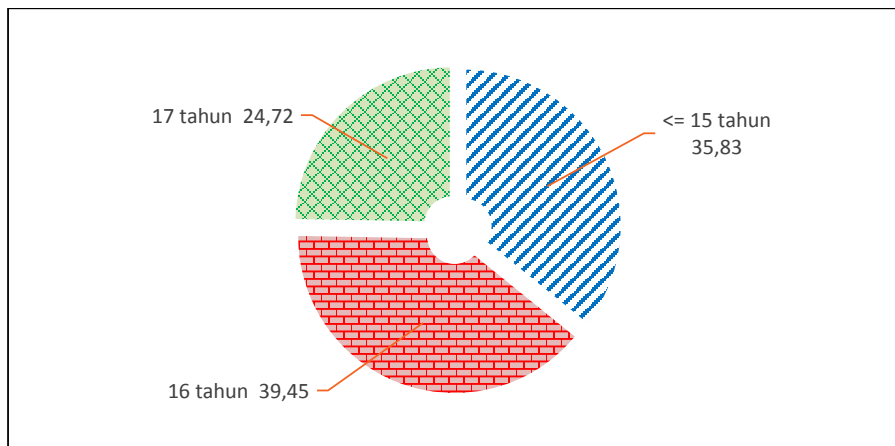
Gambar 4.2 menunjukkan bahwa 98,40 persen anak perempuan usia 10-17 tahun belum kawin, 1,53 persen berstatus kawin dan 0,07 persen berstatus cerai, baik cerai mati maupun cerai hidup. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi kementerian dan lembaga terkait, anak yang berstatus kawinan tercabut sebagian haknya sebagai anak, diantaranya adalah hak atas pendidikan. Karena sebagaimana kita tahu, pada pendidikan dasar dan menengah formal mensyaratkan anak harus berstatus belum kawin.



Sumber: BPS-Susenas 2014

Gambar 4.2 **Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Menurut Status Perkawinan, 2014**

Lebih rinci lagi, pada Gambar 4.3, dari 1,60 persen anak perempuan usia 10-17 tahun yang berstatus kawin dan cerai di Indonesia, sebesar 35,83 persen kawin di usia 15 tahun ke bawah, sebesar 39,45 persen kawin di usia 16 tahun, dan sebesar 24,72 persen kawin di usia 17 tahun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu usia perkawinan yang diijinkan untuk perempuan adalah 16 tahun, maka masih cukup banyak anak yang menikah di usia kurang dari 16 tahun.



Sumber: BPS-Susenas 2014

Gambar 4.3 Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun yang Berstatus Kawin dan Cerai Menurut Umur Kawin Pertama, 2014

Melihat fenomena perkawinan pada usia yang sangat muda bagi perempuan, tentunya hal ini tidak terlepas dari peran orang tua, seorang anak kemungkinan sudah mempunyai kesadaran atas dirinya dapat memutuskan kapan dia ingin menikah jika tidak ada campur tangan orang tua atau orang yang terdekat dengan dirinya. Sehingga untuk mengurangi fenomena pernikahan dini ini dapat dilakukan dengan cara memberikan edukasi kepada para orang tua, khususnya yang memiliki anak perempuan agar dapat menunda usia perkawinan hingga anak perempuannya telah mencapai usia yang cukup matang untuk menikah.

BAB

KESEHATAN

DASAR

DAN

KESEJAHTERAAN



KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN

Pembangunan kesehatan merupakan bagian yang tak terpisahkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan pembangunan nasional, sehingga kesehatan masyarakat selalu diupayakan oleh pemerintah. RPJMN 2015-2019 menyebutkan bahwa sasaran pembangunan manusia dan masyarakat bidang kesehatan antara lain: 1. Penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 346 menjadi 306 jiwa, 2. Penurunan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 32 menjadi 24 jiwa, 3. Penurunan persentase prevalensi kekurangan gizi pada balita dari 19,6 menjadi 17 persen, dan 4. Penurunan persentase *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta (dibawah 2 tahun) dari 32,9 menjadi 28 persen. Dari ketiga sasaran pembangunan tersebut tiga diantaranya dikhususkan untuk kesehatan bayi dan balita, begitu pentingnya kesehatan bayi dan balita dikarenakan anak merupakan generasi penerus yang menjamin eksistensi bangsa dan negara kedepan. Dan UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) juga menyebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kesehatan merupakan keadaan fisik, mental dan kesejahteraan sosial secara lengkap, bukan hanya sekedar tidak mengidap penyakit atau kelemahan. Sedangkan seorang anak dikatakan sehat apabila mengikuti pola perkembangan dan pertumbuhan yang sesuai dengan umurnya. Dalam Kajian Evaluasi Pembangunan Sektoral “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelangsungan Hidup Anak” oleh BPPN (2009), tingkat kesehatan seorang anak antara lain dipengaruhi oleh waktu yang disediakan ibu untuk melakukan pemeriksaan prenatal dan kunjungan ke klinik bayi yang baik, memberikan ASI, menyiapkan makanan dan mengobati penyakit. Sehingga pada bab ini akan dibahas tentang penolong kelahiran, pemberian Air Susu Ibu, imunisasi keluhan kesehatan dan kunjungan anak ke fasilitas kesehatan.

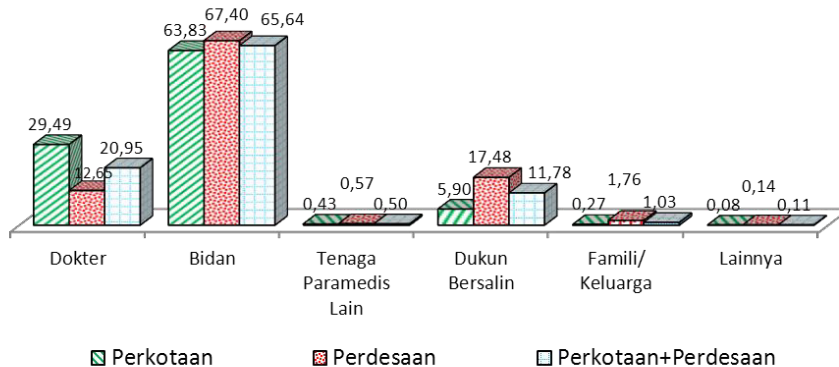
5.1 Penolong Kelahiran

Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian bayi tertinggi adalah saat neonatal.

Penolong kelahiran didefinisikan sebagai orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih. Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dicatat sebagai dokter tidak hanya dokter spesialis kandungan saja tetapi termasuk dokter umum dan dokter lainnya.

Seringkali seorang ibu yang akan melahirkan ditolong lebih dari satu orang penolong kelahiran. Hal ini dapat terjadi jika ibu pada awal persalinannya ditolong oleh dukun, karena terjadi masalah harus dibawa ke bidan. Dalam kasus tersebut, ada dua penolong kelahiran dimana penolong kelahiran pertama adalah dukun sedangkan penolong kelahiran terakhir adalah bidan. Pada bab ini akan diulas mengenai penolong kelahiran terakhir.

Berdasarkan Gambar 5.1 dapat dilihat bahwa penolong kelahiran terakhir paling banyak adalah bidan, baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Dari hasil Susenas, penolong kelahiran di daerah perkotaan terbanyak dilakukan oleh bidan (63,83 persen) dan dokter yang membantu proses persalinan hanya sebesar 29,49 persen. Sementara itu, di daerah perdesaan penolong kelahiran terbanyak yang dipilih oleh masyarakat adalah bidan (67,4 persen) dan dukun bersalin (17,48 persen). Masih tingginya persentase balita yang kelahirannya ditolong oleh dukun di daerah perdesaan mungkin disebabkan oleh faktor budaya dan fasilitas kesehatan lain yang masih jarang di perdesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meningkatkan jumlah tenaga kesehatan maupun tersedianya sarana dan prasarana kesehatan di daerah perdesaan.



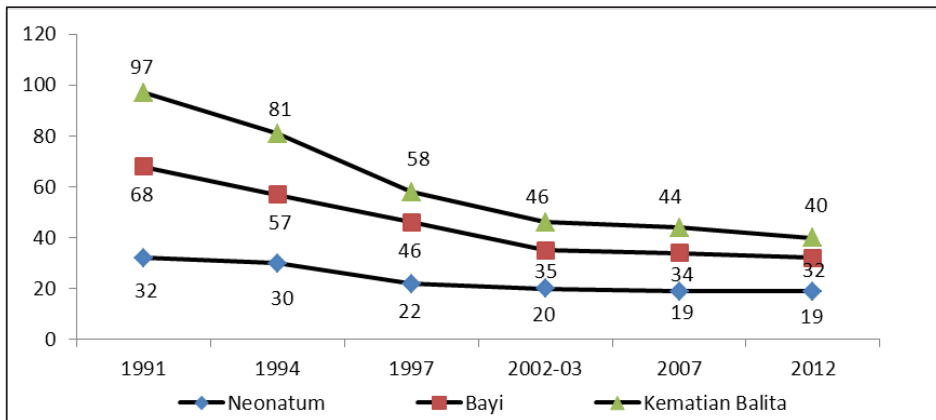
Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.1 Persentase Balita Menurut Penolong Kelahiran dan Tipe Daerah, 2014

5.2 Kematian Neonatum, Bayi dan Balita

Salah satu indikator yang dapat menunjukkan tingkat kesejahteraan suatu negara dalam bidang kesehatan adalah angka kematian bayi. Semakin tinggi angka kematian bayi maka menunjukkan derajat kesehatan yang rendah, dan kurang efektifnya program kesehatan yang diterapkan. Oleh karena itu, menurunkan angka kematian bayi menjadi salah satu fokus banyak pihak termasuk pemerintah Indonesia. Hal ini juga tertuang dalam Millenium Development Goals (MDGs) poin ke empat “Mengurangi Tingkat Kematian Anak”, yaitu mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun pada tahun 2015.

Angka kematian bayi adalah peluang bayi meninggal antara kelahiran dan sebelum mencapai umur tepat satu tahun. Penyebab kematian bayi ada dua, yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (*neonatal*) adalah kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran dan kematian bayi, dan eksogen (*post neo-natal*) adalah kematian bayi yang terjadi setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun.



Sumber: BPS - SDKI 2012

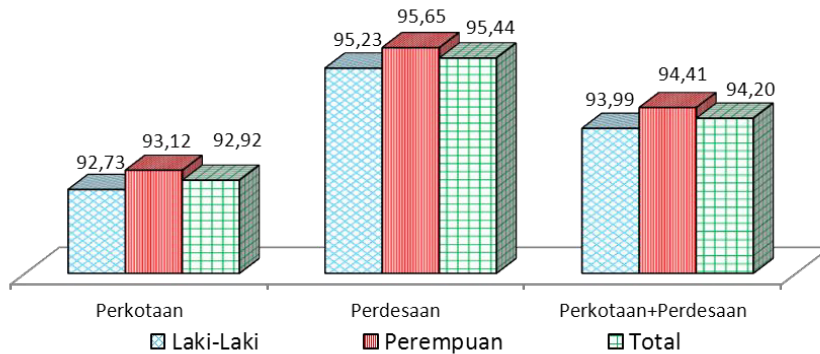
Gambar 5.2 Angka Kematian Neonatum, Bayi dan Balita, 1991-2012

Dari data SDKI pada Gambar 5.2 baik kematian Neonatum, bayi dan balita pada tahun 2012 menunjukkan angka terendah yaitu 19, 32 dan 40 pematian per 100.000 kelahiran hidup. Tren data SDKI menunjukkan angka kematian Neonatum, bayi dan balita yang cenderung menurun. Target pemerintah Indonesia dalam RPJM 2015-2019 adalah untuk menurunkan angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

5.3 Air Susu Ibu (ASI)

Air susu ibu (ASI) merupakan susu yang diproduksi oleh ibu untuk konsumsi bayi dan merupakan sumber gizi utama bagi bayi yang belum dapat mencerna makanan padat. Bayi yang disusui dengan ASI akan mendapatkan gizi terbaik yang tidak tergantikan bahkan oleh susu formula yang terbaik sekalipun. Hal ini dikarenakan, ASI mengandung banyak *immunoglobulin A (IgA)* yang baik untuk pertahanan tubuh dalam melawan penyakit.

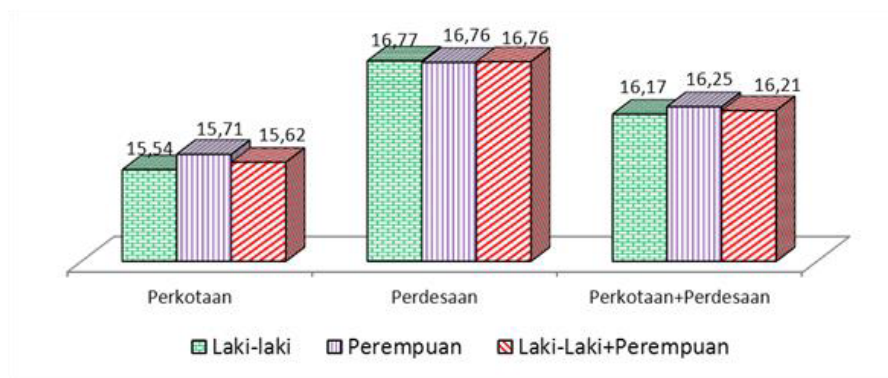
Begitu pentingnya ASI sehingga pemberian ASI yang tidak optimal pada bayi diperkirakan berkontribusi terhadap 1,4 juta kematian bayi dan 10 persen kesakitan balita di seluruh dunia (WHO, 2009). Melalui Kepmenkes RI No. 450/Menkes/SK/IV/Tahun 2004 tentang pemberian ASI secara eksklusif pemerintah Indonesia menunjukkan perhatiannya dengan menargetkan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan pertama dan cakupan ASI eksklusif sebesar 80 persen.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.3 Persentase Balita yang Pernah Diberi ASI Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

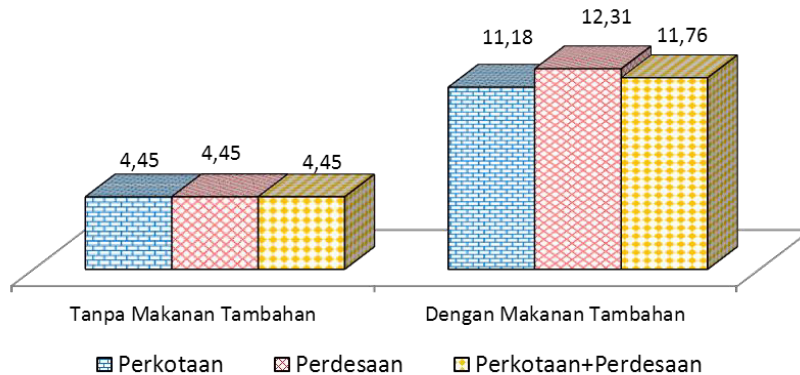
Gambar 5.3 memperlihatkan sebanyak 94,20 persen anak usia di bawah lima tahun (Balita) di Indonesia pernah diberi ASI. Persentase balita perempuan yang diberi ASI (94,41 persen) relatif lebih tinggi daripada balita laki-laki (93,99 persen). Sementara itu persentase balita di daerah perdesaan yang pernah diberi ASI (95,44 persen) lebih tinggi dibandingkan balita di daerah perkotaan (92,92 persen). Data tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pemberian ASI sudah cukup baik.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.4 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Gambar 5.4 menunjukkan rata-rata lama pemberian ASI pada balita di Indonesia sebesar 16,21 bulan. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata lama pemberian ASI pada balita laki-laki (16,17 bulan) dan perempuan (16,25 bulan). Rata-rata lama pemberian ASI di daerah perdesaan (16,76 bulan) sedikit lebih tinggi daripada di perkotaan (15,62 bulan).



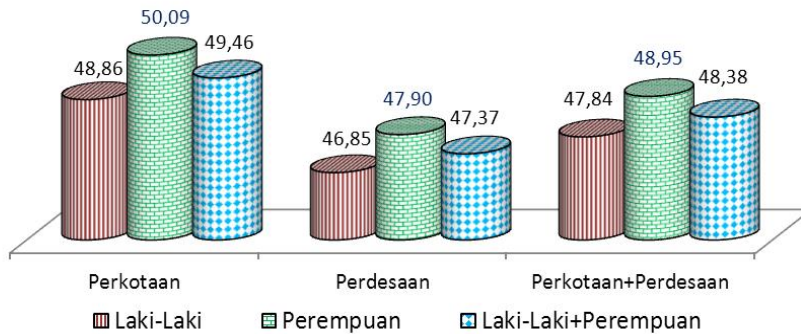
Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.5 Rata-rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Tanpa Makanan Tambahan dan dengan Makanan Tambahan bagi Balita Menurut Tipe Daerah, 2014

Dari Gambar 5.5 dapat dilihat rata-rata lama pemberian ASI saja baik di perkotaan dan perdesaan relatif sama sekitar 4 bulan. Sementara itu, rata-rata lama pemberian ASI dengan makanan tambahan di perkotaan dan perdesaan sedikit berbeda yaitu 11,18 persen di perkotaan dan 12,31 di perdesaan. Gambar 5.5 juga dapat digunakan untuk melihat keberhasilan program pemerintah mengenai ASI eksklusif selama 6 bulan, dari data terlihat bahwa program tersebut harus lebih disosialisasikan melihat rata-rata pemberian ASI tanpa makanan tambahan di Indonesia masih 4 bulan.

Dari Gambar 5.6 dapat dilihat persentase anakberumur 2-4 tahun yang diberi ASI saja selama enam bulan lebih. Persentase anak berumur 2-4 tahun yang diberi ASI saja selama enam bulan lebih sebesar 48,38 persen. Jika dilihat dari tipe daerahnya, anak berusia 2-4 tahun yang diberi ASI saja selama enam bulan lebih di daerah perkotaan (49,46 persen) sedikit lebih tinggi dibandingkan di perdesaan (47,37 persen). Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat di daerah perkotaan akan pentingnya ASI eksklusif lebih tinggi dibandingkan di perdesaan.

Sedangkan menurut jenis kelamin, anak berumur 2-4 tahun yang diberi ASI saja selama enam bulan lebih banyak anak perempuan (48,95 persen) dibandingkan anak laki-laki (47,84 persen).



Sumber: BPS - Susenas 2014

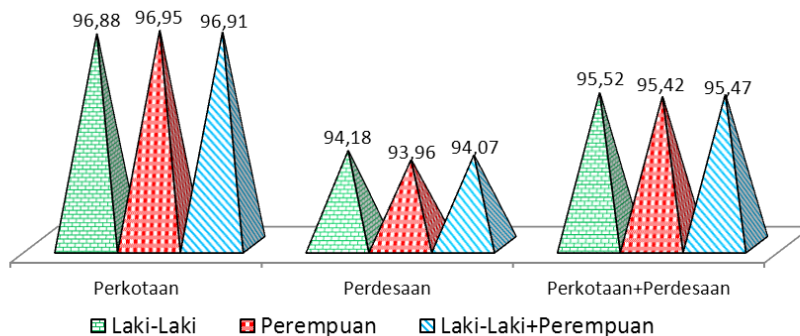
Gambar 5.6 Persentase Anak Berumur 2-4 Tahun yang Diberi ASI Saja Selama 6 Bulan Lebih Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

5.4 Imunisasi

Imunisasi merupakan upaya preventif seseorang dengan tujuan pengendalian penyakit dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh agar tubuh tahan terhadap penyakit yang berbahaya. Program imunisasi untuk anak merupakan upaya pemerintah dalam mencapai *Millenium Development Goals* (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Imunisasi di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1956 untuk membasmi penyakit cacar dan terus diperluas dengan Program Lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL). Program LIL tersebut mencakup imunisasi Hepatitis B, BCG, Polio, DPT serta campak sebelum usia 1 tahun.

Kementerian Kesehatan menargetkan cakupan imunisasi lengkap sebesar 100 persen pada tahun 2014 (Depkes, 2010). Akan tetapi, masih banyak masalah di Indonesia sehubungan dengan pemberian imunisasi, seperti orang tua yang kurang memahami pentingnya imunisasi, mitos yang salah tentang imunisasi, budaya, hingga terlambatnya jadwal imunisasi. Karena sejatinya, balita diberikan imunisasi secara lengkap dan tepat waktu, maka seluruh imunisasi harus diberikan secara lengkap sebelum anak berumur 1 tahun.

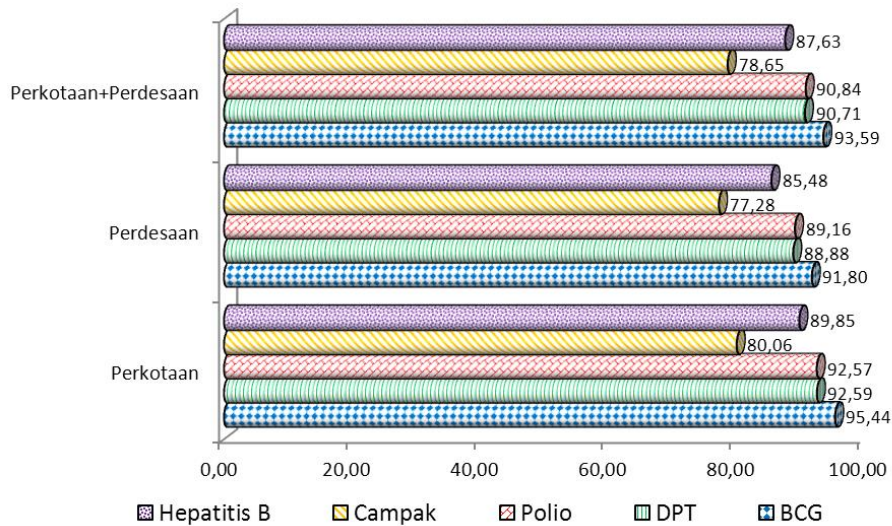
Dari Gambar 5.7 dapat dilihat bahwa persentase balita yang pernah diberi imunisasi sebesar 95,47 persen. Yang dimaksud dengan pernah diimunisasi adalah jika seorang balita pernah mendapat imunisasi minimal satu kali apapun jenis imunisasinya. Jika dilihat menurut jenis kelamin, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara persentase balita laki-laki (95,52 persen) dan perempuan (95,42 persen) yang pernah diimunisasi. Hal ini mengindikasikan sudah banyak balita yang mendapat imunisasi. Sementara itu, untuk persentase balita yang pernah diimunisasi di daerah perkotaan sebesar 96,91 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan di perdesaan yaitu sebesar 94,07 persen. Lebih banyaknya balita yang diimunisasi di daerah perkotaan dibandingkan di perdesaan perlu mendapat perhatian pemerintah, terutama sarana kesehatan yang kurang memadai di perdesaan.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.7 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

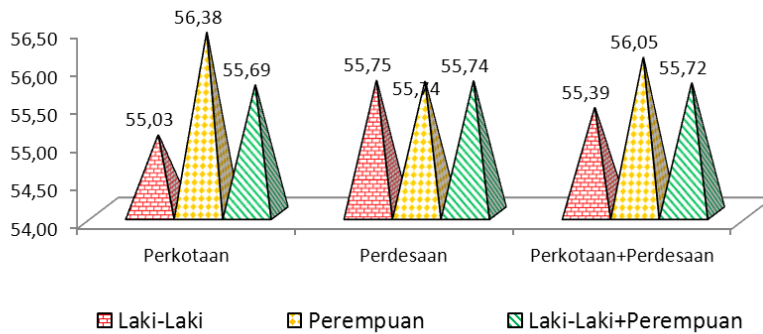
Gambar 5.8 menunjukkan persentase balita menurut jenis imunisasinya. Persentase balita yang pernah diimunisasi BCG, DPT dan Polio relatif cukup tinggi, di atas 90 persen. Sedangkan persentase balita yang pernah diimunisasi campak relatif lebih rendah yaitu 78,65 persen. Persentase balita yang pernah imunisasi BCG tertinggi baik di perkotaan (95,44 persen) atau di perdesaan (91,80 persen).



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.8 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Tipe Daerah dan Jenis Imunisasi, 2014

Selain melihat jenis imunisasinya, perlu dikaji lebih jauh mengenai pemberian imunisasi lengkap. Karena dengan imunisasi lengkap, sistem imun dalam diri anak terbentuk lebih baik. Imunisasi lengkap ditanyakan kepada anak berumur 1-4 tahun, dengan asumsi bahwa saat usia anak satu tahun sudah mendapat imunisasi lengkap dengan ditandai pemberian imunisasi campak di umur 9 bulan. Meskipun sudah banyak anak yang diberi imunisasi, namun baru 55,72 persen anak berumur 1-4 tahun yang diberi imunisasi lengkap. Menurut tipe daerah, tidak berbeda nyata antara daerah perkotaan dan perdesaan untuk anak berumur 1-4 tahun yang memperoleh imunisasi lengkap (55,69 persen dan 55,74 persen). Sedangkan jika dilihat menurut jenis kelamin, persentase anak berumur 1-4 tahun yang memperoleh imunisasi lengkap relatif sama untuk perempuan (56,05 persen) dan laki-laki (55,39 persen).

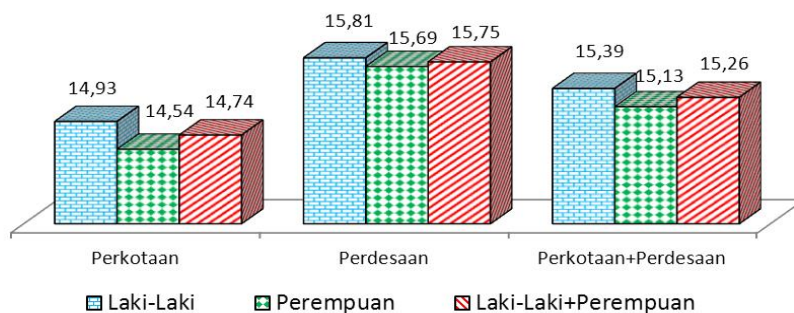


Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.9 Persentase Anak Berumur 1-4 Tahun yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

5.5 Keluhan Kesehatan

Tingkat kesejahteraan suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesehatannya. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan adalah angka kesakitan atau sering disebut juga dengan angka morbiditas. Keluhan kesehatan didefinisikan sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Sementara itu, seseorang dikatakan sakit jika mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitas sehari-harinya.



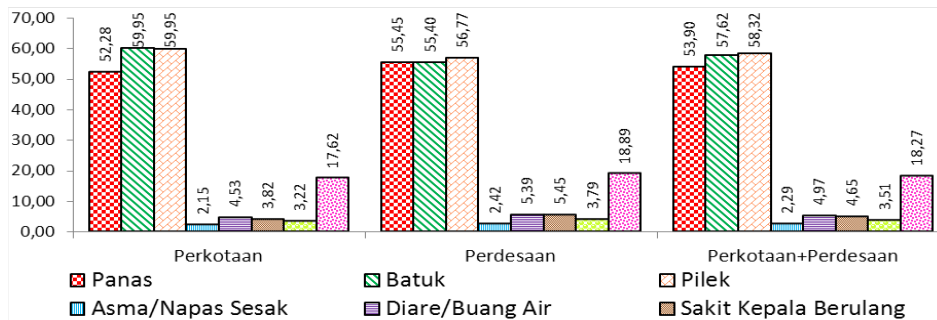
Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.10 Persentase Anak yang Sakit Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Dari Gambar 5.10 dapat dilihat bahwa angka kesakitan anak Indonesia adalah 15,26 persen. Angka kesakitan anak di daerah perdesaan sebesar 15,75 persen, sementara angka kesakitan di daerah perkotaan sebesar 14,74 persen.

Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara angka kesakitan anak laki-laki (15,39 persen) dan anak perempuan (15,13 persen).

Dalam Susenas 2014, jenis keluhan kesehatan dirinci menjadi panas, batuk, pilek, asma/napas sesak/cepat, diare/buang air, sakit kepala berulang, sakit gigi dan lainnya. Gambar 5.11 menunjukkan bahwa keluhan kesehatan yang dialami oleh balita memiliki kecenderungan yang sama di perkotaan dan perdesaan. Lebih dari separuh balita di Indonesia mengalami panas (53,90 persen), batuk (57,62 persen) dan pilek (58,32 persen). Ketiga keluhan kesehatan ini sering dialami balita, karena balita masih sangat rentan terhadap penyakit.

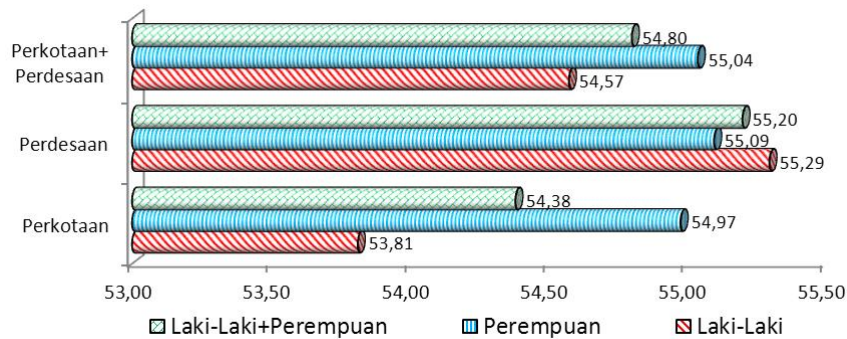


Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.11 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Menurut Tipe Daerah dan Jenis Keluhan Terbesar, 2014

Banyak cara yang dilakukan seseorang ketika dirinya sakit, dari mengobati sendiri, berobat ke dokter dan lain sebagainya. Mengobati sendiri adalah cara yang banyak dilakukan orang ketika mengalami sakit, sebelum berobat ke fasilitas kesehatan. Adapun cara mengobati sendiri bermacam-macam. Dalam Susenas, cara mengobati sendiri dibedakan menjadi tiga yaitu minum obat/pengobatan modern, minum obat/pengobatan tradisional dan lainnya.

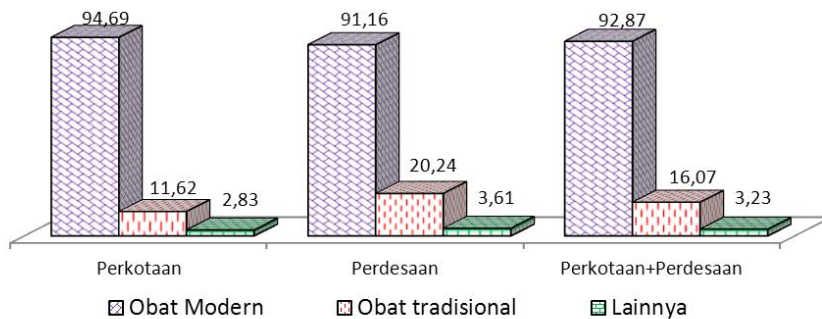
Gambar 5.12 menunjukkan bahwa sebanyak 54,80 persen anak yang sakit mengobati sendiri sakitnya. Jika dilihat menurut tipe daerahnya, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara anak yang sakit dan mengobati sendiri di perkotaan (54,38 persen) dan di perdesaan (55,20 persen). Menurut jenis kelamin, persentase anak laki-laki dan perempuan yang mengalami keluhan kesehatan relatif sama yaitu 54,57 persen dan 55,04 persen.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.12 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Sementara itu dari Gambar 5.13 dapat dilihat bahwa baik di perkotaan dan perdesaan memiliki kecenderungan penggunaan obat yang sama untuk mengobati sendiri. Sekitar 92,87 persen anak yang mengobati sendiri menggunakan obat modern, 16,07 persen obat tradisional, dan sisanya dengancara pengobatan lainnya.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.13 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Penggunaan Obat Menurut Tipe Daerah dan Jenis Pengobatan, 2014

5.6 Akses ke Pelayanan Kesehatan

Tingkat kesehatan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dilihat dari sisi masyarakat, sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah fasilitas kesehatan menjadi salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Hal lain yang tak kalah pentingnya adalah akses ke pelayanan kesehatan. Walaupun jumlah pelayanan kesehatan memadai namun bila sulit dijangkau maka fungsinya sebagai tempat pelayanan kesehatan menjadi kurang optimal.

Tabel 5.1 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Jenis Fasilitas Kesehatan dan Tipe Daerah, 2014

Fasilitas Kesehatan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+Perdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rumah Sakit Pemerintah	3,66	2,78	3,23
Rumah Sakit Swasta	5,69	1,81	3,77
Praktek Dokter/Poliklinik	38,45	19,03	28,83
Puskesmas	31,69	33,85	32,76
Praktek Tenaga Kesehatan	24,76	46,33	35,45
Praktek Pengobatan Tradisional	1,52	2,17	1,84
Dukun Bersalin	0,46	0,63	0,55
Lainnya	1,39	2,36	1,87

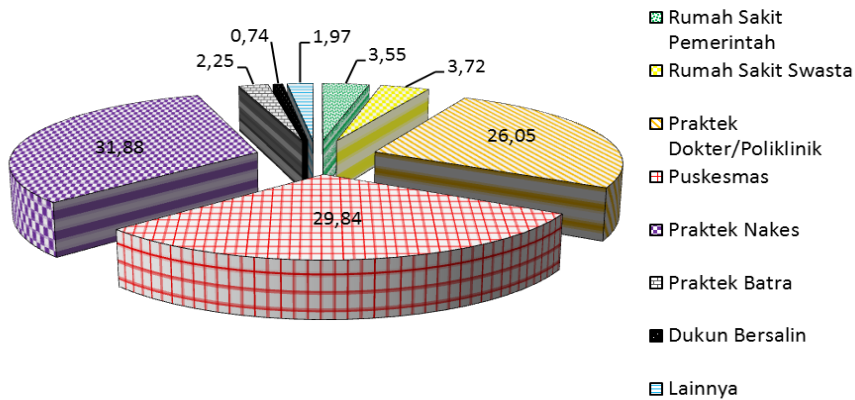
Sumber: BPS - Susenas 2014

Dari Tabel 5.1 dapat dilihat bahwa fasilitas kesehatan yang paling banyak digunakan anak untuk berobat jalan adalah praktek tenaga kesehatan (35,45 persen), dan puskesmas (32,76 persen). Di perkotaan, anak paling banyak berobat di praktek dokter/poliklinik (38,45 persen) sedangkan di perdesaan paling banyak anak berobat di praktek tenaga kesehatan (46,33 persen). Sedangkan persentase anak yang berobat di rumah sakit relatif kecil yaitu 9,35 persen di perkotaan dan 4,59 persen di perdesaan.

5.7 Tingkat Kunjungan

Tingkat kunjungan merupakan banyaknya kunjungan pasien ke salah satu fasilitas kesehatan dibandingkan dengan jumlah kunjungan ke seluruh fasilitas kesehatan. Indikator tingkat kunjungan ke fasilitas kesehatan dapat digunakan untuk melihat fasilitas kesehatan yang paling banyak dikunjungi. Dari Gambar

5.14 dapat dilihat bahwa tingkat kunjungan tertinggi adalah ke puskesmas/pustu yaitu sebesar 29,84 persen dan praktek tenaga kesehatan sebesar 31,88 persen. Sementara tingkat kunjungan terendah adalah ke dukun bersalin (0,74 persen).



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 5.14

Tingkat Kunjungan Anak ke Fasilitas Kesehatan, 2014



BAB 2 PENDIDIKAN ANAK

6

PENDIDIKAN ANAK

Anak merupakan aset yang berharga bagi sebuah keluarga dan masyarakat dalam menjalani kehidupan kolektifnya untuk menyongsong masa depan. Kepedulian keluarga dan masyarakat pada anak dalam rangka tumbuh dan berkembang secara manusiawi, sedang melakukan investasi yang sangat menguntungkan bagi keberlangsungan hidupnya. Sehingga mereka rela mencurahkan tenaga, biaya dan pikirannya demi tumbuh dan berkembangnya anak secara lebih baik. Untuk itu, lingkungan dan dukungan sosial kemasyarakatan yang baik, akan menjadikan anak tersebut menjadi satu generasi yang baik.

Kepedulian terhadap anak dilakukan dengan memenuhi salah satu hak anak, yaitu memperoleh pendidikan dan pengajaran yang dapat mengembangkan pribadi dan tingkat kecerdasan sesuai dengan minat dan bakatnya. Menurut Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Pribadi, 2007) menekankan arti penting hak atas pendidikan sebagai kendaraan utama untuk meningkatkan dan memberdayakan anak-anak dari kemiskinan, sarana untuk berpartisipasi secara aktif dan total dalam pembangunan komunitas sosialnya dan sebagai jalan ampuh menuju keadaban manusia itu sendiri. Demikian juga dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of the Child*) juga dinyatakan bahwa setiap negara di dunia melindungi dan melaksanakan hak-hak anak tentang pendidikan dengan mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar bagi semua secara bebas (Artikel 28). UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia, karenanya setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Undang Undang No 20 Tahun 2003 Pasal 6 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat). Melalui UU tersebut, Pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh anak dapat berpartisipasi dalam kegiatan sekolah. Sesuai dengan Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Sesuai dengan definisi anak tersebut, penulisan analisis pendidikan anak menggunakan umur 5-17 tahun.

Gambaran mengenai pendidikan anak Indonesia yang akan dibahas pada bagian ini adalah partisipasi sekolah, Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK), angka buta huruf, dan angka putus sekolah.

6.1 Partisipasi Sekolah

Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang tersebut tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah lagi. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti.

Tabel 6.1 Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Tipe Daerah, JenisKelamin dan Partisipasi Sekolah, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Formal + Non Formal			Jumlah
	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Bersekolah Lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K):				
Laki-laki (L)	12,37	84,19	3,44	100,00
Perempuan (P)	11,98	85,13	2,89	100,00
L+P	12,18	84,65	3,17	100,00
Perdesaan (D):				
Laki-laki (L)	12,36	82,29	5,35	100,00
Perempuan (P)	11,80	83,91	4,29	100,00
L+P	12,09	83,07	4,84	100,00
K + D :				
Laki-laki (L)	12,36	83,20	4,44	100,00
Perempuan (P)	11,89	84,50	3,61	100,00
L+P	12,13	83,83	4,04	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel 6.1 memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah anak umur 5-17 tahun menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa hampir seluruh anak umur 5-17 tahun mengakses pendidikan, yaitu sebesar 83,83 persen berstatus masih bersekolah. Namun masih ada sebesar 12,13 persen anak yang belum/tidak pernah bersekolah dan sisanya, yaitu sebesar 4,04 persen tidak bersekolah lagi.

Tabel 6.1 juga menyajikan partisipasi sekolah anak menurut daerah tempat tinggal. Tabel tersebut memperlihatkan persentase anak umur 5-17 tahun yang masih bersekolah di perkotaan lebih tinggi dibanding di perdesaan, yaitu 84,65 persen berbanding 83,07 persen. Hal sebaliknya terjadi pada persentase anak umur 5-17 tahun yang tidak bersekolah lagi, persentase anak umur 5-17 tahun di perkotaan yang tidak bersekolah lagi lebih rendah dibandingkan dengan anak di perdesaan (3,17 persen berbanding 4,84 persen). Kemudahan akses untuk memperoleh pendidikan di perkotaan yang lebih baik, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di perkotaan yang lebih lengkap dan lebih memadai

dibandingkan dengan di perdesaan diduga menjadi penyebab adanya perbedaan antara persentase anak yang bersekolah di perkotaan dibanding di perdesaan.

Partisipasi sekolah anak juga dibedakan menurut jenis kelamin. Akses anak perempuan di dalam dunia pendidikan tampak lebih baik dibandingkan dengan anak laki-laki. Keadaan ini terlihat pada persentase anak perempuan umur 5-17 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki, dan sebaliknya anak perempuan yang tidak/belum pernah sekolah dan tidak bersekolah lagi lebih rendah dibandingkan anak laki-laki. Berdasarkan data Susenas 2014 tercatat bahwa persentase anak perempuan umur 5-17 tahun yang masih bersekolah sebesar 84,50 persen, sedangkan anak laki-laki sebesar 83,20 persen. Sementara itu persentase anak perempuan yang tidak/belum pernah sekolah (11,89 persen) dan tidak bersekolah lagi (3,61 persen) lebih rendah dibandingkan anak laki-laki, yaitu 12,36 persen dan 4,44 persen. Pola yang sama juga terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan.

Faktor lain yang mempengaruhi akses penduduk pada pendidikan antara lain adalah umur. Semakin tinggi kelompok umur sekolah, semakin rendah tingkat partisipasi sekolahnya. Pada Tabel 6.2 terlihat bahwa persentase anak yang masih sekolah pada kelompok umur 7-12 tahun (kelompok usia SD/ sederajat) tercatat sebesar 98,92 persen. Pada kelompok umur 13-15 tahun (kelompok usia SMP/ sederajat) persentase anak yang masih sekolah sebesar 94,44 persen dan pada kelompok umur 16-17 tahun (kelompok usia SM/ sederajat) sebesar 78,39 persen.

Tabel 6.2 Persentase Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

Kelompok Umur	Formal + Non Formal			Jumlah
	Tdk/ Blm Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah lagi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5 – 6	73,76	26,24	0,00	100,00
7 – 12	0,87	98,92	0,21	100,00
13 – 15	0,67	94,44	4,89	100,00
16 – 17	0,73	78,39	20,88	100,00
5 – 17	12,13	83,83	4,04	100,00
7 – 17	0,80	94,42	4,78	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Usia minimal yang direkomendasikan untuk bersekolah adalah 7 tahun, namun hasil Susenas tahun 2014 menunjukkan bahwa terdapat anak berumur 5-6 tahun yang saat ini bersekolah (26,24 persen). Sementara itu pada kelompok umur yang direkomendasikan untuk mengenyam pendidikan (7-17 tahun), terlihat bahwa sebesar 94,42 persen anak pada kelompok umur 7-17 masih bersekolah, sedangkan anak yang tidak/belum sekolah sebesar 0,80 persen dan anak yang tidak sekolah lagi sebesar 4,78 persen.

6.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK)

Salah satu faktor penunjang keberhasilan pembangunan adalah memiliki sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Salah satu jalan untuk meningkatkan SDM tersebut melalui pendidikan. Upaya pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dimulai dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada penduduk terutama usia sekolah agar dapat mengakses pendidikan. Selain itu pemerintah juga meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Beberapa indikator yang dapat disajikan untuk menilai pencapaian pembangunan di bidang pendidikan adalah dengan mengetahui partisipasi penduduk usia sekolah dalam mengikuti pendidikan berdasarkan jenjang dan umur melalui Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK).

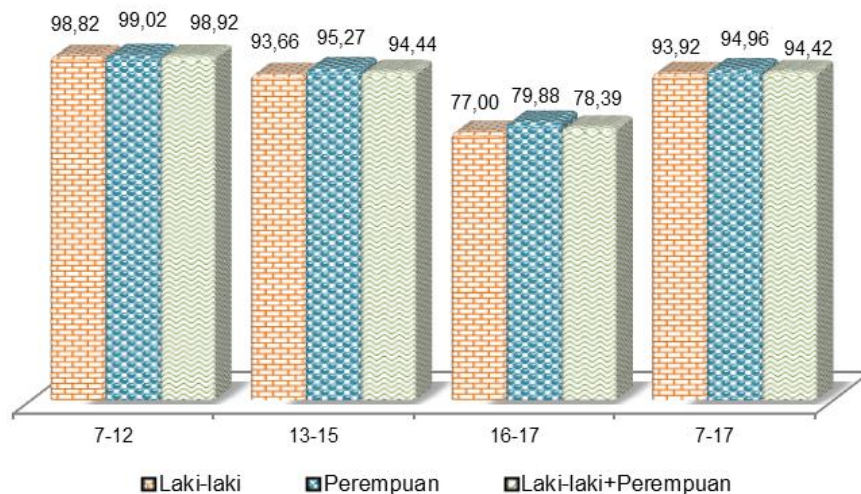
APS dikelompokkan menjadi 3, yaitu APS 7-12 tahun, APS 13-15 tahun, dan APS 16-18 tahun. APS 7-12 tahun menunjukkan angka partisipasi penduduk berumur 7-12 yang saat ini masih bersekolah pada jenjang pendidikan SD/MI/Paket A. Sementara itu, APM dikelompokkan menjadi APM SD, APM SMP, APM SM dan APM PT. APM SD menunjukkan angka partisipasi penduduk berumur 7-12 tahun yang masih bersekolah di SD/MI/Paket A. Seperti APM, APK dibedakan menjadi APK SD, APK SMP, APK SM dan APK PT. APK SD menunjukkan angka partisipasi penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI/Paket A tanpa memandang usia penduduk tersebut.

Konsep anak dalam publikasi ini adalah **penduduk yang berusia sampai dengan 17 tahun**. Sehingga kelompok umur yang digunakan pada perhitungan APS menyesuaikan dengan kelompok umur anak yaitu kelompok umur 7-12 tahun, 13-15 tahun dan 16-17 tahun. Sedangkan untuk APK dan APM, khususnya pada

kelompok SM mengikuti konsep Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) yaitu menggunakan **kelompok usia 16-18 tahun**. Hal ini dilakukan agar interpretasi yang digunakan dalam publikasi ini sama dengan yang dikeluarkan oleh Kemdikbud.

6.2.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut kelompok umur tertentu. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA.



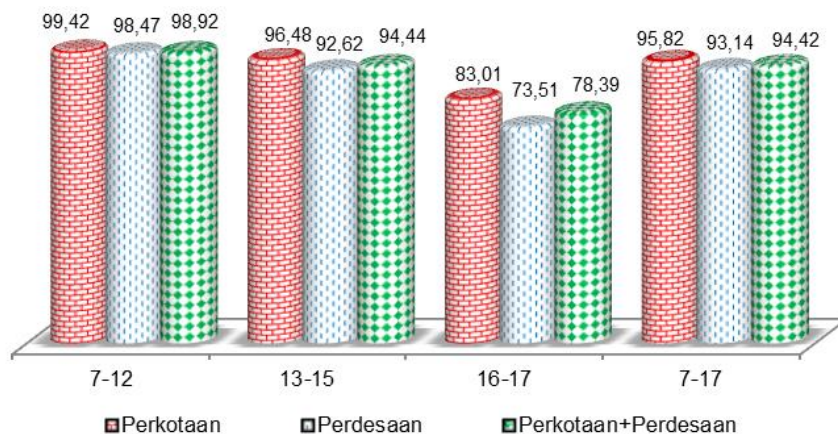
Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 6.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Jenis Kelamin, 2014

Gambaran APS anak umur 7-17 tahun berdasarkan data Susenas tahun 2014 disajikan pada Gambar 6.1. APS 7-12 tahun tercatat sebesar 98,92 persen. Angka tersebut memiliki arti bahwa dari 100 anak usia 7-12 tahun, sekitar 99 anak masih bersekolah dan 1 anak tidak bersekolah (baik tidak/belum pernah sekolah

maupun tidak sekolah lagi). Sementara itu APS 13-15 tahun tercatat sebesar 94,44 persen dan APS 16-17 tahun sebesar 78,39 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, secara umum terlihat bahwa APS anak perempuan pada setiap kelompok umur sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan APS anak laki-laki.

Gambar 6.2 menunjukkan bahwa secara umum APS di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan APS di perdesaan. Lebih tingginya APS anak di perkotaan terjadi pada setiap kelompok umur. Kondisi ini sedikit memberikan gambaran bahwa penduduk perkotaan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh pendidikan dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. Hal ini terkait dengan lebih banyaknya jumlah sekolah serta mudahnya akses ke sekolah di daerah perkotaan dibandingkan dengan perdesaan.



Sumber: BPS - Susenas 2014

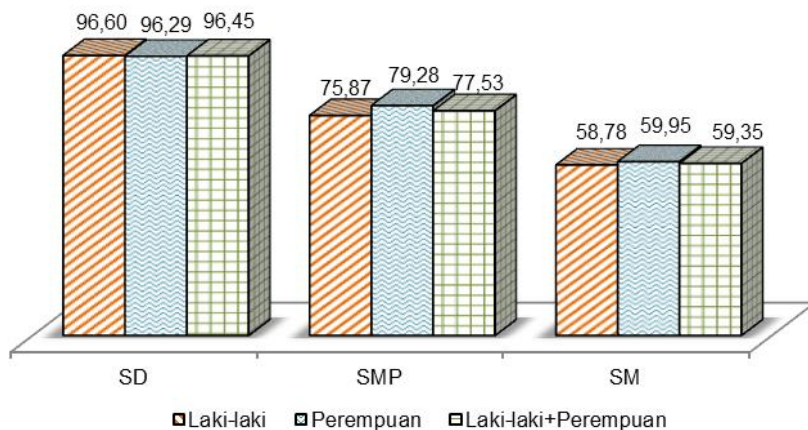
Gambar 6.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17Tahun menurut Tipe Daerah, 2014

6.2.2 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah penduduk pada kelompok usia sekolah tersebut. APM berfungsi untuk menunjukkan partisipasi pendidikan penduduk pada tingkat pendidikan tertentu yang sesuai dengan usianya, atau melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai usianya. Sebagai gambaran misalnya APM SD adalah proporsi jumlah murid SD/Sederajat yang berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

APM digunakan untuk melihat penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Bila seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka APM akan mencapai 100 persen.

Berdasarkan hasil Susenas 2014 yang disajikan pada Gambar 6.3 tercatat bahwa APM SD yang tercatat sebesar 96,45 persen, APM SMP sebesar 77,53 persen dan APM SM sebesar 59,35 persen. Pada gambar tersebut terlihat bahwa APM cenderung semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan atau dengan kata lain besaran APM dan jenjang pendidikan berbanding terbalik.



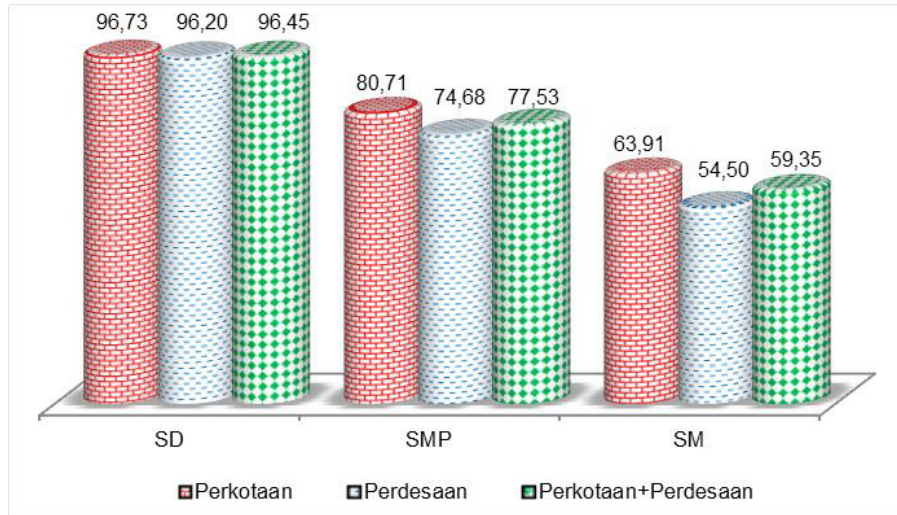
Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 6.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Jenis Kelamin, 2014

Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, APM anak laki-laki pada jenjang pendidikan SD dan SM relatif hampir sama dengan APM anak perempuan. APM SD/ sederajat anak laki-laki sebesar 96,60 persen dan anak perempuan sebesar 96,29 persen, serta APM SM/ sederajat anak laki-laki sebesar 58,78 persen dan anak perempuan sebesar 59,95 persen. Namun demikian, pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat terlihat bahwa APM laki-laki sebesar 75,87 persen lebih rendah dibandingkan anak perempuan sebesar 79,28 persen.

Apabila diperhatikan menurut daerah tempat tinggal, APM anak di daerah perkotaan secara umum cenderung lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan, kecuali pada jenjang SD yang persentasenya relatif hampir sama (Gambar 6.4). Kesenjangan APM antara anak di perkotaan dan perdesaan semakin tinggi sejalan dengan semakin meningkatnya jenjang pendidikan. Kondisi ini semakin mempertegas bahwa terdapat perbedaan kesempatan bersekolah serta sarana

dan prasarana antara anak yang tinggal di daerah perkotaan dibanding anak yang tinggal daerah di perdesaan.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 6.4 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Tipe Daerah, 2014

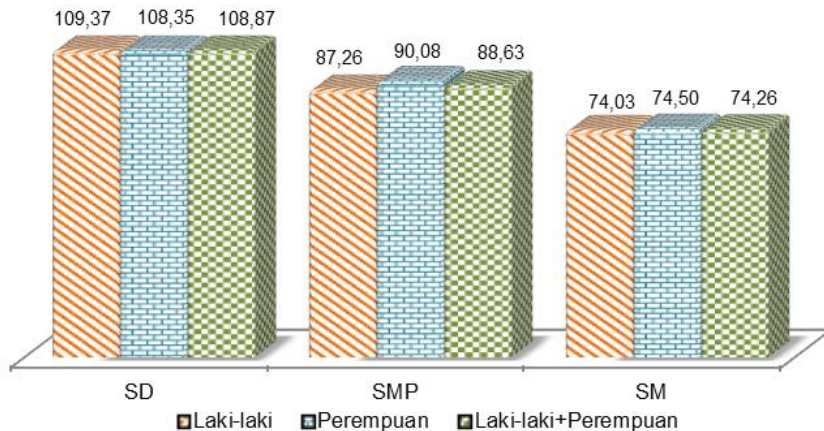
6.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai proporsi penduduk yang masih sekolah pada kelompok jenjang pendidikan tertentu terhadap jumlah keseluruhan penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tersebut. APK melihat murid yang bersekolah disuatu jenjang pendidikan tanpa memperhatikan umur. Nilai APK bisa lebih dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan mencakup anak di luar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan (misal anak bersekolah di SD berumur kurang dari 7 tahun atau lebih dari 12 tahun). APK SD adalah persentase jumlah penduduk yang sedang sekolah di SD/ sederajat terhadap jumlah penduduk usia 7 – 12 tahun.

Hasil Susenas 2014 yang disajikan dalam Gambar 6.5 dapat diketahui bahwa APK SD/ sederajat sebesar 108,87 persen, APK SMP/ sederajat sebesar 88,63 persen dan APK SM/ sederajat sebesar 74,26 persen. Penurunan APK pada jenjang pendidikan yang semakin tinggi sejalan dengan kecenderungan penurunan APS dan APM pada usia atau jenjang yang semakin tinggi.

Nilai APK SD/ sederajat sebesar 108,87 persen menunjukkan bahwa dari keseluruhan siswa yang bersekolah pada jenjang SD/ sederajat di tahun 2014, ada

sekitar 8,87 persen anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa yang masih sekolah di SD/ sederajat selain mencakup anak yang berusia 7 – 12 tahun, juga mencakup anak yang berusia kurang dari 7 tahun dan lebih dari 12 tahun. Dengan kata lain terdapat anak yang terlambat masuk sekolah atau tinggal kelas pada jenjang SD/ sederajat atau sebaliknya terdapat anak yang terlalu dini untuk bersekolah SD/ sederajat.

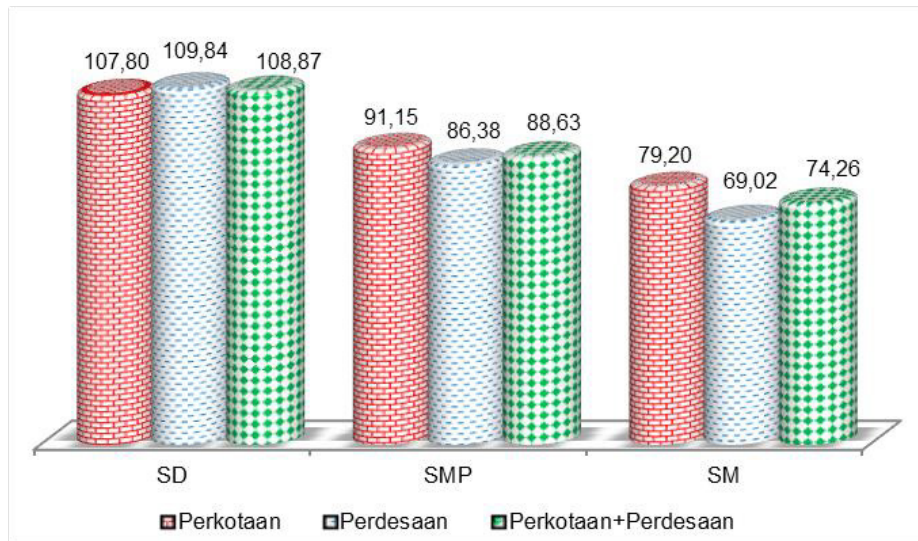


Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 6.5 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Jenis Kelamin, 2014

Bila dilihat menurut jenis kelamin, APK laki-laki pada jenjang pendidikan SD/ sederajat terlihat sedikit lebih tinggi dibanding APK anak perempuan (109,37 persen berbanding 108,35 persen). Keadaan sebaliknya terjadi pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat, dimana APK anak perempuan (90,08 persen) lebih tinggi dibanding APK anak laki-laki (87,26 persen). Sementara itu pada jenjang pendidikan SM/ sederajat APK-nya relatif sama. Hal tersebut dapat dilihat pada Gambar 6.5.

Apabila diperhatikan menurut daerah tempat tinggal terlihat bahwa APK anak di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan daerah perdesaan, kecuali APK SD/ sederajat. APK SD di perdesaan sebesar 107,80 persenan di perkotaan sebesar 109,84 persen (Gambar 6.6), sedangkan APK SMP/ sederajat di daerah perkotaan sebesar 91,15 persen dan APK SM/ sederajat sebesar 79,20 persen, serta APK SMP/ sederajat di perdesaan sebesar 86,38 persen dan APK SM/ sederajat sebesar 69,02 persen.



Sumber: BPS - Susenas 2014

Gambar 6.6 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Tipe Daerah, 2014

6.3 Angka Buta Huruf

Pada dasarnya, buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Ketidakmampuan ini niscaya menempatkan seseorang atau suatu kelompok masyarakat dalam ketertinggalan. Hal ini dikarenakan membaca dan menulis merupakan jendela untuk melihat dunia, dimana dengan kemampuan membaca dan menulislah seseorang bisa melihat dunia dengan segala perkembangannya. Tingkat melek aksara (*literacy*) merupakan salah satu parameter yang paling mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia. Apabila penduduk makin melek aksara, berarti makin majulah masyarakat itu dalam peradabannya ke depan.

UNESCO membedakan kemampuan keaksaraan dengan keaksaraan fungsional. Melek aksara (*literate*) sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kemampuan keaksaraan fungsional (*functionalliteracy*) adalah kemampuan seseorang untuk terlibat dalam aktivitas di mana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai *effective function* kelompok atau masyarakatnya dan sebagai dasar dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sendiri.

Melek huruf merupakan dasar pengetahuan bagi manusia. Dengan membaca manusia dapat meningkatkan kualitas dirinya, yang berujung pada

tingginya intelektualitas seseorang. Terlebih saat ini manusia telah memasuki era informasi dimana fenomena globalisasi yang terjadi saat ini mengalami akselerasi yang begitu cepat, sebagai dampak dari penerapan *Hi-tech society* (masyarakat berteknologi tinggi), yang menyebabkan manusia tergiring pada pola interaksi yang sangat cepat. Kondisi yang demikian menuntut terciptanya individu-individu yang tidak hanya mampu beradaptasi, akan tetapi juga dapat berperan penting di dalamnya.

World Health Organization (WHO) menekankan bahwa pendidikan keaksaraan harus menjadi bagian yang terintegrasi dalam reformasi ekonomi. Ini disebabkan karena kebutaaksaraan dapat menimbulkan efek negatif terhadap generasi kedua, lantaran seorang ibu yang buta aksara cenderung tidak mempunyai pengetahuan yang memadai terhadap kebutuhan anaknya, sehingga mempengaruhi perkembangan anak termasuk intelektualnya

Tabel 6.3 Angka Buta Huruf Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Kelompok Usia Sekolah, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Kelompok Usia Sekolah				
	5-6	7-12	13-15	16-17	5-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkotaan (K):					
Laki-laki (L)	59,69	2,53	0,30	0,01	10,67
Perempuan (P)	55,28	1,94	0,15	0,04	9,68
L+P	57,53	2,24	0,23	0,03	10,18
Perdesaan (D):					
Laki-laki (L)	73,99	6,46	0,95	0,65	14,84
Perempuan (P)	70,60	5,27	0,79	0,49	13,61
L+P	72,37	5,88	0,87	0,58	14,25
K + D :					
Laki-laki (L)	67,09	4,61	0,64	0,33	12,85
Perempuan (P)	63,05	3,69	0,49	0,26	11,70
L+P	65,13	4,16	0,57	0,30	12,29

Sumber: BPS - Susenas 2014

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2014 yang disajikan pada Tabel 6.3, sebanyak 12,29 persen anak umur 5-17 tahun tidak bisa membaca dan menulis atau buta huruf. Tingginya angka buta huruf pada anak umur 5-17 tahun dikarenakan tingginya angka buta huruf pada kelompok umur muda (5-6 tahun). Angka buta huruf anak pada kelompok umur 5-6 tahun sebesar 65,13 persen, kelompok umur 7-12 tahun sebesar 4,16 persen, kelompok umur 13-15 tahun

sebesar 0,57 persen, dan kelompok umur 16-17 sebesar 0,30 persen. Tingginya angka buta huruf pada kelompok umur muda bisa dipahami karena pada umumnya anak pada kelompok tersebut jenjang pendidikannya masih rendah, bahkan ada yang belum bersekolah sehingga kemampuan baca dan tulisnya juga masih rendah. Pola ini terjadi baik pada anak laki-laki maupun perempuan dan daerah perkotaan maupun perdesaan.

Apabila diperhatikan menurut daerah tempat tinggal, persentase anak buta huruf di daerah perdesaan lebih besar dibanding anak di daerah perkotaan (14,25 persen berbanding 10,18 persen). Berdasarkan jenis kelamin, angka buta huruf anak laki-laki lebih tinggi dibandingkan anak perempuan. Angka buta huruf anak laki-laki sebesar 12,85 persen dan angka buta huruf anak perempuan sebesar 11,70 persen). Pola yang sama terjadi baik di daerah perkotaan maupun perdesaan.

6.4 Putus Sekolah

Kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar yang layak merupakan hak setiap warga negara. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun yang didasari konsep “Pendidikan Dasar Untuk Semua” (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses yang sama untuk setiap warga negara. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama sembilan tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas satu SD/ sederajat hingga kelas sembilan SMP/ sederajat. Melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan ketrampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat dan dapat melanjutkan pendidikannya ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan merupakan hak yang sangat fundamental bagi anak, namun tidaklah mudah untuk merealisasikan pendidikan khususnya menuntaskan wajib belajar 9 tahun, karena pada kenyataannya masih banyak dijumpai anak-anak putus sekolah.

Gunawan (2010) dalam Sutiasnah (2015) menyatakan putus sekolah ialah predikat yang diberikan kepada mantan peserta didik yang tidak mampu menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, sehingga tidak dapat melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan berikutnya.

6.4.1 Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan tingkat putus sekolah (berhenti sekolah sebelum menamatkan pendidikan) di suatu jenjang pendidikan yang dinyatakan dalam persen.

Tabel 6.4 Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Masih/Pernah Sekolah menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Status Sekolah, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Masih Sekolah	Pernah Sekolah		Total
		Putus Sekolah	Tamat Sekolah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Perkotaan (K):				
Laki-laki (L)	95,90	1,56	2,54	100,00
Perempuan (P)	96,55	0,90	2,54	100,00
L+P	96,22	1,24	2,54	100,00
Perdesaan (D):				
Laki-laki (L)	93,60	2,65	3,75	100,00
Perempuan (P)	94,88	1,44	3,67	100,00
L+P	94,22	2,07	3,72	100,00
K + D :				
Laki-laki (L)	94,70	2,13	3,17	100,00
Perempuan (P)	95,69	1,18	3,13	100,00
L+P	95,18	1,67	3,15	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Pada tahun 2014, sebanyak 1,67 persen anak berumur 7-17 tahun yang putus sekolah (Tabel 6.4). Hal ini menunjukkan bahwa dari setiap 100 orang anak usia 7-17 tahun yang bersekolah, sekitar 2 anak mengalami putus sekolah. Sementara itu, persentase anak berumur 7-17 tahun yang masih bersekolah sebesar 95,18 persen dan sebanyak 3,15 persen anak telah menamatkan sekolahnya.

Bila dilihat menurut tipe daerah, persentase anak putus sekolah lebih banyak terjadi di perdesaan dibandingkan di perkotaan. Anak di perdesaan yang putus sekolah tercatat sebesar 2,07 persen, sedangkan di perkotaan sebesar 1,24 persen. Apabila diperhatikan menurut jenis kelamin, anak laki-laki yang putus sekolah lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan (2,13 persen berbanding 1,18 persen).

Angka putus sekolah anak yang paling tinggi terdapat pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat (Tabel 6.5.). Sebanyak 2,24 persen anak mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan SMP/ sederajat. Sementara itu, angka putus sekolah anak pada tingkat SM/ sederajat dan SD/ sederajat masing-masing sebesar 1,74 persen dan 1,41 persen. Pola yang serupa juga terlihat baik di daerah perkotaan maupun perdesaan serta pada anak laki-laki maupun perempuan.

Apabila diperhatikan menurut daerah tempat tinggal, angka putus sekolah anak di daerah perdesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Lebih tingginya angka putus sekolah anak di daerah perdesaan dibanding anak di daerah perkotaan terlihat pada setiap jenjang pendidikan baik SD/ sederajat, SMP/ sederajat, maupun SM/ sederajat.

Tabel 6.5 Angka Putus Sekolah Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 2014

Tipe Daerah/ Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan		
	SD/ Sederajat	SMP/ Sederajat	SM/ Sederajat
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan (K):			
Laki-laki (L)	1,12	2,53	1,62
Perempuan (P)	0,75	0,98	1,34
L+P	0,94	1,76	1,48
Perdesaan (D):			
Laki-laki (L)	2,41	3,35	2,42
Perempuan (P)	1,16	1,98	1,74
L+P	1,81	2,68	2,08
K + D :			
Laki-laki (L)	1,82	2,96	1,98
Perempuan (P)	0,97	1,49	1,51
L+P	1,41	2,24	1,74

Sumber: BPS – Susenas 2014

Ada perbedaan yang signifikan antara angka putus sekolah anak laki-laki dan perempuan (Tabel 6.5). Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP angka putus sekolah anak laki-laki hampir dua kali lipat dibanding dengan anak perempuan. Pada jenjang SM angka putus sekolah anak laki-laki sebesar 1,98 persen dan anak perempuan sebesar 1,51 persen.

6.4.2 Alasan Tidak Sekolah

Pendidikan yang diupayakan oleh pemerintah sebagai usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dapat dilihat dari Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Program tersebut menegaskan bahwa anak-anak Indonesia harus sekolah minimal sampai sembilan tahun atau lulus SMP. Akan tetapi, program tersebut dirasakan masih belum optimal jika melihat masih banyak anak yang putus sekolah.

Pendidikan murah atau gratis yang banyak diwacanakan dan diinginkan kalangan masyarakat memang akan menolong jika ditinjau secara faktor ekonomi. Akan tetapi, kebijakan ini harus juga ditunjang dengan kebijakan lain untuk menuntaskan berbagai faktor penyebab putus sekolah yang lainnya. Hal ini dikarenakan faktor ekonomi bukanlah penyebab satu-satunya putus sekolah. Selain faktor ekonomi, putus sekolah juga dapat disebabkan oleh faktor psikologis, geografis, serta lingkungan sosial.

Faktor ketidakmampuan membiayai sekolah atau faktor ekonomi menjadi faktor penyebab yang paling dominan dari tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6.6, sebagian besar anak berumur 7-17 tahun yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dikarenakan alasan ekonomi, yaitu tidak ada biaya (39,48 persen), bekerja/mencari nafkah (9,77 persen) dan malu karena ekonomi (1,17 persen). Selain alasan ekonomi, alasan menikah/mengurus rumah tangga dan merasa pendidikan cukup juga memberikan dampak terhadap anak tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dengan persentase masing-masing sebesar 4,86 persen dan 4,85 persen.

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi dengan alasan menikah/mengurus rumah tanggadan sekolah jauh di perdesaan lebih tinggi dibanding anak di perkotaan. Persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena menikah/mengurus rumah tangga di perdesaan sebesar 5,71 persen, dan di perkotaan sebesar 3,35 persen. Persentase anak yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena sekolah jauh di perdesaan sebesar 5,87 persen, dan di perkotaan sebesar 0,42 persen.

Tabel 6.6 juga menunjukkan bahwa alasan tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena bekerja/mencari nafkah persentasenya lebih besar pada anak laki-laki dibanding perempuan (11,15 persen berbanding 8,01 persen).

Alasan tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena menikah/mengurus rumah tangga persentasenya lebih besar pada anak perempuan dibanding anak laki-laki. Persentase anak perempuan yang tidak/belum pernah sekolah atau tidak sekolah lagi karena menikah/mengurus rumah tangga sebesar 10,77 persen, dan anak laki-laki sebesar 0,21 persen.

Tabel 6.6 Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tidak ada biaya	38,42	42,36	40,21	38,12	40,33	39,08	38,23	41,08	39,48
Bekerja/Mencari Nafkah	12,04	13,69	12,78	10,68	4,68	8,08	11,15	8,01	9,77
Menikah/Mengurus RT	0,09	7,29	3,35	0,27	12,82	5,71	0,21	10,77	4,86
Merasa Pendidikan cukup	5,54	5,20	5,39	3,96	5,32	4,55	4,52	5,27	4,85
Malu Karena Ekonomi	1,58	1,41	1,50	1,09	0,83	0,98	1,26	1,05	1,17
Sekolah Jauh	0,41	0,44	0,42	5,22	6,72	5,87	3,53	4,40	3,92
Cacat	4,33	5,62	4,91	4,35	5,40	4,80	4,34	5,48	4,84
Menunggu Pengumuman	1,50	1,56	1,53	0,54	0,78	0,65	0,88	1,07	0,96
Tidak Diterima	0,18	0,53	0,34	0,13	0,10	0,12	0,15	0,26	0,20
Lainnya	35,91	21,90	29,57	35,64	23,02	30,17	35,73	22,61	29,95
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

6.5 Akses Internet

Teknologi yang memiliki perkembangan cukup pesat saat ini adalah teknologi informasi dan telekomunikasi. Kemajuan teknologi tersebut harus dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Perkembangan dari teknologi ini memberikan beragam pilihan bentuk teknologi dan kecanggihannya. Internet (*interconnection-networking*) merupakan salah satu bukti nyata dari pesatnya perkembangan teknologi pada bidang tersebut. Internet membawa pengaruh yang sangat besar dalam pola kehidupan masyarakat dunia, sehingga perbedaan waktu, jauhnya lokasi dan

heterogenitas karakteristik penduduk tidak lagi menjadi hambatan dalam kecepatan penyebaran informasi.

Internet dapat memberikan manfaat besar bagi pendidikan, penelitian, niaga, dan aspek kehidupan lainnya. Dengan demikian kita harus mendorong anak-anak untuk menggunakan internet sebagai alat yang penting dalam membantu pendidikan, meningkatkan pengetahuan, dan memperluas kesempatan serta keberdayaan dalam meraih kualitas kehidupan yang lebih baik. Bagi yang masih bersekolah, teknologi internet dapat dimanfaatkan sebagai media pencari literatur/referensi guna menunjang kegiatan belajarnya.

Tabel 6.7 Persentase Anak Berumur 7-17 yang Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	32,57	34,00	33,27
Perdesaan	11,78	14,10	12,90
Perkotaan+Perdesaan	21,67	23,73	22,67

Sumber: BPS - Susenas 2014

Penggunaan internet semakin meningkat karena setiap orang dapat menikmati layanan internet, termasuk juga oleh anak-anak usia 7-17 tahun. Berdasarkan hasil Susenas 2014, yang ditunjukkan pada Tabel 6.7, tampak bahwa sebesar 22,67 persen anak di Indonesia berusia 7-17 tahun pernah mengakses internet selama 3 bulan terakhir. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase anak perempuan yang mengakses internet 2,05 persen lebih tinggi dibandingkan dengan anak laki-laki (23,73 persen berbanding 21,67 persen). Perbedaan yang cukup mencolok terlihat apabila dibedakan menurut tipe daerah, persentase anak di perkotaan yang mengakses internet (33,27 persen) jauh lebih tinggi dibandingkan dengan persentase anak di perdesaan (12,90 persen).

Tabel 6.8 Persentase Anak Berumur 5-6 yang Mengakses Internet Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Tipe Daerah	Jenis Kelamin		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki+Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Perkotaan	1,83	1,13	1,49
Perdesaan	0,18	0,09	0,14
Perkotaan+Perdesaan	0,98	0,60	0,79

Sumber: BPS - Susenas 2014

Sementara itu untuk kelompok umur 5-6 tahun (Tabel 6.8), hasil Susenas 2014 memperlihatkan bahwa persentase anak yang mengakses internet pada kelompok umur tersebut sebesar 0,79 persen. Apabila dilihat menurut jenis kelamin, persentase pengguna internet pada anak laki-laki lebih besar dibandingkan dengan anak perempuan, yaitu 0,98 persen dan 0,60 persen). Bila dilihat menurut tipe daerah, maka terdapat perbedaan yang cukup besar antara anak di daerah perkotaan yang menggunakan internet (1,49 persen) dibandingkan di perdesaan (0,14 persen)

BAB

**PERLINDUNGAN
KHUSUS**



PERLINDUNGAN KHUSUS

7.1 Upaya Perlindungan Anak di Indonesia

Upaya penanganan perlindungan anak di Indonesia secara nasional pada dasarnya telah dimulai sejak tahun 1990. Pada tahun tersebut, pemerintah Indonesia secara resmi meratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on The Rights of The Child*) melalui Keppres No.36/1990. Setelah Keppres tersebut diterbitkan, pemerintah mulai menyusun berbagai upaya untuk memetakan berbagai persoalan anak, baik dilakukan oleh pemerintah sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga PBB yang memiliki mandat untuk melaksanakan perlindungan anak. Pada tahun 1997, pemerintah menerbitkan Undang Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak berupa undang-undang khusus yang mengatur masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Undang-undang tersebut memberikan perhatian dan spesifikasi khusus bagi anak-anak yang disangka melakukan tindak pidana. Undang-undang ini juga memberikan kekhususan baik dalam penyidikan, penahanan, penuntutan, peradilan hingga penempatannya di lembaga pemasyarakatan anak.

Sebagai puncak dari upaya legislasi ini adalah lahirnya Undang-Undang No.35 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan nuansa yang lebih komprehensif dalam upaya negara memberikan perlindungan pada anak di Indonesia.

7.2 Implementasi Penanganan Perlindungan Anak

Pelaksanaan penanganan perlindungan anak di Indonesia hingga saat ini masih terkesan hanya berjalan di tempat. Secara umum, “rapor” tentang pelaksanaan penanganan masalah perlindungan anak di Indonesia masih nampak buruk di mata Komite Hak Anak PBB. Terkait dengan penerapan UU No. 3/1997 tentang Peradilan Anak, hingga saat ini masih banyak ditemukan anak-anak yang harus menjalani hukuman penjara di Indonesia.

Anak merupakan individu yang membutuhkan topangan, sokongan dan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, masyarakat, Pemerintah dan Negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, kognitif, psikologis dan emosional. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana. Atas dasar itu pulalah dalam sistem peradilan anak dipisahkan dengan orang dewasa agar anak yang berhadapan dengan hukum dapat menikmati perlindungan hukum dan hak azasi yang melekat padanya.

7.3 Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah sebagai upaya untuk melindungi anak dan hak-haknya agar bisa tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa kekerasan dan diskriminasi, hal ini diperlukan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana seperti yang kita ketahui bahwa perkembangan kejahatan yang semakin meningkat tentunya sangat memprihatinkan yang mana pelakunya tidak hanya orang dewasa akan tetapi juga dilakukan oleh anak, pada dasarnya perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak dengan orang dewasa tidak ada perbedaan hanya saja perbedaan itu terlihat dari

pelakunya yang masih di bawah umur dan yang sudah dewasa. Disamping itu juga niat/tujuan antara anak dan orang dewasa dalam melakukan suatu tindak pidana tentunya juga berbeda.

7.3.1 Anak Bermasalah Hukum

7.3.1.1 Situasi dan Kondisi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat sepanjang tahun 2013-2014, terjadi peningkatan jumlah kejahatan terhadap anak. Jumlah kejahatan dengan pelaku anak mengalami peningkatan dari 1.121 pengaduan di tahun 2013 menjadi 1.851 pengaduan di tahun 2014 atau meningkat sejumlah 730 kasus. Hampir 52 persen dari angka itu adalah kasus pencurian yang diikuti dengan kasus kekerasan, perkosaan, narkoba, judi, serta penganiayaan. Sedangkan berdasarkan fakta dan data yang dihimpun oleh Pusat Data Anak Berhadapan Dengan Hukum Komnas, secara keseluruhan ada sekitar 2.879 anak melakukan tindak kekerasan dan harus berhadapan dengan hukum. Mulai dari rentang usia 6-12 tahun sebanyak 268 anak (9 persen), serta anak berusia 13-18 tahun sebanyak 829 anak (91 persen).

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan peningkatan kejahatan terhadap anak ini lantaran kurangnya pengawasan orang tua dan minimnya penegakkan hukum. Saat ini tren kejahatan terhadap anak sudah bergeser. Bukan dilakukan oleh orang dewasa lagi, melainkan pelakunya adalah anak-anak itu sendiri dan rentang usianya 6-14 tahun. Mayoritas pelakunya adalah anak laki-laki sebanyak 2.627 anak (91 persen) dan anak perempuan sebanyak 252 anak (9 persen). Selama ini, kejahatan yang dilakukan oleh anak hanya dianggap Polisi sebagai kenakalan remaja dan anak. Padahal dalam beberapa kasus ada yang menyebabkan kematian. Jika hal ini tidak segera ditanggulangi, maka kejahatan yang dilakukan anak ditahun depan akan semakin marak dan menimbulkan masalah yang lebih kompleks.

Upaya memberikan perlindungan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan Pidana Anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata. Namun sistem peradilan pidana harus juga dimaknai mencakup akar permasalahan mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya dan kompleksitas isu mulai dari anak melakukan kontak pertama dengan polisi, proses peradilan, kondisi tahanan dan reintegrasi sosial termasuk

pelaku dalam proses tersebut. Dengan demikian istilah sistem peradilan pidana anak merujuk pada legislasi, norma dan standar, prosedur, mekanis dan ketentuan, institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Mengacu pada proses ini maka terdapat 3 (tiga) tahap sistem peradilan anak yaitu :

1. Pencegahan anak dari tindak pidana artinya bagaimana kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaik bagi anak.
2. Ketika anak bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana anak termasuk apa dan bagaimana bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana anak.
3. Pelaksanaan putusan / hukuman yang dimulai dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

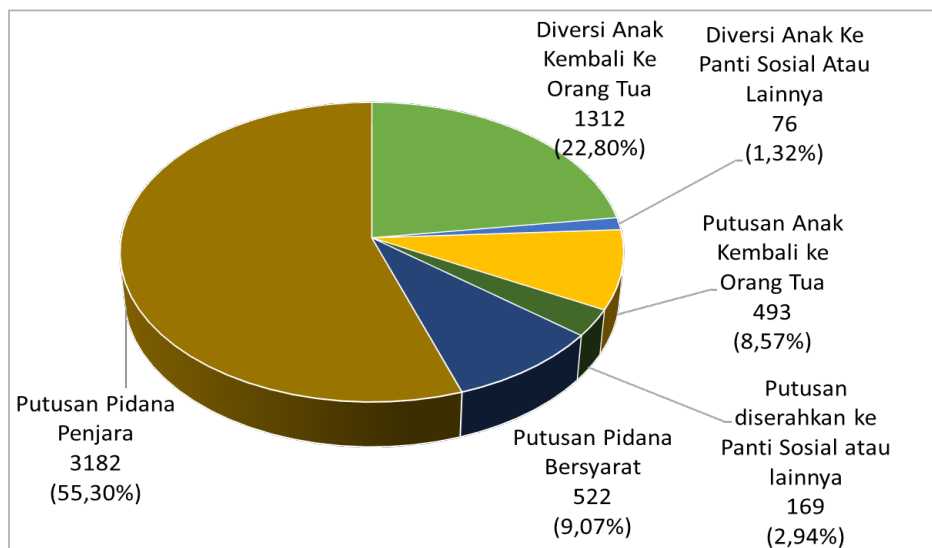
7.3.1.2 Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dengan UU No. 11 tahun 2012

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum (*children in conflict with the law*), adalah sebagai berikut : “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah Anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”. Untuk batas usia tanggung jawab pidana anak pada usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun (pasal 1 angka 3 UU No. 11 tahun 2012).

Dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum ada 7 (tujuh) Pilar Peradilan Anak yaitu : Polisi, Advokat, Jaksa, Hakim, Petugas Bapas, Petugas Lapas dan Warga Masyarakat. Secara umum penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum masih memprihatinkan apakah disebabkan oleh ketidakpahaman aparat penegak hukum sehingga mengakibatkan hak-hak anak terabaikan begitu saja. Harus diakui dari penelitian dan pengkajian yang mendalam setelah berlakunya UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak hingga berlaku ± 15 tahun bahwa Penjara bukan tempat yang baik bagi anak apalagi dengan usia pertanggung jawaban pidana yang terlalu rendah sehingga dengan berbagai upaya yang telah dilakukan baik melalui Advokasi Kebijakan dan pembelaan terhadap

anak yang berkonflik yang dilakukan beberapa NGO / LSM dan KPAI melakukan uji materil ke Mahkamah Konstitusi sampai perjuangan ke Parlemen sehingga membuahkan hasil lahirnya UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam Undang-undang yang berlaku efektif semenjak bulan Juli 2014 ini wajib mengutamakan pendekatan Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) dan Diversi.

Keadilan Restoratif adalah : Penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. (Pasal 1 angka 6 UU No. 11 tahun 2012). Sedangkan **Diversi** adalah : pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012).



Sumber : Ditjen Pemasyarakatan, 2014

Gambar 7.1. Komposisi Hasil Pendampingan terhadap Anak Yang Berhadapandengan Hukum, 2014

Penggunaan pendekatan keadilan restoratif dan diversi dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum sudah mulai dilakukan sejak bulan Juli 2014. Hal ini terlihat jelas pada fakta yang ditunjukkan Gambar 7.1. dimana sekalipun bahwa masih cukup banyak anak pelaku kejahatan yang mendapatkan putusan pidana penjara (55,30 %), namun sudah cukup besar persentase penanganan kasus

anak menggunakan pendekatan diversi (22,80 % kembali ke orang tua dan 1,32 % ke panti sosial atau lainnya). Ini menunjukkan sudah adanya keberpihakan dari aparat penegak hukum terkait dalam menangani kasus anak lebih sebagai upaya mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.

7.3.2 Anak Pelaku Tindak Pidana

Dilihat dari proses penyelesaian hukumnya, anak pelaku tindak pidana mencakup dua kriteria anak, yaitu anak didik pemasyarakatan (anak pidana) dan tahanan anak. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 (Ketentuan Umum) Butir 8 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dijelaskan bahwa anak didik pemasyarakatan adalah :

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua/walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai dengan berumur 18 (delapan belas) tahun.

Berdasarkan Tabel 7.1 dapat dilihat bahwa sebagian besar narapidana anak yang berada di lapas pada tahun 2014 adalah Napi Anak Pidana (95,21 %). Sementara untuk narapidana yang berstatus Napi Anak Negara dan Napi Anak Sipil, persentasenya sangat kecil (kurang dari 5 persen). Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum), anak didik pemasyarakatan apapun kriterianya baik anak pidana, anak negara, maupun anak sipil semuanya telah menerima keputusan pengadilan.

Tabel 7.1 Jumlah Narapidana Anak Menurut Statusnya , 2014

Bulan	Napi Anak Negara	Napi Anak Sipil	Napi Anak Pidana	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Januari	73	1	3.605	3.679
Februari	86	4	3.532	3.622
Maret	62	9	3.462	3.533
April	64	14	3.648	3.726
Mei	52	10	3.615	3.677
Juni	44	9	3.556	3.609
Juli	45	75	3.354	3.474
Agustus	22	4	3.377	3.403
September	79	1	3.158	3.238
Oktober	35	10	2.891	2.936
November	37	10	2.822	2.869
Desember	36	-	2.658	2.694
Rata-rata	53	12	3.307	3.372

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan RI

Seperti dijelaskan dalam Pasal 1 (Ketentuan Umum), anak didik pemasyarakatan apapun kriterianya baik anak pidana, anak negara, maupun anak sipil semuanya telah menerima keputusan pengadilan. Sementara itu, sejumlah tahanan anak yang tinggal di Rumah Tahanan Anak, Cabang Rutan Anak dan tempat-tempat tertentu masih harus menunggu keputusan pengadilan. Sesuai dengan penjelasan pada butir 4, pasal 1 Bab 1 bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di Rumah Tahanan Negara, Cabang Rumah Tahanan Negara dan tempat tertentu. Pejabat pelaksana hukum seperti Penyelidik, Penuntut Umum dan Hakim (Hakim Pengadilan, Hakim Banding dan Hakim Kasasi) berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan anak untuk melaksanakan berbagai macam kepentingan antara lain penyidikan (Pasal 44), penuntutan (Pasal 46) dan pemeriksaan (Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49).

Tabel 7.2 Jumlah Narapidana dan Tahanan Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin, 2014

Kelompok Usia	Status	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Dewasa	Narapidana	101.878	5.629	107.507
	Tahanan	49.377	2.768	52.145
	Jumlah	151.255	8.397	159.652
Anak-Anak	Narapidana	2.902	60	2.962
	Tahanan	774	16	790
	Jumlah	3.676	76	3.752
Dewasa dan Anak-Anak	Narapidana	104.780	5.689	110.469
	Tahanan	50.151	2.784	52.935
	Jumlah	154.931	8.473	163.404

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan RI

Sesuai dengan laporan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, jumlah anak pelaku tindak pidana di seluruh Indonesia pada tahun 2014 mencapai sebanyak 3.752 anak. Dari jumlah tersebut, seperti yang disajikan pada Tabel 7.2 sebanyak 790 anak (21,06 persen) masih berstatus sebagai tahanan dan sebanyak 2.962 anak (78,94 persen) lainnya telah berstatus narapidana atau anak didik. Tabel 7.2 juga menunjukkan bahwa anak laki-laki pelaku tindak pidana jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan anak perempuan.

7.3.3 Anak Korban Tindak Pidana

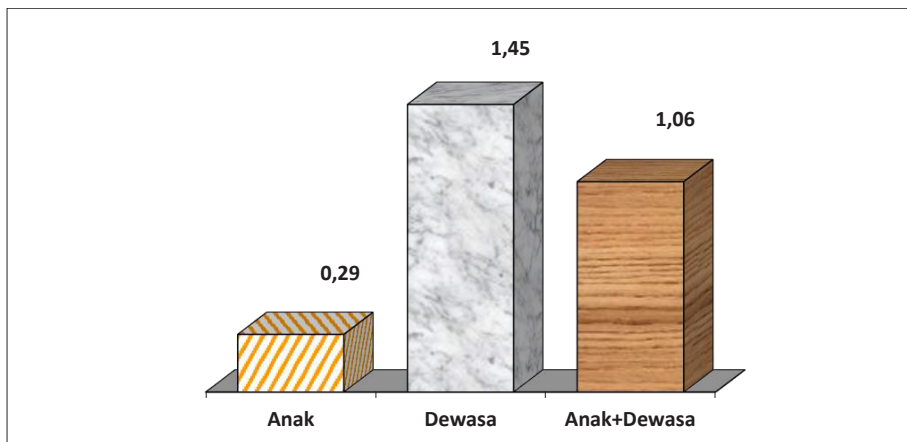
Perlindungan terhadap anak korban kejahatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab kita semua, anak korban harus mendapatkan perhatian dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum khususnya korban anak, harus ditangani secara khusus baik represif maupun tindakan preventif demi menciptakan masa depan anak yang baik dan sejahtera. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

membagi tiga bagian terhadap anak yang perkara dengan hukum, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa: “Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut sebagai anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.”

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (4) tersebut dapat kita ketahui bahwa yang dimaksud dengan anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami suatu tindak pidana. Kasus yang dialami oleh anak akhir-akhir ini cenderung mengalami peningkatan hal ini dapat kita lihat dari pemberitaan yang ada baik melalui media cetak maupun elektronik, melihat kondisi yang ada dibutuhkan suatu upaya yang serius dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap anak. Peran aktif dari para aparat penegak hukum dalam menanggulangi kejahatan terhadap anak sangat diperlukan sebagai suatu usaha yang rasional dari masyarakat.

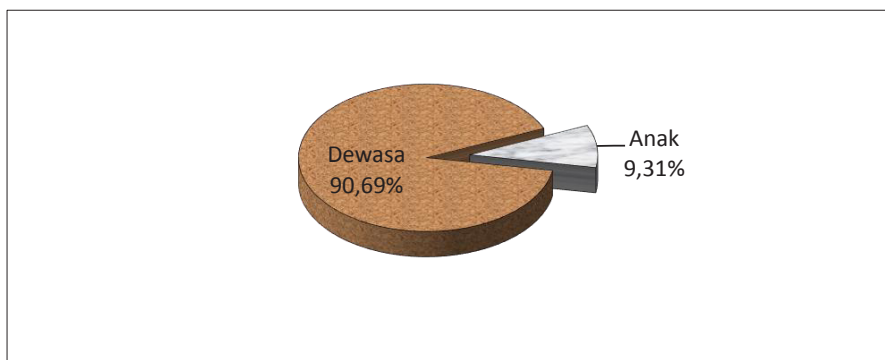
Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 90 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak korban dan Anak saksi berhak atas “upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga”. Yang dimaksud dengan rehabilitasi medis tersebut adalah proses kegiatan pengobatan secara terpadu dengan memulihkan kondisi fisik anak, anak korban dan atau anak saksi. Kemudian yang dimaksud dengan rehabilitasi sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban, dan atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.



Sumber data : BPS - Susenas 2014

Gambar 7.2 Persentase Penduduk Yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2014

Hasil Susenas tahun 2014 (Gambar 7.2) menunjukkan bahwa dari keseluruhan penduduk pada tahun 2014, sebanyak 1,06 persen diantaranya pernah menjadi korban kejahatan. Dari jumlah tersebut, sebesar 0,29 persen diantaranya adalah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun). Persentase korban kejahatan dewasa sekitar 5 kali lipat lebih banyak daripada anak, yang mencapai 1,45 persen.



Sumber data : BPS - Susenas 2014

Gambar 7.3. Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur, 2014

Jika dilihat menurut kelompok umur, komposisi penduduk dewasa yang menjadi korban kejahatan jauh lebih besar (90,69 persen) dibandingkan korban

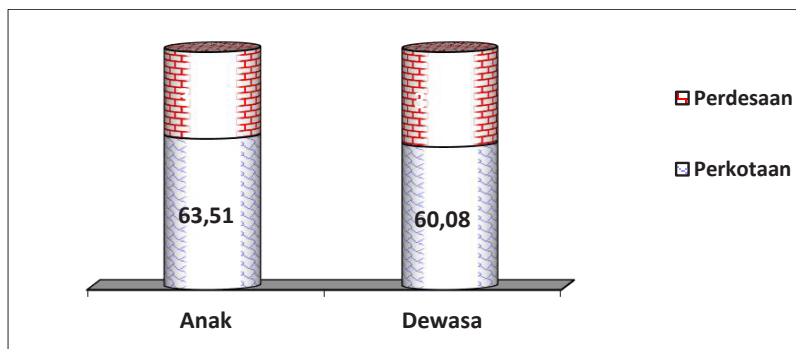
anak (9,31 persen). Dari sekitar 2,41 juta penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan, sekitar 247 ribu (9,31 persen) adalah anak (Gambar 7.3).

Tabel 7.3. Jumlah dan Persentase Penduduk Korban Kejahatan, Tahun 2012-2014

Jumlah/Persen	Kategori	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Jumlah	Anak	348.341	268.371	247.610
	Dewasa	2.152.693	2.167.721	2.413.216
	Anak dan Dewasa	2.501.034	2.436.092	2.660.826
Persentase	Anak	13,93	11,02	9,31
	Dewasa	86,07	88,98	90,69
	Anak dan Dewasa	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas, 2012-2014

Pola penduduk korban kejahatan berdasarkan hasil Susenas tahun 2012 – 2014 (Tabel 7.3) menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan selalu lebih sedikit dibandingkan dewasa yang menjadi korban kejahatan. Bahkan dibandingkan data tahun 2012, persentase anak yang menjadi korban kejahatan turun 4,62 persen dari 13,93 persen di tahun 2012 menjadi 9,31 persen di tahun 2014. Bagi para pemerhati anak, angka ini sudah barang tentu sangat menggembirakan. Karena menunjukkan adanya keberhasilan dalam upaya pencegahan anak menjadi korban kriminal.

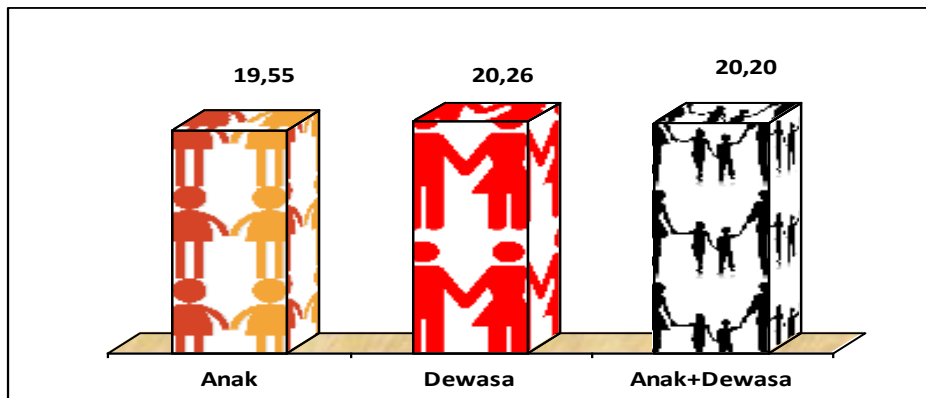


Sumber : BPS - Susenas 2014

Gambar 7.4. Perbandingan Komposisi Penduduk yang Pernah Menjadi Korban Kejahatan Menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah, 2014

Data Susenas menunjukkan bahwa anak yang menjadi korban kejahatan selama tahun 2014 jumlahnya mencapai sekitar 247,6 ribu anak (Tabel Lampiran L-

7.3.1). Seperti yang nampak pada Gambar 7.4, sekitar 63,51 persen (157,2 ribu anak) dari keseluruhan anak korban kejahatan selama tahun 2014 tinggal di perkotaan dan sekitar 36,49 persen lainnya (90,4 ribu anak) adalah anak perdesaan. Kondisi ini juga menunjukkan indikasi bahwa wilayah perdesaan lebih aman dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Gambaran serupa juga dirasakan oleh penduduk dewasa korban kejahatan. Dari Gambar 7.4 nampak bahwa sekitar 60,68 persen (sekitar 1.464,3 ribu jiwa) dari total orang dewasa yang menjadi korban kejahatan selama tahun 2014 adalah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan, sedangkan 39,92 persen lainnya (sekitar 948,9 ribu jiwa) adalah penduduk dewasa yang tinggal di perdesaan.



Sumber : BPS - Susenas 2014

Gambar 7.5. Persentase Penduduk Korban Kejahatan yang Kasusnya Dilaporkan ke Polisi Menurut Kategori Umur, Tahun 2014

Gambar 7.5 menunjukkan bahwa masih sangat sedikit kejadian kejahatan yang dilaporkan kasusnya ke polisi. Dari keseluruhan penduduk yang pernah menjadi korban kejahatan pada tahun 2014, hanya 20,2 persen diantaranya yang pernah melaporkan kejahatannya ke polisi untuk diproses, sementara selebihnya memilih untuk tidak melapor. Hal ini mungkin disebabkan tipe kejahatan yang dialami dianggap ringan, dianggap aib karena pelakunya adalah orang dekat korban, tidak berani melapor, merasa percuma melapor, dan sebagainya. Dari gambar juga dapat dilihat bahwa persentase korban anak yang melapor lebih kecil dibandingkan korban dewasa.

7.4 Profil Anak yang Bekerja

Anak merupakan individu yang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan dari bayi hingga remaja. Rentang waktu pertumbuhan dan perkembangan anak dimulai sejak bayi (0-1 tahun), usia bermain/toddler (2-3 tahun), pra sekolah (3-6), usia sekolah (6-12 tahun) hingga remaja (12-18 tahun)³. Pertumbuhan dan perkembangan anak pada rentang tersebut berbeda antara anak yang satu dengan yang lain tergantung oleh latar belakang kehidupannya.

Secara fisiologis maupun psikologis, anak-anak lebih rentan daripada orang dewasa karena perkembangan kompleks yang terjadi di setiap tahap perkembangan. Sebagai golongan yang rentan, anak memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Seperti kita ketahui manusia mempunyai hak-hak sejak lahir dan beberapa diantaranya bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Tak terkecuali pada anak, akan tetapi anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.

Pada hakekatnya anak tidak diperbolehkan bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk bergembira, belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologis, intelektual dan sosialnya⁴. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi, menjadi pekerja anak dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.

Untuk menjamin terpenuhinya hak anak yang bekerja, maka perlu ada perlindungan yang tercantum dan ditegaskan dalam perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan ini dimulai sejak Konvensi ILO No. 138 yang mengatur umur minimum anak yang bekerja, kemudian Konvensi ILO No. 182 tentang pelarangan dan tindakan cepat untuk penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk

³<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/24631/4/Chapter%20II.pdf>

⁴Syamsuddin, 1997, Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal:1. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, Implementasi Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak,hal:xiii

bagianak. Sementara di Indonesia aturan hukum tentang pekerja anak tertuang dalam Pasal 68 hingga Pasal 75 UU No. 13 Tahun 2003. Pasal 68 secara tegas menyatakan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak. Namun pada pasal 69 tertuang beberapa pengecualian di antaranya anak usia 13 hingga 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan asalkan tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental dan sosial anak. Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk pekerjaan ringan harus mampu memenuhi kriteria sebagai berikut :

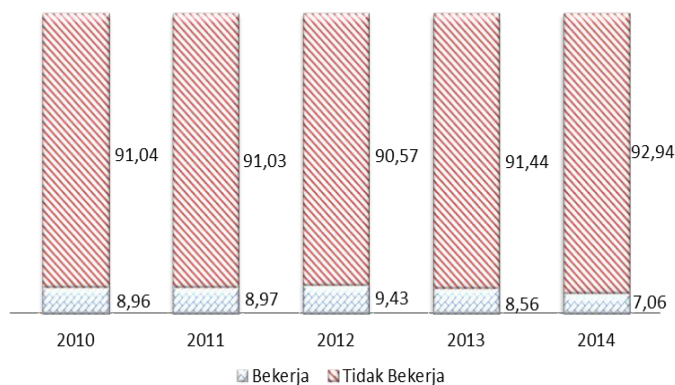
- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Ketentuan huruf a, b, f dan g tidak berlaku jika anak usia 13 hingga 15 tahun tersebut bekerja pada usaha keluarganya. Selanjutnya pada Pasal 74 disebutkan mengenai beberapa jenis pekerjaan yang dilarang dilakukan oleh anak-anak :

- (1) Siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk
- (2) Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
 - b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno, atau perjudian;
 - c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan/atau
 - d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak
- (3) Jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Sub bab ini membahas anak 10-17 tahun yang bekerja. Anak dianggap bekerja jika mereka bekerja minimal satu jam secara berturut-turut dalam periode seminggu yang lalu dan pekerjaan itu dilakukan dengan maksud untuk memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan dalam bentuk uang maupun barang. Tabel-tabel deskriptif pada lampiran, anak dibedakan dalam tiga kelompok umur yaitu umur 10-12 tahun, 13-14 tahun dan umur 15-17 tahun. Anak-anak pada kelompok 10-12 tahun sebenarnya tidak diperbolehkan bekerja (untuk jenis pekerjaan ringan sekalipun). Sedangkan untuk kelompok umur berikutnya, 13-14 tahun, pekerjaan ringan masih dapat ditoleransi undang-undang. Sementara untuk kelompok umur tertua, 15-17 tahun, secara umum diperbolehkan oleh hukum untuk bekerja. Namun demikian, berdasarkan hukum yang berlaku mereka semua dilindungi untuk tidak terlibat dalam pekerjaan terburuk atau berbahaya.

7.4.1 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja



Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.6 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Menurut Aktivitarnya, 2010-2014

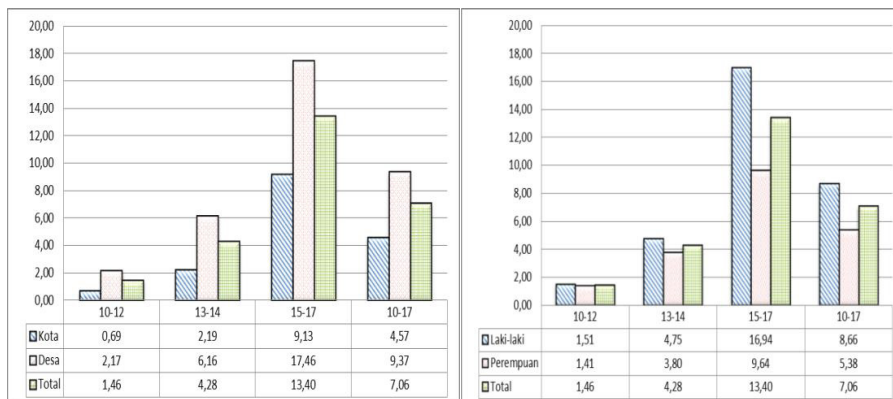
Di Indonesia, masuknya anak-anak ke dalam dunia kerja tidak dapat dihindari. Terbukti selama periode 2010-2014, jumlah anak usia 10-17 tahun yang termasuk dalam kelompok pekerja masih berada pada kisaran 9 persen, dan mencapai puncaknya pada tahun 2012 sebesar 9,43 persen, namun terus mengalami penurunan hingga tahun 2014. Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, terdapat sekitar 2,7 juta anak usia 10-17 tahun masuk dalam kelompok pekerja (Lampiran Tabel L-7.10.4). Jumlah tersebut mencapai sekitar 7,06 persen

dari total penduduk usia 10-17 tahun yang sebanyak 38,0 juta jiwa (Gambar 7.6 dan Lampiran Tabel L-7.4).

Apabila dibedakan menurut kelompok umur, dari seluruh anak berumur 15-17 tahun terdapat sekitar 13,40 persen yang bekerja. Persentase tersebut paling tinggi diantara kelompok umur lainnya, akan tetapi hal tersebut wajar karena pada kelompok umur tersebut anak-anak memang sudah diperbolehkan untuk masuk dalam pasar kerja. Hal yang perlu dikhawatirkan adalah dari seluruh anak berumur 10-12 tahun, masih terdapat sebesar 1,46 persen yang bekerja. Sementara pada kelompok umur tersebut, anak-anak tidak diperbolehkan bekerja meskipun untuk jenis pekerjaan ringan (Gambar 7.7).

Dilihat berdasarkan jenis kelamin pada anak usia 10-17 tahun, persentase anak laki-laki yang bekerja sebesar 8,66 persen, lebih besar dibandingkan dengan persentase anak perempuan yang bekerja yang hanya sebesar 5,38 persen. Hal yang sama juga terlihat, baik pada kelompok umur 10-12 tahun, 13-14 tahun dan 15-17 tahun.

Jika dilihat berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase anak yang bekerja di perdesaan sekitar dua kali lipat dibandingkan dengan persentase anak yang bekerja di perkotaan. Di perdesaan, terdapat 9,37 persen anak usia 10-17 tahun yang bekerja, sedangkan di perkotaan hanya 4,57 persen. Bahkan pada kelompok umur 10-12 tahun, persentase anak yang bekerja di perdesaan lebih dari tiga kali lipat dibandingkan persentase anak yang bekerja di perkotaan.

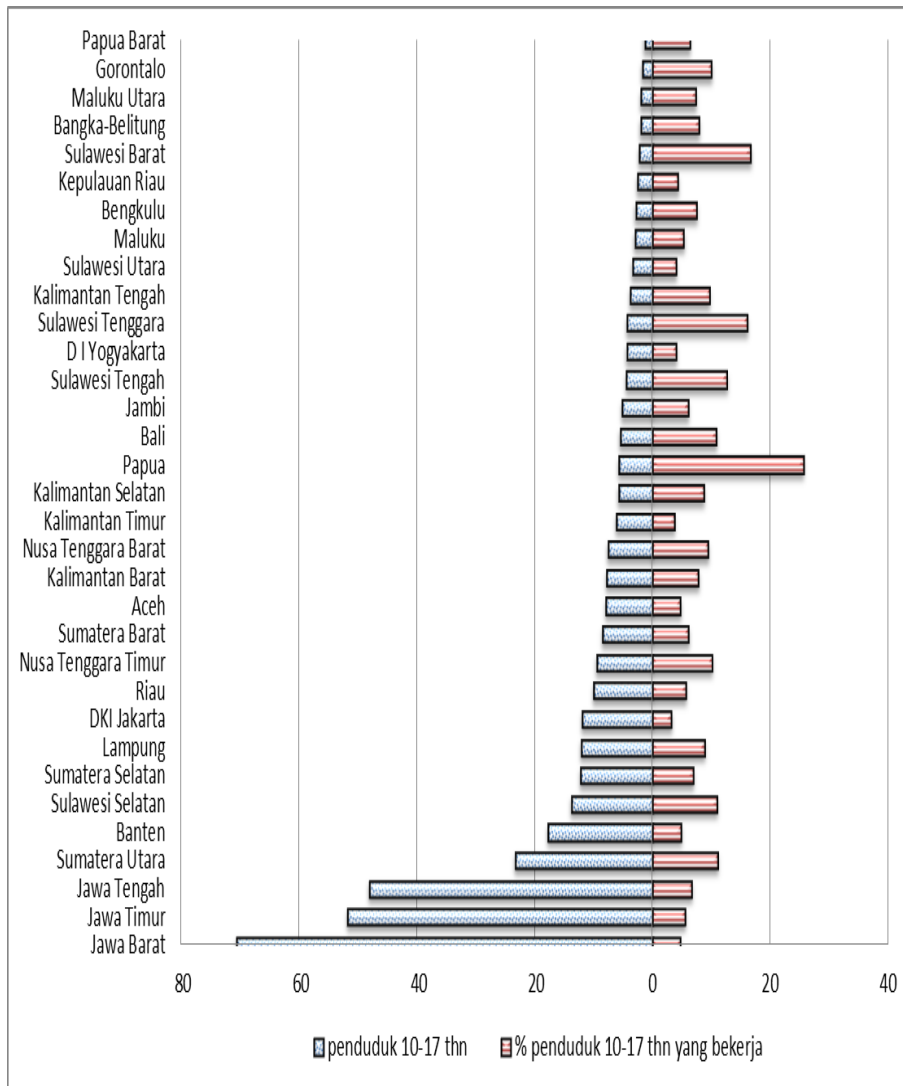


Sumber: BPS- Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.7 Persentase Anak yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

7.4.2. Anak 10-17 Tahun yang Bekerja menurut Provinsi

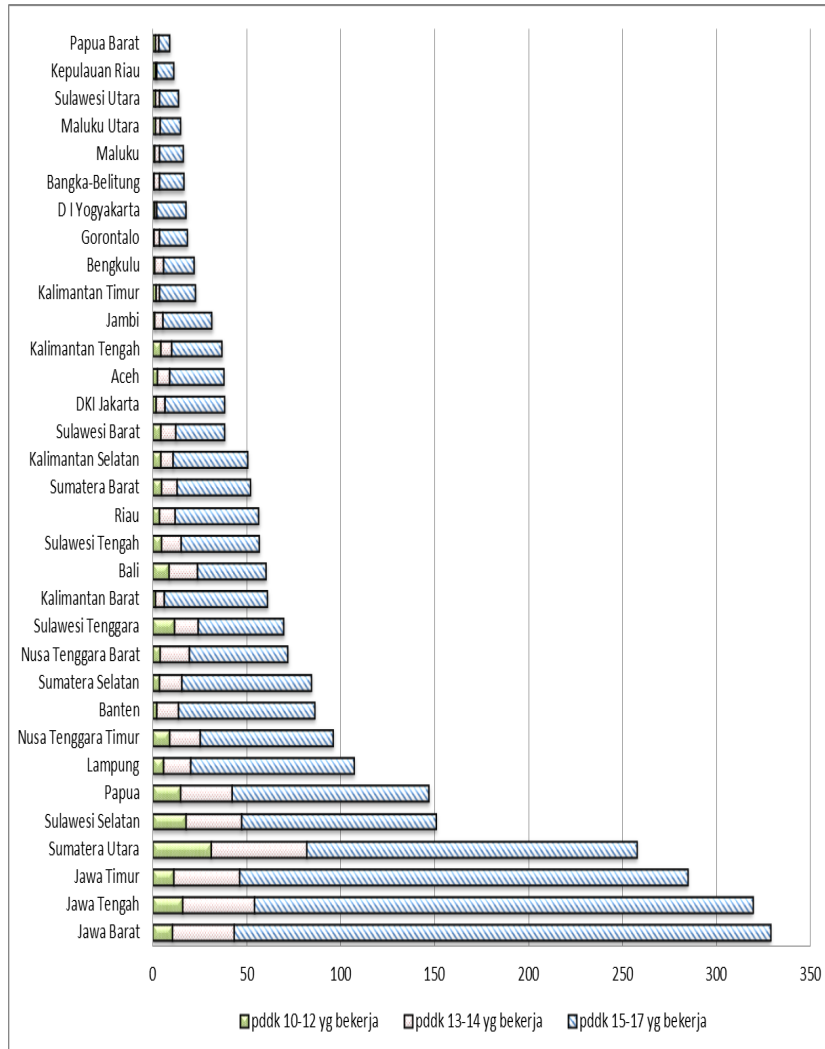
Gambar 7.8 merupakan ilustrasi jumlah dan persentase penduduk 10-17 yang bekerja berdasarkan provinsi. Secara absolut, tiga provinsi dengan jumlah anak berumur 10-17 tahun yang bekerja paling banyak adalah Jawa Barat (7,1 juta anak), Jawa Timur (5,2 juta anak) dan Jawa Tengah (4,8 juta anak).



Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.8 Jumlah Penduduk Usia 10-17 Tahun dan Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja menurut Provinsi, 2014

Sementara itu, jika dilihat menurut persentase terhadap total penduduk berumur 10-17 tahun, tiga provinsi dengan persentase anak berumur 10-17 tahun yang bekerja paling tinggi adalah Papua (25,55 persen), Sulawesi Barat (16,66 persen), dan Sulawesi Tenggara (16,06 persen). Itu artinya, untuk setiap 10 orang anak berumur 10-17 tahun di Papua, 3 di antaranya bekerja; sementara di Provinsi Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara, 1 sampai 2 orang di antaranya bekerja.



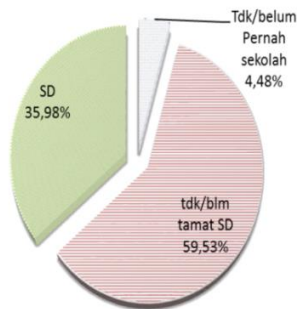
Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.9 Jumlah Anak yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Provinsi (000), 2014

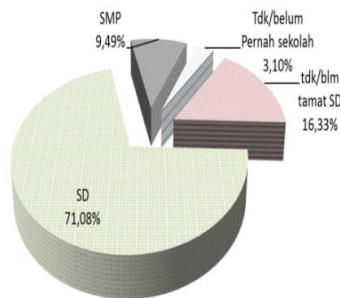
Berdasarkan kelompok umur, jumlah anak yang bekerja paling banyak adalah pada kelompok umur 15-17 tahun. Jika dibedakan menurut provinsi maka kelompok umur 15-17 tahun yang bekerja paling banyak adalah Provinsi Jawa Barat yaitu sejumlah 286 ribu anak. Hal yang lebih penting lagi yang ditunjukkan pada Gambar 7.9 adalah jumlah anak bekerja kelompok umur 10-12 tahun menurut provinsi. Tiga provinsi terbanyak adalah Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, dan Jawa Tengah (31 ribu, 18 ribu, dan 16 ribu).

7.4.3. Anak 10-17 tahun yang Bekerja menurut Pendidikan

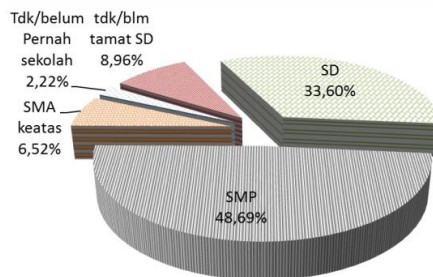
Pada umur 10-17 tahun, anak seharusnya masih menikmati jenjang pendidikan. Namun pada kenyataannya anak pada kelompok umur tersebut sudah memasuki pasar kerja. Gambar 7.10 menyajikan persentase penduduk berumur 10-17 tahun yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan. Data yang disajikan menunjukkan bahwa penduduk berumur 10-17 tahun yang bekerja memiliki pendidikan setingkat SD (71,08 persen) dan SMP (9,49 persen).



(a) Pendidikan Penduduk Bekerja Usia 10-12 Tahun



(b) Pendidikan Penduduk Bekerja Usia 13-14 Tahun



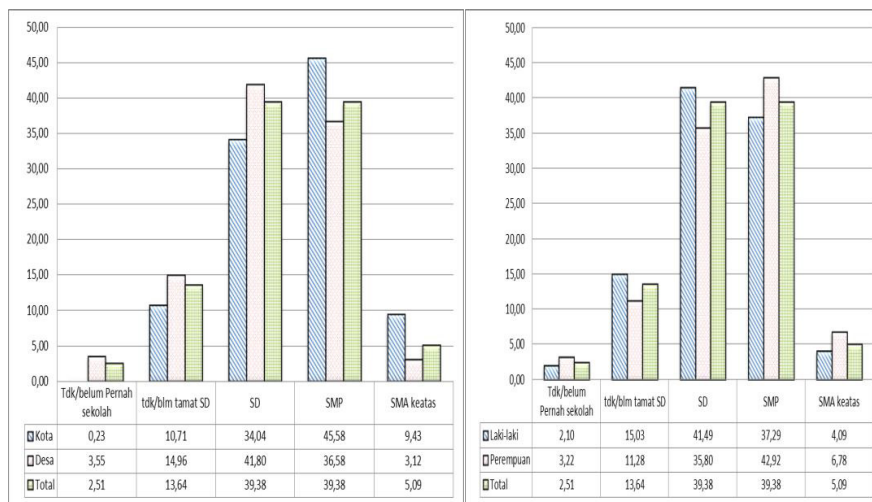
(c) Pendidikan Penduduk Bekerja Usia 15-17 Tahun

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.10 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan dan Kelompok Umur, 2014

Pola pikir anak untuk memulai masuk ke dalam pasar kerja juga dipengaruhi oleh tipe daerah dan jenis kelamin. Data pada Gambar 7.11 menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tinggal di wilayah perkotaan bekerja dengan pendidikan terakhir SMP (45,58 persen) sedangkan di wilayah perdesaan sebagian besar berpendidikan SD (41,80 persen). Berbanding terbalik dengan wilayah tempat tinggalnya, jenis kelamin perempuan yang bekerja justru mempunyai pendidikan terakhir yang ditamatkan yaitu SMP (42,92 persen) lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu tamat SD (37,29 persen). Artinya, dari setiap 10 pekerja anak dengan jenis kelamin laki-laki terdapat 4 orang anak tamatan SD, dan dari 10 pekerja anak perempuan terdapat 4 orang anak tamat SMP.

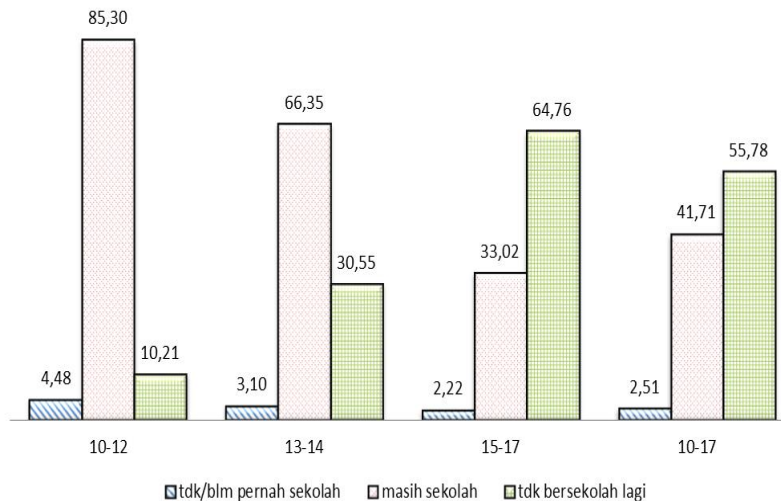
Jika dilihat lebih rinci berdasarkan kelompok umur, persentase anak yang bekerja menurut pendidikan tertinggi yang ditamatkan bervariasi pada setiap kelompok umur. Pada kelompok umur 10-12 tahun, sebagian besar anak yang bekerja tidak atau belum tamat SD (59,53 persen). Sementara pada kelompok umur 13-14 tahun dan 15-17 tahun, sebagian besar anak yang bekerja memiliki pendidikan masing-masing setingkat SD (71,08 persen) dan SMP (48,69 persen).



Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.11 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Gambar 7.12 menunjukkan bahwa sebagian besar dari anak yang bekerja sudah tidak bersekolah lagi yaitu sebesar 55,78 persen. Sedangkan anak yang bekerja dan masih sekolah sebesar 41,71 persen, dan yang tidak/belum pernah sekolah sebesar 2,51 persen. Pekerja anak umur 10-17 tahun yang masih sekolah, persentasenya berkurang, seiring dengan semakin tingginya jenjang pendidikan. Persentase anak yang bekerja dan masih sekolah umur 10-12 tahun, 13-14 tahun, dan 15-17 tahun, masing-masing 85,30 persen, 66,35 persen, dan 33,02 persen.



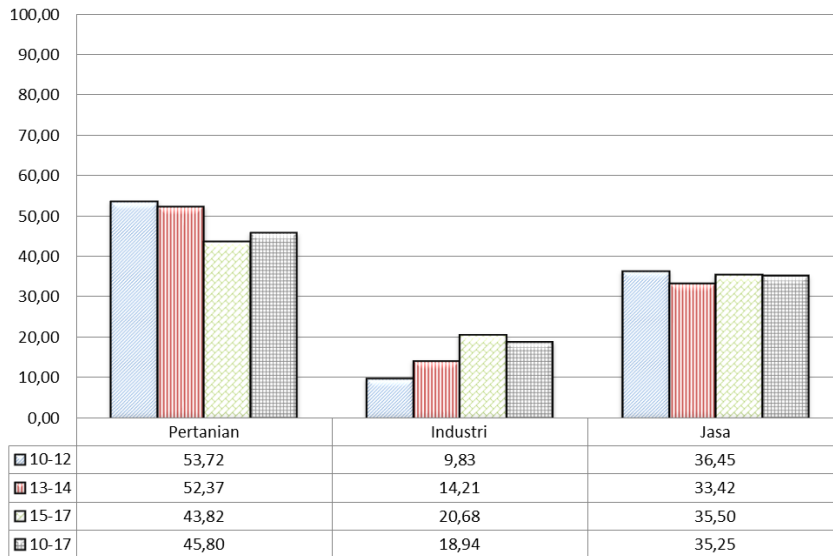
Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.12 PersentasePenduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Partisipasi Sekolah, 2014

7.4.4 Anak 10-17 tahun yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan

Dalam publikasi ini, lapangan pekerjaan utama dibagi atas 3 sektor, yaitu sektor pertanian, industri dan jasa. Sektor pertanian menampung paling banyak pekerja anak yaitu 45,80 persen. Sektor ini tetap menjadi idola bagi anak untuk mencari lahan pekerjaan, meskipun mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya, yaitu dari 46,78 persen (Profil Anak Indonesia 2013; Sakernas 2012). Gambar 7.13 menunjukkan proporsi terbesar anak yang bekerja di sektor pertanian ada di kelompok umur 10-12 tahun sebesar 53,72 persen. Sementara itu, sektor industri mampu menyerap pekerja anak sebesar 18,94 persen dan sektor jasa sebesar 35,25 persen. Di sektor industri didominasi oleh pekerja anak

berumur 15-17 tahun, sementara di sektor jasa didominasi oleh pekerja anak pada kelompok umur 10-12 tahun.

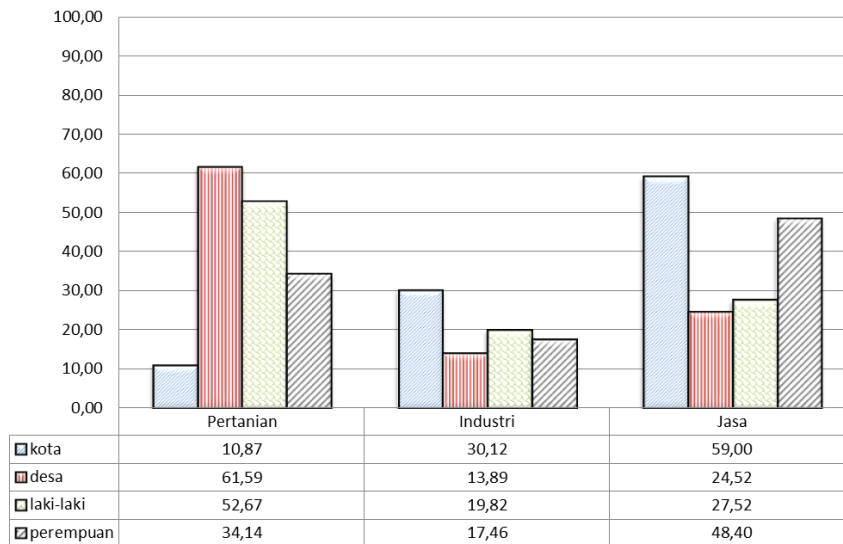


Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.13 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2014

Gambar 7.14 menyajikan potret pekerja anak pada 3 sektor lapangan pekerjaan berdasarkan komposisi daerah tempat tinggal dan jenis kelamin. Berdasarkan daerah tempat tinggal, sangat jelas perbedaan nyata antara sektor lapangan pekerjaan dan kondisi di wilayah perkotaan dan perdesaan. Wilayah perdesaan yang menyediakan lahan yang luas memang cocok dalam penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Sektor pertanian di perdesaan mampu menyerap pekerja anak hingga mencapai 61,59 persen. Sedangkan wilayah perkotaan yang sangat kental dengan sektor jasanya mampu menampung sebanyak 59,00 persen pekerja anak.

Berbeda halnya dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin, pekerja anak laki-laki sebagian besar memilih sektor pertanian sebagai lapangan pekerjaan utamanya sebesar 52,67 persen. Ini berarti bahwa dari 10 orang pekerja anak laki-laki sekitar 4 sampai 5 orang diserap oleh sektor pertanian. Sementara itu, pekerja anak perempuan sebagian besar berada di sektor jasa sebesar 48,40 persen.

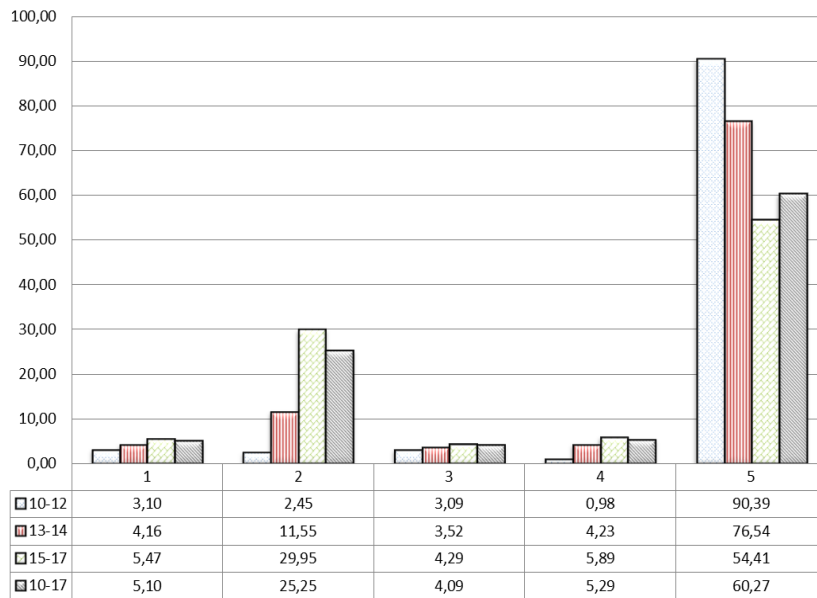


Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.14 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin dan, Tipe Daerah, 2014

7.4.5 Anak 10-17 tahun yang Bekerja menurut Status Pekerjaan

Banyaknya anak berumur 10-17 tahun yang bekerja berdasarkan status pekerjaan utamanya disajikan pada Gambar 7.15. Pada gambar tersebut, dapat dilihat bahwa anak-anak yang bekerja umumnya adalah pekerja tak dibayar yaitu sebesar 60,27 persen atau sekitar 5 sampai 6 anak dari setiap 10 anak. Bahkan apabila ditinjau berdasarkan kelompok umurnya, sebesar 90,39 persen pekerja anak umur 10-12 tahun termasuk pekerja tak dibayar.



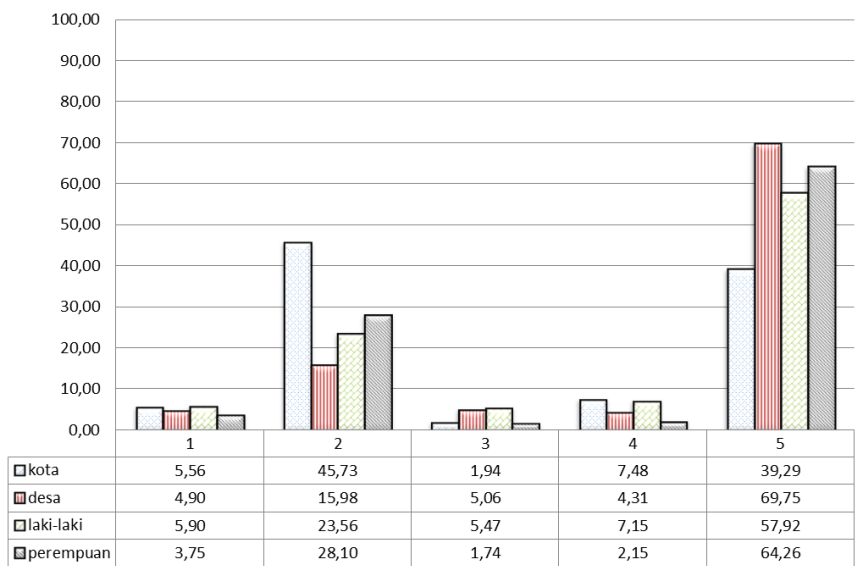
Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.15 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Kelompok Umur, 2014

Keterangan:

1. Berusaha Sendiri, Berusaha dibantu Buruh Tetap dan Buruh Tidak Dibayar
2. Buruh/Karyawan/Pegawai
3. Pekerja bebas pertanian
4. Pekerja bebas nonpertanian
5. Pekerja tak dibayar

Jika dilihat lebih rinci pada Gambar 7.16, walaupun secara umum status pekerjaan utama anak adalah sebagai pekerja tak dibayar, akan tetapi terlihat adanya perbedaan di wilayah perkotaan. Status pekerjaan utama anak di perkotaan sebagian besar adalah sebagai buruh/karyawan/pegawai sebesar 45,73 persen, meskipun proporsi sebagai pekerja tak dibayar masih lumayan besar yaitu 39,29 persen. Sedangkan di perdesaan, persentase anak yang bekerja masih jauh lebih besar sebagai pekerja tak dibayar yaitu 69,75 persen. Sementara itu, berdasarkan komposisi jenis kelamin mengikuti pola secara umum yaitu sebagian besar berstatus sebagai pekerja tak dibayar, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing sebesar 57,92 persen dan 64,26 persen.



Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.16 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2014

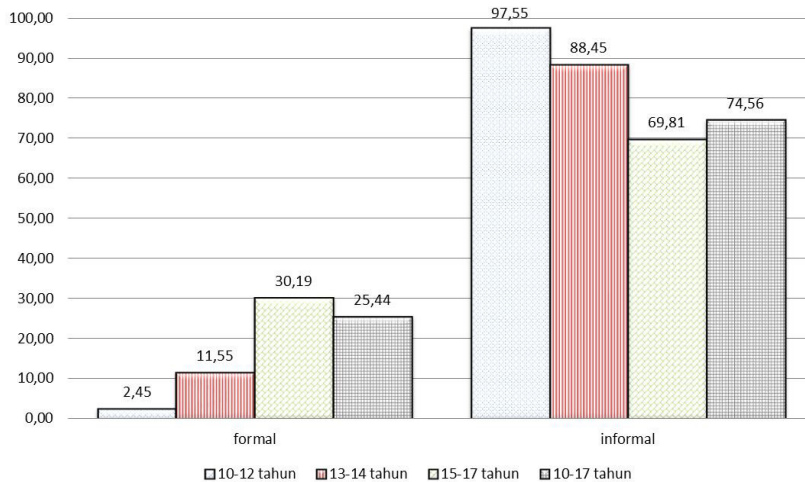
Keterangan:

1. Berusaha Sendiri, Berusaha dibantu Buruh Tetap dan Buruh Tidak Dibayar
2. Buruh/Karyawan/Pegawai
3. Pekerja bebas pertanian
4. Pekerja bebas non pertanian
5. Pekerja tak dibayar

Penduduk dikategorikan bekerja pada kegiatan formal jika mereka bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai dan juga mereka yang berusaha dibantu buruh/karyawan. Seperti diketahui, tidak semua buruh/karyawan/pegawai bekerja pada kegiatan yang memiliki aspek legalitas kegiatan. Sebagai gambaran, seorang pembantu rumah tangga juga terklasifikasi sebagai pekerja formal mengingat statusnya sebagai buruh/karyawan. Dalam ketenagakerjaan, konsep buruh/karyawan adalah mereka yang bekerja dengan mendapatkan upah/gaji berupa uang maupun barang dari majikan yang tetap, dalam hal ini termasuk juga pembantu rumah tangga.

Jika dilihat pada Gambar 7.17, sebagian besar anak berumur 10-17 tahun bekerja pada sektor informal yaitu sekitar 74,56 persen dan sektor formal sebesar 25,44 persen. Dengan semakin bertambahnya umur anak yang bekerja, semakin

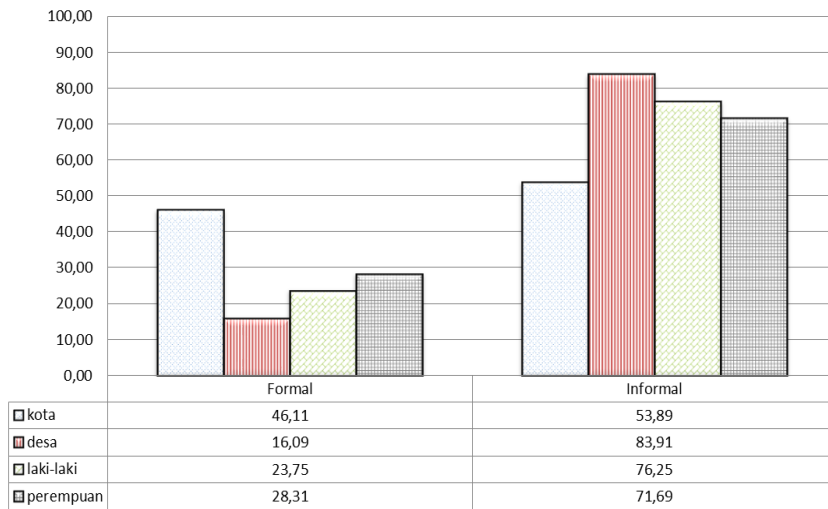
banyak anak yang berpartisipasi di sektor formal. Persentase anak umur 10-12 tahun yang bekerja di sektor formal adalah 2,45 persen. Sementara anak umur 13-14 tahun sebesar 11,55 persen, dan anak umur 15-17 tahun sebesar 30,19 persen.



Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.17 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal dan Kelompok Umur, 2014

Berdasarkan komposisi daerah tempat tinggal pada Gambar 7.18 sektor informal tetap mempunyai proporsi yang besar baik di perkotaan (53,89 persen) maupun di perdesaan (83,91 persen). Di samping itu, dari Gambar 7.18 tampak pula bahwa persentase pekerja anak yang bekerja di sektor formal lebih besardi daerah perkotaan daripada yang tinggal di perdesaan, masing-masing sebesar 46,11 persen dan 16,09 persen. Sementara jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, persentase pekerja anak perempuan yang bekerja di kegiatan formal lebih banyak dibandingkan laki-laki (perempuan: 28,31 persen; laki-laki: 23,75 persen).



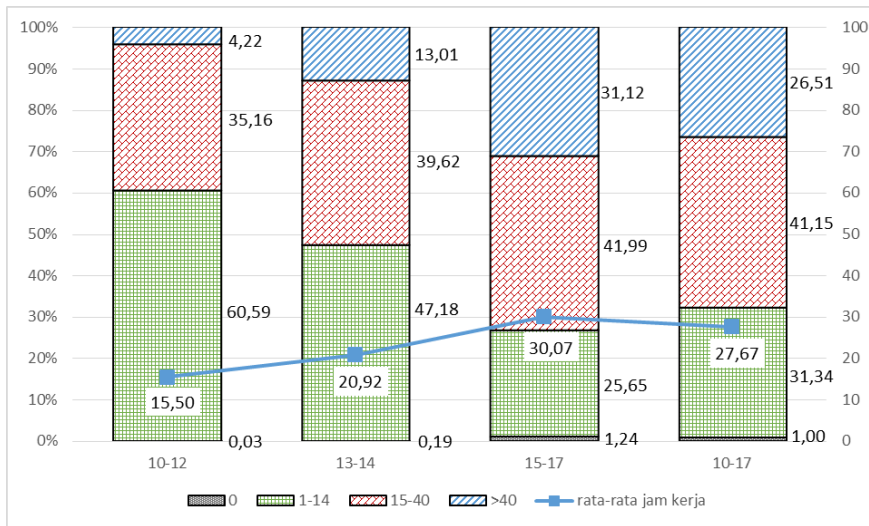
Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.18 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun Yang Bekerja Menurut Sektor Formal-Informal, Jenis Kelamin, dan Tipe Daerah, 2014

7.4.6 Anak 10-17 tahun yang Bekerja menurut Jam Kerja

Seperti telah disebutkan bahwa sesuai UU no 13 Tahun 2003, pada dasarnya pengusaha dilarang memperkerjakan anak tetapi terdapat pengecualian bagi anak usia 13-15 tahun yaitu mereka masih dapat bekerja tetapi dengan berbagai syarat dan kondisi, salah satunya yaitu tidak boleh bekerja lebih dari 3 jam perhari. Batasan jam kerja bagi anak merupakan salah satu perlindungan yang diberikan pemerintah untuk anak-anak. Jumlah jam kerja yang sedikit diasumsikan tidak terlalu mengganggu pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak (tidak mengganggu waktu belajar dan bermain anak-anak).

Di Indonesia dengan asumsi 5 hari kerja, jam kerja normal dalam seminggu diperkirakan sebanyak 35-40 jam/minggu, jika lebih dari itu maka dianggap sudah melebihi jam kerja normal. Sementara pada anak-anak ada batasan bekerja 3 jam/hari atau sekitar 15 jam per minggu. Berdasarkan teori tersebut pada tulisan ini jam kerja dikelompokkan menjadi empat yaitu: 0 jam kerja, 1-14 jam/minggu (jam kerja normal bagi anak), 15-40 jam/minggu, dan lebih dari 40 jam/minggu.



Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Gambar 7.19 Persentase Penduduk Usia 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Kelompok Umur, Jam Kerja, dan Rata-rata Jam Kerja, 2014

Berdasarkan hasil Sakernas Agustus 2014, rata-rata jam kerja seminggu pada anak 10-17 tahun yang bekerja adalah 28 jam atau hampir 6 jam setiap harinya. Pada Gambar 7.20 ada semacam pola linier antara pertambahan umur dengan rata-rata jam kerja seminggu. Rata-rata jam kerja pada anak umur 10-12 tahun adalah 15 jam/minggu, meningkat menjadi 21 jam/minggu pada anak umur 13-14 tahun, dan terus meningkat menjadi 30 jam/minggu pada anak umur 15-17 tahun.

Pada kelompok umur 10-12 tahun sebagian besar (60,59 persen) jumlah jam kerja seminggu masih dalam keadaan normal yaitu antara 1-14 jam, walaupun masih terdapat sekitar 4,22 persen anak yang bekerja dengan jumlah jam kerja diatas 40 jam seminggu. Sedangkan pada kelompok anak umur 13-14 tahun jumlah jam kerja seminggu sudah menyamai normalnya angkatan kerja yaitu sekitar 39,62 persen berada pada jumlah jam kerja 15-40 jam.

7.4.7 Anak 10-17 tahun yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Upah/Gaji

Istilah upah/gaji yang digunakan pada publikasi ini merujuk pada semua jenis imbalan atau penghasilan bersih selama sebulan baik berupa uang maupun barang yang diterima oleh pekerja dan diukur dalam uang rupiah.

Rata-rata upah/gaji anak 10-17 tahun yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai per bulan sangat kecil, yaitu hanya sekitar 767 ribu rupiah. Pola pengupahan yang pada umumnya terjadi pada anak yang bekerja di Indonesia adalah berdasarkan umur si anak, semakin tinggi umur si anak maka upah yang diberikanpun bertambah. Namun demikian, berdasarkan hasil Sakernas 2014 rata-rata upah/gaji tertinggi justru terdapat pada kelompok anak berumur 13-14 tahun yaitu sebesar 821 ribu rupiah per bulan dan terendah terdapat pada anak kelompok umur 10-12 tahun yang hanya sebesar 652 ribu rupiah per bulan.

Pada dasarnya besarnya upah/gaji terkait erat dengan lamanya jam kerja yaitu semakin besar jumlah jam kerja maka akan semakin besar pula upah/gaji yang akan diterima. Apabila rata-rata upah/gaji anak yang bekerja dikaitkan dengan rata-rata jumlah jam kerjanya dalam seminggu (Gambar 7.19 dan Tabel 7.4) dapat dilihat kelompok umur 10-12 tahun dengan rata-rata jam kerja 15 jam per minggu, rata-rata upah gajinya hanya 652 ribu rupiah. Sementara pada kelompok umur 13-14 tahun dengan rata-rata jam kerja seminggu 21 jam (tidak sampai dua kali lipat dari rata-rata jam kerja anak 10-12 tahun) rata-rata upah/gaji mencapai 821 ribu rupiah. Sehingga dapat ditarik kesimpulan sangat tidak menguntungkan bagi anak-anak usia 10-12 tahun untuk bekerja, selain dapat mengganggu perkembangan fisik dan mentalnya dari sisi pendapatannya juga tidak memadai.

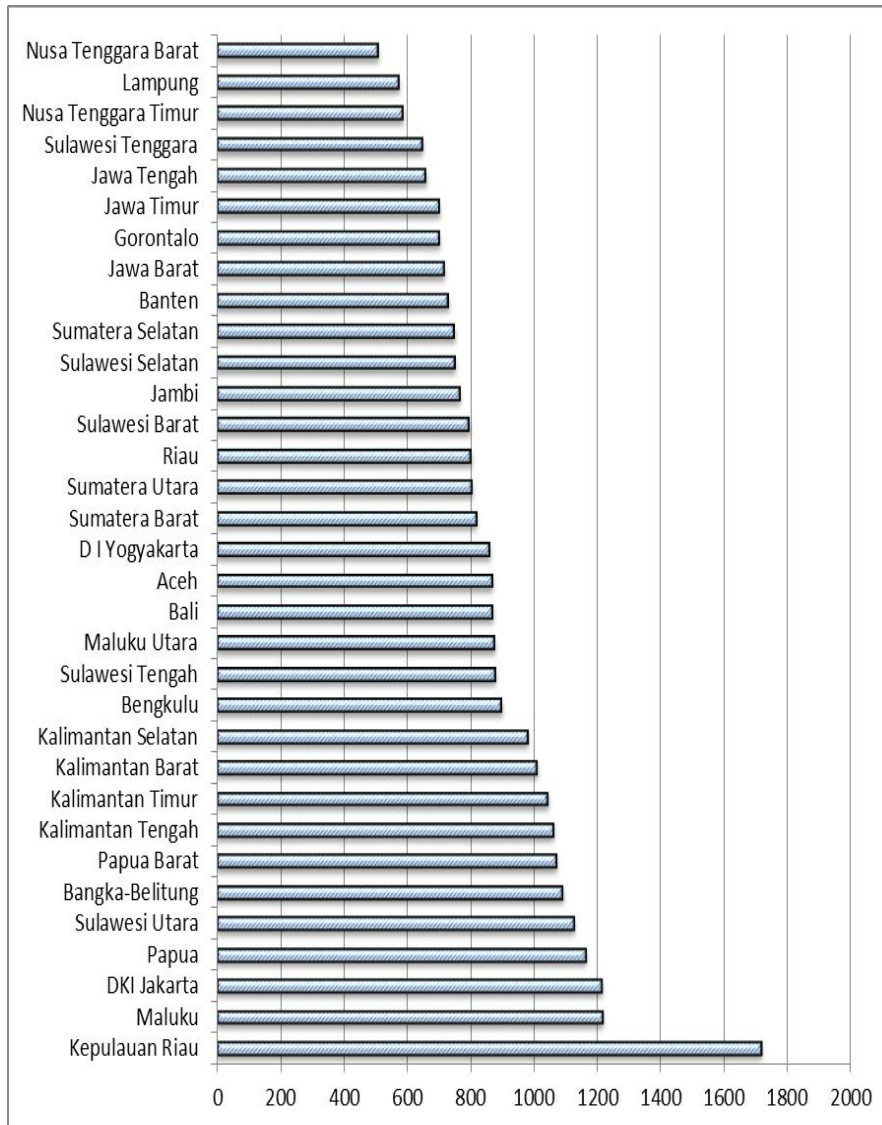
Tabel. 7.4 Rata-rata Upah/Gaji Penduduk 10-17 Tahun yang Bekerja Sebagai Buruh/Karyawan/Pegawai menurut Kelompok Umur dan Tipe Daerah

Kelompok Umur	Rata-rata Upah/Gaji Selama Sebulan (Rupiah)		
	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
10-12	877.305	542.473	651.838
13-14	993.830	676.406	821.167
15-17	764.732	762.554	763.648
Total	783.302	750.887	766.960

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Besarnya upah yang diterima pekerja sangat dipengaruhi oleh wilayah tempat kerjanya. Upah/gaji yang diberikan di wilayah perkotaan umumnya lebih besar. Hal ini juga berlaku bagi pekerja anak. Rata-rata upah/gaji selama sebulan di

wilayah perkotaan adalah sekitar 783 ribu rupiah, lebih tinggi dibandingkan wilayah perdesaan yaitu sekitar 751 ribu rupiah.



Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

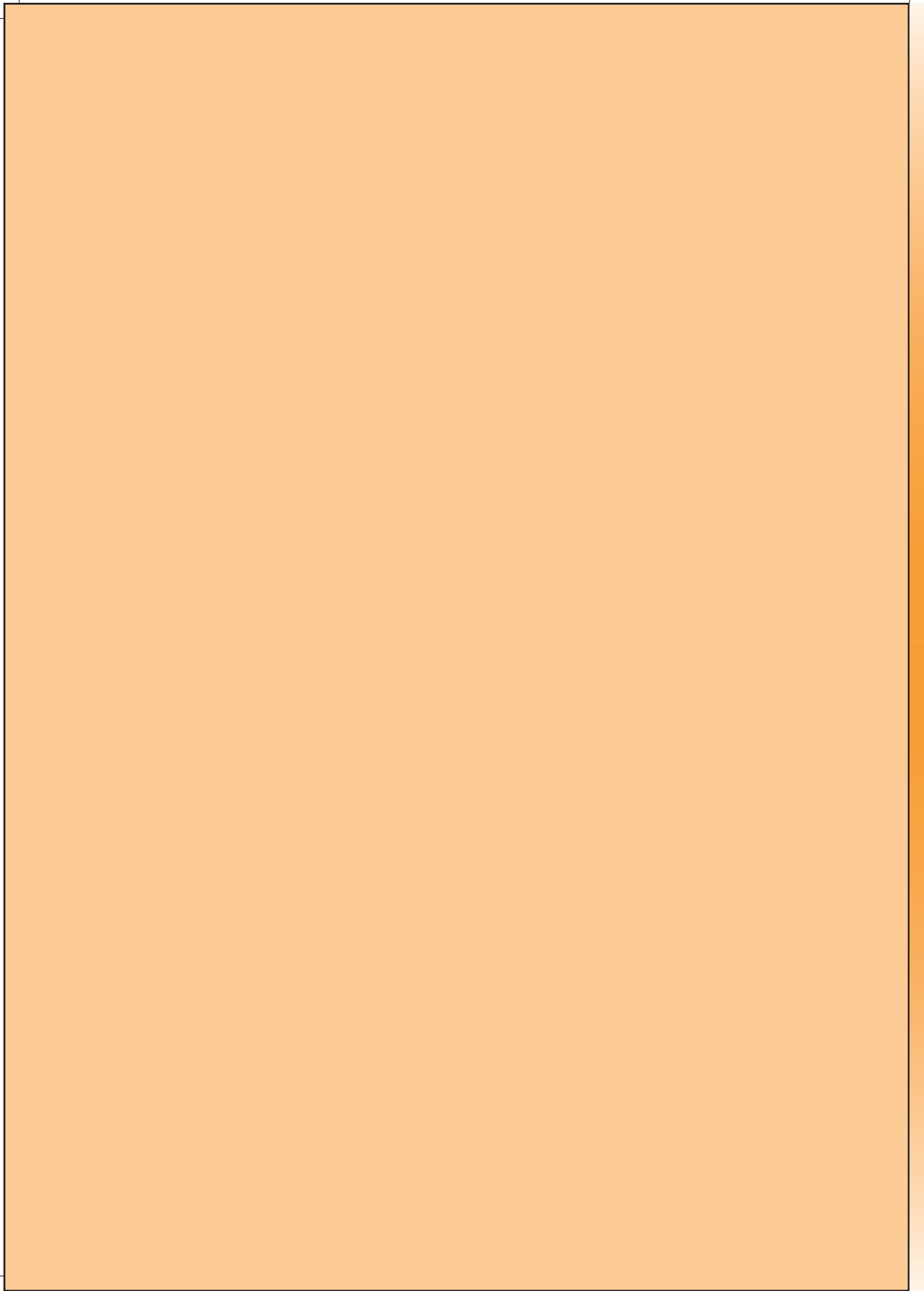
Gambar 7.20 Rata-rata Upah/Gaji Selama Sebulan Anak 10-17 Tahun Yang Bekerja Sebagai Buruh/karyawan/pegawai Menurut Provinsi (dalam ribuan rupiah), 2014

Gambar 7.20 menyajikan distribusi rata-rata upah/gaji dari 33 provinsi di Indonesia. Tiga provinsi dengan rata-rata upah/gaji tertinggi dari anak berumur 10-17 tahun yang bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai yaitu Kepulauan Riau sebesar 1,7 juta rupiah, kemudian disusul oleh Provinsi Maluku dan DKI Jakarta yang masing-masing sebesar 1,2 juta rupiah. Sebaliknya tiga provinsi dengan rata-rata upah/gaji yang terkecil ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Timur berturut-turut 506 ribu rupiah, 572 ribu rupiah dan 585 ribu rupiah.

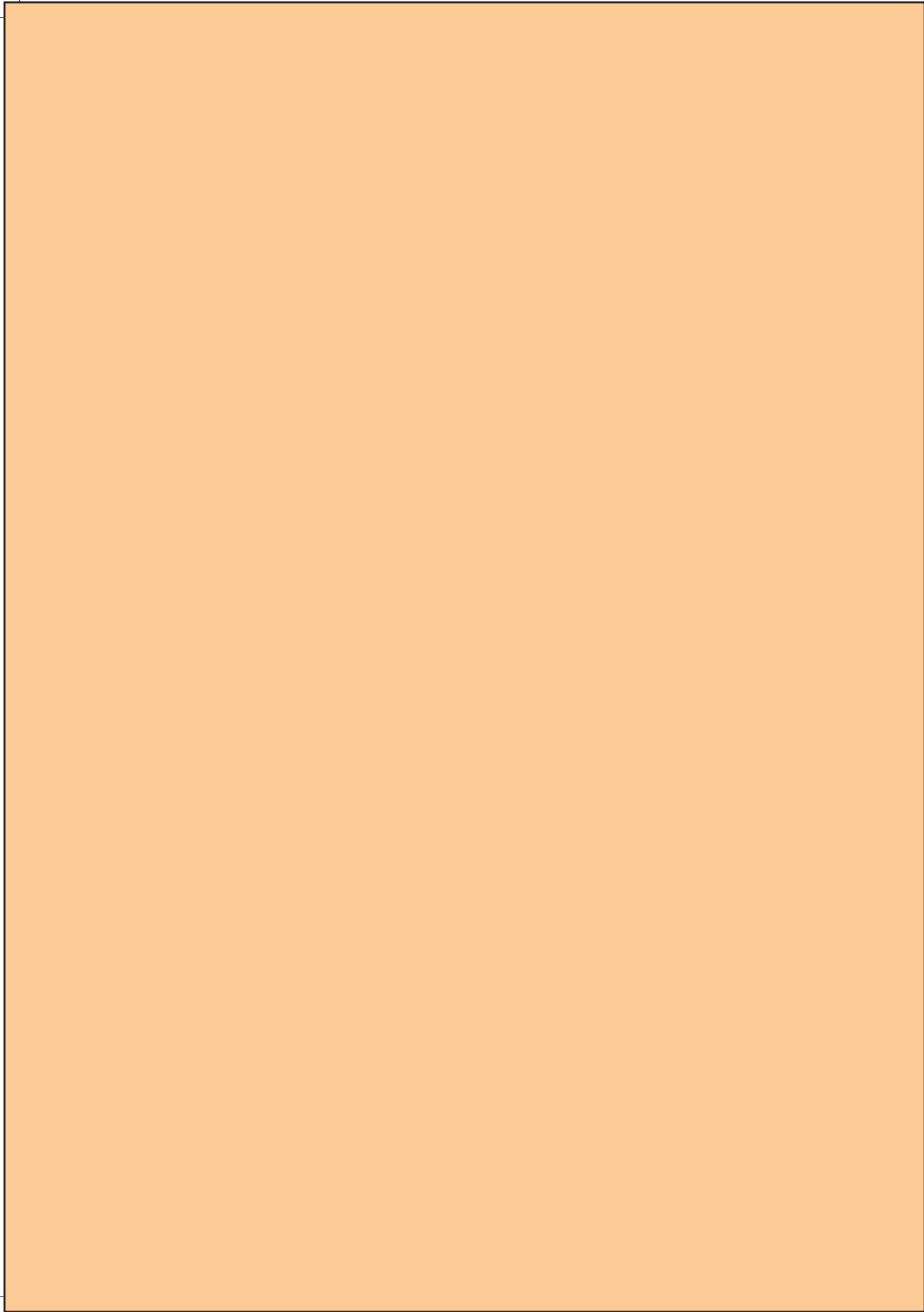
DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2013. *Statistik Pendidikan 2012*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Proyeksi Penduduk Indonesia (Indonesia Population Projection) 2010-2035*. Jakarta: BPS, BAPPENAS, UNFPA
- BPS. 2014. *Statistik Telekomunikasi Indonesia 2013*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik. 2015. *Statistik 70th Indonesia Merdeka*. Jakarta: BPS.
- Candra, P.A. 2013. *Penggunaan Internet pada Anak-anak Sekolah Usia 6-12 Tahun di Surabaya*. <http://journal.unair.ac.id>. Diakses tanggal 2 Oktober 2015.
- Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Pusat Statistik
. 2012. *Profil Anak Indonesia 2012*, Jakarta: Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. 2014. Siaran Pers Tentang Riset Kominfo dan UNICEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet. <http://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3834/Siaran+Pers+No.+17-PIH-KOMINFO-2-2014>. Diakses tanggal 05 Oktober 2015.
- Pribadi, Deny S. 2007. *Kajian Hak Asasi Manusia Untuk Meningkatkan Pemenuhan Ha Anak Atas Pendidikan*. Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman.
- Sukma, F. B. Bayon. 2009. *Pentingnya Pendidikan Pada Anak Usia Dini di Indonesia*. <http://id.scribd.com/doc/62875662/Makalah-Bahasa-Indonesia-Keilmuan#scribd>. Diakses tanggal 31 Agustus 2015.
- Sutiasnah, R.A. 2015. *Faktor-Faktor Penyebab Anak Putus Sekolah (Studi Madrasah Ibtidayah (MI) Dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) NurulWathan Pusaran 8 Kecamatan Enok Kabupaten Indragiri Hilir)*. Jom Fisip Vol. 2 No. 1 Februari 2015
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Lampiran



***Struktur Pendidikan
Usia 0-17 Tahun***



Tabel L-2.1 Rasio Ketergantungan dan Momen Bonus Demografi Menurut Provinsi

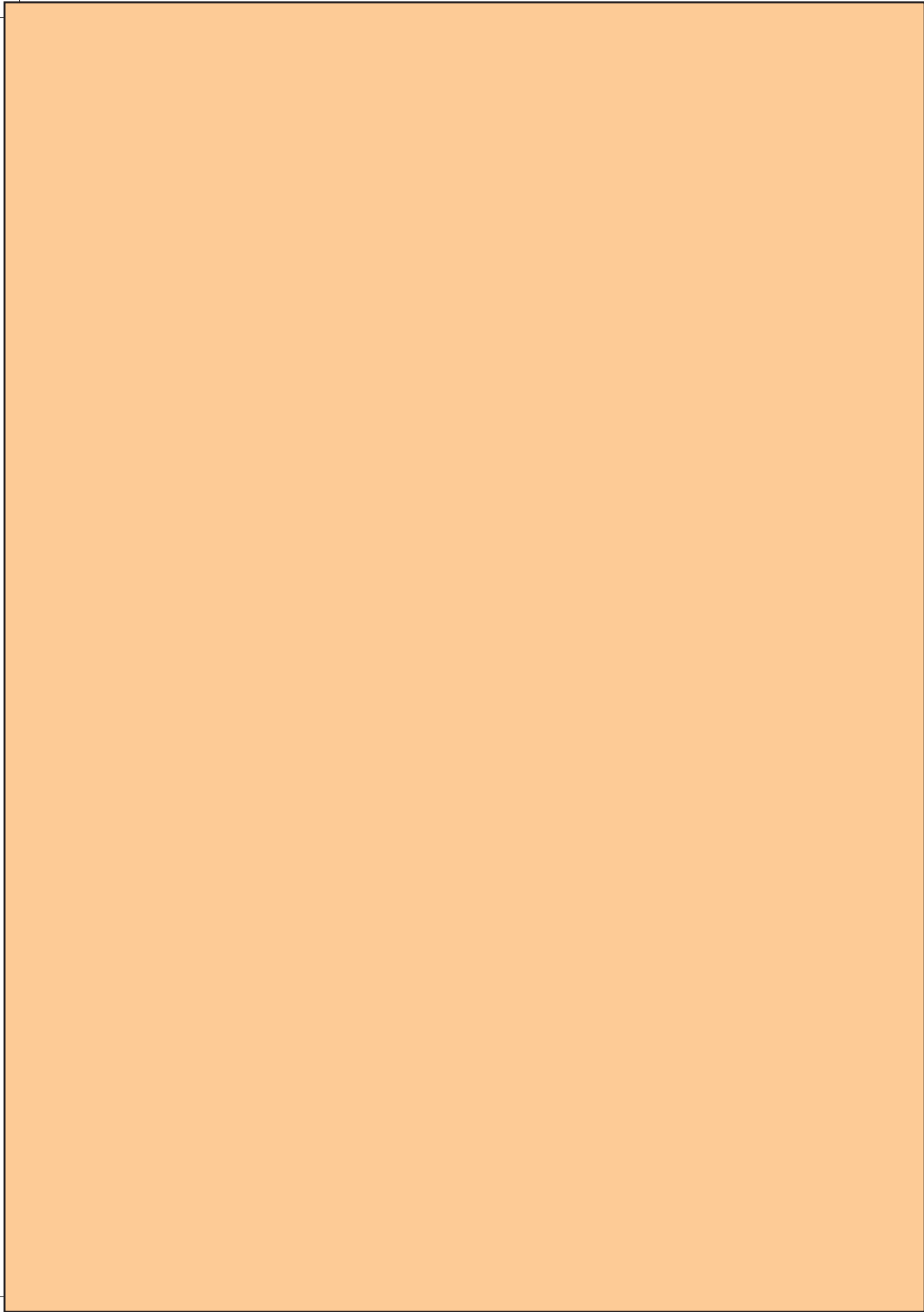
Provinsi	2010	2015	2020	2025	2030	2035	Momen Bonus Demografi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	56.3	54.7	53.5	50.9	48.0	45.9	2028
Sumatera Utara	58.0	56.4	55.3	53.6	51.6	50.8	-
Sumatera Barat	57.7	55.6	54.7	53.6	51.9	50.5	-
Riau	54.1	51.6	49.7	48.4	47.0	46.5	2021
Jambi	50.7	47.3	44.6	43.2	42.5	42.6	2012
Sumatera Selatan	51.3	49.6	48.4	47.3	45.9	45.4	2016
Bengkulu	51.3	47.9	46.0	45.1	44.5	44.4	2013
Lampung	51.2	49.6	48.6	47.2	45.6	45.4	2016
Kep. Bangka Belitung	48.7	46.1	44.9	44.2	43.4	43.1	2005
Kepulauan Riau	46.8	49.6	46.4	41.8	38.2	38.0	2008
DKI Jakarta	37.4	39.8	41.9	42.2	40.2	39.6	1980an
Jawa Barat	50.0	47.6	46.6	46.3	46.2	46.8	2011
Jawa Tengah	49.9	48.1	47.7	48.4	49.9	51.7	2012
DI Yogyakarta	45.9	45.0	45.4	46.8	47.7	48.4	1996
Jawa Timur	46.1	44.2	43.7	44.4	46.1	48.3	1998
Banten	48.6	46.4	45.4	43.8	41.7	41.0	2007
Bali	47.2	45.6	43.4	42.2	43.2	45.8	1990an
Nusa Tenggara Barat	55.6	53.7	52.2	50.3	48.6	48.0	2027
Nusa Tenggara Timur	70.6	66.7	63.5	61.8	61.7	61.5	-
Kalimantan Barat	52.6	50.9	49.8	48.8	47.3	46.6	2022
Kalimantan Tengah	50.3	46.2	43.4	41.6	40.3	39.9	2011
Kalimantan Selatan	49.2	48.7	47.7	46.2	44.6	44.7	2006
Kalimantan Timur	48.7	46.2	44.5	43.7	43.0	43.3	2005
Sulawesi Utara	48.0	46.6	46.3	46.9	47.3	48.4	2000
Sulawesi Tengah	52.5	50.4	49.7	49.4	48.4	48.6	2025
Sulawesi Selatan	56.0	52.9	51.3	50.4	49.6	49.6	2030
Sulawesi Tenggara	63.5	60.4	58.0	54.6	52.7	51.7	-
Gorontalo	51.8	48.6	47.6	47.6	47.7	47.8	2014
Sulawesi Barat	60.4	56.0	53.9	52.7	51.5	51.0	-
Maluku	63.1	59.8	58.1	57.4	55.9	54.3	-
Maluku Utara	61.1	58.7	56.0	53.5	51.6	50.8	-
Papua Barat	53.7	49.9	47.1	45.5	44.4	43.6	2016
Papua	53.7	47.5	43.8	41.9	41.6	42.4	2014
Indonesia	50.5	48.6	47.7	47.2	46.9	47.3	2013

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035, BPS

Momen Bonus Demografi: Kondisi ketika rasio beban ketergantungan dibawah 50 persen



HAK
Sipil dan Kebebasan



Tabel L-3.1 Proporsi Anak Usia 0-17 Tahun Menurut Provinsi dan Kepemilikan Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil, 2014

Provinsi	Kepemilikan akte kelahiran				Total
	Ya, ditunjukkan	Ya, tidak dapat ditunjukkan	Tidak punya	Tidak tahu	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	54,65	24,10	20,90	0,35	100,00
Sumatera Utara	44,93	18,78	35,62	0,67	100,00
Sumatera Barat	52,56	18,93	27,98	0,53	100,00
Riau	57,83	15,79	25,72	0,65	100,00
Jambi	71,80	15,21	12,70	0,29	100,00
Sumatera Selatan	55,84	26,28	17,42	0,46	100,00
Bengkulu	57,96	24,80	16,56	0,68	100,00
Lampung	57,50	21,61	20,16	0,73	100,00
Kep. Bangka Belitung	75,10	15,97	8,47	0,46	100,00
Kepulauan Riau	67,79	26,89	4,93	0,39	100,00
DKI Jakarta	55,28	38,68	5,86	0,18	100,00
Jawa Barat	51,22	22,84	25,39	0,54	100,00
Jawa Tengah	68,87	20,28	10,64	0,21	100,00
DI Yogyakarta	70,38	26,69	2,94	0,00	100,00
Jawa Timur	67,25	16,86	15,52	0,37	100,00
Banten	45,24	22,73	31,49	0,55	100,00
Bali	49,76	30,53	19,45	0,27	100,00
Nusa Tenggara Barat	41,66	22,18	35,42	0,74	100,00
Nusa Tenggara Timur	30,37	23,30	45,24	1,08	100,00
Kalimantan Barat	62,18	18,70	18,65	0,47	100,00
Kalimantan Tengah	55,24	21,27	23,14	0,34	100,00
Kalimantan Selatan	68,95	15,68	14,99	0,38	100,00
Kalimantan Timur	58,30	33,62	7,83	0,24	100,00
Sulawesi Utara	49,46	31,27	18,98	0,29	100,00
Sulawesi Tengah	36,77	27,24	35,18	0,81	100,00
Sulawesi Selatan	53,83	27,75	17,75	0,68	100,00
Sulawesi Tenggara	48,74	21,84	28,95	0,47	100,00
Gorontalo	61,91	17,77	20,03	0,29	100,00
Sulawesi Barat	51,56	19,55	28,32	0,57	100,00
Maluku	49,74	20,38	29,45	0,44	100,00
Maluku Utara	43,33	23,14	33,10	0,42	100,00
Papua Barat	25,15	40,05	34,45	0,36	100,00
Papua	17,64	19,42	56,17	6,77	100,00
Indonesia	55,61	22,11	21,72	0,56	100,00

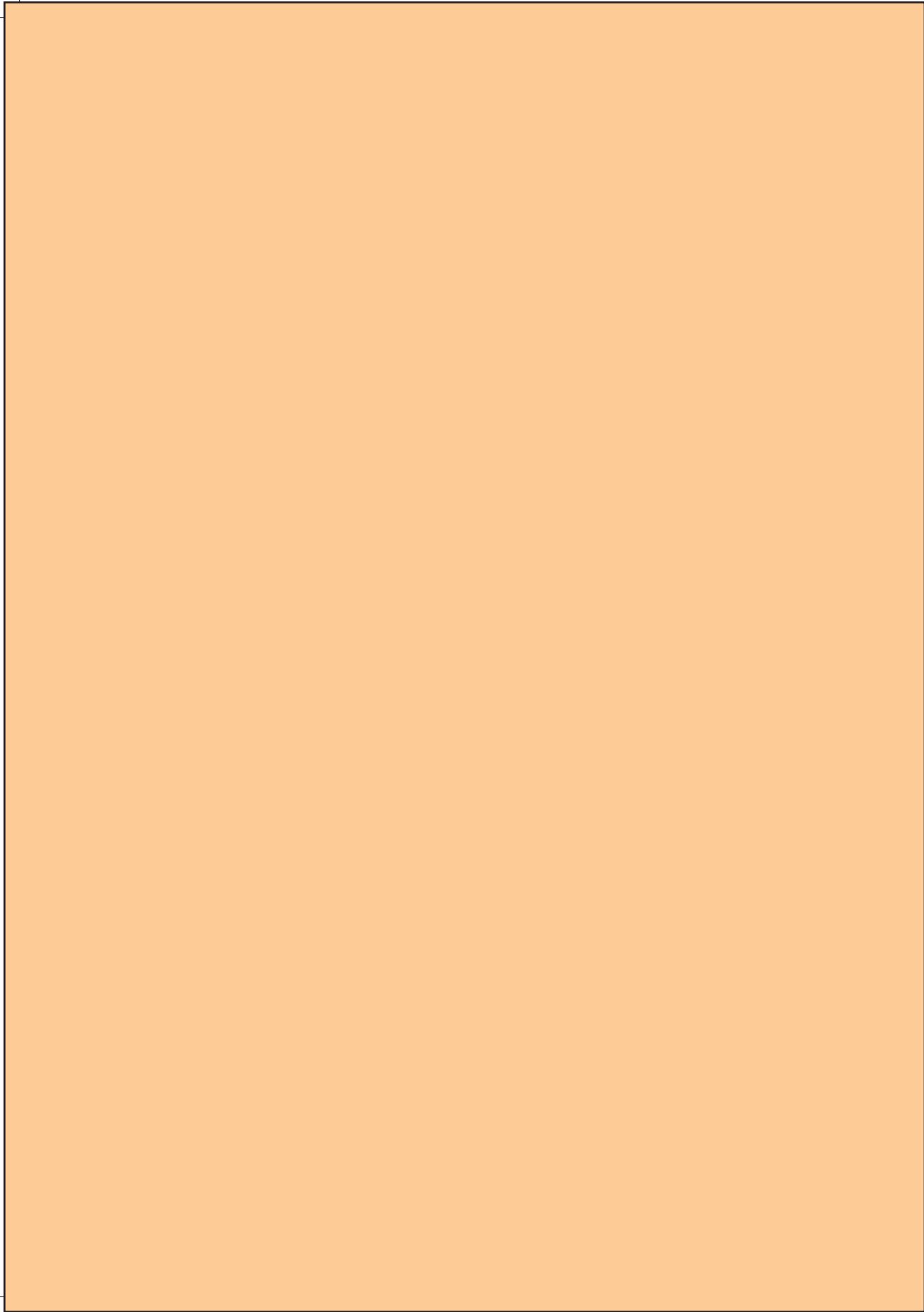
Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-3.2 Proporsi Anak Usia 0-17 Tahun Alasan Tidak Memiliki Akte Kelahiran, 2014

Provinsi	Biaya mahal /tidak ada biaya	Perjalanan jauh	Tidak tahu kelahiran harus dicatat	Tidak tahu cara mengurusnya	Tidak merasa perlu	Lainnya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Aceh	29,74	9,04	2,99	6,57	10,01	41,64	100,00
Sumatera Utara	44,23	4,17	2,20	7,27	10,76	31,37	100,00
Sumatera Barat	25,31	11,89	2,12	10,01	12,37	38,30	100,00
Riau	35,67	5,11	1,49	9,23	5,71	42,79	100,00
Jambi	26,71	7,16	2,71	15,20	9,72	38,49	100,00
Sumatera Selatan	37,58	4,85	2,54	12,80	9,38	32,85	100,00
Bengkulu	30,22	5,97	1,72	5,35	5,75	50,99	100,00
Lampung	53,04	4,19	1,14	6,35	5,30	29,98	100,00
Kep. Bangka Belitung	30,84	4,30	0,24	10,94	4,51	49,18	100,00
Kepulauan Riau	14,37	0,94	3,76	7,85	4,38	68,69	100,00
DKI Jakarta	38,04	1,27	2,18	8,74	3,84	45,93	100,00
Jawa Barat	57,10	2,72	3,13	6,72	6,37	23,96	100,00
Jawa Tengah	46,69	3,42	1,77	6,79	4,20	37,13	100,00
DI Yogyakarta	23,29	4,01	2,15	6,31	4,40	59,84	100,00
Jawa Timur	42,52	2,07	2,66	11,33	8,48	32,94	100,00
Banten	62,08	1,48	2,51	6,83	7,27	19,84	100,00
Bali	26,04	4,63	2,84	12,02	7,60	46,87	100,00
Nusa Tenggara Barat	36,70	3,02	2,93	12,28	6,89	38,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	22,58	6,42	1,93	12,20	4,42	52,46	100,00
Kalimantan Barat	30,73	9,12	2,66	7,27	9,88	40,34	100,00
Kalimantan Tengah	32,75	11,87	2,02	10,55	6,30	36,50	100,00
Kalimantan Selatan	26,04	5,41	2,02	12,35	10,28	43,89	100,00
Kalimantan Timur	15,55	11,06	1,16	17,69	5,79	48,76	100,00
Sulawesi Utara	24,48	5,33	0,87	6,04	5,09	58,19	100,00
Sulawesi Tengah	24,86	6,10	1,31	9,96	6,48	51,29	100,00
Sulawesi Selatan	16,32	7,01	4,73	14,18	10,76	47,00	100,00
Sulawesi Tenggara	29,05	8,57	1,29	13,23	5,80	42,06	100,00
Gorontalo	20,55	13,60	0,51	6,38	5,05	53,91	100,00
Sulawesi Barat	34,88	7,83	1,82	10,62	3,33	41,53	100,00
Maluku	10,90	16,98	0,87	10,68	9,68	50,90	100,00
Maluku Utara	14,24	27,85	1,01	12,26	12,44	32,20	100,00
Papua Barat	4,81	17,47	1,60	14,74	7,60	53,78	100,00
Papua	2,91	8,61	23,13	35,15	7,88	22,32	100,00
Indonesia	40,13	4,97	3,27	10,06	7,48	34,09	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

***Pengasuh Alternatif
dan Perkawinan
Usia Dini***



Tabel L- 4.1.1 **Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014**

Provinsi	Perkotaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	17,42	18,99	18,20
Sumatera Utara	14,42	13,64	14,05
Sumatera Barat	12,95	13,82	13,37
Riau	12,76	11,90	12,34
Jambi	13,78	13,74	13,76
Sumatera Selatan	10,77	14,85	12,85
Bengkulu	13,36	12,45	12,92
Lampung	15,19	14,35	14,77
Kepulauan Bangka Belitung	15,70	12,59	14,19
Kepulauan Riau	13,57	15,35	14,47
DKI Jakarta	19,88	25,15	22,40
Jawa Barat	18,53	19,69	19,09
Jawa Tengah	26,27	26,35	26,31
DI Yogyakarta	38,63	42,06	40,24
Jawa Timur	30,80	32,20	31,49
Banten	16,84	15,20	16,04
Bali	15,66	18,05	16,82
Nusa Tenggara Barat	19,50	16,90	18,22
Nusa Tenggara Timur	17,85	20,11	19,00
Kalimantan Barat	12,08	14,76	13,42
Kalimantan Tengah	18,52	16,17	17,32
Kalimantan Selatan	22,10	20,62	21,36
Kalimantan Timur	16,45	15,59	16,02
Sulawesi Utara	12,30	9,57	10,94
Sulawesi Tengah	18,66	23,60	21,13
Sulawesi Selatan	13,48	15,97	14,69
Sulawesi Tenggara	14,48	9,98	12,29
Gorontalo	23,30	29,70	26,51
Sulawesi Barat	19,35	22,84	21,06
Maluku	10,22	12,87	11,48
Maluku Utara	11,56	9,70	10,68
Papua Barat	12,13	14,24	13,13
Papua	11,66	10,00	10,88
Indonesia	19,97	20,88	20,41

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 4.1.2 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perdesaan
			Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	11,85	11,03	11,45
Sumatera Utara	9,00	10,36	9,67
Sumatera Barat	10,28	12,43	11,33
Riau	10,96	10,53	10,75
Jambi	10,74	11,55	11,14
Sumatera Selatan	9,27	9,58	9,42
Bengkulu	9,65	9,10	9,38
Lampung	12,49	13,58	13,02
Kepulauan Bangka Belitung	15,38	14,44	14,92
Kepulauan Riau	13,45	14,76	14,14
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	12,92	14,04	13,47
Jawa Tengah	20,91	20,65	20,78
DI Yogyakarta	39,61	44,68	42,08
Jawa Timur	27,73	26,18	26,97
Banten	7,65	10,72	9,17
Bali	11,00	9,11	10,09
Nusa Tenggara Barat	15,83	16,88	16,36
Nusa Tenggara Timur	10,14	12,82	11,45
Kalimantan Barat	5,37	4,35	4,87
Kalimantan Tengah	15,73	15,18	15,46
Kalimantan Selatan	23,74	23,36	23,55
Kalimantan Timur	16,45	12,13	14,32
Sulawesi Utara	12,28	12,50	12,39
Sulawesi Tengah	18,33	17,49	17,92
Sulawesi Selatan	12,66	13,84	13,24
Sulawesi Tenggara	12,31	11,40	11,87
Gorontalo	27,30	26,51	26,91
Sulawesi Barat	14,62	17,04	15,78
Maluku	7,54	10,82	9,10
Maluku Utara	11,26	12,14	11,68
Papua Barat	11,31	12,13	11,71
Papua	2,99	4,74	3,81
Indonesia	15,16	15,53	15,34

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 4.1.3 Persentase Anak Usia 0-6 Tahun yang Sedang Mengikuti PAUD menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	13,42	13,28	13,35
Sumatera Utara	11,53	11,83	11,68
Sumatera Barat	11,29	12,95	12,10
Riau	11,64	11,06	11,36
Jambi	11,66	12,22	11,94
Sumatera Selatan	9,78	11,49	10,63
Bengkulu	10,79	10,14	10,48
Lampung	13,15	13,78	13,46
Kepulauan Bangka Belitung	15,54	13,54	14,56
Kepulauan Riau	13,55	15,26	14,42
DKI Jakarta	19,88	25,15	22,40
Jawa Barat	16,66	17,80	17,22
Jawa Tengah	23,36	23,24	23,30
DI Yogyakarta	38,96	42,98	40,87
Jawa Timur	29,22	29,11	29,17
Banten	13,83	13,70	13,76
Bali	13,88	14,64	14,25
Nusa Tenggara Barat	17,38	16,88	17,13
Nusa Tenggara Timur	11,51	14,19	12,84
Kalimantan Barat	7,36	7,48	7,42
Kalimantan Tengah	16,67	15,53	16,10
Kalimantan Selatan	23,07	22,25	22,66
Kalimantan Timur	16,45	14,29	15,38
Sulawesi Utara	12,29	11,18	11,73
Sulawesi Tengah	18,40	18,98	18,69
Sulawesi Selatan	12,96	14,61	13,77
Sulawesi Tenggara	12,89	11,03	11,98
Gorontalo	25,92	27,65	26,77
Sulawesi Barat	15,66	18,34	16,95
Maluku	8,49	11,55	9,94
Maluku Utara	11,34	11,51	11,42
Papua Barat	11,58	12,78	12,16
Papua	5,25	6,13	5,66
Indonesia	17,53	18,15	17,83

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 4.2 Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Berstatus Pernah Kawin Menurut Provinsi dan Tipe Daerah, 2014

Provinsi	Perkotaan	Perdesaan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	0.09	0.78	0.60
Sumatera Utara	0.53	0.59	0.56
Sumatera Barat	0.06	0.72	0.46
Riau	0.29	1.19	0.85
Jambi	0.00	1.79	1.25
Sumatera Selatan	1.13	2.45	2.00
Bengkulu	0.59	1.22	1.01
Lampung	1.06	1.15	1.13
Kep. Bangka Belitung	2.23	4.07	3.17
Kepulauan Riau	0.71	0.01	0.57
DKI Jakarta	0.71	0.00	0.71
Jawa Barat	1.07	2.90	1.70
Jawa Tengah	0.97	1.91	1.49
DI Yogyakarta	0.00	0.95	0.33
Jawa Timur	0.97	4.55	2.84
Banten	1.20	2.69	1.71
Bali	0.89	2.81	1.70
Nusa Tenggara Barat	0.24	1.54	1.00
Nusa Tenggara Timur	1.18	0.69	0.78
Kalimantan Barat	1.73	2.24	2.09
Kalimantan Tengah	2.08	2.40	2.29
Kalimantan Selatan	1.51	2.58	2.13
Kalimantan Timur	1.08	2.39	1.60
Sulawesi Utara	1.69	2.68	2.24
Sulawesi Tengah	1.06	2.96	2.51
Sulawesi Selatan	0.98	2.66	2.06
Sulawesi Tenggara	1.00	1.65	1.47
Gorontalo	1.35	2.04	1.81
Sulawesi Barat	0.00	1.99	1.52
Maluku	0.35	1.05	0.79
Maluku Utara	0.10	1.42	1.08
Papua Barat	0.68	1.75	1.42
Papua	0.90	0.96	0.95
Indonesia	0.92	2.24	1.60

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-4.3 Persentase Anak Perempuan 10-17 Menurut Provinsi dan Status Perkawinan, 2014

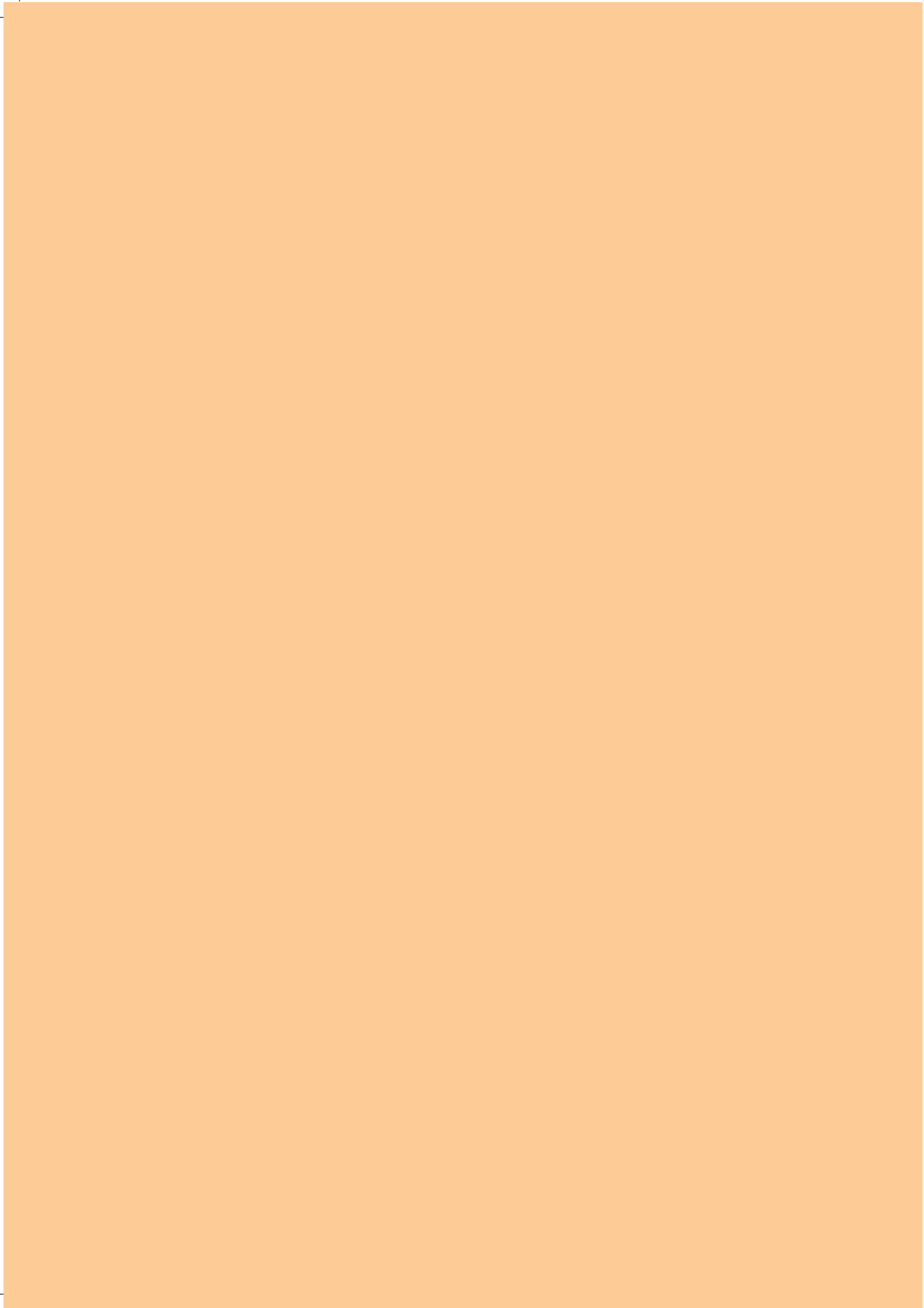
Provinsi	Belum kawin	Kawin	Cerai hidup	Cerai mati	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Aceh	99,40	0,57	0,00	0,03	100,00
Sumatera Utara	99,44	0,56	0,00	0,00	100,00
Sumatera Barat	99,54	0,42	0,04	0,00	100,00
Riau	99,15	0,81	0,04	0,00	100,00
Jambi	98,75	1,04	0,22	0,00	100,00
Sumatera Selatan	98,00	1,88	0,12	0,00	100,00
Bengkulu	98,99	0,98	0,04	0,00	100,00
Lampung	98,87	1,09	0,04	0,00	100,00
Kep. Bangka Belitung	96,83	2,94	0,23	0,00	100,00
Kepulauan Riau	99,43	0,57	0,00	0,00	100,00
DKI Jakarta	99,29	0,42	0,29	0,00	100,00
Jawa Barat	98,30	1,59	0,11	0,00	100,00
Jawa Tengah	98,51	1,46	0,02	0,01	100,00
DI Yogyakarta	99,67	0,33	0,00	0,00	100,00
Jawa Timur	97,16	2,83	0,02	0,00	100,00
Banten	98,29	1,59	0,12	0,00	100,00
Bali	98,30	1,66	0,04	0,00	100,00
Nusa Tenggara Barat	99,00	1,00	0,00	0,00	100,00
Nusa Tenggara Timur	99,22	0,74	0,04	0,00	100,00
Kalimantan Barat	97,91	2,05	0,04	0,00	100,00
Kalimantan Tengah	97,71	2,15	0,12	0,02	100,00
Kalimantan Selatan	97,87	1,82	0,32	0,00	100,00
Kalimantan Timur	98,40	1,56	0,04	0,00	100,00
Sulawesi Utara	97,76	2,04	0,21	0,00	100,00
Sulawesi Tengah	97,49	2,51	0,00	0,00	100,00
Sulawesi Selatan	97,94	1,88	0,18	0,00	100,00
Sulawesi Tenggara	98,53	1,40	0,07	0,00	100,00
Gorontalo	98,19	1,69	0,12	0,00	100,00
Sulawesi Barat	98,48	1,39	0,13	0,00	100,00
Maluku	99,21	0,70	0,09	0,00	100,00
Maluku Utara	98,92	0,94	0,15	0,00	100,00
Papua Barat	98,58	1,32	0,10	0,00	100,00
Papua	99,05	0,95	0,00	0,00	100,00
Indonesia	98,40	1,53	0,07	0,00	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-4.4 **Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun yang Berstatus Kawin dan Cerai Menurut Provinsi dan Umur Perkawinan Pertama, 2014**

Provinsi	Umur Perkawinan Pertama			Total
	<= 15 tahun	16 tahun	17 tahun	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	32,81	32,03	35,16	100,00
Sumatera Utara	10,66	45,68	43,66	100,00
Sumatera Barat	48,50	27,00	24,50	100,00
Riau	40,12	39,20	20,68	100,00
Jambi	38,82	36,52	24,65	100,00
Sumatera Selatan	41,98	27,48	30,55	100,00
Bengkulu	58,05	31,70	10,25	100,00
Lampung	19,75	35,24	45,01	100,00
Kep. Bangka Belitung	51,88	29,77	18,34	100,00
Kepulauan Riau	99,68	0,00	0,32	100,00
DKI Jakarta	43,36	40,87	15,76	100,00
Jawa Barat	35,59	37,07	27,34	100,00
Jawa Tengah	30,07	40,30	29,63	100,00
DI Yogyakarta	0,00	49,32	50,68	100,00
Jawa Timur	31,85	43,83	24,31	100,00
Banten	41,35	35,87	22,77	100,00
Bali	37,04	44,10	18,86	100,00
Nusa Tenggara Barat	26,06	35,74	38,20	100,00
Nusa Tenggara Timur	42,66	46,67	10,67	100,00
Kalimantan Barat	36,76	50,93	12,31	100,00
Kalimantan Tengah	62,00	21,55	16,46	100,00
Kalimantan Selatan	42,52	34,56	22,92	100,00
Kalimantan Timur	27,47	55,59	16,94	100,00
Sulawesi Utara	37,48	47,65	14,87	100,00
Sulawesi Tengah	45,91	35,41	18,69	100,00
Sulawesi Selatan	53,49	34,91	11,60	100,00
Sulawesi Tenggara	13,22	56,43	30,35	100,00
Gorontalo	41,73	15,89	42,39	100,00
Sulawesi Barat	24,79	47,45	27,76	100,00
Maluku	52,60	31,23	16,17	100,00
Maluku Utara	59,54	35,71	4,75	100,00
Papua Barat	10,47	70,33	19,21	100,00
Papua	52,66	44,87	2,47	100,00

Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan



Provinsi	Penolong Kelahiran							Total
	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun	Famili/ Keluarga	Lainnya	TT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	10,79	79,77	0,89	8,17	0,35	0,02	-	100,00
Sumatera Utara	11,74	76,26	0,38	8,61	2,70	0,29	0,02	100,00
Sumatera Barat	18,76	72,82	0,41	7,75	0,26	-	-	100,00
R i a u	13,11	67,09	0,79	18,04	0,60	0,37	-	100,00
Kepulauan Riau	11,16	65,51	0,33	22,62	0,30	0,08	-	100,00
J a m b i	10,70	72,49	0,23	16,26	0,31	0,01	-	100,00
Sumatera Selatan	10,66	75,48	0,38	12,21	1,00	0,28	-	100,00
Kep Bangka Belitung	9,58	75,05	0,32	14,67	0,35	0,03	-	100,00
Bengkulu	15,11	71,82	0,34	12,72	-	-	-	100,00
Lampung	23,76	60,80	0,95	14,41	-	0,08	-	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	7,93	63,39	0,42	28,14	0,12	-	-	100,00
Banten	18,14	75,92	0,38	5,52	0,02	0,01	-	100,00
Jawa Tengah	33,36	66,07	0,10	0,29	0,18	-	-	100,00
DI Yogyakarta	17,75	73,40	0,10	8,60	0,08	0,07	0,01	100,00
Jawa Timur	3,74	52,01	0,09	43,99	0,18	-	-	100,00
B a l i	35,57	61,32	-	1,71	1,40	-	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	7,11	78,75	0,61	13,07	0,45	-	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	10,25	53,29	0,94	26,72	8,48	0,31	-	100,00
Kalimantan Barat	7,77	58,27	1,67	31,64	0,38	0,28	-	100,00
Kalimantan Tengah	6,04	65,30	1,31	26,84	0,38	0,13	-	100,00
Kalimantan Selatan	12,03	69,22	0,49	17,76	0,36	0,14	-	100,00
Kalimantan Timur	18,20	67,49	1,22	12,49	0,50	0,10	-	100,00
Sulawesi Utara	30,54	51,95	2,00	14,66	0,32	0,52	-	100,00
Gorontalo	10,58	56,93	1,57	26,79	3,51	0,62	-	100,00
Sulawesi Tengah	9,73	65,87	0,71	20,08	3,48	0,13	-	100,00
Sulawesi Selatan	5,87	53,25	0,69	38,95	1,19	0,05	-	100,00
Sulawesi Barat	15,90	45,40	1,36	36,73	0,43	0,08	0,10	100,00
Sulawesi Tenggara	6,53	53,40	0,38	35,79	3,67	0,24	-	100,00
Maluku	3,15	38,90	0,27	55,16	1,22	1,30	-	100,00
Maluku Utara	6,08	42,11	1,27	47,62	2,06	0,85	-	100,00
Papua Barat	5,51	28,59	2,82	18,12	44,04	0,93	-	100,00
Papua	13,98	46,83	5,25	19,12	14,22	0,60	-	100,00
Indonesia	12,65	67,40	0,57	17,48	1,76	0,14	0,002	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.1.3 Persentase Balita Menurut Provinsi dan Penolong Kelahiran Terakhir, 2014

Perkotaan+Perdesaan								
Provinsi	Penolong Kelahiran							Total
	Dokter	Bidan	Tenaga Kesehatan Lainnya	Dukun	Famili/ Keluarga	Lainnya	TT	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	15,21	77,74	0,67	6,07	0,30	0,01	-	100,00
Sumatera Utara	18,01	74,46	0,64	5,10	1,56	0,22	0,01	100,00
Sumatera Barat	24,67	69,15	0,44	5,39	0,30	0,05	-	100,00
R i a u	21,09	65,65	0,67	11,87	0,48	0,24	-	100,00
Kepulauan Riau	14,97	67,73	0,23	16,74	0,27	0,05	-	100,00
J a m b i	18,69	69,40	0,41	11,30	0,20	0,00	-	100,00
Sumatera Selatan	16,57	72,93	0,51	9,01	0,79	0,19	-	100,00
Kep Bangka Belitung	11,75	75,66	0,34	11,97	0,26	0,02	-	100,00
Bengkulu	21,59	69,83	0,22	8,21	-	0,15	-	100,00
Lampung	44,31	52,66	0,31	2,43	0,24	0,04	-	100,00
DKI Jakarta	41,97	56,07	0,47	1,01	-	0,47	-	100,00
Jawa Barat	17,80	63,66	0,33	18,00	0,20	0,01	-	100,00
Banten	23,26	71,87	0,33	4,47	0,06	0,01	-	100,00
Jawa Tengah	41,08	58,58	0,18	0,10	0,06	-	-	100,00
DI Yogyakarta	24,27	69,92	0,10	5,52	0,13	0,06	0,00	100,00
Jawa Timur	21,26	57,81	0,33	20,39	0,20	-	-	100,00
B a l i	45,08	52,53	0,75	1,01	0,64	-	-	100,00
Nusa Tenggara Barat	11,33	77,32	0,57	10,51	0,27	-	-	100,00
Nusa Tenggara Timur	13,50	54,16	0,94	23,44	7,66	0,28	0,03	100,00
Kalimantan Barat	12,81	61,28	1,19	24,17	0,35	0,20	-	100,00
Kalimantan Tengah	10,48	65,72	1,17	22,12	0,43	0,08	-	100,00
Kalimantan Selatan	16,30	70,18	0,57	12,66	0,21	0,08	-	100,00
Kalimantan Timur	26,39	64,87	1,01	7,26	0,43	0,04	-	100,00
Sulawesi Utara	39,37	48,12	1,45	10,40	0,24	0,42	-	100,00
Gorontalo	14,89	57,60	1,45	22,87	2,73	0,47	-	100,00
Sulawesi Tengah	18,55	63,33	0,62	14,89	2,43	0,18	-	100,00
Sulawesi Selatan	8,41	57,02	0,75	32,66	1,08	0,08	-	100,00
Sulawesi Barat	26,36	42,79	1,10	28,82	0,56	0,18	0,19	100,00
Sulawesi Tenggara	9,66	54,72	0,36	32,01	3,07	0,18	-	100,00
Maluku	6,59	49,22	0,30	41,92	1,13	0,84	-	100,00
Maluku Utara	13,52	45,01	0,93	37,82	2,10	0,62	-	100,00
Papua Barat	12,42	38,25	3,27	13,32	32,07	0,68	-	100,00
Papua	17,80	51,84	3,64	15,43	10,88	0,41	-	100,00
Indonesia	20,95	65,64	0,50	11,78	1,03	0,11	0,002	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.2 Proporsi Balita yang Pernah Diberi ASI Terhadap Total Balita Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
Aceh	94,19	94,16	94,17	95,45	97,34	96,40	95,10	96,48	95,79
Sumatera Utara	88,69	89,91	89,28	93,60	95,50	94,54	91,29	92,92	92,09
Sumatera Barat	98,19	96,40	97,31	97,42	97,61	97,51	97,71	97,14	97,43
Riau	90,31	93,73	92,02	92,17	94,11	93,14	91,45	93,97	92,71
Kepulauan Riau	92,97	93,13	93,05	95,38	97,49	96,43	94,64	96,17	95,41
Jambi	89,86	92,88	91,37	93,39	95,09	94,23	92,14	94,30	93,21
Sumatera Selatan	95,78	97,06	96,38	96,10	96,38	96,23	96,00	96,58	96,28
Kep Bangka Belitung	94,32	89,21	91,80	96,70	96,31	96,51	96,11	94,55	95,35
Bengkulu	84,69	86,18	85,46	90,69	91,42	91,05	87,86	88,81	88,34
Lampung	87,06	88,91	88,00	75,09	80,51	77,92	85,51	87,76	86,66
DKI Jakarta	95,29	94,39	94,88	-	-	-	95,29	94,39	94,88
Jawa Barat	94,43	95,02	94,72	96,73	94,54	95,66	95,21	94,86	95,04
Banten	93,32	94,86	94,06	96,83	97,21	97,02	95,22	96,16	95,68
Jawa Tengah	97,97	94,13	96,25	99,10	99,15	99,12	98,35	95,90	97,24
DI Yogyakarta	91,21	91,87	91,53	94,48	94,67	94,58	92,88	93,33	93,10
Jawa Timur	92,78	91,48	92,12	95,68	96,63	96,16	93,75	93,19	93,47
Bali	90,34	93,01	91,57	96,26	95,36	95,80	92,39	93,94	93,14
Nusa Tenggara Barat	98,82	98,49	98,66	98,37	98,42	98,40	98,57	98,45	98,51
Nusa Tenggara Timur	93,50	95,68	94,63	97,83	98,71	98,26	97,07	98,13	97,59
Kalimantan Barat	86,91	86,90	86,91	93,90	93,22	93,56	91,81	91,31	91,56
Kalimantan Tengah	89,36	92,32	90,91	92,32	94,19	93,23	91,29	93,48	92,39
Kalimantan Selatan	94,89	94,08	94,48	93,31	94,90	94,14	93,98	94,56	94,28
Kalimantan Timur	89,78	89,59	89,69	92,32	94,88	93,61	90,76	91,64	91,20
Sulawesi Utara	84,44	85,75	85,09	91,11	92,81	91,94	88,20	89,68	88,92
Gorontalo	89,67	87,14	88,42	90,97	93,76	92,35	90,65	92,16	91,40
Sulawesi Tengah	90,33	91,50	90,90	95,27	96,26	95,75	93,51	94,54	94,01
Sulawesi Selatan	91,46	94,33	92,95	94,66	94,47	94,56	93,84	94,43	94,14
Sulawesi Barat	90,74	92,54	91,61	90,22	95,05	92,55	90,41	94,16	92,22
Sulawesi Tenggara	94,81	95,56	95,19	96,95	94,76	95,90	96,51	94,94	95,75
Maluku	90,43	91,20	90,80	95,04	95,67	95,34	93,41	94,07	93,72
Maluku Utara	93,74	93,44	93,59	95,52	95,86	95,68	95,05	95,20	95,12
Papua Barat	87,84	87,18	87,52	92,96	93,63	93,28	91,48	91,72	91,60
Papua	84,77	79,92	82,45	90,72	91,70	91,19	88,83	87,98	88,43
Total	92,73	93,12	92,92	95,23	95,65	95,44	93,99	94,41	94,20

Sumber: BPS - Susenas 2014

Catatan : L=Laki-Laki, P=Perempuan

Tabel L-5.3 Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Menurut Provinsi, Tipe Daerah dan jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)	(10)	(11)
Aceh	17,05	16,23	16,64	16,43	15,97	16,19	16,60	16,04	16,31
Sumatera Utara	14,42	14,21	14,32	14,56	14,67	14,62	14,50	14,46	14,48
Sumatera Barat	16,03	16,51	16,27	16,65	16,40	16,53	16,42	16,44	16,43
R i a u	15,50	15,55	15,52	16,09	15,69	15,89	15,87	15,63	15,75
Kepulauan Riau	15,68	14,69	15,18	16,74	17,05	16,90	16,42	16,35	16,39
J a m b i	14,70	16,20	15,46	17,15	17,16	17,16	16,30	16,82	16,56
Sumatera Selatan	16,24	14,97	15,64	16,43	16,67	16,55	16,37	16,17	16,27
Kep Bangka Belitung	15,75	15,73	15,74	15,75	15,91	15,83	15,75	15,87	15,81
Bengkulu	12,87	13,06	12,97	13,10	14,20	13,64	12,99	13,65	13,32
Lampung	14,40	14,95	14,68	14,02	16,30	15,25	14,35	15,12	14,75
DKI Jakarta	13,81	14,73	14,22	-	-	-	13,81	14,73	14,22
Jawa Barat	16,99	16,84	16,91	17,82	17,49	17,66	17,27	17,06	17,17
Banten	16,52	16,44	16,48	17,36	17,78	17,57	16,98	17,19	17,08
Jawa Tengah	17,07	17,16	17,11	19,34	18,01	18,73	17,85	17,47	17,68
DI Yogyakarta	15,33	15,64	15,48	17,56	17,39	17,48	16,49	16,56	16,53
Jawa Timur	13,83	14,24	14,04	16,02	16,02	16,02	14,58	14,85	14,72
B a l i	14,56	14,60	14,58	16,02	14,76	15,37	15,09	14,67	14,88
Nusa Tenggara Barat	17,20	17,06	17,13	17,63	18,01	17,83	17,44	17,61	17,53
Nusa Tenggara Timur	15,60	15,39	15,49	16,11	16,36	16,23	16,03	16,18	16,10
Kalimantan Barat	13,53	15,54	14,53	19,35	18,62	18,99	17,70	17,73	17,72
Kalimantan Tengah	15,35	16,54	15,98	18,19	17,97	18,08	17,23	17,43	17,33
Kalimantan Selatan	15,71	16,04	15,87	16,27	17,19	16,75	16,03	16,72	16,39
Kalimantan Timur	14,36	15,07	14,72	16,98	15,71	16,33	15,39	15,33	15,36
Sulawesi Utara	12,82	14,08	13,45	14,00	14,97	14,48	13,51	14,60	14,05
Gorontalo	13,78	14,55	14,16	16,48	16,73	16,61	15,84	16,23	16,03
Sulawesi Tengah	14,44	13,27	13,87	15,76	16,08	15,92	15,30	15,10	15,20
Sulawesi Selatan	14,94	16,32	15,67	15,59	15,70	15,64	15,42	15,87	15,65
Sulawesi Barat	13,87	14,84	14,34	16,70	16,46	16,58	15,70	15,89	15,79
Sulawesi Tenggara	15,49	17,20	16,37	16,87	16,70	16,79	16,59	16,82	16,70
Maluku	12,47	12,30	12,39	13,78	14,07	13,92	13,33	13,45	13,39
Maluku Utara	12,79	14,05	13,41	15,11	15,28	15,19	14,50	14,95	14,72
Papua Barat	14,07	14,78	14,42	17,80	17,06	17,44	16,77	16,42	16,60
Papua	13,52	15,29	14,34	15,37	15,33	15,35	14,81	15,32	15,05
Total	15,54	15,71	15,62	16,77	16,76	16,76	16,17	16,25	16,21

Sumber: BPS - Susenas 2014

Catatan : L=Laki-Laki, P=Perempuan

Tabel L-5.4 Rata-Rata Lama Pemberian ASI (Bulan) Tanpa Makanan Tambahan dan Dengan Makanan Tambahan menurut Provinsi dan Tipe Daerah

Provinsi	ASI tanpa Makanan Tambahan			ASI dengan Makanan Tambahan		
	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+ Perdesaan	Perkotaan	Perdesaan	Perkotaan+P erdesaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4,38	3,67	3,86	12,27	12,53	12,46
Sumatera Utara	3,80	4,23	4,04	10,51	10,38	10,44
Sumatera Barat	5,06	4,95	4,99	11,20	11,58	11,44
Riau	4,46	4,34	4,39	11,07	11,54	11,36
Jambi	4,42	4,58	4,54	10,77	12,31	11,85
Sumatera Selatan	4,18	4,99	4,71	11,28	12,17	11,86
Bengkulu	4,84	4,93	4,90	10,80	11,62	11,37
Lampung	4,53	4,31	4,36	11,21	11,52	11,45
Kep. Bangka Belitung	4,20	4,09	4,15	8,76	9,54	9,18
Kepulauan Riau	5,08	4,42	5,00	9,60	10,83	9,75
DKI Jakarta	4,55	.	4,55	9,67	.	9,67
Jawa Barat	4,83	4,72	4,79	12,08	12,94	12,37
Jawa Tengah	3,78	3,89	3,84	12,70	13,68	13,24
DI Yogyakarta	4,59	5,26	4,83	12,52	13,47	12,85
Jawa Timur	4,16	3,99	4,07	11,32	13,49	12,45
Banten	4,56	3,98	4,36	9,48	12,05	10,36
Bali	3,80	3,50	3,69	10,78	11,87	11,20
Nusa Tenggara Barat	5,21	5,71	5,49	11,92	12,12	12,03
Nusa Tenggara Timur	5,07	5,29	5,25	10,42	10,94	10,85
Kalimantan Barat	3,89	4,44	4,28	10,64	14,55	13,43
Kalimantan Tengah	5,01	5,01	5,01	10,98	13,08	12,32
Kalimantan Selatan	4,60	4,04	4,28	11,27	12,71	12,11
Kalimantan Timur	4,61	4,70	4,64	10,11	11,63	10,71
Sulawesi Utara	4,48	5,11	4,84	8,97	9,37	9,20
Sulawesi Tengah	3,63	3,92	3,85	10,53	12,69	12,19
Sulawesi Selatan	4,83	5,57	5,32	9,03	10,34	9,89
Sulawesi Tenggara	4,21	4,48	4,41	11,45	11,16	11,24
Gorontalo	3,46	3,65	3,58	10,89	12,93	12,21
Sulawesi Barat	4,87	4,89	4,88	11,50	11,91	11,82
Maluku	4,43	4,86	4,71	7,96	9,05	8,68
Maluku Utara	4,87	4,63	4,69	8,54	10,56	10,03
Papua Barat	4,20	4,98	4,75	10,14	10,37	10,30
Papua	5,22	5,26	5,25	9,19	12,18	11,35
Indonesia	4,45	4,45	4,45	11,18	12,31	11,76

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.5 Persentase Anak Berumur 2-4 Tahun yang Diberi ASI Saja Selama 6 Bulan Lebih Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	52,70	44,59	48,74	37,08	34,90	35,97	41,38	37,42	39,39
Sumatera Utara	36,51	40,35	38,33	43,16	42,82	42,98	39,94	41,72	40,82
Sumatera Barat	58,83	59,10	58,97	53,54	53,79	53,66	55,35	55,83	55,58
Riau	46,77	49,20	48,02	46,49	42,40	44,43	46,60	45,03	45,80
Kepulauan Riau	48,98	47,29	48,16	44,57	45,09	44,83	45,93	45,72	45,83
Jambi	41,49	51,27	46,52	56,00	55,35	55,68	51,17	53,92	52,55
Sumatera Selatan	73,18	61,16	67,59	55,69	56,20	55,94	60,65	57,51	59,14
Kep Bangka Belitung	41,29	53,77	47,04	47,48	43,07	45,34	45,98	45,48	45,74
Bengkulu	50,67	45,54	48,14	40,41	47,83	44,06	45,00	46,81	45,89
Lampung	62,59	54,27	58,21	29,91	41,31	36,53	58,77	52,44	55,39
DKI Jakarta	49,16	52,01	50,46	-	-	-	49,16	52,01	50,46
Jawa Barat	56,29	55,90	56,10	47,57	52,55	50,00	53,40	54,77	54,06
Banten	38,93	35,47	37,23	38,79	43,51	41,10	38,85	39,94	39,38
Jawa Tengah	55,76	52,30	54,20	67,66	74,14	70,50	60,20	60,17	60,19
DI Yogyakarta	40,07	43,91	41,96	40,49	38,46	39,48	40,29	41,02	40,65
Jawa Timur	51,29	53,89	52,56	37,20	38,89	38,04	46,64	48,83	47,72
Bali	40,52	44,76	42,41	39,21	33,20	35,98	40,05	39,59	39,83
Nusa Tenggara Barat	71,16	70,95	71,06	75,12	76,83	76,02	73,38	74,46	73,93
Nusa Tenggara Timur	68,51	70,31	69,44	67,61	68,78	68,19	67,76	69,06	68,41
Kalimantan Barat	37,11	45,83	41,74	38,39	46,28	42,12	38,08	46,15	42,02
Kalimantan Tengah	52,37	50,13	51,10	54,99	49,63	52,28	54,15	49,82	51,86
Kalimantan Selatan	45,20	48,51	46,88	34,95	41,40	38,46	39,57	44,36	42,10
Kalimantan Timur	51,34	56,33	53,92	50,33	52,98	51,58	50,90	55,01	52,95
Sulawesi Utara	44,43	51,37	47,82	55,88	54,15	54,98	50,95	53,03	52,00
Gorontalo	41,34	37,39	39,49	36,15	42,38	39,28	37,46	41,24	39,33
Sulawesi Tengah	62,51	66,72	64,49	67,88	68,76	68,31	66,02	68,08	67,01
Sulawesi Selatan	41,09	43,88	42,56	48,33	47,82	48,07	46,60	46,82	46,71
Sulawesi Barat	24,38	33,70	29,34	29,78	28,23	29,01	27,98	30,23	29,12
Sulawesi Tenggara	49,65	66,98	59,15	56,02	54,26	55,21	54,85	57,34	56,05
Maluku	47,36	42,00	44,90	47,82	48,66	48,23	47,66	46,57	47,14
Maluku Utara	49,49	58,26	53,88	40,42	44,33	42,31	42,70	48,03	45,29
Papua Barat	58,06	57,17	57,61	43,26	46,88	45,00	46,82	49,60	48,18
Papua	37,41	43,46	40,39	52,55	44,60	48,88	48,37	44,25	46,44
Indonesia	48,86	50,09	49,46	46,85	47,90	47,37	47,84	48,95	48,38

Sumber: BPS - Susenas 2014

Catatan : L=Laki-Laki, P=Perempuan

Tabel L-5.6 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	92,39	92,32	92,36	91,98	90,53	91,25	92,10	91,02	91,55
Sumatera Utara	91,65	94,74	93,14	90,78	89,33	90,07	91,19	91,83	91,50
Sumatera Barat	91,84	94,45	93,13	92,80	91,56	92,21	92,44	92,68	92,56
Riau	93,74	93,91	93,83	91,99	90,17	91,09	92,66	91,63	92,15
Kepulauan Riau	97,31	94,93	96,13	90,00	90,24	90,12	92,23	91,66	91,95
Jambi	94,79	97,08	95,93	94,70	94,64	94,67	94,73	95,51	95,12
Sumatera Selatan	96,51	98,86	97,61	95,79	95,46	95,63	96,01	96,45	96,22
Kep Bangka Belitung	96,44	97,04	96,74	96,61	97,17	96,88	96,57	97,14	96,85
Bengkulu	97,48	94,92	96,16	95,09	93,40	94,27	96,22	94,16	95,18
Lampung	97,88	97,18	97,52	91,74	96,67	94,32	97,08	97,11	97,10
DKI Jakarta	97,96	99,10	98,47	-	-	-	97,96	99,10	98,47
Jawa Barat	97,11	96,72	96,92	96,25	95,03	95,65	96,82	96,15	96,49
Banten	98,98	98,22	98,61	98,09	98,41	98,25	98,50	98,33	98,41
Jawa Tengah	98,87	98,22	98,58	100,00	98,55	99,33	99,25	98,34	98,84
DI Yogyakarta	98,40	98,59	98,49	96,63	96,24	96,44	97,50	97,37	97,43
Jawa Timur	95,63	94,56	95,09	87,66	90,06	88,88	92,97	93,07	93,02
Bali	99,27	100,00	99,61	98,44	99,94	99,21	98,98	99,97	99,46
Nusa Tenggara Barat	97,81	99,37	98,58	98,98	97,90	98,42	98,46	98,51	98,49
Nusa Tenggara Timur	97,57	99,27	98,45	94,32	94,24	94,28	94,89	95,21	95,05
Kalimantan Barat	94,24	93,85	94,05	89,17	87,84	88,51	90,69	89,66	90,18
Kalimantan Tengah	93,12	95,20	94,21	91,02	89,27	90,17	91,75	91,53	91,64
Kalimantan Selatan	94,83	93,66	94,23	90,82	94,46	92,72	92,52	94,13	93,35
Kalimantan Timur	97,32	97,34	97,33	96,88	94,21	95,52	97,15	96,13	96,63
Sulawesi Utara	98,67	97,60	98,14	97,55	98,44	97,98	98,04	98,06	98,05
Gorontalo	98,67	94,50	96,60	92,50	92,09	92,30	94,00	92,68	93,34
Sulawesi Tengah	97,46	97,32	97,39	92,58	93,24	92,90	94,32	94,72	94,51
Sulawesi Selatan	93,69	95,48	94,62	93,70	93,55	93,62	93,70	94,07	93,89
Sulawesi Barat	96,80	98,97	97,85	94,31	97,14	95,67	95,19	97,79	96,44
Sulawesi Tenggara	94,07	93,14	93,59	86,39	85,84	86,13	87,97	87,52	87,75
Maluku	94,90	94,95	94,92	86,58	89,86	88,14	89,53	91,69	90,56
Maluku Utara	98,68	98,22	98,45	94,50	93,92	94,22	95,62	95,09	95,36
Papua Barat	98,21	96,05	97,15	73,37	75,05	74,18	80,53	81,25	80,88
Papua	96,28	97,09	96,67	90,89	89,62	90,28	92,60	91,98	92,30
Indonesia	96,88	96,95	96,91	94,18	93,96	94,07	95,52	95,42	95,47

Sumber: BPS - Susenas 2014

Catatan : L=Laki-Laki, P=Perempuan

Tabel L-5.7.1 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2014

Provinsi	Perkotaan														
	Laki-Laki					Perempuan					Laki-Laki+Perempuan				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	91,05	88,14	87,47	74,06	85,02	89,38	85,65	86,41	75,41	84,32	90,23	86,91	86,95	74,73	84,68
Sumatera Utara	90,09	86,44	86,79	76,85	83,38	92,67	91,05	91,15	78,08	86,84	91,33	88,66	88,90	77,44	85,05
Sumatera Barat	88,38	84,88	83,40	68,42	82,32	93,59	88,35	87,81	74,39	85,61	90,96	86,60	85,58	71,37	83,95
Riau	91,69	89,04	87,99	77,52	86,68	92,08	88,21	87,55	79,31	86,16	91,88	88,63	87,77	78,41	86,42
Jambi	96,87	91,79	91,02	77,05	89,98	93,41	90,04	90,36	73,06	87,65	95,15	90,92	90,69	75,06	88,82
Sumatera Selatan	92,82	87,67	88,78	74,66	84,79	95,20	92,06	90,66	77,03	89,06	94,01	89,86	89,72	75,84	86,92
Bengkulu	95,89	93,44	92,26	77,85	92,47	96,86	90,13	93,05	78,69	88,87	96,35	91,88	92,63	78,24	90,78
Lampung	94,92	92,53	91,19	78,71	90,93	96,56	92,48	92,16	77,60	89,14	95,73	92,51	91,66	78,16	90,05
Kep. Bangka Belitung	95,92	94,61	94,51	85,87	93,45	93,32	88,30	89,62	77,74	88,84	94,58	91,36	91,99	81,69	91,08
Kepulauan Riau	96,49	94,66	94,20	79,59	92,59	97,01	91,63	89,89	76,44	88,30	96,75	93,12	92,01	77,99	90,41
DKI Jakarta	96,48	92,81	92,43	81,64	89,09	96,95	94,51	94,70	81,05	91,66	96,69	93,57	93,44	81,37	90,24
Jawa Barat	95,56	92,96	93,44	80,55	89,72	94,91	92,67	92,88	81,47	89,30	95,24	92,82	93,17	81,00	89,51
Jawa Tengah	97,82	95,52	94,72	80,94	92,52	97,53	94,24	94,12	80,37	92,95	97,68	94,90	94,43	80,67	92,73
DI Yogyakarta	98,43	94,83	95,58	81,55	95,60	97,40	97,21	96,38	84,09	95,17	97,97	95,89	95,94	82,68	95,40
Jawa Timur	97,51	94,66	94,81	81,79	91,90	96,96	94,96	94,92	83,04	92,60	97,24	94,81	94,86	82,40	92,24
Banten	93,18	89,99	89,59	75,59	85,37	91,66	88,15	89,66	76,23	85,04	92,41	89,06	89,63	75,92	85,21
Bali	98,99	98,05	97,63	84,94	97,36	99,79	96,11	96,39	84,94	96,01	99,36	97,15	97,06	84,94	96,74
Nusa Tenggara Barat	97,45	95,44	95,46	83,38	94,48	99,20	97,37	97,05	85,07	95,68	98,32	96,39	96,24	84,21	95,07
Nusa Tenggara Timur	95,83	90,91	92,92	80,67	92,27	98,68	94,86	95,61	82,81	94,29	97,30	92,95	94,31	81,78	93,31
Kalimantan Barat	93,36	89,20	88,25	75,01	83,11	90,80	86,58	86,10	71,88	82,78	92,08	87,89	87,18	73,45	82,94
Kalimantan Tengah	91,27	88,82	88,22	75,63	84,60	94,85	92,19	90,90	82,52	87,65	93,15	90,59	89,63	79,25	86,20
Kalimantan Selatan	94,23	91,25	90,07	76,40	87,61	91,43	89,25	87,71	75,86	85,93	92,80	90,23	88,87	76,12	86,76
Kalimantan Timur	95,21	93,93	93,61	78,17	91,73	96,50	93,49	93,55	82,27	91,61	95,86	93,71	93,58	80,24	91,67
Sulawesi Utara	96,06	92,83	90,90	83,48	91,78	96,54	94,33	92,17	79,36	91,52	96,30	93,57	91,53	81,43	91,65
Sulawesi Tengah	97,76	92,65	94,75	77,79	91,64	93,57	90,16	91,50	78,28	86,10	95,68	91,42	93,14	78,03	88,89
Sulawesi Selatan	96,98	93,86	93,45	84,83	93,08	96,97	92,30	92,93	79,93	91,16	96,97	93,10	93,19	82,45	92,15
Sulawesi Tenggara	93,16	89,43	88,06	77,70	90,64	94,91	95,08	94,61	82,76	92,45	94,07	92,37	91,46	80,33	91,58
Gorontalo	95,67	94,77	92,40	78,42	90,62	96,98	92,82	91,70	78,08	92,28	96,30	93,83	92,06	78,25	91,42
Sulawesi Barat	91,68	90,96	87,46	74,65	86,59	93,14	92,91	91,55	79,79	87,01	92,43	91,96	89,56	77,29	86,81
Maluku	94,05	88,51	89,38	80,74	85,06	93,19	88,32	88,82	77,48	87,27	93,64	88,42	89,11	79,17	86,12
Maluku Utara	97,55	94,08	95,52	83,62	92,22	96,99	92,03	91,98	84,17	91,40	97,28	93,07	93,78	83,89	91,81
Papua Barat	92,67	92,56	92,42	79,75	88,27	95,02	93,22	93,93	88,68	88,17	93,79	92,88	93,14	84,02	88,22
Papua	98,21	94,58	95,58	86,63	92,98	94,73	92,61	92,74	83,60	90,36	96,50	93,61	94,19	85,14	91,70
Indonesia	95,48	92,58	92,48	79,85	89,73	95,39	92,61	92,67	80,28	89,97	95,44	92,59	92,57	80,06	89,85

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.7.2 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2014

Provinsi	Perdesaan														
	Laki-Laki					Perempuan					Laki-Laki+Perempuan				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	88,87	86,07	86,29	75,37	80,66	86,96	83,29	83,31	72,43	78,77	87,91	84,67	84,78	73,88	79,71
Sumatera Utara	87,61	84,81	86,47	74,33	80,84	85,97	83,71	84,14	72,49	78,38	86,80	84,27	85,33	73,42	79,63
Sumatera Barat	89,95	85,86	85,73	74,76	82,72	89,70	85,54	86,18	72,91	82,48	89,83	85,70	85,94	73,88	82,60
Riau	88,32	86,17	86,14	74,54	80,22	86,14	84,60	83,38	72,55	80,33	87,24	85,39	84,77	73,56	80,27
Jambi	87,78	83,82	82,40	71,83	80,36	88,24	84,05	83,64	74,08	80,87	88,01	83,93	83,02	72,95	80,61
Sumatera Selatan	92,64	89,24	88,82	78,40	85,76	92,35	90,20	89,85	79,05	84,95	92,50	89,72	89,33	78,72	85,36
Bengkulu	93,59	89,84	89,94	79,44	88,72	92,62	89,94	90,46	77,59	89,21	93,12	89,89	90,20	78,54	88,96
Lampung	95,67	92,73	91,93	80,82	89,38	95,98	94,28	93,23	82,23	90,75	95,82	93,49	92,57	81,51	90,05
Kep. Bangka Belitung	93,41	91,14	88,71	75,85	85,80	92,07	88,77	88,70	80,31	86,72	92,75	89,98	88,70	78,03	86,25
Kepulauan Riau	90,85	86,09	87,40	76,60	84,58	96,29	95,73	94,00	82,17	87,14	93,69	91,12	90,85	79,51	85,92
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	93,25	90,61	92,04	78,46	86,37	91,54	89,24	90,38	78,09	84,52	92,41	89,94	91,22	78,28	85,46
Jawa Tengah	96,92	93,75	94,62	79,62	92,52	97,50	94,05	94,69	80,58	92,97	97,20	93,90	94,65	80,09	92,74
DI Yogyakarta	98,42	97,74	98,82	85,22	98,64	96,91	94,86	92,04	78,78	92,03	97,73	96,41	95,70	82,26	95,61
Jawa Timur	94,90	92,92	92,96	81,34	89,98	94,05	89,99	91,78	78,40	87,01	94,48	91,46	92,37	79,87	88,49
Banten	83,20	80,97	82,41	69,31	73,70	85,57	82,17	81,40	69,68	76,07	84,40	81,58	81,89	69,50	74,90
Bali	97,85	95,04	94,57	81,73	94,95	99,14	96,73	97,78	85,95	97,13	98,52	95,92	96,23	83,91	96,08
Nusa Tenggara Barat	97,68	95,29	95,12	86,53	95,50	96,76	94,06	93,26	85,59	92,10	97,20	94,65	94,15	86,04	93,73
Nusa Tenggara Timur	92,96	89,87	90,12	79,70	87,42	93,04	89,86	89,22	79,59	87,50	93,00	89,86	89,68	79,65	87,46
Kalimantan Barat	86,91	85,02	83,30	72,95	78,16	85,42	83,55	83,21	73,57	79,40	86,17	84,29	83,26	73,25	78,78
Kalimantan Tengah	86,34	83,44	85,98	75,84	83,21	87,29	85,18	84,16	74,67	80,95	86,80	84,29	85,09	75,27	82,11
Kalimantan Selatan	87,51	85,42	85,94	72,23	81,09	91,82	87,08	86,99	74,21	84,16	89,76	86,29	86,48	73,26	82,69
Kalimantan Timur	96,26	94,82	92,78	81,90	89,65	92,41	91,31	90,21	81,25	87,40	94,31	93,04	91,48	81,57	88,51
Sulawesi Utara	97,11	94,66	93,10	81,89	88,86	97,90	94,54	93,09	81,82	92,04	97,50	94,60	93,09	81,86	90,41
Sulawesi Tengah	89,69	86,00	87,66	76,11	83,36	88,02	85,10	85,82	74,56	82,17	88,87	85,56	86,74	75,34	82,77
Sulawesi Selatan	91,13	86,86	86,35	74,77	84,98	91,60	88,13	87,84	77,04	85,60	91,35	87,47	87,06	75,86	85,28
Sulawesi Tenggara	92,37	89,14	88,68	78,30	88,18	91,99	89,49	89,44	79,80	88,03	92,18	89,32	89,06	79,05	88,10
Gorontalo	92,18	87,69	86,52	75,20	85,16	95,37	94,72	93,03	84,15	91,19	93,72	91,08	89,65	79,51	88,07
Sulawesi Barat	82,60	81,55	80,47	69,59	78,33	82,99	80,12	79,19	67,97	77,81	82,78	80,87	79,86	68,82	78,08
Maluku	81,00	77,70	80,34	70,32	71,62	83,73	83,23	83,35	74,95	76,04	82,30	80,34	81,77	72,53	73,73
Maluku Utara	91,65	90,18	90,06	80,85	87,32	92,57	90,66	89,77	80,41	87,90	92,10	90,41	89,92	80,64	87,60
Papua Barat	87,01	86,75	86,66	75,51	82,05	85,64	82,36	83,47	72,02	78,96	86,36	84,65	85,13	73,84	80,57
Papua	70,89	63,67	62,64	52,39	53,46	72,55	66,12	66,32	57,04	57,67	71,69	64,85	64,42	54,63	55,49
Indonesia	91,96	89,10	89,41	77,37	85,73	91,63	88,66	88,90	77,19	85,22	91,80	88,88	89,16	77,28	85,48

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.7.3 Persentase Balita yang Pernah Diberi Imunisasi Menurut Provinsi, Jenis Kelamin dan Jenis Imunisasi, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan														
	Laki-Laki					Perempuan					Laki-Laki+Perempuan				
	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B	BCG	DPT	Polio	Campak	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	89,48	86,65	86,62	75,00	81,88	87,61	83,92	84,15	73,23	80,26	88,54	85,28	85,38	74,11	81,07
Sumatera Utara	88,78	85,58	86,62	75,52	82,04	89,06	87,09	87,38	75,07	82,28	88,91	86,32	86,99	75,30	82,16
Sumatera Barat	89,37	85,49	84,86	72,41	82,57	91,21	86,63	86,81	73,48	83,69	90,26	86,04	85,81	72,93	83,11
Riau	89,61	87,27	86,85	75,69	82,70	88,45	86,01	85,00	75,18	82,60	89,04	86,64	85,93	75,43	82,65
Jambi	90,56	86,25	85,03	73,42	83,29	89,81	85,86	85,68	73,77	82,93	90,18	86,06	85,35	73,59	83,11
Sumatera Selatan	92,71	88,68	88,81	77,07	85,42	93,37	90,87	90,14	78,33	86,42	93,03	89,77	89,47	77,69	85,91
Bengkulu	94,29	90,94	90,65	78,95	89,87	93,86	90,00	91,22	77,91	89,11	94,09	90,49	90,93	78,45	89,50
Lampung	95,49	92,68	91,74	80,30	89,76	96,12	93,84	92,97	81,08	90,35	95,80	93,25	92,34	80,68	90,05
Kep. Bangka Belitung	94,60	92,78	91,45	80,58	89,41	92,69	88,54	89,16	79,03	87,77	93,64	90,65	90,30	79,80	88,59
Kepulauan Riau	95,75	93,55	93,32	79,20	91,55	96,91	92,19	90,45	77,22	88,14	96,35	92,85	91,86	78,19	89,81
DKI Jakarta	96,48	92,81	92,43	81,64	89,09	96,95	94,51	94,70	81,05	91,66	96,69	93,57	93,44	81,37	90,24
Jawa Barat	94,78	92,17	92,97	79,85	88,59	93,77	91,51	92,03	80,33	87,68	94,28	91,84	92,51	80,08	88,14
Jawa Tengah	97,33	94,56	94,67	80,23	92,52	97,51	94,13	94,43	80,49	92,96	97,42	94,35	94,55	80,35	92,74
DI Yogyakarta	98,43	95,82	96,69	82,80	96,63	97,23	96,38	94,86	82,22	94,06	97,89	96,07	95,86	82,54	95,47
Jawa Timur	96,18	93,77	93,87	81,56	90,92	95,44	92,37	93,28	80,62	89,69	95,82	93,08	93,58	81,10	90,31
Banten	89,85	86,99	87,20	73,50	81,49	89,63	86,16	86,91	74,05	82,06	89,74	86,57	87,05	73,78	81,78
Bali	98,59	97,01	96,57	83,83	96,53	99,53	96,36	96,94	85,34	96,46	99,05	96,70	96,75	84,56	96,49
Nusa Tenggara Barat	97,58	95,36	95,27	85,14	95,05	97,77	95,43	94,83	85,37	93,58	97,68	95,40	95,05	85,26	94,31
Nusa Tenggara Timur	93,46	90,05	90,61	79,87	88,27	94,13	90,82	90,46	80,22	88,82	93,79	90,43	90,54	80,04	88,54
Kalimantan Barat	88,84	86,27	84,78	73,56	79,64	87,05	84,46	84,08	73,06	80,42	87,95	85,37	84,44	73,31	80,03
Kalimantan Tengah	88,05	85,31	86,76	75,76	83,69	90,17	87,85	86,72	77,66	83,50	89,11	86,58	86,74	76,72	83,60
Kalimantan Selatan	90,36	87,90	87,69	74,00	83,86	91,66	87,97	87,28	74,89	84,89	91,03	87,94	87,48	74,46	84,39
Kalimantan Timur	95,61	94,27	93,29	79,60	90,93	94,92	92,64	92,26	81,88	89,98	95,26	93,45	92,77	80,75	90,45
Sulawesi Utara	96,65	93,86	92,14	82,59	90,13	97,30	94,44	92,68	80,72	91,81	96,97	94,15	92,41	81,67	90,96
Sulawesi Tengah	91,65	87,62	89,38	76,52	85,37	89,37	86,33	87,20	75,47	83,13	90,52	86,98	88,30	76,00	84,26
Sulawesi Selatan	93,21	89,35	88,88	78,35	87,86	93,54	89,64	89,68	78,09	87,62	93,37	89,49	89,27	78,22	87,74
Sulawesi Tenggara	92,58	89,22	88,52	78,14	88,81	92,77	90,99	90,83	80,59	89,22	92,68	90,12	89,69	79,39	89,02
Gorontalo	93,41	90,19	88,59	76,33	87,09	95,94	94,05	92,56	81,99	91,58	94,63	92,05	90,51	79,07	89,26
Sulawesi Barat	84,46	83,48	81,90	70,62	80,03	85,32	83,06	82,02	70,69	79,92	84,88	83,27	81,96	70,65	79,98
Maluku	85,62	81,53	83,54	74,01	76,38	87,13	85,06	85,31	75,86	80,07	86,34	83,22	84,39	74,90	78,15
Maluku Utara	93,22	91,22	91,52	81,59	88,63	93,77	91,03	90,37	81,43	88,85	93,49	91,12	90,96	81,51	88,74
Papua Barat	88,80	88,59	88,48	76,85	84,02	88,60	85,79	86,77	77,28	81,87	88,71	87,25	87,66	77,06	82,99
Papua	78,77	72,58	72,14	62,26	64,86	79,10	73,94	74,12	64,88	67,32	78,93	73,24	73,10	63,53	66,05
Indonesia	93,70	90,83	90,93	78,60	87,71	93,47	90,59	90,74	78,70	87,55	93,59	90,71	90,84	78,65	87,63

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.8 Persentase Anak Berumur 1-4 tahun yang Mendapat Imunisasi Lengkap Menurut Provinsi, Tipe Daerah , dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	55,87	58,28	57,06	45,51	46,19	45,86	48,40	49,45	48,92
Sumatera Utara	55,34	56,36	55,83	53,02	50,75	51,90	54,11	53,34	53,74
Sumatera Barat	46,21	57,40	51,74	56,16	56,06	56,11	52,47	56,58	54,46
Riau	66,75	70,31	68,53	55,57	55,90	55,73	59,87	61,51	60,68
Jambi	62,55	63,83	63,19	62,00	63,06	62,53	62,17	63,30	62,73
Sumatera Selatan	63,13	63,97	63,55	64,00	62,15	63,09	63,69	62,81	63,25
Bengkulu	70,96	72,79	71,82	66,60	68,43	67,49	67,93	69,71	68,79
Lampung	68,78	72,25	70,48	71,90	73,43	72,65	71,13	73,14	72,11
Kep. Bangka Belitung	72,02	61,76	66,73	66,17	65,56	65,88	68,93	63,67	66,29
Kepulauan Riau	69,10	68,92	69,00	66,64	66,64	66,64	68,78	68,61	68,69
DKI Jakarta	57,93	61,12	59,35	-	-	-	57,93	61,12	59,35
Jawa Barat	60,15	59,18	59,68	55,77	55,40	55,59	58,67	57,90	58,29
Jawa Tengah	72,51	72,87	72,68	72,41	72,25	72,33	72,45	72,53	72,49
DI Yogyakarta	73,13	76,69	74,72	76,98	75,87	76,47	74,44	76,40	75,33
Jawa Timur	69,61	70,39	69,99	67,11	65,52	66,31	68,33	67,85	68,10
Banten	53,56	52,57	53,06	33,20	32,34	32,76	46,78	45,85	46,31
Bali	79,45	76,03	77,86	74,86	80,51	77,79	77,86	77,81	77,83
Nusa Tenggara Barat	73,51	73,27	73,39	71,52	71,23	71,37	72,40	72,07	72,23
Nusa Tenggara Timur	76,42	79,64	78,09	71,25	71,31	71,28	72,15	72,92	72,53
Kalimantan Barat	59,10	51,40	55,26	50,96	54,05	52,49	53,39	53,25	53,32
Kalimantan Tengah	62,83	68,29	65,70	52,32	57,53	54,86	55,96	61,63	58,80
Kalimantan Selatan	70,04	67,80	68,90	62,69	64,23	63,49	65,81	65,70	65,76
Kalimantan Timur	67,63	74,06	70,87	69,85	67,38	68,60	68,49	71,47	69,99
Sulawesi Utara	76,44	69,85	73,17	71,62	70,26	70,96	73,72	70,08	71,93
Sulawesi Tengah	70,43	73,70	72,05	66,78	63,45	65,13	67,67	65,94	66,81
Sulawesi Selatan	78,23	73,60	75,97	64,45	67,75	66,03	69,35	69,87	69,60
Sulawesi Tenggara	68,05	76,76	72,58	72,41	72,91	72,66	71,30	73,95	72,64
Gorontalo	67,76	72,23	69,92	62,65	73,51	67,88	64,46	73,05	68,61
Sulawesi Barat	70,13	75,88	73,09	59,25	58,67	58,97	61,48	62,62	62,03
Maluku	75,66	72,77	74,27	56,65	59,15	57,84	63,38	64,04	63,70
Maluku Utara	69,54	70,24	69,88	58,29	59,56	58,91	61,29	62,45	61,85
Papua Barat	69,37	73,41	71,30	59,96	54,08	57,14	62,94	60,18	61,61
Papua	58,37	60,54	59,43	21,44	23,32	22,35	32,09	34,31	33,17
Indonesia	64,36	64,83	64,59	61,80	61,80	61,80	63,07	63,28	63,17

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.9 Persentase Anak yang Sakit Selama Sebulan Terakhir Menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	15,23	14,35	14,80	17,52	16,31	16,92	16,90	15,78	16,35
Sumatera Utara	13,30	11,79	12,55	12,61	12,12	12,37	12,93	11,96	12,46
Sumatera Barat	14,09	15,11	14,59	14,95	14,93	14,94	14,63	15,00	14,81
Riau	13,78	13,59	13,69	12,59	14,26	13,41	13,04	14,01	13,52
Jambi	11,30	9,05	10,18	13,05	12,83	12,94	12,53	11,69	12,11
Sumatera Selatan	11,15	11,44	11,29	10,19	11,17	10,67	10,52	11,27	10,89
Bengkulu	15,89	13,37	14,65	16,83	17,75	17,28	16,55	16,39	16,47
Lampung	9,96	11,11	10,53	14,35	12,99	13,70	13,24	12,50	12,89
Kep. Bangka Belitung	11,47	10,20	10,85	10,67	10,32	10,50	11,06	10,26	10,67
Kepulauan Riau	14,36	12,25	13,32	10,18	9,88	10,04	13,64	11,86	12,77
DKI Jakarta	15,59	14,48	15,05	-	-	-	15,59	14,48	15,05
Jawa Barat	13,73	14,16	13,94	14,79	14,63	14,71	14,09	14,32	14,20
Jawa Tengah	17,92	16,37	17,16	16,19	16,54	16,36	16,97	16,46	16,72
DI Yogyakarta	18,14	14,77	16,49	23,94	19,38	21,78	20,19	16,33	18,32
Jawa Timur	17,40	16,65	17,04	19,98	18,38	19,20	18,75	17,55	18,17
Banten	14,13	14,78	14,45	15,43	16,46	15,92	14,57	15,34	14,95
Bali	19,12	18,08	18,61	29,43	29,47	29,45	23,24	22,67	22,96
Nusa Tenggara Barat	19,48	19,81	19,64	17,61	20,02	18,78	18,37	19,93	19,13
Nusa Tenggara Timur	14,65	13,95	14,31	18,75	20,43	19,57	18,00	19,24	18,61
Kalimantan Barat	11,93	13,13	12,53	13,71	13,51	13,61	13,20	13,40	13,30
Kalimantan Tengah	14,77	15,61	15,19	15,68	14,81	15,26	15,38	15,08	15,24
Kalimantan Selatan	14,73	14,86	14,79	16,36	15,09	15,74	15,69	15,00	15,35
Kalimantan Timur	13,52	12,15	12,85	11,75	11,75	11,75	12,83	11,99	12,42
Sulawesi Utara	10,96	13,57	12,24	18,98	19,38	19,17	15,52	16,82	16,15
Sulawesi Tengah	16,37	16,00	16,19	18,88	18,58	18,73	18,30	17,98	18,15
Sulawesi Selatan	11,23	11,18	11,20	14,86	14,86	14,86	13,55	13,54	13,55
Sulawesi Tenggara	13,63	15,01	14,30	19,74	19,64	19,69	18,11	18,40	18,25
Gorontalo	25,90	25,02	25,46	20,21	21,50	20,83	22,06	22,68	22,36
Sulawesi Barat	19,46	20,58	20,02	20,02	19,39	19,71	19,90	19,66	19,78
Maluku	13,46	12,55	13,02	11,51	12,31	11,90	12,21	12,40	12,30
Maluku Utara	11,47	12,40	11,92	10,87	11,03	10,95	11,02	11,37	11,19
Papua Barat	15,36	15,96	15,65	10,87	10,64	10,76	12,25	12,27	12,26
Papua	10,12	9,92	10,02	9,47	9,55	9,51	9,62	9,64	9,63
Indonesia	14,93	14,54	14,74	15,81	15,69	15,75	15,39	15,13	15,26

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L -5.10.1 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Terbesar, 2014

Provinsi	Perkotaan											
	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki+Perempuan			
	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	68,35	56,45	58,23	29,60	61,73	53,90	59,86	25,86	65,21	55,24	59,00	27,82
Sumatera Utara	59,59	61,23	54,49	24,68	55,84	60,18	56,27	26,69	57,73	60,71	55,38	25,68
Sumatera Barat	64,42	61,25	58,52	26,47	63,41	61,52	54,65	26,83	63,92	61,38	56,60	26,65
Riau	62,79	72,31	68,14	24,63	57,74	67,73	62,12	29,76	60,37	70,11	65,25	27,09
Jambi	58,10	63,37	60,57	30,89	50,07	56,91	56,85	28,32	54,39	60,38	58,85	29,70
Sumatera Selatan	39,59	62,77	60,39	34,55	45,23	58,84	57,99	34,67	42,45	60,77	59,17	34,61
Bengkulu	43,13	66,41	68,14	22,72	45,31	69,46	67,67	25,51	44,17	67,87	67,92	24,05
Lampung	39,44	60,70	59,30	29,06	54,11	57,72	59,78	32,68	46,63	59,24	59,53	30,83
Kep. Bangka Belitung	48,07	60,90	63,90	30,88	42,02	56,10	62,49	34,86	45,23	58,64	63,24	32,75
Kepulauan Riau	58,67	65,52	61,01	18,39	50,28	73,50	67,76	18,91	54,76	69,24	64,15	18,63
DKI Jakarta	42,92	67,30	62,30	28,32	44,99	63,88	64,39	27,29	43,89	65,69	63,29	27,83
Jawa Barat	50,72	53,95	56,10	33,06	51,38	54,28	56,62	32,78	51,05	54,11	56,35	32,92
Jawa Tengah	54,00	64,19	65,93	34,10	51,82	62,73	62,27	36,61	52,95	63,49	64,16	35,31
DI Yogyakarta	46,85	63,17	62,35	29,14	44,79	63,14	65,56	32,44	45,87	63,15	63,87	30,71
Jawa Timur	52,76	64,10	62,49	29,06	52,85	63,06	63,46	28,52	52,81	63,58	62,97	28,79
Banten	56,77	63,53	61,47	29,66	53,91	62,63	65,04	30,83	55,35	63,09	63,24	30,24
Bali	59,88	52,20	52,98	34,95	61,21	64,83	64,62	35,43	60,53	58,39	58,68	35,19
Nusa Tenggara Barat	64,86	56,15	61,94	41,50	66,76	59,25	60,87	40,44	65,80	57,68	61,41	40,98
Nusa Tenggara Timur	44,89	60,44	63,98	33,33	46,87	63,84	68,80	29,15	45,83	62,05	66,26	31,35
Kalimantan Barat	45,32	53,40	48,99	36,11	49,94	51,36	50,24	33,82	47,65	52,37	49,62	34,96
Kalimantan Tengah	54,16	61,69	56,45	27,58	52,13	62,51	63,77	31,19	53,13	62,11	60,15	29,41
Kalimantan Selatan	45,70	59,92	57,57	32,86	51,63	63,63	65,36	31,21	48,52	61,69	61,27	32,07
Kalimantan Timur	40,92	59,73	63,27	25,84	43,89	53,86	62,00	22,24	42,32	56,95	62,67	24,14
Sulawesi Utara	51,78	50,83	47,57	32,17	62,62	50,32	48,60	36,64	57,37	50,57	48,10	34,47
Sulawesi Tengah	62,11	53,22	49,25	40,44	54,20	49,66	54,52	40,96	57,92	51,33	52,04	40,72
Sulawesi Selatan	53,93	47,83	48,53	35,57	51,95	43,68	46,68	33,94	52,98	45,83	47,64	34,78
Sulawesi Tenggara	53,69	47,53	44,88	32,18	63,60	53,10	50,53	27,84	58,72	50,36	47,75	29,97
Gorontalo	76,56	51,42	40,01	43,34	70,28	49,10	42,39	49,51	73,49	50,29	41,17	46,35
Sulawesi Barat	60,40	40,35	46,03	31,69	59,05	38,18	51,78	31,81	59,71	39,24	48,98	31,75
Maluku	50,35	53,37	50,86	25,45	41,33	51,46	47,72	31,73	45,98	52,44	49,34	28,49
Maluku Utara	63,24	40,39	32,92	31,97	58,38	54,13	44,44	24,83	60,75	47,44	38,83	28,30
Papua Barat	48,47	69,14	63,98	38,68	45,66	61,86	65,34	42,58	47,12	65,65	64,63	40,55
Papua	48,26	61,15	63,44	35,01	44,26	63,07	57,55	44,27	46,30	62,09	60,55	39,55
Indonesia	52,34	60,30	59,69	31,11	52,21	59,59	60,22	31,57	52,28	59,95	59,95	31,33

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.10.2 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Terbesar, 2014

Perdesaan

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki+Perempuan			
	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	67,10	53,84	53,99	35,99	67,90	56,26	55,78	33,71	67,48	55,00	54,85	34,89
Sumatera Utara	59,62	55,43	55,92	28,05	60,36	58,28	60,09	25,20	59,98	56,80	57,94	26,68
Sumatera Barat	59,83	52,33	53,18	36,64	59,85	55,29	57,01	35,11	59,84	53,78	55,05	35,89
Riau	58,83	56,98	56,56	30,66	57,67	58,24	58,19	31,36	58,23	57,62	57,39	31,02
Jambi	54,99	59,61	56,80	27,94	53,72	60,85	59,97	27,67	54,36	60,22	58,37	27,81
Sumatera Selatan	45,31	55,22	55,33	35,77	47,39	53,88	56,89	33,13	46,34	54,56	56,10	34,47
Bengkulu	53,51	57,79	61,49	38,51	48,92	51,54	62,45	34,12	51,24	54,70	61,97	36,34
Lampung	52,00	61,71	61,92	33,92	53,11	64,10	63,59	32,94	52,53	62,83	62,71	33,46
Kep. Bangka Belitung	47,38	58,12	61,62	28,07	39,95	52,54	61,19	28,58	43,71	55,37	61,40	28,32
Kepulauan Riau	67,49	54,33	48,02	24,84	65,84	44,96	45,93	31,98	66,65	49,60	46,96	28,44
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	51,79	47,96	52,07	38,25	53,91	48,90	54,04	38,06	52,82	48,42	53,03	38,15
Jawa Tengah	53,93	60,46	61,32	38,36	52,79	59,59	61,54	37,95	53,36	60,02	61,43	38,16
DI Yogyakarta	49,97	71,54	69,67	34,03	49,77	62,50	65,22	28,43	49,88	67,43	67,65	31,48
Jawa Timur	55,10	60,08	57,88	34,69	55,58	57,59	59,71	31,99	55,33	58,90	58,75	33,40
Banten	57,32	49,02	55,56	37,76	53,80	48,44	54,98	33,84	55,61	48,74	55,28	35,86
Bali	65,42	56,55	55,74	36,11	64,07	53,68	56,13	34,06	64,77	55,16	55,93	35,12
Nusa Tenggara Barat	66,88	56,09	57,11	43,14	61,75	57,08	58,34	45,32	64,27	56,59	57,74	44,25
Nusa Tenggara Timur	57,92	60,17	61,26	46,03	57,16	61,21	62,50	49,02	57,54	60,69	61,88	47,52
Kalimantan Barat	53,19	54,57	61,26	37,33	49,45	48,19	56,01	36,13	51,32	51,39	58,64	36,73
Kalimantan Tengah	57,69	61,32	58,83	35,40	53,98	62,00	59,85	28,88	55,94	61,64	59,31	32,32
Kalimantan Selatan	52,07	61,13	59,36	31,41	53,22	58,33	61,83	32,99	52,62	59,80	60,53	32,16
Kalimantan Timur	44,75	47,87	54,96	32,37	44,48	48,52	57,07	32,55	44,61	48,19	56,01	32,46
Sulawesi Utara	60,90	51,57	47,85	35,02	56,77	55,47	48,65	35,11	58,88	53,47	48,24	35,07
Sulawesi Tengah	61,00	50,37	43,28	39,94	57,26	47,90	45,01	40,28	59,17	49,17	44,12	40,11
Sulawesi Selatan	56,02	40,89	43,47	41,96	55,19	36,71	41,88	38,32	55,61	38,82	42,68	40,16
Sulawesi Tenggara	62,62	45,82	46,25	34,54	64,62	46,51	44,26	36,30	63,58	46,15	45,29	35,39
Gorontalo	77,13	48,82	42,55	31,56	74,47	47,83	40,39	39,75	75,86	48,35	41,52	35,46
Sulawesi Barat	57,40	48,21	43,10	39,24	53,71	43,50	45,96	42,03	55,59	45,89	44,51	40,61
Maluku	54,73	55,46	43,37	33,19	57,99	51,34	46,59	38,80	56,36	53,40	44,98	36,00
Maluku Utara	60,79	44,02	33,32	40,56	62,16	50,01	40,66	36,50	61,48	47,02	36,99	38,53
Papua Barat	47,72	62,25	58,62	28,27	46,89	59,93	54,88	31,07	47,30	61,07	56,73	29,69
Papua	42,15	61,61	65,09	31,40	41,33	60,07	63,20	32,10	41,76	60,88	64,19	31,73
Indonesia	55,63	55,72	56,26	36,37	55,26	55,06	57,31	35,49	55,45	55,40	56,77	35,94

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.10.3
Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jenis Keluhan Terbesar, 2014

Perdesaan + Perkotaan

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki+Perempuan			
	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya	Panas	Batuk	Pilek	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	67,41	54,48	55,03	34,41	66,40	55,68	56,77	31,80	66,93	55,06	55,87	33,16
Sumatera Utara	59,60	58,31	55,21	26,38	58,05	59,25	58,14	25,96	58,84	58,77	56,65	26,17
Sumatera Barat	61,64	55,85	55,29	32,63	61,28	57,79	56,06	31,79	61,46	56,80	55,67	32,22
Riau	60,47	63,35	61,37	28,15	57,69	61,88	59,70	30,74	59,09	62,62	60,54	29,45
Jambi	55,91	60,73	57,92	28,82	52,73	59,78	59,12	27,85	54,37	60,27	58,50	28,35
Sumatera Selatan	42,99	58,28	57,38	35,28	46,49	55,95	57,35	33,77	44,74	57,12	57,37	34,52
Bengkulu	50,36	60,40	63,51	33,72	47,88	56,73	63,97	31,62	49,14	58,60	63,73	32,69
Lampung	49,50	61,51	61,40	32,95	53,33	62,74	62,78	32,88	51,31	62,09	62,05	32,92
Kepulauan Bangka Belitung	47,75	59,62	62,84	29,59	41,02	54,38	61,86	31,82	44,51	57,10	62,37	30,66
Kepulauan Riau	60,04	63,78	58,98	19,40	53,05	68,42	63,87	21,24	56,74	65,97	61,29	20,26
DKI Jakarta	42,92	67,30	62,30	28,32	44,99	63,88	64,39	27,29	43,89	65,69	63,29	27,83
Jawa Barat	51,10	51,84	54,68	34,88	52,27	52,40	55,72	34,63	51,67	52,11	55,19	34,76
Jawa Tengah	53,97	62,23	63,52	36,33	52,34	61,03	61,87	37,33	53,17	61,65	62,71	36,82
DI Yogyakarta	47,97	66,17	64,97	30,89	46,48	62,92	65,44	31,08	47,27	64,65	65,19	30,98
Jawa Timur	54,02	61,93	60,00	32,09	54,26	60,23	61,52	30,31	54,14	61,11	60,74	31,23
Banten	56,97	58,32	59,35	32,57	53,87	57,66	61,52	31,88	55,44	58,00	60,42	32,23
Bali	62,54	54,29	54,30	35,51	62,56	59,56	60,61	34,78	62,55	56,85	57,37	35,16
Nusa Tenggara Barat	66,03	56,12	59,14	42,45	63,78	57,96	59,36	43,35	64,90	57,04	59,25	42,90
Nusa Tenggara Timur	55,68	60,22	61,73	43,84	55,54	61,62	63,50	45,89	55,61	60,91	62,60	44,85
Kalimantan Barat	50,95	54,24	57,77	36,98	49,59	49,11	54,35	35,46	50,27	51,67	56,06	36,22
Kalimantan Tengah	56,57	61,44	58,08	32,92	53,34	62,18	61,21	29,68	55,01	61,80	59,59	31,36
Kalimantan Selatan	49,49	60,64	58,63	32,00	52,58	60,49	63,27	32,27	50,95	60,57	60,83	32,12
Kalimantan Timur	42,28	55,52	60,32	28,16	44,11	51,84	60,14	26,13	43,16	53,75	60,23	27,18
Sulawesi Utara	57,53	51,29	47,75	33,97	59,08	53,43	48,63	35,72	58,30	52,36	48,19	34,84
Sulawesi Tengah	61,23	50,95	44,51	40,04	56,55	48,31	47,22	40,44	58,90	49,64	45,85	40,24
Sulawesi Selatan	55,33	43,18	45,15	39,85	54,15	38,94	43,41	36,92	54,75	41,10	44,29	38,41
Sulawesi Tenggara	60,46	46,24	45,92	33,97	64,35	48,24	45,91	34,08	62,36	47,21	45,91	34,02
Gorontalo	76,91	49,82	41,58	36,07	72,82	48,33	41,18	43,60	74,94	49,10	41,39	39,69
Sulawesi Barat	58,08	46,43	43,76	37,53	55,00	42,22	47,37	39,57	56,55	44,34	45,55	38,54
Maluku	53,03	54,65	46,28	30,19	51,76	51,39	47,01	36,16	52,40	53,04	46,64	33,14
Maluku Utara	61,40	43,13	33,22	38,45	61,20	51,06	41,62	33,52	61,29	47,12	37,45	35,97
Papua Barat	48,00	64,77	60,58	32,08	46,47	60,59	58,46	35,02	47,24	62,70	59,53	33,54
Papua	43,47	61,51	64,74	32,18	42,00	60,75	61,92	34,85	42,77	61,15	63,39	33,46
Indonesia	54,03	57,95	57,93	33,80	53,77	57,27	58,73	33,58	53,90	57,62	58,32	33,69

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.11 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan			Perdesaan			Perkotaan+Perdesaan		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	52,91	53,57	53,22	48,46	53,37	50,82	49,56	53,42	51,41
Sumatera Utara	60,26	60,92	60,58	58,66	63,97	61,23	59,45	62,41	60,90
Sumatera Barat	43,76	46,84	45,28	49,51	47,36	48,46	47,24	47,15	47,20
Riau	53,26	53,83	53,53	60,07	61,56	60,83	57,24	58,59	57,91
Jambi	58,23	57,25	57,78	69,12	66,55	67,85	65,88	64,02	64,98
Sumatera Selatan	58,88	64,74	61,86	60,09	58,54	59,33	59,60	61,14	60,37
Bengkulu	49,54	52,25	50,84	53,29	54,28	53,78	52,15	53,69	52,91
Lampung	52,09	54,47	53,25	55,82	56,85	56,30	55,08	56,34	55,68
Kep. Bangka Belitung	61,13	57,31	59,34	55,10	54,06	54,59	58,35	55,74	57,09
Kepulauan Riau	55,00	56,13	55,53	51,63	49,69	50,65	54,48	54,99	54,72
DKI Jakarta	55,67	53,83	54,80	-	-	-	55,67	53,83	54,80
Jawa Barat	58,13	58,54	58,33	65,68	63,66	64,70	60,78	60,33	60,56
Jawa Tengah	45,33	46,96	46,11	45,26	46,02	45,64	45,30	46,45	45,86
DI Yogyakarta	52,56	54,30	53,39	38,50	41,67	39,94	47,52	50,02	48,69
Jawa Timur	51,73	53,24	52,48	50,55	49,88	50,23	51,10	51,50	51,29
Banten	48,42	53,55	50,96	66,15	65,61	65,89	54,79	57,77	56,26
Bali	40,38	42,44	41,39	37,46	35,45	36,49	38,97	39,14	39,05
Nusa Tenggara Barat	59,04	60,20	59,61	59,53	56,30	57,88	59,32	57,88	58,60
Nusa Tenggara Timur	47,18	50,86	48,92	43,39	40,74	42,07	44,04	42,34	43,20
Kalimantan Barat	60,57	54,99	57,76	56,46	59,23	57,84	57,63	58,01	57,82
Kalimantan Tengah	67,30	71,52	69,43	64,54	67,26	65,82	65,41	68,74	67,02
Kalimantan Selatan	72,54	74,61	73,53	73,51	74,42	73,94	73,12	74,49	73,77
Kalimantan Timur	55,76	55,61	55,69	55,19	56,09	55,64	55,56	55,79	55,67
Sulawesi Utara	46,36	47,16	46,78	48,01	52,66	50,29	47,40	50,49	48,94
Sulawesi Tengah	65,17	67,49	66,40	64,49	65,81	65,14	64,63	66,20	65,41
Sulawesi Selatan	51,62	51,71	51,67	57,62	56,22	56,92	55,63	54,78	55,21
Sulawesi Tenggara	61,95	59,95	60,93	67,31	63,80	65,62	66,01	62,79	64,44
Gorontalo	58,92	52,77	55,92	72,79	66,81	69,94	67,48	61,28	64,50
Sulawesi Barat	53,07	48,78	50,87	58,52	53,20	55,90	57,29	52,14	54,73
Maluku	65,82	71,55	68,60	74,94	74,02	74,48	71,40	73,10	72,24
Maluku Utara	62,64	68,60	65,69	72,93	68,47	70,70	70,41	68,50	69,45
Papua Barat	56,03	55,36	55,71	45,57	48,08	46,84	49,40	50,58	49,99
Papua	49,40	48,39	48,91	50,36	46,44	48,50	50,15	46,88	48,59
Indonesia	53,81	54,97	54,38	55,29	55,09	55,20	54,57	55,04	54,80

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.12.1 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir menurut Penggunaan Obat dan jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan								
	Obat Modern			Obat Tradisional			Lainnya		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	95,35	95,61	95,48	10,21	11,01	10,59	1,91	0,93	1,44
Sumatera Utara	93,05	93,63	93,34	16,20	16,19	16,20	2,26	1,73	1,99
Sumatera Barat	85,40	81,74	83,53	18,87	22,00	20,47	4,80	2,69	3,72
Riau	95,14	94,25	94,71	11,11	14,75	12,87	2,08	2,34	2,20
Jambi	93,18	96,66	94,78	17,86	9,70	14,12	-	2,51	1,15
Sumatera Selatan	91,84	94,81	93,42	10,84	10,59	10,71	5,38	4,76	5,05
Bengkulu	95,10	92,38	93,76	13,45	19,41	16,38	3,15	0,91	2,05
Lampung	90,15	92,95	91,55	21,46	19,48	20,47	7,31	3,22	5,26
Kep. Bangka Belitung	93,40	93,01	93,22	13,91	12,92	13,46	3,83	2,22	3,10
Kepulauan Riau	87,39	91,70	89,42	36,29	27,08	31,95	6,26	3,02	4,74
DKI Jakarta	94,44	94,38	94,41	13,44	17,16	15,17	3,72	3,11	3,44
Jawa Barat	96,73	96,88	96,80	9,81	9,68	9,75	1,60	1,76	1,68
Jawa Tengah	94,67	94,58	94,63	10,05	9,41	9,74	4,34	3,27	3,82
DI Yogyakarta	89,62	91,46	90,51	13,29	13,62	13,45	4,48	5,18	4,82
Jawa Timur	95,58	94,97	95,27	8,86	10,65	9,76	2,33	3,83	3,09
Banten	95,85	98,13	97,04	6,88	6,66	6,77	3,35	2,97	3,15
Bali	81,60	94,27	87,97	22,01	14,54	18,25	5,01	5,96	5,49
Nusa Tenggara Barat	91,48	92,26	91,87	15,42	15,09	15,26	2,12	1,37	1,74
Nusa Tenggara Timur	95,71	95,42	95,56	6,84	5,76	6,31	1,31	0,23	0,78
Kalimantan Barat	93,59	96,70	95,08	5,84	5,13	5,50	3,71	1,75	2,77
Kalimantan Tengah	96,46	95,03	95,72	11,25	9,91	10,56	2,83	4,25	3,57
Kalimantan Selatan	94,75	96,47	95,58	10,59	8,71	9,68	2,60	2,52	2,56
Kalimantan Timur	96,31	93,73	95,09	13,33	9,59	11,57	1,37	3,97	2,60
Sulawesi Utara	93,53	92,47	92,98	7,84	9,74	8,83	1,72	3,60	2,70
Sulawesi Tengah	95,59	98,33	97,06	12,16	7,82	9,83	1,45	1,78	1,63
Sulawesi Selatan	89,93	90,89	90,39	15,42	16,61	15,99	4,11	4,39	4,24
Sulawesi Tenggara	89,13	89,88	89,51	14,80	15,22	15,01	1,80	2,68	2,24
Gorontalo	96,30	96,47	96,38	8,52	6,66	7,67	1,91	0,46	1,24
Sulawesi Barat	91,07	94,54	92,78	15,35	10,89	13,16	1,27	2,55	1,90
Maluku	94,64	95,73	95,19	8,11	12,49	10,33	2,19	2,91	2,55
Maluku Utara	88,45	94,58	91,73	15,93	14,48	15,15	3,00		1,39
Papua Barat	94,10	95,86	94,94	7,44	9,28	8,32	3,31	5,23	4,22
Papua	91,53	92,51	92,00	17,39	17,87	17,63	0,38	0,99	0,68
Indonesia	94,41	94,97	94,69	11,59	11,66	11,62	2,86	2,79	2,83

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.12.2 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir menurut Penggunaan Obat dan jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perdesaan								
	Obat Modern			Obat Tradisional			Lainnya		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	91,06	87,62	89,32	29,12	30,94	30,04	2,45	3,47	2,97
Sumatera Utara	91,84	93,04	92,45	25,00	22,66	23,82	3,18	3,04	3,11
Sumatera Barat	78,70	79,01	78,85	39,26	36,17	37,79	2,32	1,88	2,11
Riau	92,07	91,48	91,77	23,59	20,15	21,81	2,10	2,69	2,41
Jambi	95,20	94,30	94,76	25,81	27,46	26,61	2,42	2,85	2,63
Sumatera Selatan	90,41	90,61	90,51	25,60	23,10	24,38	5,34	5,28	5,31
Bengkulu	85,74	86,75	86,24	26,52	26,78	26,65	3,16	5,59	4,38
Lampung	89,98	91,19	90,56	17,29	16,58	16,96	7,58	8,54	8,04
Kep. Bangka Belitung	90,91	95,05	92,93	23,59	17,97	20,84	7,68	7,06	7,38
Kepulauan Riau	92,16	87,45	89,82	12,67	18,09	15,36	0,82	7,52	4,14
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	95,09	95,53	95,30	16,30	17,11	16,69	2,41	1,99	2,21
Jawa Tengah	93,17	94,23	93,70	11,06	8,66	9,85	4,61	4,82	4,72
DI Yogyakarta	87,62	80,70	84,34	13,93	24,27	18,83	11,60	12,51	12,03
Jawa Timur	92,98	92,40	92,71	17,48	19,67	18,51	3,04	3,96	3,48
Banten	97,52	98,52	98,00	12,92	9,84	11,43	5,12	4,33	4,74
Bali	84,03	69,56	77,25	27,92	41,31	34,20	3,39	2,51	2,98
Nusa Tenggara Barat	87,80	86,74	87,28	22,85	23,81	23,32	0,51	1,44	0,97
Nusa Tenggara Timur	78,98	79,93	79,44	31,92	31,90	31,91	2,40	2,95	2,67
Kalimantan Barat	88,85	87,71	88,27	23,66	21,66	22,64	3,64	5,81	4,75
Kalimantan Tengah	95,01	95,08	95,05	19,15	18,26	18,72	5,49	3,58	4,57
Kalimantan Selatan	97,75	96,13	96,98	17,23	20,79	18,93	2,73	2,89	2,80
Kalimantan Timur	93,79	94,26	94,03	25,66	26,11	25,89	0,89	1,38	1,14
Sulawesi Utara	93,72	94,29	94,01	8,41	8,73	8,57	2,01	1,97	1,98
Sulawesi Tengah	92,70	89,83	91,29	15,82	14,91	15,38	3,49	4,26	3,87
Sulawesi Selatan	89,67	90,76	90,21	21,12	19,98	20,56	3,93	1,70	2,84
Sulawesi Tenggara	93,43	90,73	92,17	11,98	14,16	13,00	0,75	2,90	1,75
Gorontalo	96,23	96,00	96,12	11,78	12,85	12,27	2,98	2,33	2,68
Sulawesi Barat	81,19	78,42	79,89	25,28	27,19	26,17	3,25	1,47	2,42
Maluku	87,72	92,30	90,00	28,62	24,45	26,55	2,87	2,32	2,60
Maluku Utara	86,64	86,52	86,58	39,83	34,93	37,46	12,35	9,03	10,75
Papua Barat	84,90	78,48	81,57	32,32	39,05	35,82	2,18	4,26	3,26
Papua	60,91	68,25	64,24	67,35	62,35	65,08	3,13	1,89	2,57
Indonesia	91,18	91,15	91,16	20,36	20,11	20,24	3,53	3,70	3,61

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.12...3 Persentase Anak yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Mengobati Sendiri Selama Sebulan Terakhir menurut Penggunaan Obat dan jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan								
	Obat Modern			Obat Tradisional			Lainnya		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	92,19	89,57	90,88	24,13	26,08	25,10	2,31	2,85	2,58
Sumatera Utara	92,45	93,33	92,90	20,56	19,44	20,00	2,71	2,38	2,55
Sumatera Barat	81,15	80,10	80,63	31,81	30,52	31,18	3,23	2,20	2,73
Riau	93,26	92,46	92,86	18,76	18,25	18,50	2,09	2,57	2,33
Jambi	94,67	94,88	94,77	23,72	23,14	23,44	1,78	2,76	2,25
Sumatera Selatan	90,98	92,47	91,73	19,69	17,56	18,61	5,36	5,05	5,20
Bengkulu	88,44	88,33	88,39	22,75	24,71	23,72	3,16	4,27	3,71
Lampung	90,01	91,55	90,75	18,08	17,18	17,65	7,53	7,44	7,49
Kep. Bangka Belitung	92,32	93,97	93,09	18,13	15,29	16,80	5,50	4,50	5,03
Kepulauan Riau	88,10	91,02	89,48	32,79	25,63	29,40	5,46	3,75	4,65
DKI Jakarta	94,44	94,38	94,41	13,44	17,16	15,17	3,72	3,11	3,44
Jawa Barat	96,10	96,38	96,24	12,27	12,42	12,34	1,91	1,85	1,88
Jawa Tengah	93,88	94,40	94,14	10,58	9,01	9,80	4,48	4,10	4,29
DI Yogyakarta	89,04	88,42	88,74	13,47	16,63	14,99	6,55	7,25	6,89
Jawa Timur	94,20	93,68	93,95	13,46	15,16	14,29	2,71	3,90	3,29
Banten	96,57	98,29	97,44	9,50	7,92	8,70	4,12	3,51	3,81
Bali	82,72	83,69	83,19	24,74	25,99	25,35	4,26	4,49	4,37
Nusa Tenggara Barat	89,34	89,07	89,21	19,74	20,13	19,94	1,18	1,41	1,30
Nusa Tenggara Timur	82,07	82,87	82,46	27,29	26,95	27,12	2,20	2,43	2,31
Kalimantan Barat	90,27	90,17	90,22	18,33	17,14	17,74	3,66	4,70	4,18
Kalimantan Tengah	95,48	95,07	95,28	16,58	15,25	15,92	4,62	3,82	4,23
Kalimantan Selatan	96,54	96,27	96,41	14,56	15,87	15,19	2,67	2,74	2,70
Kalimantan Timur	95,42	93,93	94,70	17,68	15,86	16,80	1,20	2,99	2,06
Sulawesi Utara	93,66	93,62	93,64	8,20	9,10	8,66	1,90	2,57	2,24
Sulawesi Tengah	93,30	91,84	92,57	15,07	13,23	14,14	3,07	3,68	3,37
Sulawesi Selatan	89,75	90,80	90,26	19,37	18,96	19,17	3,99	2,51	3,27
Sulawesi Tenggara	92,46	90,52	91,54	12,62	14,43	13,48	0,99	2,85	1,87
Gorontalo	96,25	96,16	96,21	10,69	10,75	10,72	2,62	1,70	2,20
Sulawesi Barat	83,26	82,06	82,69	23,20	23,51	23,35	2,84	1,71	2,30
Maluku	90,20	93,55	91,88	21,29	20,07	20,68	2,63	2,54	2,58
Maluku Utara	87,03	88,58	87,80	34,62	29,71	32,18	10,31	6,73	8,53
Papua Barat	88,72	85,00	86,85	21,98	27,88	24,95	2,65	4,62	3,64
Papua	67,40	73,92	70,40	56,75	51,95	54,54	2,55	1,68	2,15
Indonesia	92,73	93,01	92,87	16,15	15,99	16,07	3,21	3,26	3,23

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L -5.13.1 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas Kesehatan, 2014

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskes mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	5,07	1,91	22,51	45,97	29,11	2,65	0,80	0,78
Sumatera Utara	2,77	3,26	31,50	19,79	45,67	3,27	0,60	1,43
Sumatera Barat	3,66	3,97	18,39	24,93	50,85	2,99	0,29	1,12
Riau	4,18	9,03	45,85	23,72	24,56	1,43	0,75	1,20
Jambi	5,80	4,05	28,22	47,39	16,04	0,69	-	1,33
Sumatera Selatan	4,07	10,52	36,14	25,59	26,26	1,29	0,23	0,95
Bengkulu	4,02	3,06	34,32	29,10	33,45	5,61	0,70	2,27
Lampung	1,76	2,88	25,06	32,21	38,28	3,34	-	2,39
Kep. Bangka Belitung	5,93	3,71	41,06	36,43	18,89	2,75	0,38	0,38
Kepulauan Riau	4,95	12,99	38,58	24,10	21,38	1,04	0,04	0,20
DKI Jakarta	2,83	8,31	52,31	33,68	2,56	0,75	0,07	2,09
Jawa Barat	4,13	5,93	42,70	35,68	18,09	1,90	0,73	1,62
Jawa Tengah	2,98	3,95	34,29	30,54	34,71	1,26	0,72	1,45
DI Yogyakarta	3,68	13,53	35,58	28,73	20,05	0,90	-	0,75
Jawa Timur	2,91	5,26	32,52	26,29	36,82	1,06	0,33	0,68
Banten	1,61	6,80	49,89	24,91	19,86	0,82	0,38	1,42
Bali	4,80	7,00	41,34	16,52	33,47	0,66	0,06	0,71
Nusa Tenggara Barat	3,23	1,44	31,36	47,60	23,19	3,63	0,53	2,30
Nusa Tenggara Timur	9,49	3,93	33,35	47,16	8,48	-	-	1,11
Kalimantan Barat	4,61	2,92	30,61	34,43	30,29	1,55	0,31	0,66
Kalimantan Tengah	6,20	2,70	38,64	36,62	21,94	0,83	0,73	3,37
Kalimantan Selatan	5,71	3,06	38,12	35,01	21,86	2,38	0,23	0,70
Kalimantan Timur	3,87	9,47	38,92	41,24	9,62	0,53	0,26	2,42
Sulawesi Utara	2,37	1,72	56,26	32,58	10,46	0,36	-	0,15
Sulawesi Tengah	12,35	2,30	30,81	39,41	24,87	1,63	1,03	1,59
Sulawesi Selatan	5,54	4,58	25,38	49,59	16,18	1,36	0,20	2,87
Sulawesi Tenggara	6,94	3,67	24,30	59,49	7,18	0,30	-	0,87
Gorontalo	3,00	-	31,67	49,90	17,98	5,57	0,44	-
Sulawesi Barat	7,48	0,94	20,05	43,56	31,68	2,11	0,59	-
Maluku	5,38	1,90	32,26	49,86	14,17	0,78	-	1,36
Maluku Utara	8,56	2,82	47,63	38,30	3,77	-	-	0,78
Papua Barat	8,75	1,54	38,32	50,79	2,61	0,09	-	-
Papua	20,51	4,99	41,79	33,18	5,96	0,87	0,87	1,06
Indonesia	3,66	5,69	38,45	31,69	24,76	1,52	0,46	1,39

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.13.2 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas Kesehatan, 2014

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskes mas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Perdesaan	
							Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,48	1,96	11,20	54,42	37,69	2,62	1,25	2,85
Sumatera Utara	3,15	2,94	12,53	21,05	62,49	2,47	0,85	2,48
Sumatera Barat	2,34	1,05	9,07	30,58	56,11	7,93	0,37	1,53
Riau	1,84	3,94	26,30	30,44	37,63	3,73	0,71	3,18
Jambi	2,78	0,94	17,77	30,70	49,25	1,13	-	1,28
Sumatera Selatan	2,88	1,59	13,29	20,67	64,22	3,23	0,74	2,02
Bengkulu	1,62	0,65	21,41	18,95	59,85	2,84	0,39	1,46
Lampung	1,54	1,37	14,91	26,57	59,69	2,20	0,51	1,40
Kep. Bangka Belitung	1,45	0,84	24,94	40,62	34,71	0,94	-	0,83
Kepulauan Riau	2,43	-	21,93	48,25	23,25	5,01	-	4,41
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	3,84	1,93	28,39	29,74	43,95	1,63	1,08	2,66
Jawa Tengah	2,50	1,97	24,24	24,78	52,70	1,58	0,89	1,50
DI Yogyakarta	3,47	8,51	29,96	33,46	33,80	0,51	0,51	1,43
Jawa Timur	2,26	2,13	19,57	19,22	60,68	2,06	0,58	2,03
Banten	0,50	0,42	17,90	30,86	51,00	1,16	-	2,70
Bali	3,69	1,14	31,74	24,22	45,46	0,58	-	0,65
Nusa Tenggara Barat	1,81	0,22	21,90	43,43	33,47	6,91	0,30	2,36
Nusa Tenggara Timur	1,53	1,71	8,52	78,25	7,14	0,50	0,11	5,34
Kalimantan Barat	2,80	2,07	7,07	36,23	52,61	1,83	0,38	2,98
Kalimantan Tengah	3,94	0,40	18,04	51,80	28,24	1,06	0,11	2,20
Kalimantan Selatan	2,35	0,58	12,69	35,94	46,52	2,93	0,39	4,09
Kalimantan Timur	6,70	1,66	19,42	57,71	16,09	1,57	0,79	3,46
Sulawesi Utara	3,27	3,18	28,60	35,21	33,77	0,45	0,27	1,55
Sulawesi Tengah	2,78	0,71	10,62	46,90	34,99	4,53	0,56	5,49
Sulawesi Selatan	2,45	0,49	10,11	60,65	28,78	1,56	0,32	2,15
Sulawesi Tenggara	2,42	2,24	8,08	60,85	26,75	1,41	0,49	3,49
Gorontalo	2,35	0,22	21,74	43,88	37,33	2,31	0,22	0,93
Sulawesi Barat	2,54	1,39	11,61	69,08	20,14	3,06	1,18	3,96
Maluku	2,58	-	10,08	67,53	21,63	-	-	-
Maluku Utara	5,90	1,01	9,21	64,72	14,20	1,24	0,52	7,99
Papua Barat	7,19	1,55	9,59	74,52	9,10	0,49	0,52	1,81
Papua	15,10	2,22	7,74	80,77	2,48	1,42	1,42	2,91
Indonesia	2,78	1,81	19,03	33,85	46,33	2,17	0,63	2,36

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.13.3 Persentase Anak yang Berobat Jalan Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas Kesehatan, 2014

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskesmas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,62	1,95	13,91	52,40	35,63	2,63	1,14	2,35
Sumatera Utara	2,95	3,11	22,41	20,40	53,73	2,89	0,72	1,93
Sumatera Barat	2,90	2,29	13,03	28,18	53,87	5,83	0,33	1,36
Riau	2,85	6,14	34,75	27,53	31,98	2,74	0,72	2,32
Jambi	3,82	2,00	21,35	36,41	37,89	0,98		1,30
Sumatera Selatan	3,37	5,26	22,68	22,69	48,62	2,43	0,53	1,58
Bengkulu	2,34	1,38	25,30	22,01	51,90	3,68	0,48	1,71
Lampung	1,58	1,69	17,10	27,79	55,07	2,45	0,40	1,61
Kep. Bangka Belitung	3,76	2,32	33,27	38,46	26,54	1,88	0,20	0,60
Kepulauan Riau	4,53	10,83	35,81	28,11	21,69	1,70	0,03	0,90
DKI Jakarta	2,83	8,31	52,31	33,68	2,56	0,75	0,07	2,09
Jawa Barat	4,03	4,58	37,86	33,67	26,84	1,81	0,85	1,97
Jawa Tengah	2,72	2,89	28,94	27,47	44,29	1,43	0,81	1,47
DI Yogyakarta	3,60	11,49	33,30	30,65	25,63	0,74	0,21	1,02
Jawa Timur	2,57	3,61	25,70	22,57	49,38	1,59	0,46	1,39
Banten	1,25	4,73	39,49	26,85	29,99	0,93	0,25	1,84
Bali	4,24	4,06	36,52	20,39	39,49	0,62	0,03	0,68
Nusa Tenggara Barat	2,40	0,73	25,86	45,17	29,17	5,54	0,39	2,33
Nusa Tenggara Timur	2,73	2,05	12,28	73,54	7,34	0,42	0,09	4,70
Kalimantan Barat	3,39	2,35	14,72	35,64	45,35	1,74	0,36	2,23
Kalimantan Tengah	4,76	1,23	25,50	46,30	25,96	0,98	0,33	2,62
Kalimantan Selatan	3,68	1,56	22,76	35,57	36,76	2,71	0,32	2,75
Kalimantan Timur	4,86	6,74	32,09	47,00	11,89	0,89	0,44	2,79
Sulawesi Utara	2,94	2,64	38,87	34,23	25,11	0,42	0,17	1,03
Sulawesi Tengah	4,80	1,04	14,89	45,31	32,85	3,92	0,66	4,66
Sulawesi Selatan	3,54	1,93	15,48	56,75	24,35	1,49	0,28	2,41
Sulawesi Tenggara	3,68	2,64	12,58	60,47	21,32	1,10	0,35	2,76
Gorontalo	2,64	0,12	26,20	46,58	28,63	3,77	0,32	0,51
Sulawesi Barat	3,99	1,26	14,08	61,59	23,52	2,78	1,01	2,80
Maluku	3,98	0,95	21,19	58,68	17,89	0,39		0,68
Maluku Utara	6,72	1,57	21,03	56,59	10,99	0,86	0,36	5,77
Papua Barat	7,72	1,55	19,29	66,51	6,91	0,36	0,34	1,20
Papua	16,88	3,13	18,92	65,14	3,62	1,24	1,24	2,30
Indonesia	3,23	3,77	28,83	32,76	35,45	1,84	0,55	1,87

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L-5.14.1 Tingkat Kunjungan Anak Ke Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas Kesehatan, 2014

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskesmas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Perkotaan
								Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,93	2,08	19,46	41,96	25,25	4,32	0,90	1,11
Sumatera Utara	2,94	3,58	27,22	17,48	42,84	3,68	0,77	1,49
Sumatera Barat	3,29	3,34	15,71	22,80	49,69	3,45	0,33	1,39
Riau	4,72	9,25	39,22	20,04	22,51	1,92	1,08	1,26
Jambi	4,56	3,18	25,02	43,97	14,81	2,72	0,00	5,74
Sumatera Selatan	7,75	8,83	34,65	23,37	22,98	1,16	0,36	0,90
Bengkulu	4,46	2,77	30,41	26,19	27,73	4,74	1,03	2,67
Lampung	1,55	3,53	23,42	29,27	36,98	2,80	0,00	2,45
Kep. Bangka Belitung	6,49	2,81	36,19	32,14	18,41	2,79	0,58	0,58
Kepulauan Riau	4,49	12,40	40,23	22,39	19,03	1,27	0,03	0,17
DKI Jakarta	4,14	8,62	48,59	33,16	2,27	1,05	0,06	2,13
Jawa Barat	4,08	5,47	37,77	32,62	15,13	2,20	0,89	1,84
Jawa Tengah	3,31	4,07	30,92	27,11	30,27	1,79	0,96	1,57
DI Yogyakarta	5,75	12,89	33,39	28,46	17,73	0,75	0,00	1,04
Jawa Timur	3,18	4,99	30,34	24,91	33,98	1,37	0,46	0,76
Banten	1,41	6,33	47,24	22,69	19,27	0,98	0,42	1,64
Bali	5,24	7,49	39,42	15,19	30,55	1,51	0,05	0,55
Nusa Tenggara Barat	2,68	1,72	26,92	39,58	20,76	5,09	0,66	2,58
Nusa Tenggara Timur	12,26	4,79	32,15	42,30	7,59	0,00	0,00	0,92
Kalimantan Barat	4,59	2,60	30,78	33,01	25,70	1,66	0,51	1,14
Kalimantan Tengah	8,39	2,72	32,28	32,82	18,55	1,13	1,06	3,05
Kalimantan Selatan	5,84	3,05	33,34	35,33	18,32	3,06	0,35	0,71
Kalimantan Timur	4,15	8,91	37,27	37,39	8,25	0,97	0,42	2,65
Sulawesi Utara	1,78	1,63	55,44	31,49	8,74	0,81	0,00	0,11
Sulawesi Tengah	12,33	2,66	23,30	32,85	23,40	2,24	1,42	1,80
Sulawesi Selatan	5,76	4,93	22,89	47,87	14,39	1,25	0,32	2,58
Sulawesi Tenggara	7,62	3,35	22,19	58,66	7,23	0,24	0,00	0,71
Gorontalo	2,69	0,00	29,18	46,46	16,70	4,62	0,34	0,00
Sulawesi Barat	6,74	0,70	16,21	42,09	30,24	3,14	0,88	0,00
Maluku	6,30	1,59	28,56	49,06	12,35	0,66	0,00	1,47
Maluku Utara	8,77	2,55	46,28	37,19	4,50	0,00	0,00	0,71
Papua Barat	7,85	1,85	38,37	49,24	2,61	0,08	0,00	0,00
Papua	19,75	4,81	37,77	27,65	5,81	1,35	1,35	1,50
Indonesia	3,99	5,46	34,92	29,23	22,33	1,91	0,61	1,55

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.14.2 Tingkat Kunjungan Anak Ke Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas Kesehatan, 2014

Provinsi	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskesmas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Perdesaan
								Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,07	2,06	9,21	46,65	30,30	3,47	1,48	2,76
Sumatera Utara	3,50	3,44	11,64	18,54	56,93	2,74	1,02	2,19
Sumatera Barat	2,53	1,41	8,43	27,43	48,73	9,31	0,47	1,68
Riau	2,42	3,75	21,98	27,94	34,61	4,81	1,09	3,39
Jambi	2,46	0,85	16,32	30,21	47,56	1,32	0,00	1,28
Sumatera Selatan	3,08	1,84	12,59	17,73	57,45	4,19	1,05	2,08
Bengkulu	1,55	0,77	19,67	17,04	56,14	2,79	0,58	1,46
Lampung	2,17	2,04	13,79	22,94	54,17	2,53	0,71	1,65
Kep. Bangka Belitung	1,12	0,65	20,59	41,87	33,57	1,56	0,00	0,64
Kepulauan Riau	2,05	0,00	22,18	43,82	20,60	6,06	0,00	5,29
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	4,45	2,06	25,79	24,96	36,87	1,87	1,41	2,59
Jawa Tengah	3,04	2,14	22,77	21,03	46,08	1,92	1,17	1,84
DI Yogyakarta	5,80	7,91	25,29	29,47	28,52	0,77	0,77	1,46
Jawa Timur	2,64	2,45	17,92	17,63	54,00	2,46	0,77	2,14
Banten	0,53	0,47	16,33	28,86	49,86	1,54	0,00	2,42
Bali	4,11	1,19	28,27	21,20	43,87	0,82	0,00	0,55
Nusa Tenggara Barat	2,54	0,27	19,90	40,62	27,96	6,34	0,53	1,84
Nusa Tenggara Timur	1,45	2,10	8,05	75,91	7,12	0,73	0,13	4,52
Kalimantan Barat	2,57	3,10	6,89	34,02	48,18	1,87	0,60	2,77
Kalimantan Tengah	3,81	0,41	16,78	47,04	28,28	0,92	0,17	2,59
Kalimantan Selatan	2,58	0,45	10,29	36,12	41,62	3,68	0,77	4,49
Kalimantan Timur	6,13	2,33	17,99	52,20	14,40	1,84	1,24	3,87
Sulawesi Utara	3,21	3,05	27,09	32,69	31,65	0,58	0,40	1,34
Sulawesi Tengah	2,82	0,89	10,25	43,43	31,38	4,86	0,91	5,45
Sulawesi Selatan	2,41	0,68	9,41	56,18	26,43	2,17	0,50	2,21
Sulawesi Tenggara	2,50	2,14	8,32	56,17	24,41	1,92	0,76	3,78
Gorontalo	2,85	0,33	18,65	37,70	37,03	2,29	0,33	0,84
Sulawesi Barat	2,67	1,71	9,82	57,03	20,24	3,30	1,57	3,65
Maluku	2,17	0,00	8,30	67,80	21,73	0,00	0,00	0,00
Maluku Utara	6,28	0,92	11,38	61,59	11,59	1,09	0,74	6,42
Papua Barat	7,38	1,76	9,55	69,73	8,07	0,80	0,82	1,88
Papua	12,01	2,24	6,42	70,57	2,47	1,60	1,60	3,09
Indonesia	3,11	2,03	17,44	30,44	41,15	2,58	0,87	2,37

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 5.14.3 Tingkat Kunjungan Anak Ke Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi dan Jenis Fasilitas Kesehatan, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan							
	Rumah Sakit Pemerintah	Rumah Sakit Swasta	Praktek Dokter/ Poliklinik	Puskesmas	Praktek Nakes	Praktek Batra	Dukun Bersalin	Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	4,25	2,07	11,35	45,67	29,25	3,65	1,35	2,42
Sumatera Utara	3,21	3,51	19,65	17,99	49,69	3,23	0,89	1,83
Sumatera Barat	2,84	2,19	11,38	25,56	49,12	6,94	0,41	1,56
Riau	3,40	6,10	29,35	24,56	29,44	3,57	1,09	2,48
Jambi	3,19	1,66	19,34	34,99	36,18	1,80	0,00	2,83
Sumatera Selatan	4,98	4,69	21,58	20,03	43,40	2,95	0,77	1,60
Bengkulu	2,43	1,37	22,92	19,81	47,53	3,38	0,71	1,83
Lampung	2,03	2,36	15,87	24,30	50,46	2,59	0,56	1,82
Kep. Bangka Belitung	3,93	1,78	28,74	36,79	25,65	2,20	0,30	0,61
Kepulauan Riau	4,06	10,22	37,05	26,16	19,30	2,11	0,03	1,07
DKI Jakarta	4,14	8,62	48,59	33,16	2,27	1,05	0,06	2,13
Jawa Barat	4,21	4,26	33,53	29,91	22,83	2,08	1,07	2,11
Jawa Tengah	3,17	3,04	26,56	23,86	38,73	1,86	1,07	1,71
DI Yogyakarta	5,77	10,74	29,89	28,90	22,39	0,76	0,33	1,22
Jawa Timur	2,88	3,62	23,63	20,97	44,81	1,96	0,63	1,50
Banten	1,11	4,32	36,65	24,80	29,76	1,17	0,28	1,91
Bali	4,67	4,30	33,78	18,22	37,28	1,16	0,02	0,55
Nusa Tenggara Barat	2,60	0,89	22,88	40,18	24,90	5,81	0,58	2,16
Nusa Tenggara Timur	2,99	2,48	11,49	71,10	7,18	0,63	0,11	4,01
Kalimantan Barat	3,21	2,94	14,42	33,70	41,09	1,80	0,57	2,26
Kalimantan Tengah	5,52	1,27	22,55	41,75	24,66	1,00	0,50	2,76
Kalimantan Selatan	3,89	1,50	19,56	35,80	32,25	3,43	0,60	2,97
Kalimantan Timur	4,86	6,55	30,36	42,70	10,45	1,28	0,71	3,09
Sulawesi Utara	2,68	2,53	37,51	32,25	23,22	0,67	0,25	0,89
Sulawesi Tengah	4,98	1,30	13,22	41,02	29,56	4,27	1,03	4,62
Sulawesi Selatan	3,57	2,14	14,06	53,32	22,28	1,85	0,44	2,34
Sulawesi Tenggara	3,89	2,47	12,08	56,84	19,76	1,46	0,56	2,95
Gorontalo	2,78	0,18	23,24	41,52	28,16	3,31	0,33	0,47
Sulawesi Barat	3,77	1,43	11,55	52,99	22,95	3,26	1,38	2,67
Maluku	4,16	0,77	18,05	58,78	17,22	0,32	0,00	0,71
Maluku Utara	6,93	1,35	20,44	55,26	9,75	0,80	0,54	4,94
Papua Barat	7,54	1,79	18,98	63,03	6,28	0,56	0,55	1,27
Papua	14,36	3,02	15,93	57,55	3,49	1,52	1,52	2,61
Indonesia	3,55	3,72	26,05	29,84	31,88	2,25	0,74	1,97

Sumber: BPS - Susenas 2014

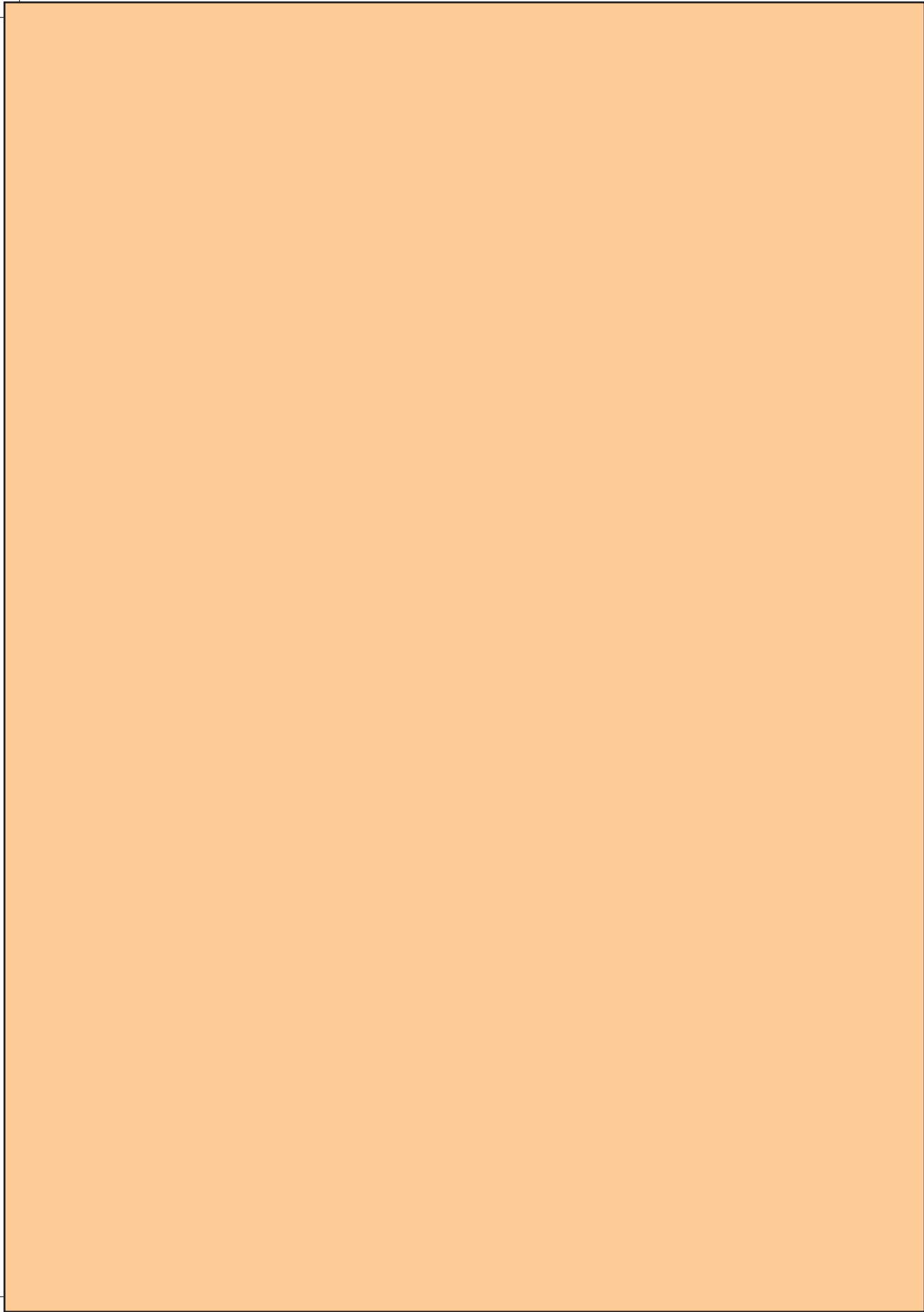
Tabel L- 5.15 Tingkat Kunjungan Anak Ke Fasilitas Kesehatan Menurut Provinsi dan Kelompok Tenaga Kesehatan, 2014

Provinsi	Perkotaan		Perdesaan		Perkotaan+Perdesaan	
	Tenaga Kesehatan	Bukan Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Bukan Tenaga Kesehatan	Tenaga Kesehatan	Bukan Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	93,67	6,33	92,29	7,71	92,58	7,42
Sumatera Utara	94,06	5,94	94,05	5,95	94,05	5,95
Sumatera Barat	94,84	5,16	88,53	11,47	91,09	8,91
Riau	95,74	4,26	90,71	9,29	92,86	7,14
Jambi	91,54	8,46	97,40	2,60	95,37	4,63
Sumatera Selatan	97,58	2,42	92,68	7,32	94,68	5,32
Bengkulu	91,56	8,44	95,17	4,83	94,08	5,92
Lampung	94,74	5,26	95,11	4,89	95,03	4,97
Kep. Bangka Belitung	96,05	3,95	97,80	2,20	96,88	3,12
Kepulauan Riau	98,53	1,47	88,65	11,35	96,79	3,21
DKI Jakarta	96,76	3,24	-	-	-	-
Jawa Barat	95,07	4,93	94,13	5,87	94,74	5,26
Jawa Tengah	95,68	4,32	95,07	4,93	95,35	4,65
DI Yogyakarta	98,21	1,79	97,00	3,00	97,69	2,31
Jawa Timur	97,41	2,59	94,63	5,37	95,91	4,09
Banten	96,95	3,05	96,05	3,95	96,64	3,36
Bali	97,89	2,11	98,63	1,37	98,26	1,74
Nusa Tenggara Barat	91,66	8,34	91,29	8,71	91,45	8,55
Nusa Tenggara Timur	99,08	0,92	94,61	5,39	95,25	4,75
Kalimantan Barat	96,69	3,31	94,76	5,24	95,37	4,63
Kalimantan Tengah	94,76	5,24	96,32	3,68	95,74	4,26
Kalimantan Selatan	95,88	4,12	91,06	8,94	93,00	7,00
Kalimantan Timur	95,96	4,04	93,05	6,95	94,92	5,08
Sulawesi Utara	99,08	0,92	97,68	2,32	98,19	1,81
Sulawesi Tengah	94,54	5,46	88,77	11,23	90,08	9,92
Sulawesi Selatan	95,85	4,15	95,12	4,88	95,37	4,63
Sulawesi Tenggara	99,05	0,95	93,54	6,46	95,03	4,97
Gorontalo	95,04	4,96	96,54	3,46	95,89	4,11
Sulawesi Barat	95,98	4,02	91,47	8,53	92,69	7,31
Maluku	97,88	2,12	100,00	0,00	98,98	1,02
Maluku Utara	99,29	0,71	91,76	8,24	93,71	6,29
Papua Barat	99,92	0,08	96,49	3,51	97,61	2,39
Papua	95,79	4,21	93,72	6,28	94,35	5,65
Indonesia	95,94	4,06	94,17	5,83	95,04	4,96

Sumber: BPS - Susenas 2014



Pendidikan Anak



Tabel L- 6.1.2 Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perdesaan				
Provinsi	Tidak/Blm Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	11,21	86,29	2,50	100,00
Sumatera Utara	12,03	84,88	3,10	100,00
Sumatera Barat	13,98	82,86	3,16	100,00
Riau	14,61	81,34	4,04	100,00
Jambi	10,95	84,33	4,71	100,00
Sumatera Selatan	11,24	83,13	5,62	100,00
Bengkulu	10,98	85,48	3,54	100,00
Lampung	11,51	83,95	4,54	100,00
Kep. Bangka Belitung	11,90	80,87	7,23	100,00
Kepulauan Riau	13,85	82,74	3,40	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	11,84	81,46	6,70	100,00
Jawa Tengah	9,97	84,98	5,05	100,00
D I Yogyakarta	14,40	84,56	1,04	100,00
Jawa Timur	12,01	82,76	5,23	100,00
Banten	10,81	83,23	5,96	100,00
Bali	12,10	84,45	3,45	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,42	84,40	3,18	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,35	84,64	4,01	100,00
Kalimantan Barat	12,44	81,19	6,37	100,00
Kalimantan Tengah	12,59	81,74	5,66	100,00
Kalimantan Selatan	13,29	80,74	5,97	100,00
Kalimantan Timur	11,21	86,30	2,49	100,00
Sulawesi Utara	8,19	87,34	4,46	100,00
Sulawesi Tengah	11,95	83,01	5,05	100,00
Sulawesi Selatan	10,00	84,46	5,54	100,00
Sulawesi Tenggara	9,67	86,19	4,14	100,00
Gorontalo	11,39	82,69	5,93	100,00
Sulawesi Barat	12,29	81,66	6,05	100,00
Maluku	10,16	86,57	3,27	100,00
Maluku Utara	11,66	85,08	3,26	100,00
Papua Barat	14,34	82,92	2,75	100,00
Papua	33,65	62,35	4,00	100,00
Indonesia	12,09	83,07	4,84	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 6.1.3 Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perkotaan+Perdesaan				
Provinsi	Tidak/Blm Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	11,39	86,50	2,11	100,00
Sumatera Utara	11,38	85,88	2,73	100,00
Sumatera Barat	13,66	83,71	2,63	100,00
Riau	14,16	82,54	3,29	100,00
Jambi	10,80	85,25	3,96	100,00
Sumatera Selatan	10,51	84,66	4,82	100,00
Bengkulu	11,43	85,61	2,96	100,00
Lampung	11,26	84,45	4,29	100,00
Kep. Bangka Belitung	10,79	83,72	5,49	100,00
Kepulauan Riau	16,06	82,26	1,68	100,00
DKI Jakarta	14,17	82,28	3,56	100,00
Jawa Barat	12,20	82,76	5,05	100,00
Jawa Tengah	10,30	85,13	4,57	100,00
D I Yogyakarta	14,43	84,85	0,73	100,00
Jawa Timur	12,72	83,49	3,79	100,00
Banten	11,68	84,08	4,24	100,00
Bali	12,50	85,14	2,36	100,00
Nusa Tenggara Barat	12,27	84,91	2,82	100,00
Nusa Tenggara Timur	11,12	85,16	3,72	100,00
Kalimantan Barat	12,40	82,15	5,44	100,00
Kalimantan Tengah	11,96	83,29	4,75	100,00
Kalimantan Selatan	12,68	82,36	4,96	100,00
Kalimantan Timur	12,37	85,55	2,08	100,00
Sulawesi Utara	8,31	87,21	4,48	100,00
Sulawesi Tengah	11,94	83,48	4,57	100,00
Sulawesi Selatan	10,74	84,32	4,93	100,00
Sulawesi Tenggara	9,87	86,33	3,80	100,00
Gorontalo	10,83	83,77	5,40	100,00
Sulawesi Barat	12,46	81,97	5,58	100,00
Maluku	9,24	87,81	2,95	100,00
Maluku Utara	11,22	86,01	2,76	100,00
Papua Barat	13,56	84,04	2,40	100,00
Papua	28,97	67,51	3,52	100,00
Indonesia	12,13	83,83	4,04	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 6.2.1 Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014
Perkotaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	99,26	92,65	77,52	99,25	94,46	87,00	99,26	93,58	82,26
Sumatera Utara	98,07	86,65	77,11	98,16	90,78	78,23	98,11	88,64	77,64
Sumatera Barat	97,39	87,45	71,52	98,42	91,86	84,53	97,88	89,65	77,62
Riau	97,60	83,02	61,27	97,68	87,05	73,11	97,64	84,80	66,97
Jambi	98,08	88,30	56,64	98,84	89,94	64,70	98,46	89,10	60,61
Sumatera Selatan	97,52	85,10	58,63	97,80	89,43	63,59	97,66	87,18	61,06
Bengkulu	98,30	90,80	66,91	99,51	93,26	75,20	98,89	92,00	71,04
Lampung	98,31	88,27	63,09	98,48	90,13	70,09	98,39	89,22	66,34
Kep. Bangka Belitung	96,19	78,87	49,03	96,74	76,35	65,13	96,47	77,68	57,35
Kepulauan Riau	99,59	83,49	64,89	98,24	87,51	79,35	98,93	85,47	71,18
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	97,02	84,27	56,98	98,38	86,95	56,67	97,68	85,59	56,84
Jawa Tengah	98,57	86,31	65,34	98,93	91,23	62,14	98,75	88,66	63,88
D I Yogyakarta	99,99	96,39	85,70	99,58	100,00	86,66	99,78	98,10	86,18
Jawa Timur	98,23	87,75	63,41	98,39	90,20	63,07	98,30	88,88	63,24
Banten	97,22	86,12	59,43	98,69	92,26	64,16	97,90	88,95	61,54
Bali	99,11	96,37	69,90	99,33	93,44	70,36	99,22	94,94	70,10
Nusa Tenggara Barat	97,97	92,18	70,15	97,72	91,46	61,04	97,86	91,81	65,76
Nusa Tenggara Timur	95,12	86,45	60,02	96,20	88,24	64,76	95,64	87,32	62,28
Kalimantan Barat	96,08	81,95	53,90	95,86	83,93	60,33	95,97	82,91	57,02
Kalimantan Tengah	97,99	84,09	55,84	98,42	80,32	59,62	98,20	82,35	57,63
Kalimantan Selatan	96,90	80,12	54,73	97,86	82,84	59,73	97,37	81,42	57,19
Kalimantan Timur	98,93	97,66	75,14	98,39	94,76	82,94	98,67	96,13	78,39
Sulawesi Utara	97,25	80,23	69,81	98,74	91,16	77,97	97,98	85,75	73,53
Sulawesi Tengah	95,86	78,06	57,31	96,64	86,13	70,91	96,23	81,88	63,85
Sulawesi Selatan	96,92	83,55	66,61	98,06	87,68	67,95	97,47	85,57	67,30
Sulawesi Tenggara	95,83	84,70	65,12	98,02	89,56	74,93	96,87	87,05	70,19
Gorontalo	95,20	73,73	48,80	98,84	82,95	68,96	97,03	78,30	58,59
Sulawesi Barat	97,07	76,24	66,18	95,32	85,43	62,96	96,22	80,79	64,51
Maluku	97,47	94,11	69,71	98,40	92,07	75,98	97,93	93,11	72,78
Maluku Utara	97,53	88,68	80,60	98,76	91,13	83,40	98,13	89,84	82,04
Papua Barat	94,43	88,39	74,07	95,71	89,14	65,07	95,02	88,74	69,78
Papua	69,80	61,82	50,73	69,71	64,31	45,91	69,76	62,94	48,59
Indonesia	96,87	85,63	63,75	97,51	88,96	66,42	97,18	87,24	65,02

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 6.2.2 Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perdesaan				
Provinsi	Tidak/Blm Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,23	96,80	2,96	100,00
Sumatera Utara	0,58	95,69	3,73	100,00
Sumatera Barat	0,69	95,55	3,76	100,00
Riau	0,86	94,23	4,91	100,00
Jambi	0,49	93,96	5,55	100,00
Sumatera Selatan	0,54	92,75	6,71	100,00
Bengkulu	0,38	95,43	4,19	100,00
Lampung	0,44	94,17	5,39	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,73	90,68	8,59	100,00
Kepulauan Riau	1,60	94,33	4,07	100,00
DKI Jakarta	-	-	-	-
Jawa Barat	0,69	91,51	7,80	100,00
Jawa Tengah	0,29	93,82	5,89	100,00
D I Yogyakarta	0,10	98,65	1,25	100,00
Jawa Timur	0,57	93,31	6,13	100,00
Banten	0,74	92,23	7,02	100,00
Bali	0,56	95,35	4,09	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,70	95,52	3,78	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,22	94,02	4,76	100,00
Kalimantan Barat	1,42	91,01	7,57	100,00
Kalimantan Tengah	0,55	92,65	6,80	100,00
Kalimantan Selatan	0,44	92,38	7,19	100,00
Kalimantan Timur	0,36	96,69	2,95	100,00
Sulawesi Utara	0,58	94,25	5,16	100,00
Sulawesi Tengah	1,41	92,62	5,97	100,00
Sulawesi Selatan	0,75	92,80	6,45	100,00
Sulawesi Tenggara	0,81	94,29	4,90	100,00
Gorontalo	0,79	92,28	6,93	100,00
Sulawesi Barat	0,84	91,94	7,21	100,00
Maluku	0,59	95,52	3,89	100,00
Maluku Utara	0,94	95,18	3,88	100,00
Papua Barat	2,60	94,14	3,27	100,00
Papua	22,68	72,54	4,78	100,00
Indonesia	1,15	93,14	5,72	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 6.2.3 Anak Berumur 7-17 Tahun menurut Provinsi dan Partisipasi Sekolah, 2014

Perkotaan+Perdesaan				
Provinsi	Tidak/Blm Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	0,20	97,27	2,53	100,00
Sumatera Utara	0,52	96,21	3,27	100,00
Sumatera Barat	0,50	96,37	3,13	100,00
Riau	0,82	95,18	4,00	100,00
Jambi	0,42	94,92	4,66	100,00
Sumatera Selatan	0,42	93,83	5,75	100,00
Bengkulu	0,28	96,20	3,52	100,00
Lampung	0,42	94,49	5,09	100,00
Kep. Bangka Belitung	0,53	92,93	6,54	100,00
Kepulauan Riau	0,73	97,19	2,08	100,00
DKI Jakarta	0,39	95,36	4,26	100,00
Jawa Barat	0,55	93,52	5,93	100,00
Jawa Tengah	0,31	94,34	5,35	100,00
D I Yogyakarta	0,03	99,09	0,88	100,00
Jawa Timur	0,45	95,08	4,47	100,00
Banten	0,49	94,48	5,03	100,00
Bali	0,59	96,60	2,80	100,00
Nusa Tenggara Barat	0,54	96,12	3,34	100,00
Nusa Tenggara Timur	1,12	94,47	4,42	100,00
Kalimantan Barat	1,09	92,43	6,47	100,00
Kalimantan Tengah	0,49	93,83	5,67	100,00
Kalimantan Selatan	0,59	93,51	5,91	100,00
Kalimantan Timur	0,40	97,09	2,51	100,00
Sulawesi Utara	0,52	94,24	5,25	100,00
Sulawesi Tengah	1,21	93,37	5,42	100,00
Sulawesi Selatan	0,66	93,57	5,78	100,00
Sulawesi Tenggara	0,74	94,76	4,51	100,00
Gorontalo	0,68	92,97	6,36	100,00
Sulawesi Barat	0,80	92,54	6,66	100,00
Maluku	0,48	96,02	3,50	100,00
Maluku Utara	0,79	95,92	3,28	100,00
Papua Barat	2,10	95,03	2,87	100,00
Papua	18,07	77,72	4,21	100,00
Indonesia	0,80	94,42	4,78	100,00

Sumber: BPS - Susenas 2014

Tabel L- 6.3.1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	100,00	98,30	91,47	99,86	97,74	97,63	99,94	98,02	94,55
Sumatera Utara	99,46	96,74	83,35	99,24	97,80	90,51	99,35	97,28	86,87
Sumatera Barat	99,80	95,79	86,61	99,42	99,57	96,59	99,62	97,70	91,72
Riau	99,26	97,20	85,55	98,63	97,52	90,56	98,95	97,37	87,85
Jambi	99,50	97,21	83,45	99,79	99,28	88,92	99,65	98,18	86,21
Sumatera Selatan	99,72	97,14	84,80	99,66	98,14	83,71	99,69	97,62	84,27
Bengkulu	100,00	98,18	88,86	100,00	98,16	96,86	100,00	98,17	92,47
Lampung	99,63	93,26	85,23	99,52	95,49	81,52	99,58	94,29	83,39
Kep. Bangka Belitung	99,46	94,75	80,37	100,00	95,62	81,99	99,72	95,18	81,25
Kepulauan Riau	99,01	99,08	88,62	99,62	99,57	89,12	99,30	99,32	88,88
DKI Jakarta	99,42	96,88	79,98	99,51	96,48	80,17	99,47	96,69	80,08
Jawa Barat	99,36	93,62	76,49	99,40	96,17	78,92	99,38	94,87	77,71
Jawa Tengah	99,44	96,16	77,82	99,64	96,44	82,35	99,54	96,29	80,05
D I Yogyakarta	100,00	100,00	94,47	100,00	99,84	97,93	100,00	99,92	96,07
Jawa Timur	99,48	97,92	87,58	99,54	98,54	85,96	99,51	98,22	86,75
Banten	99,32	96,60	83,41	99,83	96,21	79,50	99,57	96,41	81,45
Bali	99,42	97,94	92,08	99,05	98,56	88,71	99,24	98,26	90,55
Nusa Tenggara Barat	99,31	97,25	84,54	99,90	97,12	92,86	99,59	97,18	88,39
Nusa Tenggara Timur	98,82	97,88	88,32	98,67	96,71	88,99	98,75	97,30	88,63
Kalimantan Barat	99,49	95,19	80,29	99,22	97,44	89,50	99,36	96,31	85,44
Kalimantan Tengah	99,74	97,22	87,86	99,29	96,98	80,24	99,52	97,10	84,07
Kalimantan Selatan	98,71	90,94	83,67	99,78	95,04	85,86	99,22	92,74	84,82
Kalimantan Timur	99,12	97,20	88,16	99,25	98,70	92,49	99,18	97,89	90,19
Sulawesi Utara	98,67	93,85	78,73	99,09	96,39	79,29	98,88	95,01	79,02
Sulawesi Tengah	99,59	91,30	85,28	98,41	98,50	91,28	99,04	95,33	87,85
Sulawesi Selatan	98,80	95,21	80,34	99,45	96,31	83,77	99,11	95,76	82,01
Sulawesi Tenggara	99,33	94,46	83,72	99,53	96,88	86,62	99,43	95,57	85,10
Gorontalo	99,62	91,88	70,63	99,24	92,65	91,69	99,43	92,23	81,16
Sulawesi Barat	97,62	90,16	71,78	98,56	98,28	92,06	98,08	94,32	81,84
Maluku	99,75	99,56	86,11	99,43	97,73	87,46	99,60	98,60	86,77
Maluku Utara	99,84	97,96	87,11	99,88	98,84	95,86	99,86	98,43	91,52
Papua Barat	98,30	98,12	94,09	98,13	97,91	88,99	98,21	98,01	91,88
Papua	97,70	97,20	88,31	97,78	97,38	88,32	97,74	97,29	88,32
Indonesia	99,38	95,90	82,01	99,46	97,08	84,02	99,42	96,48	83,01

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.3.2 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perdesaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	99,73	96,08	84,12	99,89	98,28	87,02	99,81	97,14	85,58
Sumatera Utara	99,28	94,07	79,34	99,09	96,06	86,27	99,19	95,02	82,78
Sumatera Barat	98,94	92,47	78,22	99,21	97,05	89,23	99,07	94,74	83,69
Riau	98,72	92,72	76,26	98,27	92,56	83,96	98,50	92,64	80,01
Jambi	98,96	91,42	69,88	99,85	95,06	78,54	99,38	93,35	74,07
Sumatera Selatan	99,34	90,27	64,77	99,37	92,63	74,37	99,36	91,37	69,34
Bengkulu	99,20	96,95	75,37	99,26	95,12	87,69	99,23	96,03	81,27
Lampung	99,50	91,49	71,47	99,62	96,63	79,43	99,56	93,92	75,08
Kep. Bangka Belitung	97,97	88,50	70,83	99,41	87,36	62,52	98,67	87,93	67,02
Kepulauan Riau	99,36	93,82	71,47	97,11	98,19	86,71	98,32	95,70	77,97
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	99,03	88,26	66,89	99,24	90,15	64,69	99,13	89,20	65,89
Jawa Tengah	99,34	92,72	72,35	99,64	94,73	74,39	99,48	93,71	73,28
D I Yogyakarta	100,00	98,26	94,39	99,63	99,38	95,41	99,81	98,71	94,83
Jawa Timur	99,07	94,40	71,73	99,46	94,97	68,80	99,26	94,68	70,32
Banten	98,31	92,01	67,81	99,22	92,26	71,51	98,76	92,13	69,49
Bali	99,82	96,17	84,28	99,23	95,36	76,78	99,52	95,78	80,63
Nusa Tenggara Barat	98,40	96,91	80,21	99,25	97,81	79,92	98,79	97,33	80,06
Nusa Tenggara Timur	97,04	92,96	73,04	98,65	94,33	78,99	97,84	93,61	75,86
Kalimantan Barat	97,39	89,37	61,94	98,10	90,59	67,41	97,74	89,96	64,49
Kalimantan Tengah	99,11	89,93	62,37	99,77	91,79	66,58	99,43	90,83	64,28
Kalimantan Selatan	99,20	88,45	63,73	99,29	93,98	67,54	99,24	91,20	65,54
Kalimantan Timur	99,62	98,43	82,69	99,58	97,26	83,23	99,60	97,90	82,96
Sulawesi Utara	98,89	91,96	72,38	99,12	95,70	84,55	99,00	93,82	77,80
Sulawesi Tengah	96,92	88,76	69,65	97,82	91,47	81,78	97,36	90,06	75,17
Sulawesi Selatan	98,41	89,02	72,42	99,24	92,60	76,64	98,81	90,84	74,43
Sulawesi Tenggara	98,81	91,80	74,85	99,17	94,03	79,52	98,99	92,82	77,01
Gorontalo	96,79	86,85	67,42	99,14	92,78	81,17	97,95	89,61	74,18
Sulawesi Barat	97,69	82,99	70,97	98,02	93,18	78,25	97,86	87,84	74,77
Maluku	99,23	94,68	77,68	98,71	95,53	85,71	98,97	95,10	81,22
Maluku Utara	98,45	95,32	80,48	98,72	95,74	78,04	98,59	95,52	79,28
Papua Barat	96,50	95,84	84,09	95,51	95,13	82,32	96,02	95,51	83,29
Papua	77,48	71,06	53,49	74,90	73,70	56,94	76,27	72,28	54,97
Indonesia	98,32	91,68	71,94	98,62	93,63	75,27	98,47	92,62	73,51

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.3.3

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17	7-12	13-15	16-17
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	99,81	96,67	86,04	99,89	98,13	89,76	99,84	97,38	87,91
Sumatera Utara	99,36	95,25	81,32	99,16	96,89	88,33	99,26	96,06	84,78
Sumatera Barat	99,26	93,69	81,58	99,29	98,00	92,29	99,27	95,84	86,96
Riau	98,92	94,30	80,07	98,41	94,42	86,49	98,67	94,36	83,13
Jambi	99,11	93,41	73,83	99,83	96,29	81,75	99,46	94,88	77,71
Sumatera Selatan	99,47	92,41	73,30	99,47	94,42	78,44	99,47	93,36	75,77
Bengkulu	99,42	97,34	80,30	99,48	96,08	90,81	99,45	96,71	85,23
Lampung	99,53	91,93	75,15	99,59	96,35	80,06	99,56	94,01	77,44
Kep. Bangka Belitung	98,67	91,64	75,11	99,68	91,43	72,80	99,16	91,53	73,96
Kepulauan Riau	99,07	97,90	84,24	99,18	99,31	88,67	99,12	98,56	86,48
DKI Jakarta	99,42	96,88	79,98	99,51	96,48	80,17	99,47	96,69	80,08
Jawa Barat	99,25	91,72	73,30	99,35	93,99	74,72	99,30	92,84	73,99
Jawa Tengah	99,38	94,26	75,02	99,64	95,47	78,56	99,51	94,85	76,69
D I Yogyakarta	100,00	99,29	94,44	99,88	99,69	97,09	99,94	99,48	95,64
Jawa Timur	99,26	96,07	79,03	99,50	96,68	77,15	99,38	96,36	78,10
Banten	98,98	94,90	77,99	99,62	94,85	77,06	99,29	94,87	77,54
Bali	99,58	97,18	89,01	99,12	97,27	83,66	99,36	97,23	86,51
Nusa Tenggara Barat	98,76	97,03	82,23	99,52	97,51	85,21	99,11	97,27	83,71
Nusa Tenggara Timur	97,35	93,81	76,95	98,66	94,77	81,50	97,99	94,26	79,10
Kalimantan Barat	97,98	90,98	67,67	98,40	92,57	76,21	98,18	91,76	71,93
Kalimantan Tengah	99,30	92,36	71,67	99,62	93,55	72,13	99,46	92,94	71,88
Kalimantan Selatan	99,00	89,54	72,36	99,49	94,39	76,36	99,24	91,83	74,35
Kalimantan Timur	99,33	97,70	86,19	99,38	98,13	88,86	99,35	97,89	87,47
Sulawesi Utara	98,80	92,82	75,10	99,11	95,99	81,95	98,95	94,34	78,36
Sulawesi Tengah	97,50	89,25	74,60	97,94	93,22	84,57	97,71	91,23	79,05
Sulawesi Selatan	98,54	91,21	75,58	99,31	93,90	79,54	98,91	92,57	77,49
Sulawesi Tenggara	98,94	92,49	77,53	99,27	94,77	81,74	99,11	93,53	79,50
Gorontalo	97,63	88,51	68,51	99,17	92,73	84,81	98,40	90,47	76,57
Sulawesi Barat	97,67	84,47	71,18	98,14	94,36	81,59	97,91	89,26	76,55
Maluku	99,41	96,35	81,20	98,95	96,35	86,52	99,19	96,35	83,66
Maluku Utara	98,79	95,92	82,27	99,00	96,57	83,00	98,89	96,24	82,63
Papua Barat	97,02	96,48	87,57	96,27	96,07	84,52	96,65	96,28	86,21
Papua	81,52	77,00	62,02	79,78	79,29	65,84	80,69	78,07	63,70
Indonesia	98,82	93,66	77,00	99,02	95,27	79,88	98,92	94,44	78,39

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.4.1 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	96,90	88,17	75,18	96,83	84,51	75,03	96,86	86,36	75,11
Sumatera Utara	96,69	78,84	63,94	95,40	81,54	70,06	96,03	80,22	66,91
Sumatera Barat	98,19	78,25	68,86	97,68	86,48	76,75	97,94	82,39	73,01
Riau	97,13	78,21	65,31	96,32	85,72	69,91	96,72	82,13	67,34
Jambi	95,69	77,73	67,99	96,53	85,22	75,20	96,11	81,25	71,54
Sumatera Selatan	94,49	80,83	66,40	92,12	79,13	66,81	93,36	80,01	66,60
Bengkulu	97,96	82,94	68,83	97,59	75,50	70,94	97,77	79,22	69,86
Lampung	99,16	81,43	66,10	96,74	82,77	64,58	97,96	82,05	65,32
Kep. Bangka Belitung	97,67	74,39	59,82	96,88	76,26	66,63	97,29	75,30	63,36
Kepulauan Riau	98,10	85,70	73,28	98,50	84,88	72,30	98,28	85,31	72,75
DKI Jakarta	97,11	78,26	61,89	96,57	81,02	56,00	96,84	79,61	58,79
Jawa Barat	97,76	79,67	59,39	97,08	83,24	61,04	97,43	81,42	60,20
Jawa Tengah	96,53	79,57	61,62	96,57	81,04	62,55	96,55	80,28	62,08
D I Yogyakarta	98,63	84,24	66,25	99,66	82,05	65,83	99,17	83,14	66,06
Jawa Timur	97,31	81,77	68,98	96,90	85,39	66,45	97,11	83,52	67,70
Banten	96,90	80,96	61,32	97,05	82,95	61,08	96,97	81,93	61,20
Bali	95,49	82,96	77,59	93,16	89,35	64,95	94,36	86,20	71,47
Nusa Tenggara Barat	98,56	79,65	67,62	98,63	86,22	69,47	98,59	83,16	68,51
Nusa Tenggara Timur	93,81	72,21	72,01	90,86	73,66	67,55	92,41	72,92	69,97
Kalimantan Barat	95,66	72,01	58,71	95,13	73,36	68,91	95,41	72,69	64,17
Kalimantan Tengah	97,61	77,00	66,78	97,41	81,72	62,45	97,52	79,32	64,59
Kalimantan Selatan	97,38	70,09	61,40	96,86	79,90	63,98	97,13	74,40	62,75
Kalimantan Timur	95,81	78,39	69,48	96,23	77,86	71,53	96,02	78,15	70,46
Sulawesi Utara	93,70	70,06	59,39	90,52	72,54	57,29	92,14	71,19	58,33
Sulawesi Tengah	93,18	70,52	77,38	92,44	71,13	66,81	92,84	70,86	72,40
Sulawesi Selatan	97,16	73,35	62,63	96,75	77,80	60,18	96,96	75,60	61,42
Sulawesi Tenggara	96,78	80,08	65,39	96,88	74,48	65,96	96,83	77,51	65,69
Gorontalo	98,49	67,17	50,29	96,80	68,56	71,64	97,62	67,82	61,55
Sulawesi Barat	96,04	70,81	62,37	96,57	71,19	79,00	96,30	71,01	70,32
Maluku	90,64	73,42	61,62	92,09	66,14	61,36	91,33	69,60	61,49
Maluku Utara	94,77	86,33	70,66	93,11	69,39	73,66	93,98	77,23	72,17
Papua Barat	92,52	76,74	75,96	91,80	76,74	66,40	92,17	76,74	71,78
Papua	91,41	75,18	66,70	88,54	71,70	62,55	90,00	73,53	64,74
Indonesia	97,00	79,39	63,79	96,44	82,08	64,04	96,73	80,71	63,91

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.4.2 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perdesaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	98,34	82,86	65,15	97,91	86,85	68,89	98,13	84,78	66,98
Sumatera Utara	96,80	75,40	62,53	96,21	78,17	67,00	96,51	76,72	64,72
Sumatera Barat	97,89	66,33	55,13	97,92	76,96	69,07	97,90	71,61	62,05
Riau	96,65	72,85	54,82	95,83	77,40	63,43	96,24	75,11	58,99
Jambi	97,17	70,99	50,98	98,03	79,55	57,65	97,57	75,53	54,21
Sumatera Selatan	97,86	70,25	49,08	97,12	78,12	54,63	97,49	73,94	51,66
Bengkulu	98,51	74,10	57,88	97,71	76,21	65,80	98,13	75,16	61,72
Lampung	97,64	72,99	52,30	98,36	80,74	57,10	97,99	76,65	54,54
Kep. Bangka Belitung	95,62	64,86	50,23	95,95	71,96	51,20	95,78	68,39	50,68
Kepulauan Riau	98,63	69,33	60,49	97,11	84,82	66,27	97,93	75,97	62,93
DKI Jakarta	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Jawa Barat	98,38	72,87	50,32	97,46	78,20	46,31	97,94	75,52	48,40
Jawa Tengah	96,49	74,60	53,54	96,23	79,90	54,81	96,36	77,21	54,13
D I Yogyakarta	99,27	80,10	73,43	97,98	81,28	74,22	98,61	80,57	73,76
Jawa Timur	96,38	79,15	54,68	97,37	78,00	51,31	96,86	78,60	53,00
Banten	95,63	75,61	49,63	96,68	74,98	46,88	96,14	75,33	48,35
Bali	97,30	83,92	69,93	95,88	80,56	69,58	96,59	82,30	69,77
Nusa Tenggara Barat	96,35	82,02	61,36	97,68	81,36	59,94	96,96	81,71	60,61
Nusa Tenggara Timur	94,29	59,96	43,26	95,73	69,19	49,59	95,00	64,33	46,36
Kalimantan Barat	96,07	56,81	40,89	95,67	65,23	44,58	95,88	60,90	42,61
Kalimantan Tengah	98,06	71,05	42,51	98,77	75,94	46,63	98,41	73,42	44,42
Kalimantan Selatan	97,83	66,82	49,33	97,46	75,25	47,07	97,65	71,00	48,26
Kalimantan Timur	98,43	81,90	61,61	97,48	78,03	63,10	97,97	80,15	62,35
Sulawesi Utara	94,72	72,06	62,93	93,88	74,35	66,95	94,33	73,20	64,77
Sulawesi Tengah	92,53	67,13	55,37	90,41	74,23	63,49	91,49	70,55	59,03
Sulawesi Selatan	95,91	70,26	55,69	96,28	73,42	59,37	96,09	71,87	57,47
Sulawesi Tenggara	96,00	72,53	60,10	95,31	75,36	60,39	95,66	73,82	60,24
Gorontalo	95,23	66,54	48,90	97,52	70,82	57,65	96,36	68,53	53,32
Sulawesi Barat	94,32	65,74	47,20	94,85	69,73	57,48	94,58	67,64	52,35
Maluku	95,44	75,19	61,47	94,52	74,91	65,77	94,98	75,05	63,47
Maluku Utara	96,88	74,57	57,69	96,96	74,00	60,96	96,92	74,30	59,29
Papua Barat	93,16	64,01	57,63	92,83	64,77	57,11	93,00	64,36	57,40
Papua	76,59	47,82	34,60	73,92	47,56	36,19	75,34	47,70	35,29
Indonesia	96,24	72,75	53,63	96,16	76,75	55,45	96,20	74,68	54,50

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.4.3 Angka Partisipasi Murni (APM) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	97,95	84,26	67,83	97,63	86,21	70,60	97,80	85,20	69,20
Sumatera Utara	96,75	76,93	63,23	95,83	79,77	68,50	96,29	78,33	65,80
Sumatera Barat	98,00	70,72	60,53	97,83	80,53	72,31	97,92	75,61	66,52
Riau	96,82	74,74	59,20	96,01	80,52	65,86	96,42	77,67	62,31
Jambi	96,76	73,30	55,84	97,58	81,20	62,79	97,15	77,34	59,22
Sumatera Selatan	96,72	73,55	56,08	95,53	78,45	59,93	96,13	75,87	57,92
Bengkulu	98,36	76,91	61,74	97,68	75,98	67,63	98,03	76,44	64,61
Lampung	98,03	75,10	56,03	97,93	81,23	59,39	97,98	77,98	57,64
Kep. Bangka Belitung	96,59	69,64	54,68	96,39	74,08	59,28	96,49	71,83	56,93
Kepulauan Riau	98,19	82,04	69,83	98,25	84,87	71,18	98,22	83,36	70,52
DKI Jakarta	97,11	78,26	61,89	96,57	81,02	56,00	96,84	79,61	58,79
Jawa Barat	97,97	77,26	56,49	97,21	81,41	56,47	97,60	79,30	56,48
Jawa Tengah	96,51	76,83	57,47	96,38	80,39	58,81	96,45	78,57	58,11
D I Yogyakarta	98,85	82,54	68,57	99,10	81,81	68,30	98,98	82,20	68,46
Jawa Timur	96,81	80,39	61,43	97,15	81,53	58,58	96,98	80,94	60,00
Banten	96,46	78,98	57,25	96,93	80,21	56,46	96,69	79,56	56,87
Bali	96,23	83,37	74,64	94,31	85,80	66,66	95,29	84,58	70,83
Nusa Tenggara Barat	97,22	81,16	64,28	98,07	83,43	63,95	97,62	82,29	64,11
Nusa Tenggara Timur	94,21	62,06	50,64	94,94	70,02	53,78	94,56	65,86	52,15
Kalimantan Barat	95,95	61,00	46,50	95,53	67,58	53,76	95,75	64,23	50,06
Kalimantan Tengah	97,92	73,03	50,89	98,36	77,91	52,69	98,13	75,40	51,75
Kalimantan Selatan	97,65	68,25	54,67	97,21	77,03	55,41	97,44	72,40	55,04
Kalimantan Timur	96,88	79,82	66,60	96,74	77,93	68,27	96,81	78,96	67,41
Sulawesi Utara	94,31	71,15	61,32	92,45	73,60	62,08	93,42	72,32	61,69
Sulawesi Tengah	92,67	67,79	61,95	90,81	73,46	64,54	91,77	70,62	63,13
Sulawesi Selatan	96,34	71,36	58,52	96,44	74,95	59,70	96,39	73,18	59,10
Sulawesi Tenggara	96,21	74,47	61,64	95,73	75,13	62,19	95,97	74,77	61,91
Gorontalo	96,20	66,75	49,35	97,29	70,08	62,45	96,74	68,29	56,07
Sulawesi Barat	94,71	66,79	50,96	95,24	70,07	62,45	94,97	68,37	56,65
Maluku	93,76	74,59	61,54	93,71	71,63	63,77	93,74	73,10	62,60
Maluku Utara	96,36	77,26	61,46	96,05	72,76	64,78	96,21	75,03	63,10
Papua Barat	92,98	67,58	63,92	92,53	68,80	60,24	92,76	68,18	62,29
Papua	79,55	54,04	42,70	77,04	53,26	43,63	78,36	53,68	43,11
Indonesia	96,60	75,87	58,78	96,29	79,28	59,95	96,45	77,53	59,35

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.5.1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	111,57	100,29	84,30	115,40	94,84	87,53	113,39	97,59	85,92
Sumatera Utara	111,76	89,89	80,10	106,72	92,71	87,89	109,20	91,32	83,89
Sumatera Barat	109,47	88,78	84,27	108,42	98,42	88,47	108,97	93,64	86,48
Riau	111,54	89,14	79,71	108,03	97,31	86,61	109,78	93,40	82,75
Jambi	109,89	89,52	86,93	111,83	93,85	86,66	110,86	91,55	86,80
Sumatera Selatan	111,17	100,09	77,93	110,66	100,03	85,23	110,93	100,06	81,56
Bengkulu	109,40	98,73	86,73	113,04	82,88	93,74	111,24	90,80	90,16
Lampung	112,84	86,41	77,03	107,50	92,58	75,01	110,19	89,26	76,00
Kep. Bangka Belitung	118,11	82,76	82,32	113,27	84,67	88,70	115,78	83,69	85,63
Kepulauan Riau	107,56	92,21	86,22	108,88	93,31	81,95	108,18	92,73	83,90
DKI Jakarta	104,93	87,67	79,52	103,43	94,19	70,39	104,18	90,86	74,71
Jawa Barat	106,90	87,50	71,80	106,69	92,04	72,56	106,80	89,72	72,17
Jawa Tengah	108,99	90,54	77,39	110,84	91,01	77,83	109,89	90,77	77,61
D I Yogyakarta	106,76	96,37	88,86	109,87	86,34	90,16	108,38	91,34	89,44
Jawa Timur	105,91	92,09	85,75	105,45	95,21	77,17	105,69	93,59	81,41
Banten	110,59	90,77	77,54	106,58	91,90	77,39	108,61	91,32	77,47
Bali	104,71	94,97	92,28	103,32	102,03	77,36	104,04	98,56	85,06
Nusa Tenggara Barat	108,21	89,10	79,13	107,58	95,64	81,77	107,91	92,59	80,40
Nusa Tenggara Timur	112,31	94,02	96,28	106,48	98,60	91,37	109,53	96,29	94,03
Kalimantan Barat	109,14	89,75	76,22	109,85	89,86	86,49	109,47	89,80	81,72
Kalimantan Tengah	112,18	85,05	89,27	111,04	89,04	76,85	111,63	87,02	83,00
Kalimantan Selatan	110,59	78,81	81,52	107,08	89,38	76,43	108,90	83,45	78,87
Kalimantan Timur	108,56	91,82	93,02	108,86	89,59	92,85	108,71	90,79	92,94
Sulawesi Utara	110,22	82,62	83,70	110,07	94,59	77,55	110,15	88,08	80,58
Sulawesi Tengah	102,57	91,20	92,77	108,30	83,04	93,06	105,21	86,64	92,91
Sulawesi Selatan	109,09	81,22	83,90	106,89	87,77	81,09	108,04	84,52	82,52
Sulawesi Tenggara	112,95	89,22	92,31	110,27	83,23	84,09	111,61	86,47	88,07
Gorontalo	116,53	72,74	77,40	115,91	79,55	93,26	116,21	75,89	85,76
Sulawesi Barat	107,36	78,55	89,13	104,87	79,07	118,43	106,12	78,82	103,13
Maluku	110,70	96,74	82,94	109,69	82,29	95,49	110,22	89,16	89,15
Maluku Utara	106,91	105,01	85,78	106,39	83,85	109,31	106,66	93,64	97,62
Papua Barat	110,02	99,06	90,18	104,96	95,31	96,64	107,52	97,06	93,00
Papua	106,96	100,28	92,67	101,42	98,92	93,40	104,25	99,63	93,01
Indonesia	108,25	89,70	79,62	107,33	92,66	78,77	107,80	91,15	79,20

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.5.2 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	111,82	93,39	79,45	110,23	97,23	80,32	111,04	95,23	79,88
Sumatera Utara	113,36	86,28	80,08	109,21	92,83	84,11	111,32	89,41	82,06
Sumatera Barat	112,49	80,60	71,15	111,50	88,96	81,57	112,01	84,75	76,32
Riau	112,17	88,03	66,61	106,14	90,58	77,93	109,20	89,30	72,09
Jambi	111,91	83,87	64,17	109,30	88,09	72,66	110,68	86,11	68,28
Sumatera Selatan	114,46	78,73	66,72	110,62	87,86	65,17	112,53	83,01	66,00
Bengkulu	116,70	86,34	67,30	113,22	87,74	80,37	115,03	87,04	73,64
Lampung	114,03	84,30	64,63	113,25	87,79	66,40	113,65	85,95	65,45
Kep. Bangka Belitung	111,13	78,27	62,59	110,77	84,50	69,33	110,95	81,37	65,69
Kepulauan Riau	116,35	76,17	69,73	108,43	96,01	76,68	112,68	84,68	72,67
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	107,13	81,05	63,04	107,55	86,03	58,12	107,33	83,53	60,69
Jawa Tengah	110,36	87,32	68,62	110,47	89,33	70,47	110,41	88,31	69,47
DI Yogyakarta	112,50	92,41	111,40	108,68	85,08	98,63	110,55	89,47	106,10
Jawa Timur	107,13	93,04	66,90	108,78	87,78	60,90	107,93	90,51	63,91
Banten	114,57	86,87	60,67	110,06	85,78	67,89	112,38	86,37	64,02
Bali	111,55	94,08	82,04	103,95	90,55	89,71	107,77	92,38	85,62
Nusa Tenggara Barat	109,01	93,03	74,92	110,87	91,55	72,64	109,87	92,33	73,72
Nusa Tenggara Timur	116,84	83,05	62,22	114,57	91,42	67,21	115,72	87,01	64,66
Kalimantan Barat	116,99	71,58	56,05	113,64	81,41	58,69	115,36	76,35	57,28
Kalimantan Tengah	112,33	83,67	57,84	112,00	83,96	60,41	112,17	83,81	59,03
Kalimantan Selatan	111,87	77,55	67,10	111,35	85,99	62,14	111,62	81,74	64,77
Kalimantan Timur	112,62	94,96	73,96	112,72	92,57	74,89	112,67	93,89	74,43
Sulawesi Utara	107,34	85,78	80,94	108,62	89,05	92,30	107,94	87,40	86,14
Sulawesi Tengah	106,85	82,36	72,76	102,22	96,29	86,86	104,58	89,06	79,12
Sulawesi Selatan	109,66	81,02	70,96	109,54	82,59	80,79	109,60	81,82	75,72
Sulawesi Tenggara	114,37	82,91	79,87	110,96	89,27	79,39	112,68	85,80	79,64
Gorontalo	109,01	80,09	66,91	110,96	79,86	78,05	109,97	79,98	72,54
Sulawesi Barat	107,75	78,76	61,13	110,46	83,18	74,57	109,10	80,86	67,86
Maluku	111,83	91,58	80,67	112,05	90,89	86,97	111,94	91,24	83,60
Maluku Utara	111,87	84,36	76,92	112,23	82,69	80,37	112,05	83,55	78,62
Papua Barat	110,00	85,51	81,03	110,21	81,78	74,27	110,10	83,77	78,02
Papua	88,49	64,13	48,25	85,61	60,41	52,60	87,14	62,40	50,14
Indonesia	110,37	85,10	68,29	109,29	87,75	69,81	109,84	86,38	69,02

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.5.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) Anak menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan								
	Laki-laki			Perempuan			Laki-laki+Perempuan		
	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM	SD	SMP	SM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	111,75	95,20	80,74	111,57	96,57	82,33	111,66	95,87	81,53
Sumatera Utara	112,63	87,88	80,09	108,04	92,77	85,97	110,34	90,29	82,96
Sumatera Barat	111,38	83,61	76,31	110,36	92,50	84,48	110,89	88,05	80,46
Riau	111,94	88,42	72,08	106,85	93,11	81,19	109,42	90,79	76,33
Jambi	111,35	85,81	70,67	110,06	89,76	76,75	110,73	87,83	73,63
Sumatera Selatan	113,34	85,39	71,25	110,63	91,81	73,89	112,01	88,43	72,51
Bengkulu	114,70	90,27	74,15	113,17	86,20	85,13	113,95	88,23	79,49
Lampung	113,72	84,83	67,98	111,71	88,94	69,04	112,74	86,76	68,49
Kep. Bangka Belitung	114,43	80,52	71,74	111,94	84,58	79,46	113,22	82,52	75,51
Kepulauan Riau	109,15	88,63	81,77	108,80	93,82	80,97	108,99	91,06	81,36
DKI Jakarta	104,93	87,67	79,52	103,43	94,19	70,39	104,18	90,86	74,71
Jawa Barat	106,98	85,21	69,00	106,98	89,86	68,08	106,98	87,50	68,55
Jawa Tengah	109,76	88,76	72,89	110,63	90,06	74,27	110,18	89,40	73,55
D I Yogyakarta	108,72	94,75	96,15	109,47	85,94	92,65	109,11	90,66	94,62
Jawa Timur	106,56	92,58	75,80	107,21	91,32	68,71	106,88	91,98	72,24
Banten	111,95	89,33	71,67	107,75	89,79	74,30	109,89	89,55	72,94
Bali	107,51	94,59	88,33	103,59	97,39	81,92	105,59	95,99	85,27
Nusa Tenggara Barat	108,70	91,59	76,89	109,53	93,29	76,48	109,08	92,44	76,68
Nusa Tenggara Timur	116,06	84,94	70,96	113,25	92,75	72,84	114,68	88,66	71,86
Kalimantan Barat	114,78	76,59	62,40	112,64	83,85	69,18	113,75	80,15	65,72
Kalimantan Tengah	112,28	84,13	68,69	111,71	85,69	66,71	112,01	84,89	67,74
Kalimantan Selatan	111,36	78,10	73,48	109,61	87,29	69,20	110,52	82,45	71,36
Kalimantan Timur	110,22	93,10	86,04	110,43	90,78	85,90	110,32	92,04	85,97
Sulawesi Utara	108,51	84,34	82,20	109,24	91,35	84,87	108,86	87,70	83,48
Sulawesi Tengah	105,91	84,09	78,75	103,43	92,99	88,82	104,71	88,53	83,35
Sulawesi Selatan	109,46	81,09	76,23	108,63	84,40	80,91	109,06	82,77	78,51
Sulawesi Tenggara	114,00	84,53	83,48	110,78	87,70	80,90	112,40	85,97	82,22
Gorontalo	111,24	77,67	70,30	112,52	79,76	83,27	111,88	78,64	76,95
Sulawesi Barat	107,66	78,72	68,06	109,19	82,22	84,71	108,42	80,41	76,30
Maluku	111,44	93,35	81,63	111,26	87,68	90,84	111,35	90,50	86,04
Maluku Utara	110,65	89,07	79,49	110,85	83,00	89,08	110,75	86,06	84,23
Papua Barat	110,01	89,32	84,17	108,68	86,34	81,79	109,36	87,86	83,12
Papua	92,18	72,35	59,46	88,98	69,50	64,11	90,67	71,02	61,53
Indonesia	109,37	87,26	74,03	108,35	90,08	74,50	108,87	88,63	74,26

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.6.1. Angka Buta Huruf Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	14,02	14,42	14,21
Sumatera Utara	11,72	9,77	10,75
Sumatera Barat	13,82	11,81	12,84
Riau	13,14	10,89	12,03
Jambi	11,30	8,68	10,01
Sumatera Selatan	9,18	8,81	9,00
Bengkulu	10,75	11,00	10,87
Lampung	9,95	10,17	10,05
Kep. Bangka Belitung	11,99	9,48	10,78
Kepulauan Riau	11,63	12,22	11,91
DKI Jakarta	7,98	9,38	8,70
Jawa Barat	10,17	9,31	9,75
Jawa Tengah	9,99	8,63	9,33
D I Yogyakarta	11,91	9,97	10,93
Jawa Timur	9,42	8,56	9,00
Banten	11,86	9,57	10,75
Bali	9,48	10,79	10,13
Nusa Tenggara Barat	13,99	12,56	13,29
Nusa Tenggara Timur	12,07	10,77	11,45
Kalimantan Barat	14,17	12,33	13,26
Kalimantan Tengah	9,55	8,62	9,10
Kalimantan Selatan	9,13	8,17	8,67
Kalimantan Timur	11,07	9,92	10,52
Sulawesi Utara	9,16	8,23	8,70
Sulawesi Tengah	12,63	11,88	12,26
Sulawesi Selatan	13,89	13,12	13,52
Sulawesi Tenggara	16,77	11,37	14,21
Gorontalo	12,09	12,49	12,29
Sulawesi Barat	18,92	15,12	17,06
Maluku	9,62	8,75	9,20
Maluku Utara	14,96	10,79	12,93
Papua Barat	14,18	13,04	13,62
Papua	14,11	11,92	13,07
Indonesia	10,67	9,68	10,18

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.6.2. Angka Buta Huruf Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perdesaan
			Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	17,26	16,23	16,76
Sumatera Utara	14,75	15,19	14,97
Sumatera Barat	16,41	16,57	16,49
Riau	16,99	15,14	16,09
Jambi	13,58	13,09	13,34
Sumatera Selatan	15,20	13,34	14,29
Bengkulu	15,22	14,16	14,71
Lampung	13,28	13,38	13,33
Kep. Bangka Belitung	14,82	13,42	14,14
Kepulauan Riau	14,15	13,71	13,95
DKI Jakarta	-	-	-
Jawa Barat	12,72	11,95	12,35
Jawa Tengah	11,39	9,59	10,52
D I Yogyakarta	10,67	10,81	10,74
Jawa Timur	10,45	8,88	9,69
Banten	16,26	13,51	14,96
Bali	13,91	11,05	12,54
Nusa Tenggara Barat	18,21	15,93	17,13
Nusa Tenggara Timur	19,52	17,78	18,67
Kalimantan Barat	17,20	17,16	17,18
Kalimantan Tengah	13,32	14,15	13,72
Kalimantan Selatan	14,32	11,17	12,82
Kalimantan Timur	15,26	11,53	13,48
Sulawesi Utara	11,60	11,50	11,55
Sulawesi Tengah	18,11	16,26	17,22
Sulawesi Selatan	16,16	14,83	15,51
Sulawesi Tenggara	18,11	16,53	17,36
Gorontalo	18,96	15,24	17,15
Sulawesi Barat	20,93	19,03	19,99
Maluku	15,24	12,64	13,98
Maluku Utara	17,88	16,84	17,38
Papua Barat	23,54	25,51	24,50
Papua	39,02	39,98	39,46
Indonesia	14,84	13,61	14,25

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.6.3. Angka Buta Huruf Anak Berumur 5-17 Tahun menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan+Perdesaan	
			Laki-laki + Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	
Aceh	16,38	15,74	16,07	
Sumatera Utara	13,36	12,66	13,02	
Sumatera Barat	15,43	14,79	15,12	
Riau	15,56	13,54	14,57	
Jambi	12,90	11,76	12,35	
Sumatera Selatan	13,14	11,78	12,48	
Bengkulu	13,86	13,16	13,52	
Lampung	12,44	12,53	12,48	
Kep. Bangka Belitung	13,45	11,52	12,52	
Kepulauan Riau	12,11	12,49	12,29	
DKI Jakarta	7,98	9,38	8,70	
Jawa Barat	11,05	10,20	10,64	
Jawa Tengah	10,76	9,15	9,98	
D I Yogyakarta	11,46	10,25	10,86	
Jawa Timur	9,97	8,73	9,37	
Banten	13,38	10,89	12,18	
Bali	11,35	10,90	11,13	
Nusa Tenggara Barat	16,54	14,54	15,58	
Nusa Tenggara Timur	18,14	16,52	17,35	
Kalimantan Barat	16,33	15,74	16,05	
Kalimantan Tengah	12,11	12,37	12,24	
Kalimantan Selatan	12,20	9,94	11,12	
Kalimantan Timur	12,73	10,55	11,69	
Sulawesi Utara	10,55	10,06	10,31	
Sulawesi Tengah	16,87	15,26	16,09	
Sulawesi Selatan	15,34	14,22	14,79	
Sulawesi Tenggara	17,75	15,15	16,51	
Gorontalo	16,81	14,33	15,59	
Sulawesi Barat	20,47	18,14	19,32	
Maluku	13,23	11,23	12,26	
Maluku Utara	17,16	15,35	16,28	
Papua Barat	20,71	21,72	21,20	
Papua	33,69	33,66	33,68	
Indonesia	12,85	11,70	12,29	

Sumber: Susenas 2014, BPS

Tabel L- 6.7.1. Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan											
	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki + Perempuan			
	1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	Jumlah	1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	Jumlah	1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	98,4	0,6	1,1	100,0	99,0	0,1	0,8	100,0	98,7	0,4	1,0	100,0
Sumatera Utara	96,4	1,6	2,0	100,0	98,1	0,6	1,4	100,0	97,2	1,1	1,7	100,0
Sumatera Barat	96,6	2,2	1,2	100,0	99,3	0,4	0,3	100,0	97,9	1,3	0,8	100,0
Riau	97,0	1,5	1,5	100,0	98,0	0,8	1,2	100,0	97,5	1,2	1,3	100,0
Jambi	96,8	1,1	2,1	100,0	98,1	0,4	1,5	100,0	97,4	0,8	1,8	100,0
Sumatera Selatan	96,2	1,7	2,1	100,0	95,9	1,6	2,4	100,0	96,1	1,7	2,3	100,0
Bengkulu	97,0	1,0	2,0	100,0	99,0	0,5	0,5	100,0	98,0	0,7	1,2	100,0
Lampung	95,8	1,6	2,6	100,0	95,7	1,2	3,1	100,0	95,7	1,4	2,9	100,0
Kep. Bangka Belitung	95,5	2,7	1,8	100,0	95,8	1,6	2,6	100,0	95,7	2,2	2,2	100,0
Kepulauan Riau	98,4	0,4	1,2	100,0	98,4	0,2	1,4	100,0	98,4	0,3	1,3	100,0
DKI Jakarta	95,7	1,7	2,7	100,0	95,8	0,5	3,7	100,0	95,7	1,1	3,2	100,0
Jawa Barat	94,6	1,8	3,6	100,0	95,5	1,3	3,2	100,0	95,0	1,6	3,4	100,0
Jawa Tengah	94,8	1,7	3,5	100,0	95,8	0,8	3,4	100,0	95,3	1,2	3,5	100,0
D I Yogyakarta	99,0	0,4	0,7	100,0	99,6	0,0	0,4	100,0	99,3	0,2	0,5	100,0
Jawa Timur	97,5	1,1	1,4	100,0	97,3	0,7	2,0	100,0	97,4	0,9	1,7	100,0
Banten	96,5	1,1	2,4	100,0	95,5	1,1	3,4	100,0	96,0	1,1	2,9	100,0
Bali	98,5	0,3	1,3	100,0	97,7	0,4	1,9	100,0	98,1	0,3	1,6	100,0
Nusa Tenggara Barat	96,6	1,2	2,1	100,0	98,0	0,2	1,8	100,0	97,3	0,7	2,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	97,1	1,2	1,7	100,0	97,1	1,8	1,1	100,0	97,1	1,5	1,4	100,0
Kalimantan Barat	95,4	2,2	2,5	100,0	97,1	1,6	1,3	100,0	96,2	1,9	1,9	100,0
Kalimantan Tengah	97,3	1,4	1,3	100,0	96,0	1,2	2,8	100,0	96,6	1,3	2,1	100,0
Kalimantan Selatan	95,1	2,4	2,5	100,0	96,8	1,0	2,2	100,0	95,9	1,8	2,4	100,0
Kalimantan Timur	97,2	1,2	1,6	100,0	98,4	0,5	1,1	100,0	97,8	0,8	1,4	100,0
Sulawesi Utara	94,3	3,8	1,9	100,0	95,0	2,7	2,3	100,0	94,6	3,3	2,1	100,0
Sulawesi Tengah	95,2	1,5	3,3	100,0	97,9	0,7	1,4	100,0	96,5	1,2	2,4	100,0
Sulawesi Selatan	94,8	2,1	3,1	100,0	96,1	1,1	2,8	100,0	95,4	1,6	2,9	100,0
Sulawesi Tenggara	95,9	1,6	2,5	100,0	97,3	1,1	1,6	100,0	96,6	1,4	2,1	100,0
Gorontalo	93,0	4,6	2,5	100,0	96,7	2,5	0,8	100,0	94,9	3,5	1,6	100,0
Sulawesi Barat	92,3	5,2	2,5	100,0	98,0	0,3	1,7	100,0	95,2	2,8	2,1	100,0
Maluku	97,3	0,9	1,9	100,0	97,1	0,7	2,2	100,0	97,2	0,8	2,0	100,0
Maluku Utara	98,0	1,2	0,7	100,0	99,0	0,8	0,2	100,0	98,5	1,0	0,5	100,0
Papua Barat	98,1	1,2	0,7	100,0	98,0	0,3	1,7	100,0	98,0	0,8	1,2	100,0
Papua	97,9	0,4	1,7	100,0	97,6	1,0	1,4	100,0	97,8	0,7	1,5	100,0
Indonesia	95,9	1,6	2,5	100,0	96,6	0,9	2,5	100,0	96,2	1,2	2,5	100,0

Sumber: BPS-Susenas 2014

Catatan : 1 - Masih Sekolah
2 - Putus Sekolah
3 - Tamat Sekolah

Tabel L- 6.7.2. Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perdesaan											
	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki + Perempuan			
	1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	Jumlah	1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	Jumlah	1 ^{a)}	2 ^{a)}	3 ^{a)}	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	96,6	1,1	2,4	100,0	97,5	0,4	2,1	100,0	97,0	0,7	2,2	100,0
Sumatera Utara	95,5	2,2	2,3	100,0	97,1	1,2	1,7	100,0	96,2	1,7	2,0	100,0
Sumatera Barat	94,9	3,5	1,6	100,0	97,6	1,4	1,0	100,0	96,2	2,5	1,3	100,0
Riau	94,6	2,5	2,9	100,0	95,6	1,7	2,8	100,0	95,0	2,1	2,8	100,0
Jambi	93,4	2,9	3,7	100,0	95,5	1,7	2,8	100,0	94,4	2,3	3,3	100,0
Sumatera Selatan	92,0	3,6	4,4	100,0	94,6	1,7	3,7	100,0	93,3	2,7	4,1	100,0
Bengkulu	95,0	2,5	2,5	100,0	96,6	0,9	2,5	100,0	95,8	1,7	2,5	100,0
Lampung	93,1	2,8	4,1	100,0	96,2	0,8	3,0	100,0	94,6	1,8	3,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	91,6	5,4	3,0	100,0	91,1	4,0	4,9	100,0	91,3	4,7	3,9	100,0
Kepulauan Riau	94,5	2,1	3,4	100,0	97,6	0,8	1,6	100,0	95,9	1,5	2,6	100,0
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	91,9	2,1	6,0	100,0	92,4	1,6	5,9	100,0	92,1	1,9	6,0	100,0
Jawa Tengah	93,4	1,9	4,7	100,0	94,8	0,7	4,5	100,0	94,1	1,3	4,6	100,0
DI Yogyakarta	98,4	0,6	1,0	100,0	99,1	0,0	0,9	100,0	98,7	0,3	0,9	100,0
Jawa Timur	93,9	2,2	3,9	100,0	93,8	1,3	5,0	100,0	93,8	1,7	4,4	100,0
Banten	92,3	2,9	4,8	100,0	93,6	1,0	5,4	100,0	92,9	2,0	5,1	100,0
Bali	96,4	1,3	2,3	100,0	95,3	1,3	3,3	100,0	95,9	1,3	2,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	96,2	2,0	1,8	100,0	96,1	1,5	2,4	100,0	96,2	1,7	2,1	100,0
Nusa Tenggara Timur	94,3	3,9	1,7	100,0	96,1	2,2	1,7	100,0	95,2	3,1	1,7	100,0
Kalimantan Barat	91,6	4,8	3,7	100,0	93,1	3,0	3,9	100,0	92,3	3,9	3,8	100,0
Kalimantan Tengah	92,3	4,0	3,7	100,0	94,1	2,3	3,6	100,0	93,2	3,2	3,6	100,0
Kalimantan Selatan	91,8	3,3	4,9	100,0	93,8	2,1	4,1	100,0	92,8	2,7	4,5	100,0
Kalimantan Timur	97,4	1,0	1,6	100,0	96,7	0,8	2,5	100,0	97,0	0,9	2,1	100,0
Sulawesi Utara	93,3	3,8	2,8	100,0	96,5	2,1	1,5	100,0	94,8	3,0	2,2	100,0
Sulawesi Tengah	92,6	4,1	3,3	100,0	95,4	2,1	2,5	100,0	93,9	3,1	2,9	100,0
Sulawesi Selatan	92,6	4,1	3,3	100,0	94,5	2,0	3,5	100,0	93,5	3,1	3,4	100,0
Sulawesi Tenggara	94,1	3,2	2,6	100,0	96,0	1,8	2,2	100,0	95,1	2,5	2,4	100,0
Gorontalo	90,8	5,3	3,9	100,0	94,7	1,7	3,7	100,0	92,7	3,5	3,8	100,0
Sulawesi Barat	90,7	6,9	2,4	100,0	95,5	2,8	1,7	100,0	93,0	4,9	2,1	100,0
Maluku	95,5	2,5	2,0	100,0	96,7	1,6	1,6	100,0	96,1	2,1	1,8	100,0
Maluku Utara	96,2	2,2	1,6	100,0	96,0	2,2	1,8	100,0	96,1	2,2	1,7	100,0
Papua Barat	96,8	1,6	1,7	100,0	96,5	2,2	1,3	100,0	96,6	1,8	1,5	100,0
Papua	93,3	2,4	4,3	100,0	94,5	2,1	3,4	100,0	93,8	2,3	3,9	100,0
Indonesia	93,6	2,6	3,8	100,0	94,9	1,4	3,7	100,0	94,2	2,1	3,7	100,0

Sumber: BPS-Susenas 2014

Catatan : 1 - Masih Sekolah
2 - Putus Sekolah
3 - Tamat Sekolah

Tabel L- 6.7.3. Persentase Penduduk Berumur 7-17 Tahun yang Pernah/Sedang Sekolah menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan				Laki-Laki + Perempuan			
	1 ^a	2 ^a	3 ^a	Jumlah	1 ^a	2 ^a	3 ^a	Jumlah	1 ^a	2 ^a	3 ^a	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Aceh	97,1	0,9	2,0	100,0	97,9	0,3	1,8	100,0	97,5	0,6	1,9	100,0
Sumatera Utara	95,9	1,9	2,2	100,0	97,5	0,9	1,5	100,0	96,7	1,4	1,9	100,0
Sumatera Barat	95,5	3,0	1,5	100,0	98,2	1,0	0,7	100,0	96,9	2,1	1,1	100,0
Riau	95,5	2,2	2,4	100,0	96,5	1,4	2,2	100,0	96,0	1,8	2,3	100,0
Jambi	94,4	2,4	3,3	100,0	96,3	1,3	2,4	100,0	95,3	1,8	2,9	100,0
Sumatera Selatan	93,4	2,9	3,6	100,0	95,1	1,7	3,3	100,0	94,2	2,3	3,5	100,0
Bengkulu	95,6	2,0	2,3	100,0	97,3	0,8	1,8	100,0	96,5	1,4	2,1	100,0
Lampung	93,8	2,5	3,7	100,0	96,1	0,9	3,0	100,0	94,9	1,7	3,4	100,0
Kep. Bangka Belitung	93,5	4,1	2,4	100,0	93,4	2,8	3,8	100,0	93,4	3,5	3,1	100,0
Kepulauan Riau	97,6	0,7	1,7	100,0	98,2	0,3	1,5	100,0	97,9	0,5	1,6	100,0
DKI Jakarta	95,7	1,7	2,7	100,0	95,8	0,5	3,7	100,0	95,7	1,1	3,2	100,0
Jawa Barat	93,6	1,9	4,4	100,0	94,5	1,4	4,1	100,0	94,0	1,7	4,3	100,0
Jawa Tengah	94,0	1,8	4,2	100,0	95,3	0,7	4,0	100,0	94,6	1,3	4,1	100,0
D I Yogyakarta	98,8	0,4	0,8	100,0	99,5	0,0	0,5	100,0	99,1	0,2	0,7	100,0
Jawa Timur	95,6	1,7	2,7	100,0	95,4	1,0	3,6	100,0	95,5	1,3	3,1	100,0
Banten	95,0	1,7	3,3	100,0	94,9	1,1	4,1	100,0	94,9	1,4	3,6	100,0
Bali	97,6	0,7	1,7	100,0	96,7	0,8	2,5	100,0	97,2	0,7	2,1	100,0
Nusa Tenggara Barat	96,4	1,7	1,9	100,0	96,9	0,9	2,2	100,0	96,6	1,3	2,0	100,0
Nusa Tenggara Timur	94,8	3,4	1,7	100,0	96,3	2,2	1,6	100,0	95,5	2,8	1,7	100,0
Kalimantan Barat	92,7	4,0	3,3	100,0	94,3	2,6	3,1	100,0	93,5	3,3	3,2	100,0
Kalimantan Tengah	93,9	3,2	2,9	100,0	94,7	1,9	3,3	100,0	94,3	2,6	3,1	100,0
Kalimantan Selatan	93,2	2,9	3,9	100,0	95,0	1,6	3,3	100,0	94,1	2,3	3,6	100,0
Kalimantan Timur	97,3	1,1	1,6	100,0	97,7	0,6	1,7	100,0	97,5	0,9	1,7	100,0
Sulawesi Utara	93,7	3,8	2,4	100,0	95,8	2,4	1,8	100,0	94,7	3,1	2,2	100,0
Sulawesi Tengah	93,2	3,5	3,3	100,0	96,0	1,8	2,3	100,0	94,5	2,7	2,8	100,0
Sulawesi Selatan	93,4	3,4	3,3	100,0	95,0	1,7	3,3	100,0	94,2	2,6	3,3	100,0
Sulawesi Tenggara	94,6	2,8	2,6	100,0	96,4	1,6	2,0	100,0	95,5	2,2	2,3	100,0
Gorontalo	91,4	6,2	2,4	100,0	95,9	2,7	1,4	100,0	93,6	4,5	1,9	100,0
Sulawesi Barat	91,1	5,3	3,6	100,0	95,4	1,3	3,2	100,0	93,3	3,3	3,4	100,0
Maluku	96,1	1,9	2,0	100,0	96,9	1,3	1,8	100,0	96,5	1,6	1,9	100,0
Maluku Utara	96,6	2,0	1,4	100,0	96,7	1,9	1,4	100,0	96,7	1,9	1,4	100,0
Papua Barat	97,2	1,5	1,4	100,0	97,0	1,6	1,4	100,0	97,1	1,5	1,4	100,0
Papua	94,4	1,9	3,6	100,0	95,4	1,8	2,9	100,0	94,9	1,9	3,3	100,0
Indonesia	94,7	2,1	3,2	100,0	95,7	1,2	3,1	100,0	95,2	1,7	3,2	100,0

Sumber: BPS-Susenas 2014

Catatan : 1 - Masih Sekolah
2 - Putus Sekolah
3 - Tamat Sekolah

Tabel L- 6.8.1.1

Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan										
	Laki-laki										
	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urur Rumah tangga	Merasa Pendidik an cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	56,7	14,1	0,0	2,8	8,1	0,0	6,7	2,3	0,0	9,4	100,0
Sumatera Utara	38,9	7,2	0,0	7,3	0,0	0,3	3,1	1,0	0,5	41,6	100,0
Sumatera Barat	36,5	6,6	0,0	0,0	3,8	0,0	3,6	0,6	0,8	48,2	100,0
Riau	33,6	10,4	0,0	0,8	3,1	0,0	0,3	0,8	0,0	51,0	100,0
Jambi	40,8	15,1	0,0	0,8	0,0	0,0	15,9	0,0	0,0	27,4	100,0
Sumatera Selatan	29,6	13,2	0,0	11,0	3,6	0,0	6,8	7,1	0,0	28,6	100,0
Bengkulu	13,2	42,0	0,0	0,3	0,0	0,0	2,0	8,9	0,0	33,7	100,0
Lampung	37,6	4,0	0,3	4,7	6,6	0,0	7,1	0,9	0,0	38,8	100,0
Kep. Bangka Belitung	8,8	13,5	7,0	10,2	2,3	0,0	3,4	1,6	0,0	53,2	100,0
Kepulauan Riau	8,3	6,8	0,0	10,1	0,0	1,9	8,8	13,0	0,0	51,0	100,0
DKI Jakarta	44,0	10,6	0,0	6,2	0,0	2,0	3,2	4,7	0,0	29,2	100,0
Jawa Barat	44,8	8,4	0,0	6,1	1,8	0,7	3,5	0,6	0,0	34,1	100,0
Jawa Tengah	39,7	17,5	0,0	5,4	2,7	0,0	3,4	0,6	0,0	30,6	100,0
D I Yogyakarta	29,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	70,9	100,0
Jawa Timur	29,3	13,6	0,0	4,4	1,6	0,0	5,0	2,3	0,0	43,7	100,0
Banten	53,1	12,5	0,0	6,6	1,1	0,0	5,0	0,6	1,5	19,6	100,0
Bali	25,6	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	11,6	12,3	0,0	34,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	43,8	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	39,2	100,0
Nusa Tenggara Timur	29,8	23,7	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,0	0,0	42,9	100,0
Kalimantan Barat	22,1	18,7	1,5	12,8	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	39,9	100,0
Kalimantan Tengah	43,3	21,9	0,0	5,6	0,0	0,0	5,6	5,4	0,0	18,2	100,0
Kalimantan Selatan	7,8	23,0	0,0	7,2	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	53,1	100,0
Kalimantan Timur	31,2	19,0	0,0	3,1	0,0	0,9	6,5	0,0	0,9	38,4	100,0
Sulawesi Utara	12,2	16,0	0,0	5,8	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	57,1	100,0
Sulawesi Tengah	26,0	6,7	0,0	0,0	2,0	0,0	3,6	0,3	0,0	61,3	100,0
Sulawesi Selatan	27,7	19,3	0,4	2,0	0,3	0,0	5,5	1,7	0,8	42,3	100,0
Sulawesi Tenggara	23,6	20,2	0,0	2,3	0,0	0,0	6,3	4,2	1,6	41,7	100,0
Gorontalo	5,4	4,7	0,0	2,6	0,0	0,0	5,8	0,0	0,0	81,5	100,0
Sulawesi Barat	35,9	14,4	0,0	0,0	1,8	0,0	6,8	3,6	0,0	37,4	100,0
Maluku	22,6	9,6	0,0	10,3	0,0	0,0	8,4	6,5	0,0	42,5	100,0
Maluku Utara	17,8	20,4	0,0	10,3	11,5	0,0	3,8	0,0	0,0	36,2	100,0
Papua Barat	18,4	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	5,9	4,0	0,0	69,2	100,0
Papua	29,0	5,3	2,0	17,9	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	40,3	100,0
Indonesia	38,4	12,0	0,1	5,5	1,6	0,4	4,3	1,5	0,2	35,9	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.1.2. Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan											
Provinsi	Perempuan										
	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidik an cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	31,0	10,8	0,0	36,6	100,0
Sumatera Utara	40,5	6,8	1,3	4,7	1,5	0,3	10,4	6,3	0,0	28,2	100,0
Sumatera Barat	26,3	10,6	0,0	0,0	0,0	0,0	23,7	0,0	0,0	39,3	100,0
Riau	49,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	0,3	0,0	44,2	100,0
Jambi	35,6	3,6	0,0	0,0	3,9	2,0	15,8	11,3	0,0	27,9	100,0
Sumatera Selatan	32,4	19,0	10,7	14,0	0,2	0,0	2,0	0,7	0,0	21,0	100,0
Bengkulu	8,5	33,4	41,1	0,0	6,4	0,0	10,6	0,0	0,0	0,0	100,0
Lampung	55,0	7,6	10,5	0,0	0,0	0,0	5,8	0,7	5,8	14,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	36,5	7,3	0,0	5,0	0,0	1,4	7,1	0,9	0,0	41,8	100,0
Kepulauan Riau	38,7	13,5	0,0	4,7	0,0	0,0	18,2	2,1	0,0	22,8	100,0
DKI Jakarta	44,0	28,0	8,4	4,3	5,5	0,0	2,0	0,0	1,3	6,4	100,0
Jawa Barat	44,2	10,3	7,8	4,1	2,1	0,5	5,4	0,7	0,4	24,5	100,0
Jawa Tengah	44,5	20,7	5,0	5,4	0,5	0,0	6,9	2,5	0,4	13,9	100,0
D I Yogyakarta	59,4	40,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0
Jawa Timur	41,9	9,1	7,6	11,0	0,0	0,0	5,2	0,0	0,0	25,2	100,0
Banten	48,7	19,1	5,6	1,8	0,6	2,2	1,0	0,8	0,3	19,8	100,0
Bali	22,6	35,8	14,0	0,0	0,0	0,0	1,6	2,1	0,0	24,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	43,2	6,1	2,0	9,2	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	36,9	100,0
Nusa Tenggara Timur	36,0	6,4	7,3	5,4	0,0	0,0	6,7	0,0	0,0	38,2	100,0
Kalimantan Barat	37,2	14,3	8,7	2,0	2,2	0,0	12,3	6,2	0,0	17,1	100,0
Kalimantan Tengah	33,4	4,8	18,6	2,5	0,0	0,0	5,0	5,2	5,0	25,4	100,0
Kalimantan Selatan	34,5	12,6	7,6	12,2	0,0	0,0	7,2	1,1	0,0	24,8	100,0
Kalimantan Timur	29,1	0,0	27,1	3,6	0,0	1,0	9,9	7,5	0,0	21,8	100,0
Sulawesi Utara	24,0	7,9	12,4	8,2	0,0	0,0	8,3	1,1	0,0	38,2	100,0
Sulawesi Tengah	26,2	18,6	13,4	0,0	5,0	0,0	16,7	0,0	0,0	20,1	100,0
Sulawesi Selatan	38,2	11,3	9,7	10,8	0,0	1,7	3,4	6,7	0,0	18,2	100,0
Sulawesi Tenggara	43,6	9,5	14,0	6,4	0,0	0,2	6,6	0,0	0,0	19,6	100,0
Gorontalo	14,4	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0	64,2	100,0
Sulawesi Barat	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,3	0,0	0,0	78,2	100,0
Maluku	48,4	0,0	2,6	2,3	0,0	0,0	11,8	10,1	7,7	17,1	100,0
Maluku Utara	38,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	62,0	100,0
Papua Barat	22,5	0,0	7,4	1,1	4,1	0,0	24,1	3,7	4,3	32,9	100,0
Papua	30,8	7,2	7,3	5,7	0,0	2,2	6,9	4,6	0,0	35,2	100,0
Indonesia	42,4	13,7	7,3	5,2	1,4	0,4	5,6	1,6	0,5	21,9	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.1.3. Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan										
	Laki-laki+Perempuan										
	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidikan cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	43,8	8,9	0,0	1,7	5,1	0,0	15,6	5,4		19,4	100,0
Sumatera Utara	39,6	7,0	0,5	6,3	0,6	0,3	6,0	3,1	0,3	36,3	100,0
Sumatera Barat	34,2	7,5	0,0	0,0	2,9	0,0	8,2	0,5	0,6	46,1	100,0
Riau	40,8	5,8	0,0	0,4	1,7	0,0	2,6	0,6	0,0	48,0	100,0
Jambi	38,9	11,0	0,0	0,5	1,4	0,7	15,9	4,0	0,0	27,6	100,0
Sumatera Selatan	31,0	16,0	5,2	12,5	2,0	0,0	4,5	4,0	0,0	24,9	100,0
Bengkulu	11,9	39,7	11,0	0,2	1,7	0,0	4,3	6,5	0,0	24,7	100,0
Lampung	46,2	5,8	5,3	2,4	3,3	0,0	6,5	0,8	2,8	26,9	100,0
Kep. Bangka Belitung	22,0	10,5	3,6	7,7	1,2	0,7	5,2	1,2	0,0	47,8	100,0
Kepulauan Riau	21,8	9,8	0,0	7,7	0,0	1,1	13,0	8,2	0,0	38,5	100,0
DKI Jakarta	44,0	19,5	4,3	5,3	2,8	1,0	2,6	2,3	0,6	17,6	100,0
Jawa Barat	44,6	9,2	3,5	5,2	1,9	0,6	4,3	0,7	0,2	29,8	100,0
Jawa Tengah	41,8	18,9	2,2	5,4	1,8	0,0	4,9	1,4	0,2	23,3	100,0
D I Yogyakarta	37,2	10,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	52,0	100,0
Jawa Timur	35,7	11,3	3,9	7,8	0,8	0,0	5,1	1,1	0,0	34,3	100,0
Banten	50,8	16,0	3,0	4,1	0,9	1,1	2,9	0,7	0,9	19,7	100,0
Bali	24,0	26,4	7,4	0,0	0,0	0,0	6,3	6,9	0,0	29,0	100,0
Nusa Tenggara Barat	43,6	9,1	0,7	3,1	0,0	0,0	5,1	0,0	0,0	38,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	32,8	15,2	3,6	2,7	0,0	0,0	4,1	1,0	0,0	40,6	100,0
Kalimantan Barat	28,2	17,0	4,4	8,4	0,9	0,0	7,9	2,5	0,0	30,6	100,0
Kalimantan Tengah	37,4	11,6	11,2	3,7	0,0	0,0	5,3	5,3	3,0	22,5	100,0
Kalimantan Selatan	18,0	19,0	2,9	9,1	0,0	0,0	8,2	0,4	0,0	42,3	100,0
Kalimantan Timur	30,5	12,1	9,8	3,3	0,0	0,9	7,7	2,7	0,6	32,4	100,0
Sulawesi Utara	17,6	12,3	5,6	6,9	0,0	0,0	8,6	0,5	0,0	48,5	100,0
Sulawesi Tengah	26,1	10,6	4,4	0,0	3,0	0,0	8,0	0,2	0,0	47,7	100,0
Sulawesi Selatan	32,2	15,9	4,3	5,7	0,2	0,7	4,6	3,9	0,5	32,0	100,0
Sulawesi Tenggara	31,5	16,0	5,6	3,9	0,0	0,1	6,4	2,6	1,0	33,0	100,0
Gorontalo	8,4	3,1	1,7	1,8	0,0	0,0	9,2	0,0	0,0	75,8	100,0
Sulawesi Barat	29,5	11,1	0,0	0,0	1,4	0,0	8,3	2,8	0,0	46,9	100,0
Maluku	36,2	4,6	1,3	6,1	0,0	0,0	10,2	8,4	4,1	29,2	100,0
Maluku Utara	23,6	14,5	0,0	7,3	8,2	0,0	2,7	0,0	0,0	43,6	100,0
Papua Barat	20,7	1,1	4,1	0,6	2,3	0,0	16,0	3,8	2,4	49,0	100,0
Papua	29,9	6,2	4,6	12,1	0,0	1,0	6,1	2,2	0,0	37,9	100,0
Indonesia	40,2	12,8	3,3	5,4	1,5	0,4	4,9	1,5	0,3	29,6	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.2.1. Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perdesaan										
	Laki-laki										
	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidikan an cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	49,2	9,9	0,0	0,2	0,6	1,0	3,9	2,8	0,0	32,3	100,0
Sumatera Utara	40,1	8,6	0,0	8,7	1,2	3,8	5,1	1,5	0,3	30,6	100,0
Sumatera Barat	28,7	8,1	0,0	2,7	0,0	3,6	9,1	0,1	1,1	46,6	100,0
Riau	34,0	11,2	0,0	2,4	0,0	3,8	3,7	2,3	0,0	42,6	100,0
Jambi	45,1	9,3	0,0	8,5	1,1	2,5	3,2	0,8	0,7	28,7	100,0
Sumatera Selatan	30,1	17,5	0,2	7,0	1,4	5,4	3,3	0,5	0,0	34,6	100,0
Bengkulu	38,6	3,0	0,0	0,9	2,7	0,0	3,8	0,0	0,0	51,0	100,0
Lampung	43,6	15,0	0,0	7,3	0,6	1,4	6,6	0,0	0,0	25,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	17,4	13,4	0,0	0,9	0,0	5,0	5,1	0,0	1,2	57,1	100,0
Kepulauan Riau	24,0	6,2	0,0	11,5	1,6	5,0	4,2	11,5	0,0	36,1	100,0
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	55,7	4,4	0,1	2,2	1,5	3,4	3,3	0,0	0,1	29,4	100,0
Jawa Tengah	46,6	10,1	0,0	7,4	0,6	0,0	2,6	0,2	0,0	32,5	100,0
D I Yogyakarta	42,6	20,1	19,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17,9	100,0
Jawa Timur	38,2	13,9	0,6	4,8	1,4	2,3	5,9	0,3	0,0	32,6	100,0
Banten	57,2	3,9	0,0	0,0	0,0	1,9	5,7	0,0	0,0	31,2	100,0
Bali	33,7	7,3	5,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	49,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	30,9	8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	4,7	0,5	50,6	100,0
Nusa Tenggara Timur	28,3	9,8	0,0	1,4	2,0	3,2	8,4	0,1	0,3	46,6	100,0
Kalimantan Barat	28,6	22,3	1,0	3,2	0,7	5,4	2,1	0,0	0,0	36,8	100,0
Kalimantan Tengah	37,4	24,8	0,0	4,6	0,0	3,3	3,3	0,0	0,0	26,6	100,0
Kalimantan Selatan	32,6	8,9	0,0	6,0	4,9	6,1	2,0	0,5	1,2	37,9	100,0
Kalimantan Timur	32,3	17,0	0,0	0,0	0,9	5,4	4,6	5,6	0,0	34,2	100,0
Sulawesi Utara	31,1	10,0	0,6	5,3	1,6	2,4	5,0	0,0	0,0	44,0	100,0
Sulawesi Tengah	27,1	12,3	0,0	2,9	1,8	8,2	5,7	0,2	0,2	41,6	100,0
Sulawesi Selatan	26,0	16,8	0,6	2,9	1,0	6,6	7,0	1,1	0,2	37,7	100,0
Sulawesi Tenggara	23,9	12,1	0,0	0,6	0,9	4,5	10,7	1,3	0,0	46,0	100,0
Gorontalo	19,7	9,3	1,2	3,5	3,4	2,6	3,5	0,0	0,0	56,7	100,0
Sulawesi Barat	30,0	11,6	2,3	0,7		8,1	3,4	0,0	0,0	43,9	100,0
Maluku	34,5	7,3	0,4	7,2	1,1	2,4	5,0	3,8	0,0	38,3	100,0
Maluku Utara	29,3	3,7	1,6	2,8	1,5	4,3	14,1	1,5	0,0	41,2	100,0
Papua Barat	19,5	6,7	0,0	4,9	3,1	9,9	8,1	0,0	0,0	47,8	100,0
Papua	20,4	7,2	0,0	1,3	0,7	27,0	1,0	0,0	0,1	42,3	100,0
Indonesia	38,1	10,7	0,3	4,0	1,1	5,2	4,4	0,5	0,1	35,6	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.2.2. Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Perempuan											Perdesaan
Provinsi	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidik an cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	Total
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	63,5	0,0	10,0	1,6	0,0	1,3	2,7	0,6	0,0	20,4	100,0
Sumatera Utara	43,7	6,7	5,9	5,5	1,6	4,3	10,2	1,9	0,6	19,6	100,0
Sumatera Barat	43,8	3,1	7,4	1,7	0,0	1,7	8,1	0,0	1,5	32,7	100,0
Riau	46,7	4,9	4,7	5,1	1,2	2,0	4,9	0,0	0,7	30,0	100,0
Jambi	40,1	1,0	15,1	3,7	2,0	1,2	2,5	2,7	0,0	31,6	100,0
Sumatera Selatan	30,4	5,6	17,5	9,0	1,3	6,2	8,6	0,5	0,0	20,9	100,0
Bengkulu	40,6	2,0	9,4	0,0	2,4	0,0	6,3	3,5	0,0	35,8	100,0
Lampung	52,0	6,5	11,4	6,4	0,0	0,8	9,1	4,1	0,0	9,8	100,0
Kep. Bangka Belitung	24,4	6,1	18,7	1,6	1,2	4,6	1,2	0,0	0,0	42,1	100,0
Kepulauan Riau	16,5	27,6	0,0	0,0	6,1	6,1	3,9	0,0	0,0	39,8	100,0
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	52,0	2,2	11,4	6,4	0,9	5,7	4,9	0,5	0,0	16,0	100,0
Jawa Tengah	44,6	7,1	13,7	10,7	0,7	0,7	6,6	0,6	0,0	15,4	100,0
D I Yogyakarta	28,7	0,0	0,0	36,9	0,0	0,0	19,8	0,0	0,0	14,6	100,0
Jawa Timur	38,6	7,4	25,6	6,8	0,3	2,5	5,1	0,4	0,0	13,3	100,0
Banten	66,8	3,8	2,4	1,8	1,1	1,8	0,0	0,0	0,0	22,3	100,0
Bali	38,3	2,5	25,2	0,0	5,5	2,5	9,8	2,7	0,0	13,6	100,0
Nusa Tenggara Barat	50,8	0,0	10,6	2,3	0,0	6,0	11,4	0,0	0,0	18,8	100,0
Nusa Tenggara Timur	29,6	2,9	2,9	1,1	2,1	4,5	7,3	0,6	0,0	48,9	100,0
Kalimantan Barat	32,9	6,6	16,4	5,5	0,0	9,4	2,3	1,3	0,0	25,7	100,0
Kalimantan Tengah	37,2	10,2	14,1	7,3	0,0	5,0	4,3	3,0	0,0	18,9	100,0
Kalimantan Selatan	23,1	4,9	12,7	4,3	0,8	7,9	5,7	2,2	0,0	38,2	100,0
Kalimantan Timur	34,8	5,3	30,6	0,9	0,0	10,9	0,9	1,0	0,0	15,6	100,0
Sulawesi Utara	18,2	2,2	19,4	7,2	0,0	1,3	10,7	0,0	0,0	41,0	100,0
Sulawesi Tengah	31,7	0,6	13,7	0,0	1,3	16,6	6,8	0,8	0,1	28,6	100,0
Sulawesi Selatan	36,9	2,9	17,9	2,6	0,0	11,5	6,0	0,3	0,6	21,4	100,0
Sulawesi Tenggara	31,0	3,7	11,6	1,4	1,9	5,0	13,7	2,9	0,0	28,9	100,0
Gorontalo	14,7	2,6	13,0	1,3	0,0	21,4	6,1	0,0	0,0	40,8	100,0
Sulawesi Barat	36,7	4,3	4,5	1,5	4,3	17,4	4,0	1,9	0,0	25,4	100,0
Maluku	37,4	1,8	7,9	7,7	2,1	4,4	9,7	4,6	0,0	24,4	100,0
Maluku Utara	27,5	3,1	8,9	14,4	2,6	5,3	6,7	1,4	0,0	30,2	100,0
Papua Barat	17,1	4,0	11,9	0,5	0,0	3,1	9,9	0,0	0,0	53,4	100,0
Papua	23,4	3,7	1,0	1,3	0,6	26,3	0,6	0,0	0,1	43,0	100,0
Indonesia	40,3	4,7	12,8	5,3	0,8	6,7	5,4	0,8	0,1	23,0	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.2.3. Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki+Perempuan										Total
	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidik an cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	55,1	5,8	4,1	0,8	0,4	1,1	3,4	1,9	0,0	27,4	100,0
Sumatera Utara	41,6	7,8	2,4	7,4	1,4	4,0	7,2	1,7	0,4	26,1	100,0
Sumatera Barat	33,5	6,5	2,4	2,4	0,0	3,0	8,8	0,1	1,2	42,1	100,0
Riau	39,8	8,3	2,1	3,6	0,5	3,0	4,2	1,2	0,3	36,9	100,0
Jambi	43,2	6,2	5,8	6,7	1,5	2,0	3,0	1,5	0,4	29,8	100,0
Sumatera Selatan	30,2	12,7	7,2	7,8	1,4	5,7	5,4	0,5	0,0	29,1	100,0
Bengkulu	39,4	2,6	3,7	0,6	2,6	0,0	4,8	1,4	0,0	44,9	100,0
Lampung	46,5	12,1	3,9	7,0	0,4	1,2	7,4	1,4	0,0	20,1	100,0
Kep. Bangka Belitung	20,9	9,8	9,3	1,3	0,6	4,8	3,1	0,0	0,6	49,7	100,0
Kepulauan Riau	21,5	13,4	0,0	7,6	3,1	5,4	4,1	7,6	0,0	37,3	100,0
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	54,0	3,4	5,3	4,1	1,2	4,5	4,0	0,2	0,0	23,2	100,0
Jawa Tengah	45,8	8,8	5,8	8,8	0,6	0,3	4,3	0,4	0,0	25,2	100,0
D I Yogyakarta	37,4	12,6	12,2	13,8	0,0	0,0	7,4	0,0	0,0	16,6	100,0
Jawa Timur	38,4	10,8	12,7	5,8	0,8	2,4	5,5	0,4	0,0	23,2	100,0
Banten	61,2	3,9	1,0	0,7	0,5	1,8	3,3	0,0	0,0	27,5	100,0
Bali	36,4	4,5	16,9	0,0	3,2	1,4	5,7	3,2	0,0	28,7	100,0
Nusa Tenggara Barat	40,2	4,4	5,0	1,1	0,0	2,8	8,0	2,5	0,3	35,7	100,0
Nusa Tenggara Timur	28,8	7,1	1,1	1,3	2,1	3,7	8,0	0,3	0,2	47,5	100,0
Kalimantan Barat	30,4	15,5	7,7	4,2	0,4	7,1	2,2	0,5	0,0	32,0	100,0
Kalimantan Tengah	37,3	18,7	5,9	5,7	0,0	4,0	3,7	1,2	0,0	23,4	100,0
Kalimantan Selatan	28,6	7,2	5,3	5,3	3,2	6,8	3,5	1,2	0,7	38,0	100,0
Kalimantan Timur	33,6	11,1	15,6	0,5	0,4	8,2	2,7	3,3	0,0	24,7	100,0
Sulawesi Utara	26,8	7,4	6,8	5,9	1,1	2,0	6,9	0,0	0,0	43,0	100,0
Sulawesi Tengah	28,8	7,9	5,2	1,8	1,6	11,3	6,1	0,4	0,2	36,7	100,0
Sulawesi Selatan	30,5	11,0	7,8	2,8	0,6	8,6	6,6	0,8	0,4	30,9	100,0
Sulawesi Tenggara	26,8	8,7	4,6	0,9	1,3	4,7	11,9	1,9	0,0	39,1	100,0
Gorontalo	18,1	7,2	5,0	2,8	2,3	8,7	4,3	0,0	0,0	51,6	100,0
Sulawesi Barat	32,5	8,8	3,1	1,0	1,6	11,6	3,7	0,7	0,0	36,9	100,0
Maluku	35,7	5,1	3,4	7,4	1,5	3,2	6,9	4,1	0,0	32,6	100,0
Maluku Utara	28,4	3,4	5,2	8,5	2,0	4,8	10,5	1,4	0,0	35,8	100,0
Papua Barat	18,3	5,3	6,1	2,7	1,5	6,4	9,0	0,0	0,0	50,7	100,0
Papua	21,8	5,6	0,5	1,3	0,7	26,7	0,8	0,0	0,1	42,6	100,0
Indonesia	39,1	8,1	5,7	4,6	1,0	5,9	4,8	0,6	0,1	30,2	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.3.1. Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Perkotaan+Perdesaan										
	Laki-laki										
	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidik an cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	50,3	10,5	0,0	0,6	1,7	0,9	4,3	2,8	0,0	28,9	100,0
Sumatera Utara	39,6	8,0	0,0	8,2	0,7	2,4	4,3	1,3	0,4	35,0	100,0
Sumatera Barat	30,7	7,7	0,0	2,0	1,0	2,7	7,7	0,2	1,0	47,0	100,0
Riau	33,9	11,0	0,0	2,0	0,8	2,8	2,8	1,9	0,0	44,8	100,0
Jambi	44,4	10,3	0,0	7,2	0,9	2,1	5,4	0,7	0,6	28,4	100,0
Sumatera Selatan	30,0	16,6	0,1	7,9	1,9	4,3	4,0	1,8	0,0	33,4	100,0
Bengkulu	33,6	10,6	0,0	0,8	2,2		3,5	1,7	0,0	47,6	100,0
Lampung	42,5	13,0	0,1	6,8	1,7	1,1	6,7	0,2	0,0	27,9	100,0
Kep. Bangka Belitung	14,6	13,4	2,3	3,9	0,8	3,4	4,6	0,5	0,8	55,9	100,0
Kepulauan Riau	15,0	6,5	0,0	10,7	0,7	3,2	6,8	12,4	0,0	44,6	100,0
DKI Jakarta	44,0	10,6	0,0	6,2	0,0	2,0	3,2	4,7	0,0	29,2	100,0
Jawa Barat	49,7	6,6	0,0	4,4	1,6	1,9	3,4	0,3	0,0	32,0	100,0
Jawa Tengah	43,9	13,0	0,0	6,6	1,4	0,0	2,9	0,4	0,0	31,7	100,0
D I Yogyakarta	35,5	9,5	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	100,0
Jawa Timur	35,8	13,8	0,4	4,7	1,4	1,7	5,6	0,9	0,0	35,6	100,0
Banten	55,3	7,9	0,0	3,1	0,5	1,0	5,4	0,3	0,7	25,8	100,0
Bali	29,9	11,2	2,8	0,0	0,0	0,0	5,4	7,9	0,0	42,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	35,6	9,1	0,0	0,0	0,0	0,0	5,5	3,0	0,3	46,4	100,0
Nusa Tenggara Timur	28,5	11,1	0,0	1,2	1,8	2,8	7,7	0,3	0,3	46,2	100,0
Kalimantan Barat	27,5	21,7	1,1	4,7	0,6	4,5	2,5	0,0	0,0	37,3	100,0
Kalimantan Tengah	38,2	24,4	0,0	4,7	0,0	2,8	3,6	0,8	0,0	25,4	100,0
Kalimantan Selatan	24,5	13,4	0,0	6,4	3,3	4,1	4,2	0,4	0,8	42,8	100,0
Kalimantan Timur	31,7	18,2	0,0	1,9	0,3	2,7	5,8	2,2	0,5	36,7	100,0
Sulawesi Utara	23,9	12,2	0,4	5,5	1,0	1,5	6,5	0,0	0,0	49,0	100,0
Sulawesi Tengah	27,0	11,5	0,0	2,5	1,8	7,0	5,4	0,2	0,2	44,5	100,0
Sulawesi Selatan	26,5	17,5	0,5	2,7	0,8	4,8	6,6	1,3	0,4	39,0	100,0
Sulawesi Tenggara	23,9	13,7	0,0	0,9	0,7	3,6	9,8	1,9	0,3	45,1	100,0
Gorontalo	16,1	8,2	0,9	3,3	2,6	2,0	4,1	0,0	0,0	62,9	100,0
Sulawesi Barat	31,2	12,1	1,9	0,6	0,4	6,5	4,1	0,7	0,0	42,6	100,0
Maluku	31,7	7,9	0,3	7,9	0,8	1,8	5,8	4,4	0,0	39,3	100,0
Maluku Utara	27,6	6,1	1,4	3,9	2,9	3,7	12,6	1,3	0,0	40,5	100,0
Papua Barat	19,4	6,0	0,0	4,1	2,6	8,3	7,7	0,6	0,0	51,2	100,0
Papua	20,8	7,1	0,1	2,0	0,7	26,0	1,1	0,0	0,1	42,2	100,0
Indonesia	38,2	11,2	0,2	4,5	1,3	3,5	4,3	0,9	0,1	35,7	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.3.2.

Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan											
Provinsi	Perempuan										Total
	Tidak ada biaya	Bekerja/Mencari Nafkah	Menikah/Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidikan cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	58,2	0,0	8,7	1,4	0,0	1,1	6,2	1,8	0,0	22,4	100,0
Sumatera Utara	42,5	6,7	4,2	5,2	1,6	2,8	10,3	3,6	0,4	22,9	100,0
Sumatera Barat	40,7	4,4	6,1	1,4	0,0	1,4	10,9	0,0	1,2	33,9	100,0
Riau	47,5	3,7	3,5	3,8	0,9	1,5	5,0	0,1	0,5	33,5	100,0
Jambi	39,4	1,4	12,7	3,1	2,3	1,4	4,6	4,0	0,0	31,0	100,0
Sumatera Selatan	30,9	9,1	15,7	10,3	1,0	4,5	6,9	0,6	0,0	21,0	100,0
Bengkulu	36,8	5,7	13,1	0,0	2,9	0,0	6,8	3,1	0,0	31,6	100,0
Lampung	52,9	6,8	11,2	4,5	0,0	0,6	8,1	3,1	1,6	11,1	100,0
Kep. Bangka Belitung	28,1	6,5	12,9	2,7	0,8	3,6	3,0	0,3	0,0	42,0	100,0
Kepulauan Riau	31,6	18,0	0,0	3,2	2,0	2,0	13,6	1,4	0,0	28,3	100,0
DKI Jakarta	44,0	28,0	8,4	4,3	5,5	0,0	2,0	0,0	1,3	6,4	100,0
Jawa Barat	47,8	6,6	9,5	5,1	1,5	2,9	5,2	0,6	0,2	20,6	100,0
Jawa Tengah	44,6	12,7	10,1	8,5	0,6	0,4	6,7	1,3	0,2	14,8	100,0
D I Yogyakarta	41,1	16,4	0,0	22,0	0,0	0,0	11,8	0,0	0,0	8,7	100,0
Jawa Timur	39,6	7,9	20,4	8,0	0,2	1,7	5,1	0,3	0,0	16,8	100,0
Banten	56,4	12,6	4,2	1,8	0,9	2,0	0,6	0,5	0,2	20,9	100,0
Bali	31,9	16,2	20,6	0,0	3,2	1,5	6,4	2,4	0,0	17,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	48,9	1,5	8,5	4,0	0,0	4,6	9,2	0,0	0,0	23,3	100,0
Nusa Tenggara Timur	30,5	3,4	3,5	1,7	1,8	3,8	7,2	0,5	0,0	47,4	100,0
Kalimantan Barat	33,5	7,7	15,3	5,0	0,3	8,0	3,8	2,0	0,0	24,4	100,0
Kalimantan Tengah	36,2	8,8	15,3	6,1	0,0	3,7	4,5	3,6	1,3	20,6	100,0
Kalimantan Selatan	26,5	7,2	11,2	6,6	0,6	5,6	6,2	1,9	0,0	34,3	100,0
Kalimantan Timur	32,2	2,9	29,0	2,1	0,0	6,4	5,0	4,0	0,0	18,4	100,0
Sulawesi Utara	21,1	5,1	15,8	7,7	0,0	0,7	9,5	0,6	0,0	39,6	100,0
Sulawesi Tengah	31,0	2,8	13,6	0,0	1,7	14,5	8,0	0,7	0,1	27,6	100,0
Sulawesi Selatan	37,2	5,3	15,6	4,9	0,0	8,7	5,2	2,1	0,4	20,5	100,0
Sulawesi Tenggara	33,5	4,9	12,1	2,4	1,5	4,0	12,3	2,3	0,0	27,0	100,0
Gorontalo	14,6	2,0	11,0	1,0	0,0	15,9	8,7	0,0	0,0	46,8	100,0
Sulawesi Barat	33,6	3,8	4,0	1,3	3,9	15,5	5,1	1,7	0,0	31,2	100,0
Maluku	41,1	1,2	6,1	5,9	1,4	2,9	10,4	6,5	2,6	21,9	100,0
Maluku Utara	28,2	2,9	8,3	13,5	2,4	5,0	6,2	1,3	0,0	32,3	100,0
Papua Barat	18,1	3,3	11,1	0,6	0,8	2,6	12,5	0,7	0,8	49,6	100,0
Papua	23,7	3,9	1,3	1,5	0,6	25,3	0,8	0,2	0,1	42,7	100,0
Indonesia	41,1	8,0	10,8	5,3	1,0	4,4	5,5	1,1	0,3	22,6	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.8.3.3.

Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi menurut Provinsi, Alasan Tidak/Belum Pernah Sekolah/Tidak Bersekolah Lagi, dan Jenis Kelamin, 2014

Perkotaan+Perdesaan

Provinsi	Laki-laki+Perempuan										
	Tidak ada biaya	Bekerja/ Mencari Nafkah	Menikah/ Meng-urus Rumah tangga	Merasa Pendidikan cukup	Malu Karena Ekonomi	Sekolah Jauh	Cacat	Menunggu Pengumuman	Tidak Diterima	Lain-nya	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	53,5	6,3	3,5	0,9	1,0	1,0	5,1	2,4	0,0	26,3	100,0
Sumatera Utara	40,8	7,5	1,7	7,0	1,1	2,6	6,7	2,2	0,4	30,1	100,0
Sumatera Barat	33,7	6,7	1,8	1,8	0,7	2,3	8,6	0,2	1,1	43,1	100,0
Riau	40,0	7,7	1,6	2,8	0,8	2,2	3,8	1,1	0,2	39,7	100,0
Jambi	42,5	7,0	4,8	5,6	1,5	1,8	5,1	1,9	0,4	29,4	100,0
Sumatera Selatan	30,4	13,4	6,7	8,9	1,5	4,4	5,2	1,3	0,0	28,1	100,0
Bengkulu	34,8	8,7	4,9	0,5	2,5	0,0	4,7	2,2	0,0	41,6	100,0
Lampung	46,4	10,7	4,2	6,0	1,0	0,9	7,2	1,3	0,6	21,6	100,0
Kep. Bangka Belitung	21,2	10,0	7,5	3,3	0,8	3,5	3,8	0,4	0,4	49,1	100,0
Kepulauan Riau	21,7	11,2	0,0	7,7	1,2	2,7	9,5	8,0	0,0	38,0	100,0
DKI Jakarta	44,0	19,5	4,3	5,3	2,8	1,0	2,6	2,3	0,6	17,6	100,0
Jawa Barat	48,8	6,6	4,3	4,7	1,6	2,4	4,2	0,5	0,1	26,8	100,0
Jawa Tengah	44,2	12,9	4,4	7,5	1,1	0,2	4,5	0,8	0,1	24,5	100,0
D I Yogyakarta	37,3	11,7	6,2	7,1	0,0	0,0	3,8	0,0	0,0	33,8	100,0
Jawa Timur	37,7	10,9	10,2	6,3	0,8	1,7	5,4	0,6	0,0	26,4	100,0
Banten	55,8	10,1	2,0	2,5	0,7	1,5	3,1	0,4	0,4	23,5	100,0
Bali	31,0	14,0	12,8	0,0	1,8	0,8	6,0	4,8	0,0	28,8	100,0
Nusa Tenggara Barat	41,3	5,9	3,6	1,7	0,0	1,9	7,1	1,7	0,2	36,6	100,0
Nusa Tenggara Timur	29,3	8,0	1,4	1,4	1,8	3,2	7,5	0,4	0,2	46,7	100,0
Kalimantan Barat	30,1	15,8	7,2	4,8	0,5	6,0	3,1	0,8	0,0	31,8	100,0
Kalimantan Tengah	37,3	17,4	6,9	5,3	0,0	3,2	4,0	2,0	0,6	23,2	100,0
Kalimantan Selatan	25,3	10,9	4,5	6,5	2,2	4,7	5,0	1,0	0,5	39,4	100,0
Kalimantan Timur	31,9	11,6	12,4	2,0	0,2	4,2	5,4	3,0	0,3	28,9	100,0
Sulawesi Utara	22,8	9,5	6,3	6,3	0,6	1,2	7,6	0,2	0,0	45,4	100,0
Sulawesi Tengah	28,4	8,3	5,1	1,6	1,8	9,8	6,4	0,4	0,2	38,2	100,0
Sulawesi Selatan	31,0	12,4	6,8	3,6	0,5	6,4	6,0	1,7	0,4	31,2	100,0
Sulawesi Tenggara	27,7	10,2	4,8	1,5	1,0	3,8	10,8	2,1	0,2	37,9	100,0
Gorontalo	15,7	6,2	4,2	2,5	1,7	6,5	5,6	0,0	0,0	57,7	100,0
Sulawesi Barat	32,0	9,2	2,6	0,8	1,6	9,7	4,4	1,1	0,0	38,6	100,0
Maluku	35,8	4,9	2,8	7,0	1,1	2,3	7,8	5,3	1,1	31,7	100,0
Maluku Utara	27,9	4,6	4,6	8,4	2,7	4,3	9,6	1,3	0,0	36,6	100,0
Papua Barat	18,7	4,6	5,8	2,3	1,7	5,3	10,2	0,7	0,4	50,4	100,0
Papua	22,1	5,6	0,6	1,8	0,6	25,7	1,0	0,1	0,1	42,4	100,0
Indonesia	39,5	9,8	4,9	4,9	1,2	3,9	4,8	1,0	0,2	30,0	100,0

Sumber : BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.9.1 Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perkotaan
			Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	15,07	18,48	16,72
Sumatera Utara	28,87	28,49	28,68
Sumatera Barat	37,34	39,37	38,34
Riau	34,36	33,95	34,15
Jambi	31,46	33,71	32,56
Sumatera Selatan	35,60	35,95	35,77
Bengkulu	37,06	35,60	36,34
Lampung	21,37	24,26	22,78
Kep. Bangka Belitung	25,27	26,84	26,04
Kepulauan Riau	36,75	34,17	35,52
DKI Jakarta	47,01	43,89	45,45
Jawa Barat	29,78	31,12	30,43
Jawa Tengah	34,13	37,62	35,83
D I Yogyakarta	46,38	47,38	46,89
Jawa Timur	36,16	37,92	37,02
Banten	31,78	32,19	31,98
Bali	38,04	39,57	38,78
Nusa Tenggara Barat	15,38	22,35	18,79
Nusa Tenggara Timur	20,48	20,85	20,66
Kalimantan Barat	33,72	31,82	32,79
Kalimantan Tengah	32,21	30,27	31,27
Kalimantan Selatan	31,39	35,45	33,33
Kalimantan Timur	37,80	39,29	38,51
Sulawesi Utara	33,77	36,09	34,89
Sulawesi Tengah	28,06	32,01	29,95
Sulawesi Selatan	31,85	36,23	33,98
Sulawesi Tenggara	21,78	28,85	25,22
Gorontalo	25,66	32,41	29,02
Sulawesi Barat	16,09	19,12	17,61
Maluku	26,93	30,16	28,53
Maluku Utara	15,13	20,62	17,86
Papua Barat	17,46	21,28	19,35
Papua	12,62	17,10	14,79
Indonesia	32,57	34,00	33,27

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.9.2 Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

Provinsi	Laki-laki	Perempuan	Perdesaan
			Laki-laki + Perempuan
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	3,83	4,60	4,20
Sumatera Utara	10,29	11,21	10,74
Sumatera Barat	12,30	15,51	13,86
Riau	9,66	13,04	11,33
Jambi	10,39	15,08	12,68
Sumatera Selatan	9,26	9,73	9,49
Bengkulu	8,65	13,41	10,96
Lampung	10,01	13,24	11,55
Kep. Bangka Belitung	9,16	13,39	11,21
Kepulauan Riau	14,93	14,22	14,61
DKI Jakarta	0,00	0,00	0,00
Jawa Barat	13,78	15,26	14,49
Jawa Tengah	19,80	23,36	21,51
D I Yogyakarta	33,43	31,93	32,73
Jawa Timur	17,08	20,33	18,65
Banten	6,62	9,98	8,21
Bali	22,81	23,44	23,12
Nusa Tenggara Barat	4,74	8,94	6,73
Nusa Tenggara Timur	2,09	1,77	1,93
Kalimantan Barat	5,64	6,40	6,01
Kalimantan Tengah	9,83	10,79	10,29
Kalimantan Selatan	13,70	14,91	14,28
Kalimantan Timur	13,30	17,29	15,21
Sulawesi Utara	13,27	17,52	15,27
Sulawesi Tengah	5,95	8,05	6,97
Sulawesi Selatan	10,24	14,44	12,29
Sulawesi Tenggara	6,15	7,70	6,90
Gorontalo	9,05	14,41	11,65
Sulawesi Barat	3,87	6,43	5,14
Maluku	3,42	3,20	3,31
Maluku Utara	1,88	2,86	2,36
Papua Barat	5,26	3,72	4,52
Papua	0,52	1,05	0,76
Indonesia	11,78	14,10	12,90

Sumber: BPS-Susenas 2014

Tabel L- 6.9.3 Persentase Anak Berumur 7-17 Tahun yang Mengakses Internet menurut Provinsi dan Jenis Kelamin, 2014

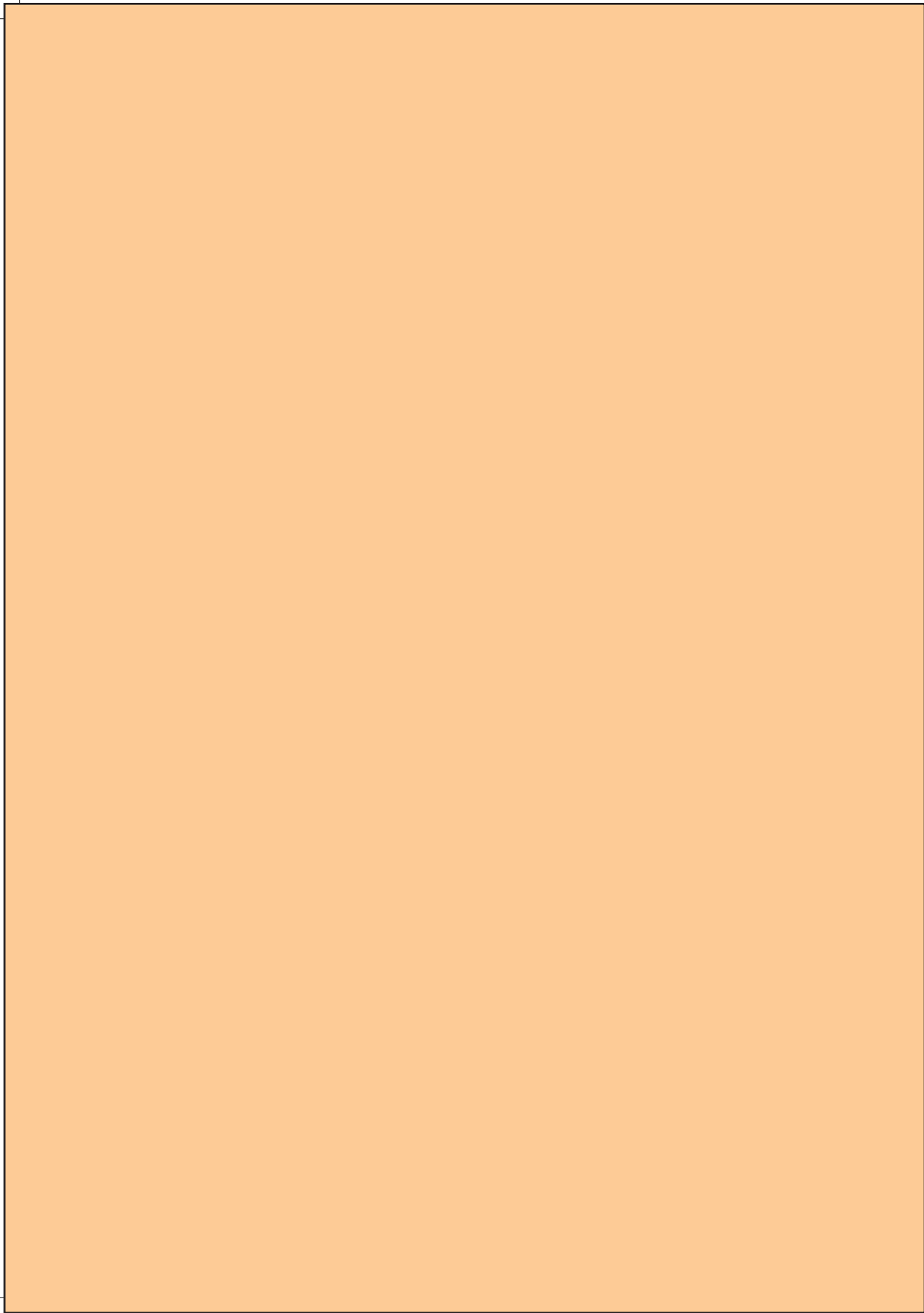
Provinsi	Perkotaan+Perdesaan		
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
	(1)	(2)	(3)
Aceh	6,83	8,24	7,52
Sumatera Utara	18,78	19,40	19,09
Sumatera Barat	21,64	24,55	23,07
Riau	18,85	20,94	19,89
Jambi	16,63	20,66	18,60
Sumatera Selatan	18,40	18,64	18,52
Bengkulu	17,23	20,26	18,71
Lampung	12,93	16,17	14,48
Kep. Bangka Belitung	16,84	19,92	18,35
Kepulauan Riau	32,38	30,55	31,51
DKI Jakarta	47,01	43,89	45,45
Jawa Barat	24,21	25,72	24,95
Jawa Tengah	26,23	29,84	27,98
D I Yogyakarta	41,66	42,32	41,98
Jawa Timur	26,03	28,68	27,32
Banten	22,94	24,77	23,83
Bali	31,77	32,85	32,30
Nusa Tenggara Barat	8,99	14,48	11,63
Nusa Tenggara Timur	5,47	5,21	5,35
Kalimantan Barat	13,64	13,84	13,74
Kalimantan Tengah	17,06	17,16	17,11
Kalimantan Selatan	21,05	23,41	22,18
Kalimantan Timur	27,99	30,43	29,16
Sulawesi Utara	21,92	25,60	23,68
Sulawesi Tengah	10,98	13,43	12,16
Sulawesi Selatan	17,94	22,20	20,01
Sulawesi Tenggara	10,31	13,43	11,81
Gorontalo	14,23	20,22	17,16
Sulawesi Barat	6,64	9,35	7,99
Maluku	11,85	13,01	12,42
Maluku Utara	5,12	7,32	6,20
Papua Barat	8,85	9,11	8,97
Papua	3,10	4,71	3,85
Indonesia	21,67	23,73	22,67

Sumber: BPS-Susenas 2014





Perlindungan Khusus



Tabel L- 7.2.2 **Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin Tahun 2012–2014**

Provinsi	2012		2013		2014	
	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	61,39	38,61	66,80	33,20	64,07	35,93
Sumatera Utara	60,02	39,98	54,15	45,85	62,73	37,27
Sumatera Barat	58,75	41,25	55,00	45,00	51,45	48,55
Riau	53,94	46,06	64,65	35,35	66,45	33,55
Jambi	63,56	36,44	68,76	31,24	70,08	29,92
Sumatera Selatan	69,06	30,94	67,62	32,38	67,35	32,65
Bengkulu	69,51	30,49	69,83	30,17	76,72	23,28
Lampung	66,95	33,05	67,51	32,49	72,44	27,56
Kep. Bangka Belitung	67,68	32,32	70,36	29,64	68,83	31,17
Kepulauan Riau	66,53	33,47	53,19	46,81	70,92	29,08
DKI Jakarta	55,36	44,64	60,69	39,31	64,39	35,61
Jawa Barat	60,20	39,80	65,90	34,10	64,65	35,35
Jawa Tengah	63,27	36,73	61,27	38,73	60,42	39,58
D I Yogyakarta	61,73	38,27	63,56	36,44	60,95	39,05
Jawa Timur	61,47	38,53	61,11	38,89	62,58	37,42
Banten	64,69	35,31	60,31	39,69	69,11	30,89
Bali	65,73	34,27	76,31	23,69	68,87	31,13
Nusa Tenggara Barat	70,06	29,94	64,94	35,06	63,84	36,16
Nusa Tenggara Timur	70,76	29,24	69,97	30,03	73,76	26,24
Kalimantan Barat	57,93	42,07	63,22	36,78	68,22	31,78
Kalimantan Tengah	67,33	32,67	76,14	23,86	71,97	28,03
Kalimantan Selatan	59,53	40,47	57,27	42,73	60,87	39,13
Kalimantan Timur	59,64	40,36	61,68	38,32	65,07	34,93
Sulawesi Utara	58,29	41,71	58,96	41,04	70,60	29,40
Sulawesi Tengah	67,80	32,20	71,50	28,50	69,39	30,61
Sulawesi Selatan	62,15	37,85	56,99	43,01	60,98	39,02
Sulawesi Tenggara	62,48	37,52	65,66	34,34	66,95	33,05
Gorontalo	58,50	41,50	60,14	39,86	58,86	41,14
Sulawesi Barat	54,22	45,78	69,40	30,60	67,95	32,05
Maluku	65,68	34,32	62,86	37,14	56,95	43,05
Maluku Utara	62,81	37,19	75,79	24,21	67,90	32,10
Papua Barat	73,41	26,59	62,69	37,31	69,13	30,87
Papua	63,63	36,37	61,85	38,15	72,58	27,42
INDONESIA	62,24	37,76	63,06	36,94	64,62	35,38

Sumber: BPS-Susenas 2012, 2013, 2014

Keterangan : L = Laki-laki P = Perempuan

Tabel L- 7.3.1 Jumlah Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur Tahun 2012–2014

Provinsi	2012		2013		2014	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	4.560	18.606	4.275	26.251	5.942	31.563
Sumatera Utara	9.786	69.466	15.920	102.568	14.611	106.626
Sumatera Barat	4.292	29.598	9.752	47.141	5.593	46.639
Riau	11.330	46.595	8.534	57.868	5.956	58.363
Jambi	2.215	21.524	2.838	20.560	3.054	20.358
Sumatera Selatan	8.261	68.698	8.701	80.716	17.773	100.083
Bengkulu	1.697	21.440	2.507	20.966	1.279	22.323
Lampung	10.906	78.416	9.679	72.774	6.663	86.391
Kep. Bangka Belitung	1.538	9.463	1.300	11.917	1.365	9.837
Kepulauan Riau	122	14.507	2.409	20.895	716	17.692
DKI Jakarta	19.857	98.709	16.125	129.429	13.831	119.285
Jawa Barat	135.762	513.809	60.781	411.518	51.718	461.980
Jawa Tengah	29.976	289.601	29.312	285.964	31.027	317.059
D I Yogyakarta	2.702	37.305	1.680	39.804	3.862	40.542
Jawa Timur	30.397	274.646	24.266	277.029	23.795	369.398
Banten	19.374	138.686	20.476	115.225	15.969	122.639
Bali	6.943	33.633	1.322	28.311	376	23.642
Nusa Tenggara Barat	4.801	61.533	7.023	66.427	6.277	68.216
Nusa Tenggara Timur	5.524	60.207	5.166	60.092	5.278	54.146
Kalimantan Barat	4.270	22.573	2.431	24.077	2.560	30.772
Kalimantan Tengah	1.960	10.832	1.464	11.799	1.764	15.418
Kalimantan Selatan	4.476	25.388	2.802	30.389	2.731	31.887
Kalimantan Timur	3.366	11.930	1.002	25.241	2.955	29.503
Sulawesi Utara	4.926	20.600	3.709	18.995	2.085	22.579
Sulawesi Tengah	3.131	30.849	3.795	34.020	3.998	37.018
Sulawesi Selatan	4.509	61.108	8.624	51.353	6.097	60.947
Sulawesi Tenggara	3.441	18.663	2.054	24.373	1.573	26.747
Gorontalo	2.262	10.405	2.804	17.747	2.112	17.254
Sulawesi Barat	999	9.303	1.405	8.549	1.919	11.143
Maluku	994	13.332	1.547	14.773	1.163	11.074
Maluku Utara	704	4.039	81	3.327	538	5.502
Papua Barat	593	8.722	667	6.444	860	8.102
Papua	2.667	18.507	3.920	21.179	2.170	28.488
INDONESIA	348.341	2.152.693	268.371	2.167.721	247.610	2.413.216

Sumber: BPS-Susenas 2012, 2013, 2014

Tabel L- 7.3.2 Persentase Penduduk Korban Kejahatan Menurut Provinsi dan Kelompok Umur, Tahun 2012–2014

Provinsi	2012		2013		2014	
	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa	Anak	Dewasa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A c e h	19,68	80,32	14,00	86,00	15,84	84,16
Sumatera Utara	12,35	87,65	13,44	86,56	12,05	87,95
Sumatera Barat	12,66	87,34	17,14	82,86	10,71	89,29
Riau	19,56	80,44	12,85	87,15	9,26	90,74
Jambi	9,33	90,67	12,13	87,87	13,04	86,96
Sumatera Selatan	10,73	89,27	9,73	90,27	15,08	84,92
Bengkulu	7,33	92,67	10,68	89,32	5,42	94,58
Lampung	12,21	87,79	11,74	88,26	7,16	92,84
Kep. Bangka Belitung	13,98	86,02	9,84	90,16	12,19	87,81
Kepulauan Riau	0,83	99,17	10,34	89,66	3,89	96,11
DKI Jakarta	16,75	83,25	11,08	88,92	10,39	89,61
Jawa Barat	20,90	79,10	12,87	87,13	10,07	89,93
Jawa Tengah	9,38	90,62	9,30	90,70	8,91	91,09
D I Yogyakarta	6,75	93,25	4,05	95,95	8,70	91,30
Jawa Timur	9,96	90,04	8,05	91,95	6,05	93,95
Banten	12,26	87,74	15,09	84,91	11,52	88,48
Bali	17,11	82,89	4,46	95,54	1,57	98,43
Nusa Tenggara Barat	7,24	92,76	9,56	90,44	8,43	91,57
Nusa Tenggara Timur	8,40	91,60	7,92	92,08	8,88	91,12
Kalimantan Barat	15,91	84,09	9,17	90,83	7,68	92,32
Kalimantan Tengah	15,32	84,68	11,04	88,96	10,27	89,73
Kalimantan Selatan	14,99	85,01	8,44	91,56	7,89	92,11
Kalimantan Timur	22,01	77,99	3,82	96,18	9,10	90,90
Sulawesi Utara	19,30	80,70	16,34	83,66	8,45	91,55
Sulawesi Tengah	9,21	90,79	10,04	89,96	9,75	90,25
Sulawesi Selatan	6,87	93,13	14,38	85,62	9,09	90,91
Sulawesi Tenggara	15,57	84,43	7,77	92,23	5,55	94,45
Gorontalo	17,86	82,14	13,64	86,36	10,91	89,09
Sulawesi Barat	9,70	90,30	14,11	85,89	14,69	85,31
Maluku	6,94	93,06	9,48	90,52	9,50	90,50
Maluku Utara	14,84	85,16	2,38	97,62	8,91	91,09
Papua Barat	6,37	93,63	9,38	90,62	9,60	90,40
Papua	12,60	87,40	15,62	84,38	7,08	92,92
INDONESIA	13,93	86,07	11,02	88,98	9,31	90,69

Sumber: BPS-Susenas 2012, 2013, 2014

Tabel L-7.4 Penduduk Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Kelompok umur			Total	Kelompok umur			Total
	10 - 12	13-14	15-17		10 - 12	13-14	15-17	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	72.341	53.623	91.306	217.270	191.056	153.982	232.263	577.301
Sumatera Utara	372.274	262.160	444.771	1.079.205	442.541	304.234	505.755	1.252.530
Sumatera Barat	108.130	73.701	150.647	332.478	175.271	135.785	205.323	516.379
Riau	125.222	99.946	148.917	374.085	227.738	148.208	252.862	628.808
Jambi	51.761	39.488	65.512	156.761	129.162	92.390	142.513	364.065
Sumatera Selatan	141.670	112.946	171.686	426.302	287.073	194.775	317.495	799.343
Bengkulu	30.591	21.695	39.826	92.112	69.848	49.540	83.799	203.187
Lampung	102.468	77.649	143.595	323.712	301.149	238.474	351.542	891.165
Bangka-Belitung	34.530	23.743	45.846	104.119	38.464	24.221	42.254	104.939
Kepulauan Riau	87.133	51.406	73.497	212.036	20.102	12.155	15.280	47.537
DKI Jakarta	422.742	299.511	474.762	1.197.015	0	0	0	0
Jawa Barat	1.527.781	1.160.679	1.926.707	4.615.167	819.523	618.914	1.001.589	2.440.026
Jawa Tengah	736.086	534.159	899.149	2.169.394	881.787	663.162	1.095.018	2.639.967
D I Y	95.088	72.773	119.865	287.726	49.443	43.041	61.072	153.556
Jawa Timur	866.741	564.297	1027.703	2.458.741	915.365	714.506	1.086.346	2.716.217
Banten	395.956	267.267	482.184	1.145.407	209.765	168.092	252.385	630.242
Bali	124.772	75.542	139.449	339.763	80.724	57.057	78.112	215.893
Nusa Tenggara Barat	106.551	79.053	121.845	307.449	161.229	108.375	183.310	452.914
Nusa Tenggara Timur	57.712	43.512	81.233	182.457	274.625	189.053	305.659	769.337
Kalimantan Barat	79.077	50.788	103.827	233.692	185.215	132.274	230.549	548.038
Kalimantan Tengah	44.447	29.408	53.913	127.768	92.230	59.094	103.472	254.796
Kalimantan Selatan	85.961	57.516	100.657	244.134	123.827	81.816	130.532	336.175
Kalimantan Timur	124.354	94.412	156.278	375.044	83.789	60.231	98.713	242.733
Sulawesi Utara	50.854	37.753	65.701	154.308	69.811	46.810	77.122	193.743
Sulawesi Tengah	36.476	23.801	41.208	101.485	119.063	81.915	145.527	346.505
Sulawesi Selatan	160.866	120.151	210.282	491.299	304.567	220.116	365.046	889.729
Sulawesi Tenggara	36.778	29.392	50.397	116.567	113.302	74.781	129.760	317.843
Gorontalo	20.352	13.978	25.248	59.578	44.694	27.424	52.357	124.475
Sulawesi Barat	16.525	12.613	22.179	51.317	62.427	37.999	78.242	178.668
Maluku	38.192	24.411	48.753	111.356	69.465	44.703	81.481	195.649
Maluku Utara	17.350	12.030	22.240	51.620	51.994	38.993	59.110	150.097
Papua Barat	14.612	8.655	17.826	41.093	40.229	21.481	40.368	102.078
Papua	40.596	26.561	56.106	123.263	146.700	102.186	203.215	452.101
Indonesia	6.225.989	4.454.619	7.623.115	18.303.723	6.782.178	4.945.787	8.008.071	19.736.036

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.5 Penduduk Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur, 2014

Provinsi	Laki-Laki				Perempuan			
	Kelompok umur			Total	Kelompok umur			Total
	10 - 12	13-14	15-17		10 - 12	13-14	15-17	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	135.269	104.714	155.028	395.011	128.128	102.891	168.541	399.560
Sumatera Utara	419.849	286.349	477.925	1184.123	394.966	280.045	472.601	1147.612
Sumatera Barat	145.097	106.083	175.821	427.001	138.304	103.403	180.149	421.856
Riau	179.194	128.258	196.416	503.868	173.766	119.896	205.363	499.025
Jambi	97.638	60.352	112.664	270.654	83.285	71.526	95.361	250.172
Sumatera Selatan	218.491	158.789	254.113	631.393	210.252	148.932	235.068	594.252
Bengkulu	51.208	36.776	62.264	150.248	49.231	34.459	61.361	145.051
Lampung	216.111	153.655	265.188	634.954	187.506	162.468	229.949	579.923
Bangka-Belitung	38.257	23.647	45.469	107.373	34.737	24.317	42.631	101.685
Kepulauan Riau	56.396	31.317	45.127	132.840	50.839	32.244	43.650	126.733
DKI Jakarta	223.819	144.355	203.067	571.241	198.923	155.156	271.695	625.774
Jawa Barat	1.209.327	902.461	1.513.665	3.625.453	1.137.977	877.132	1.414.631	3.429.740
Jawa Tengah	832.396	609.448	1.051.968	2.493.812	785.477	587.873	942.199	2.315.549
D I Y	75.755	57.504	89.926	223.185	68.776	58.310	91.011	218.097
Jawa Timur	905.009	658.064	1.099.015	2.662.088	877.097	620.739	1.015.034	2.512.870
Banten	309.218	225.056	384.193	918.467	296.503	210.303	350.376	857.182
Bali	102.739	71.283	109.956	283.978	102.757	61.316	107.605	271.678
Nusa Tenggara Barat	140.611	92.241	161.281	394.133	127.169	95.187	143.874	366.230
Nusa Tenggara Timur	176.001	113.030	202.337	491.368	156.336	119.535	184.555	460.426
Kalimantan Barat	134.447	93.968	165.460	393.875	129.845	89.094	168.916	387.855
Kalimantan Tengah	72.666	42.333	83.268	198.267	64.011	46.169	74.117	184.297
Kalimantan Selatan	108.718	70.523	120.533	299.774	101.070	68.809	110.656	280.535
Kalimantan Timur	107.595	78.995	129.802	316.392	100.548	75.648	125.189	301.385
Sulawesi Utara	59.632	46.161	77.246	183.039	61.033	38.402	65.577	165.012
Sulawesi Tengah	77.504	56.746	93.499	227.749	78.035	48.970	93.236	220.241
Sulawesi Selatan	248.533	164.230	296.377	709.140	216.900	176.037	278.951	671.888
Sulawesi Tenggara	75.418	55.036	97.242	227.696	74.662	49.137	82.915	206.714
Gorontalo	32.063	22.233	39.772	94.068	32.983	19.169	37.833	89.985
Sulawesi Barat	41.546	24.862	50.564	116.972	37.406	25.750	49.857	113.013
Maluku	54.577	36.444	69.963	160.984	53.080	32.670	60.271	146.021
Maluku Utara	38.141	23.503	40.135	101.779	31.203	27.520	41.215	99.938
Papua Barat	30.094	13.623	30.177	73.894	24.747	16.513	28.017	69.277
Papua	98.868	68.859	151.315	319.042	88.428	59.888	108.006	256.322
Indonesia	6.712.187	4.760.898	8.050.776	19.523.861	6.295.980	4.639.508	7.580.410	18.515.898

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.6.1 Penduduk 10-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

						Perkotaan
Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	319	207	71.228	-	587	72.341
Sumatera Utara	4.182	1.859	363.200	1.884	1.149	372.274
Sumatera Barat	1.309	1.661	103.288	912	960	108.130
Riau	1.703	639	114.605	3.592	4.683	125.222
Jambi	445	99	49.506	-	1.711	51.761
Sumatera Selatan	904	1.118	135.335	1.522	2.791	141.670
Bengkulu	117	-	30.233	-	241	30.591
Lampung	302	162	101.100	482	422	102.468
Bangka-Belitung	172	-	33.543	387	428	34.530
Kepulauan Riau	1.350	-	79.611	1.363	4.809	87.133
DKI Jakarta	1.666	2.652	413.438	-	4.986	422.742
Jawa Barat	7.934	7.900	1479.087	7.366	25.494	1527.781
Jawa Tengah	4.412	2.462	719.963	3.007	6.242	736.086
D I Y	-	-	91.536	-	3.552	95.088
Jawa Timur	3.143	7.447	842.941	3.074	10.136	866.741
Banten	1.994	1.501	381.998	518	9.945	395.956
Bali	1.824	951	120.624	313	1.060	124.772
Nusa Tenggara Barat	1.209	.0	104.848	247	247	106.551
Nusa Tenggara Timur	681	288	55.520	680	543	57.712
Kalimantan Barat	486	40	76.851	609	1.091	79.077
Kalimantan Tengah	480	435	42.726	322	484	44.447
Kalimantan Selatan	1.036	527	80.901	791	2.706	85.961
Kalimantan Timur	1.272	207	117.027	569	5.279	124.354
Sulawesi Utara	357	.0	49.607	178	712	50.854
Sulawesi Tengah	777	427	32.577	697	1.998	36.476
Sulawesi Selatan	1.940	1.542	156.052	393	939	160.866
Sulawesi Tenggara	1.094	-	35.316	236	132	36.778
Gorontalo	108	-	19.364	352	528	20.352
Sulawesi Barat	1.176	-	14.724	194	431	16.525
Maluku	250	51	36.071	581	1.239	38.192
Maluku Utara	102	-	17.074	-	174	17.350
Papua Barat	-	27	13.788	-	797	14.612
Papua	-	197	39.596	146	657	40.596
Indonesia	42.744	32.399	6.023.278	30.415	97.153	6.225.989

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.6.2 Penduduk 13-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Perkotaan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	839	536	50.682	403	1.163	53.623
Sumatera Utara	6.611	2.335	246.726	3.869	2.619	262.160
Sumatera Barat	1.200	840	68.633	1.119	1.909	73.701
Riau	2.694	1.237	88.434	3.091	4.490	99.946
Jambi	1.113	158	36.771	113	1.333	39.488
Sumatera Selatan	2.759	1.449	105.438	1.487	1.813	112.946
Bengkulu	1.209	181	19.554	181	570	21.695
Lampung	1.448	162	73.390	2.214	435	77.649
Bangka-Belitung	592	-	22.456	298	397	23.743
Kepulauan Riau	-	-	47.620	702	3.084	51.406
DKI Jakarta	4.873	2.896	287.684	-	4.058	299.511
Jawa Barat	19.508	16.152	1.073.493	16.370	35.156	1.160.679
Jawa Tengah	10.404	2.302	500.097	4.712	16.644	534.159
D I Y	654	1.554	65.385	2.636	2.544	72.773
Jawa Timur	11.987	6.466	526.227	7.626	11.991	564.297
Banten	6.333	1.032	249.254	1.720	8.928	267.267
Bali	3.329	662	71.551	-	-	75.542
Nusa Tenggara Barat	6.362	570	70.731	503	887	79.053
Nusa Tenggara Timur	1.437	206	40.339	939	591	43.512
Kalimantan Barat	1.462	609	46.959	834	924	50.788
Kalimantan Tengah	665	-	28.325	99	319	29.408
Kalimantan Selatan	1.461	434	50.364	1.812	3.445	57.516
Kalimantan Timur	1.114	1.415	88.531	1.115	2.237	94.412
Sulawesi Utara	943	198	35.022	559	1.031	37.753
Sulawesi Tengah	1.210	332	20.982	511	766	23.801
Sulawesi Selatan	3.804	521	112.814	1.964	1.048	120.151
Sulawesi Tenggara	770	150	27.614	282	576	29.392
Gorontalo	133	266	12.790	132	657	13.978
Sulawesi Barat	1.585	134	10.501	393	-	12.613
Maluku	489	337	21.518	718	1.349	24.411
Maluku Utara	64	16	11.671	147	132	12.030
Papua Barat	27	27	7.644	91	866	8.655
Papua	671	155	24.872	305	558	26.561
Indonesia	97.750	43.332	4.144.072	56.945	112.520	4.454.619

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.6.3. Penduduk 15-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Perkotaan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.861	1.174	83.603	1.829	1.839	91.306
Sumatera Utara	45.327	13.328	363.221	14.166	8.729	444.771
Sumatera Barat	10.967	6.116	126.716	2.566	4.282	150.647
Riau	11.004	7.994	119.463	4.119	6.337	148.917
Jambi	7.010	3.498	51.962	959	2.083	65.512
Sumatera Selatan	14.695	9.771	138.910	6.728	1.582	171.686
Bengkulu	4.927	690	32.807	356	1.046	39.826
Lampung	11.730	7.000	121.230	2.487	1.148	143.595
Bangka-Belitung	4.946	1.218	36.644	1.648	1.390	45.846
Kepulauan Riau	7.798	2.399	57.007	1.529	4.764	73.497
DKI Jakarta	31.772	17.669	415.298	5.325	4.698	474.762
Jawa Barat	177.022	107.138	1520.038	47.718	74.791	1.926.707
Jawa Tengah	100.545	50.533	698.478	25.098	24.495	899.149
D I Y	10.055	1.105	97.965	7.285	3.455	119.865
Jawa Timur	75.643	31.808	877.999	20.416	21.837	1027.703
Banten	47.869	28.145	370.336	8.863	26.971	482.184
Bali	15.074	1.499	118.565	3.645	666	139.449
Nusa Tenggara Barat	15.158	2.838	97.256	3.400	3.193	121.845
Nusa Tenggara Timur	4.226	1.490	71.958	2.169	1.390	81.233
Kalimantan Barat	10.161	4.295	83.306	4.677	1.388	103.827
Kalimantan Tengah	6.252	956	42.169	3.203	1.333	53.913
Kalimantan Selatan	16.030	2.480	75.261	2.076	4.810	100.657
Kalimantan Timur	11.283	3.961	131.411	4.944	4.679	156.278
Sulawesi Utara	3.232	4.722	51.258	2.168	4.321	65.701
Sulawesi Tengah	4.919	998	32.091	2.324	876	41.208
Sulawesi Selatan	22.120	3.941	173.100	6.994	4.127	210.282
Sulawesi Tenggara	5.790	641	40.080	3.354	532	50.397
Gorontalo	3.829	608	18.668	1.181	962	25.248
Sulawesi Barat	4.742	195	15.056	1.836	350	22.179
Maluku	2.821	1.549	37.851	3.000	3.532	48.753
Maluku Utara	1.735	730	18.024	1.376	375	22.240
Papua Barat	338	249	14.815	757	1.667	17.826
Papua	3.963	546	48.732	870	1.995	56.106
Indonesia	695.844	321.284	6.181.278	199.066	225.643	7.623.115

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.6.4 Penduduk 10-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014
Perkotaan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	4.019	1.917	205.513	2.232	3.589	217.270
Sumatera Utara	56.120	17.522	973.147	19.919	12.497	1079.205
Sumatera Barat	13.476	8.617	298.637	4.597	7.151	332.478
Riau	15.401	9.870	322.502	10.802	15.510	374.085
Jambi	8.568	3.755	138.239	1.072	5.127	156.761
Sumatera Selatan	18.358	12.338	379.683	9.737	6.186	426.302
Bengkulu	6.253	871	82.594	537	1.857	92.112
Lampung	13.480	7.324	295.720	5.183	2.005	323.712
Bangka-Belitung	5.710	1.218	92.643	2.333	2.215	104.119
Kepulauan Riau	9.148	2.399	184.238	3.594	12.657	212.036
DKI Jakarta	38.311	23.217	1116.420	5.325	13.742	1197.015
Jawa Barat	204.464	131.190	4072.618	71.454	135.441	4615.167
Jawa Tengah	115.361	55.297	1918.538	32.817	47.381	2169.394
D I Y	10.709	2.659	254.886	9.921	9.551	287.726
Jawa Timur	90.773	45.721	2247.167	31.116	43.964	2458.741
Banten	56.196	30.678	1001.588	11.101	45.844	1145.407
Bali	20.227	3.112	310.740	3.958	1.726	339.763
Nusa Tenggara Barat	22.729	3.408	272.835	4.150	4.327	307.449
Nusa Tenggara Timur	6.344	1.984	167.817	3.788	2.524	182.457
Kalimantan Barat	12.109	4.944	207.116	6.120	3.403	233.692
Kalimantan Tengah	7.397	1.391	113.220	3.624	2.136	127.768
Kalimantan Selatan	18.527	3.441	206.526	4.679	10.961	244.134
Kalimantan Timur	13.669	5.583	336.969	6.628	12.195	375.044
Sulawesi Utara	4.532	4.920	135.887	2.905	6.064	154.308
Sulawesi Tengah	6.906	1.757	85.650	3.532	3.640	101.485
Sulawesi Selatan	27.864	6.004	441.966	9.351	6.114	491.299
Sulawesi Tenggara	7.654	791	103.010	3.872	1.240	116.567
Gorontalo	4.070	874	50.822	1.665	2.147	59.578
Sulawesi Barat	7.503	329	40.281	2.423	781	51.317
Maluku	3.560	1.937	95.440	4.299	6.120	111.356
Maluku Utara	1.901	746	46.769	1.523	681	51.620
Papua Barat	365	303	36.247	848	3.330	41.093
Papua	4.634	898	113.200	1.321	3.210	123.263
Indonesia	836.338	397.015	16.348.628	286.426	435.316	18.303.723

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.7.1 Penduduk 10-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

						Perdesaan
Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.302	459	186.195	31	2.069	191.056
Sumatera Utara	26.880	1.177	406.166	2.810	5.508	442.541
Sumatera Barat	3.458	549	169.202	997	1.065	175.271
Riau	1.857	658	211.109	3.171	10.943	227.738
Jambi	691	-	127.010	417	1.044	129.162
Sumatera Selatan	2.670	2.240	278.279	1.781	2.103	287.073
Bengkulu	866	472	67.835	483	192	69.848
Lampung	5.472	1.059	285.089	6.401	3.128	301.149
Bangka-Belitung	557	237	37.002	383	285	38.464
Kepulauan Riau	-	-	19.407	186	509	20.102
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	2.389	2.642	789.048	5.924	19.520	819.523
Jawa Tengah	11.472	2.965	850.992	3.757	12.601	881.787
D I Y	992	-	47.861	-	590	49.443
Jawa Timur	7.988	3.661	890.365	2.905	10.446	915.365
Banten	-	4.542	199.183	571	5.469	209.765
Bali	6.847	527	71.497	806	1.047	80.724
Nusa Tenggara Barat	2.793	403	156.280	747	1.006	161.229
Nusa Tenggara Timur	8.363	2.409	259.226	2.335	2.292	274.625
Kalimantan Barat	910	389	181.068	1.193	1.655	185.215
Kalimantan Tengah	3.674	125	87.311	290	830	92.230
Kalimantan Selatan	3.175	235	118.088	646	1.683	123.827
Kalimantan Timur	512	326	82.047	450	454	83.789
Sulawesi Utara	947	165	66.472	592	1.635	69.811
Sulawesi Tengah	4.028	695	108.543	3.563	2.234	119.063
Sulawesi Selatan	15.658	1.908	276.352	3.461	7.188	304.567
Sulawesi Tenggara	10.342	616	99.631	1.099	1.614	113.302
Gorontalo	572	106	42.817	485	714	44.694
Sulawesi Barat	3.310	406	56.077	880	1.754	62.427
Maluku	715	677	65.308	1.032	1.733	69.465
Maluku Utara	1.415	233	48.437	686	1.223	51.994
Papua Barat	1.507	44	38.211	-	467	40.229
Papua	14.918	1.152	106.855	1.272	22.503	146.700
Indonesia	147.280	31.077	6.428.963	49.354	125.504	6.782.178

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.7.2 Penduduk 13-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Perdesaan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	5.499	1.355	145.259	717	1.152	153.982
Sumatera Utara	44.308	2.343	250.440	2.722	4.421	304.234
Sumatera Barat	7.141	816	123.121	2.548	2.159	135.785
Riau	5.829	1.266	134.304	3.109	3.700	148.208
Jambi	2.986	1.693	84.221	823	2.667	92.390
Sumatera Selatan	9.008	1.581	172.033	6.746	5.407	194.775
Bengkulu	3.439	271	44.372	628	830	49.540
Lampung	12.995	3.107	208.796	9.705	3.871	238.474
Bangka-Belitung	2.181	50	21.254	616	120	24.221
Kepulauan Riau	699	-	10.781	221	454	12.155
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	13.471	14.498	548.939	8.763	33.243	618.914
Jawa Tengah	27.934	8.116	594.056	9.885	23.171	663.162
D I Y	546	215	42.280	-	-	43.041
Jawa Timur	23.151	4.691	663.294	10.665	12.705	714.506
Banten	5.254	7.253	143.165	3.511	8.909	168.092
Bali	11.691	658	42.798	793	1.117	57.057
Nusa Tenggara Barat	9.110	954	97.211	754	346	108.375
Nusa Tenggara Timur	14.606	1.154	166.721	4.405	2.167	189.053
Kalimantan Barat	3.167	145	122.852	3.357	2.753	132.274
Kalimantan Tengah	5.208	113	52.424	652	697	59.094
Kalimantan Selatan	5.051	854	72.113	409	3.389	81.816
Kalimantan Timur	717	1.038	57.205	661	610	60.231
Sulawesi Utara	1.422	559	42.591	640	1.598	46.810
Sulawesi Tengah	9.224	1.477	65.217	3.148	2.849	81.915
Sulawesi Selatan	25.829	1.154	180.650	5.269	7.214	220.116
Sulawesi Tenggara	12.115	343	59.765	1.752	806	74.781
Gorontalo	2.912	305	22.156	1.467	584	27.424
Sulawesi Barat	6.302	-	28.811	2.128	758	37.999
Maluku	2.026	282	40.076	1.171	1.148	44.703
Maluku Utara	2.554	384	33.314	1.223	1.518	38.993
Papua Barat	1.654	-	18.823	379	625	21.481
Papua	26.515	2.448	62.562	1.999	8.662	102.186
Indonesia	304.544	59.123	4.351.604	90.866	139.650	4.945.787

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.7.3 Penduduk 15-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014
Perdesaan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	25.900	9.982	186.405	3.578	6.398	232.263
Sumatera Utara	130.417	15.167	333.611	14.986	11.574	505.755
Sumatera Barat	28.035	6.249	158.847	6.998	5.194	205.323
Riau	33.362	13.502	179.645	16.232	10.121	252.862
Jambi	19.332	5.427	104.069	6.538	7.147	142.513
Sumatera Selatan	54.376	11.409	212.274	24.671	14.765	317.495
Bengkulu	11.570	2.126	64.747	2.999	2.357	83.799
Lampung	75.176	15.685	230.427	23.105	7.149	351.542
Bangka-Belitung	8.051	2.940	25.350	4.668	1.245	42.254
Kepulauan Riau	1.439	391	12.350	680	420	15.280
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	108.539	117.501	634.843	59.417	81.289	1001.589
Jawa Tengah	164.467	56.007	752.698	57.998	63.848	1095.018
D I Y	5.455	418	53.627	1.284	288	61.072
Jawa Timur	162.867	51.678	754.129	68.903	48.769	1086.346
Banten	24.780	33.912	151.189	13.137	29.367	252.385
Bali	21.424	2.008	51.422	2.804	.454	78.112
Nusa Tenggara Barat	37.325	3.043	129.890	9.868	3.184	183.310
Nusa Tenggara Timur	66.687	5.390	215.966	12.614	5.002	305.659
Kalimantan Barat	44.916	6.551	157.096	15.722	6.264	230.549
Kalimantan Tengah	20.526	1.470	72.888	4.978	3.610	103.472
Kalimantan Selatan	23.696	3.520	87.355	11.041	4.920	130.532
Kalimantan Timur	7.938	6.120	78.585	2.103	3.967	98.713
Sulawesi Utara	6.984	2.433	58.065	5.032	4.608	77.122
Sulawesi Tengah	36.509	4.169	85.872	15.230	3.747	145.527
Sulawesi Selatan	81.444	8.803	242.749	19.662	12.388	365.046
Sulawesi Tenggara	39.676	1.222	78.135	9.255	1.472	129.760
Gorontalo	10.855	1.229	32.682	5.475	2.116	52.357
Sulawesi Barat	21.204	918	48.294	5.336	2.490	78.242
Maluku	10.045	1.862	61.782	5.138	2.654	81.481
Maluku Utara	8.929	431	43.095	3.815	2.840	59.110
Papua Barat	5.503	660	31.909	1.611	685	40.368
Papua	100.963	7.110	78.034	3.859	13.249	203.215
Indonesia	1.398.390	399.333	5.408.030	438.737	363.581	8.008.071

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.7.4 Penduduk 10-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014
Perdesaan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	33.701	11.796	517.859	4.326	9.619	577.301
Sumatera Utara	201.605	18.687	990.217	20.518	21.503	1252.530
Sumatera Barat	38.634	7.614	451.170	10.543	8.418	516.379
Riau	41.048	15.426	525.058	22.512	24.764	628.808
Jambi	23.009	7.120	315.300	7.778	10.858	364.065
Sumatera Selatan	66.054	15.230	662.586	33.198	22.275	799.343
Bengkulu	15.875	2.869	176.954	4.110	3.379	203.187
Lampung	93.643	19.851	724.312	39.211	14.148	891.165
Bangka-Belitung	10.789	3.227	83.606	5.667	1.650	104.939
Kepulauan Riau	2.138	391	42.538	1.087	1.383	47.537
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	124.399	134.641	1972.830	74.104	134.052	2440.026
Jawa Tengah	203.873	67.088	2197.746	71.640	99.620	2639.967
D I Y	6.993	.633	143.768	1.284	.878	153.556
Jawa Timur	194.006	60.030	2307.788	82.473	71.920	2716.217
Banten	30.034	45.707	493.537	17.219	43.745	630.242
Bali	39.962	3.193	165.717	4.403	2.618	215.893
Nusa Tenggara Barat	49.228	4.400	383.381	11.369	4.536	452.914
Nusa Tenggara Timur	89.656	8.953	641.913	19.354	9.461	769.337
Kalimantan Barat	48.993	7.085	461.016	20.272	10.672	548.038
Kalimantan Tengah	29.408	1.708	212.623	5.920	5.137	254.796
Kalimantan Selatan	31.922	4.609	277.556	12.096	9.992	336.175
Kalimantan Timur	9.167	7.484	217.837	3.214	5.031	242.733
Sulawesi Utara	9.353	3.157	167.128	6.264	7.841	193.743
Sulawesi Tengah	49.761	6.341	259.632	21.941	8.830	346.505
Sulawesi Selatan	122.931	11.865	699.751	28.392	26.790	889.729
Sulawesi Tenggara	62.133	2.181	237.531	12.106	3.892	317.843
Gorontalo	14.339	1.640	97.655	7.427	3.414	124.475
Sulawesi Barat	30.816	1.324	133.182	8.344	5.002	178.668
Maluku	12.786	2.821	167.166	7.341	5.535	195.649
Maluku Utara	12.898	1.048	124.846	5.724	5.581	150.097
Papua Barat	8.664	.704	88.943	1.990	1.777	102.078
Papua	142.396	10.710	247.451	7.130	44.414	452.101
Indonesia	1.850.214	489.533	16.188.597	578.957	628.735	19.736.036

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.8.1 Penduduk 10-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014
Laki-Laki

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.558	666	131.898	.0	1.147	135.269
Sumatera Utara	16.652	2.897	395.137	616	4.547	419.849
Sumatera Barat	3.023	522	139.584	134	1.834	145.097
Riau	712	918	167.195	1.679	8.690	179.194
Jambi	586	99	95.060	233	1.660	97.638
Sumatera Selatan	1.985	325	211.959	511	3.711	218.491
Bengkulu	527	102	49.878	268	433	51.208
Lampung	3.815	1.040	206.380	2.575	2.301	216.111
Bangka-Belitung	329	117	37.205	246	360	38.257
Kepulauan Riau	-	-	52.576	1.351	2.469	56.396
DKI Jakarta	-	2.652	217.696	.0	3.471	223.819
Jawa Barat	3.536	4.898	1170.000	6.853	24.040	1209.327
Jawa Tengah	7.884	2.981	806.348	2.291	12.892	832.396
D I Y	-	-	73.125	-	2.630	75.755
Jawa Timur	8.485	5.813	876.612	2.210	11.889	905.009
Banten	-	4.674	294.774	-	9.770	309.218
Bali	2.173	-	98.400	845	1.321	102.739
Nusa Tenggara Barat	2.923	-	136.396	558	734	140.611
Nusa Tenggara Timur	6.244	1.341	165.057	1.049	2.310	176.001
Kalimantan Barat	1.095	-	131.029	620	1.703	134.447
Kalimantan Tengah	2.056	317	69.210	-	1.083	72.666
Kalimantan Selatan	2.358	550	101.522	880	3.408	108.718
Kalimantan Timur	721	122	102.957	248	3.547	107.595
Sulawesi Utara	1.005	165	56.727	314	1.421	59.632
Sulawesi Tengah	3.230	667	70.218	931	2.458	77.504
Sulawesi Selatan	11.298	2.057	228.103	814	6.261	248.533
Sulawesi Tenggara	6.276	414	67.264	236	1.228	75.418
Gorontalo	474	.0	30.390	384	815	32.063
Sulawesi Barat	2.660	224	36.281	484	1.897	41.546
Maluku	597	459	50.650	493	2.378	54.577
Maluku Utara	821	233	36.466	318	303	38.141
Papua Barat	528	-	28.786	-	780	30.094
Papua	7.719	434	79.788	356	10.571	98.868
Indonesia	101.270	34.687	6.414.671	27.497	134.062	6.712.187

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.8.2 Penduduk 13-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	3.615	1.460	97.609	.0	2.030	104.714
Sumatera Utara	26.353	2.310	251.636	2.264	3.786	286.349
Sumatera Barat	3.971	779	96.523	1.150	3.660	106.083
Riau	5.764	1.146	114.855	1.167	5.326	128.258
Jambi	2.242	1.415	53.904	113	2.678	60.352
Sumatera Selatan	6.732	2.521	143.280	1.151	5.105	158.789
Bengkulu	2.052	452	32.911	181	1.180	36.776
Lampung	10.857	2.009	133.610	3.489	3.690	153.655
Bangka-Belitung	1.977	50	21.304	74	242	23.647
Kepulauan Riau	427	-	27.535	805	2.550	31.317
DKI Jakarta	1.267	1.840	137.230	-	4.018	144.355
Jawa Barat	15.766	17.252	823.366	2.603	43.474	902.461
Jawa Tengah	24.422	7.563	544.213	4.935	28.315	609.448
D I Y	452	761	53.127	1.124	2.040	57.504
Jawa Timur	20.015	4.405	614.228	3.819	15.597	658.064
Banten	3.479	5.027	204.648	1.387	10.515	225.056
Bali	7.490	954	61.719	266	854	71.283
Nusa Tenggara Barat	7.554	551	83.217	256	663	92.241
Nusa Tenggara Timur	9.351	469	99.181	2.159	1.870	113.030
Kalimantan Barat	2.074	609	87.048	1.307	2.930	93.968
Kalimantan Tengah	3.288	113	38.303	-	629	42.333
Kalimantan Selatan	3.865	748	61.675	-	4.235	70.523
Kalimantan Timur	1.303	1.708	74.021	201	1.762	78.995
Sulawesi Utara	2.029	371	41.813	447	1.501	46.161
Sulawesi Tengah	6.198	1.241	45.279	952	3.076	56.746
Sulawesi Selatan	17.363	468	140.126	581	5.692	164.230
Sulawesi Tenggara	9.135	493	43.562	464	1.382	55.036
Gorontalo	2.274	462	18.216	400	881	22.233
Sulawesi Barat	5.690	134	17.826	840	372	24.862
Maluku	1.743	511	31.520	557	2.113	36.444
Maluku Utara	1.549	400	20.086	545	923	23.503
Papua Barat	729	-	12.083	-	811	13.623
Papua	15.058	2.033	46.002	411	5.355	68.859
Indonesia	226.084	60.255	4.271.656	33.648	169.255	4.760.898

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.8.3 Penduduk 15-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Laki-Laki

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	19.398	7.431	122.755	358	5.086	155.028
Sumatera Utara	112.308	13.143	332.795	4.044	15.635	477.925
Sumatera Barat	25.279	8.168	132.752	1.779	7.843	175.821
Riau	31.629	12.662	140.919	1.790	9.416	196.416
Jambi	19.767	5.983	80.853	1.488	4.573	112.664
Sumatera Selatan	50.857	15.258	174.294	4.694	9.010	254.113
Bengkulu	10.959	1.357	46.858	521	2.569	62.264
Lampung	69.477	14.219	169.397	5.637	6.458	265.188
Bangka-Belitung	9.708	2.719	29.975	619	2.448	45.469
Kepulauan Riau	3.208	2.790	33.810	753	4.566	45.127
DKI Jakarta	14.489	8.589	178.186	-	1.803	203.067
Jawa Barat	177.887	131.743	1095.007	16.666	92.362	1513.665
Jawa Tengah	164.451	62.675	748.628	13.705	62.509	1051.968
D I Y	7.828	632	75.760	3.725	1.981	89.926
Jawa Timur	156.008	52.585	826.415	9.255	54.752	1099.015
Banten	42.338	35.042	273.070	1.694	32.049	384.193
Bali	19.855	1.889	86.595	713	904	109.956
Nusa Tenggara Barat	34.284	4.066	116.956	1.541	4.434	161.281
Nusa Tenggara Timur	44.511	5.352	143.995	3.751	4.728	202.337
Kalimantan Barat	35.505	6.539	116.590	2.016	4.810	165.460
Kalimantan Tengah	17.848	1.794	58.119	1.715	3.792	83.268
Kalimantan Selatan	27.856	3.917	81.240	1.183	6.337	120.533
Kalimantan Timur	11.932	5.518	107.073	115	5.164	129.802
Sulawesi Utara	8.839	3.565	56.409	1.817	6.616	77.246
Sulawesi Tengah	30.204	2.522	55.492	2.403	2.878	93.499
Sulawesi Selatan	74.039	6.880	199.125	2.782	13.551	296.377
Sulawesi Tenggara	32.530	1.054	59.186	2.468	2.004	97.242
Gorontalo	12.367	1.089	22.832	1.297	2.187	39.772
Sulawesi Barat	18.520	582	28.676	1.058	1.728	50.564
Maluku	9.328	2.096	52.102	2.270	4.167	69.963
Maluku Utara	7.215	713	28.946	647	2.614	40.135
Papua Barat	2.482	375	25.508	245	1.567	30.177
Papua	60.918	5.976	74.304	345	9.772	151.315
Indonesia	1.363.824	428.923	5.774.622	93.094	390.313	8.050.776

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.8.4 Penduduk 10-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Laki-Laki

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	24.571	9.557	352.262	358	8.263	395.011
Sumatera Utara	155.313	18.350	979.568	6.924	23.968	1.184.123
Sumatera Barat	32.273	9.469	368.859	3.063	13.337	427.001
Riau	38.105	14.726	422.969	4.636	23.432	503.868
Jambi	22.595	7.497	229.817	1.834	8.911	270.654
Sumatera Selatan	59.574	18.104	529.533	6.356	17.826	631.393
Bengkulu	13.538	1.911	129.647	970	4.182	150.248
Lampung	84.149	17.268	509.387	11.701	12.449	634.954
Bangka-Belitung	12.014	2.886	88.484	939	3.050	107.373
Kepulauan Riau	3.635	2.790	113.921	2.909	9.585	132.840
DKI Jakarta	15.756	13.081	533.112	-	9.292	571.241
Jawa Barat	197.189	153.893	3.088.373	26.122	159.876	3.625.453
Jawa Tengah	196.757	73.219	2.099.189	20.931	103.716	2.493.812
D I Y	8.280	1.393	202.012	4.849	6.651	223.185
Jawa Timur	184.508	62.803	2.317.255	15.284	82.238	2.662.088
Banten	45.817	44.743	772.492	3.081	52.334	918.467
Bali	29.518	2.843	246.714	1.824	3.079	283.978
Nusa Tenggara Barat	44.761	4.617	336.569	2.355	5.831	394.133
Nusa Tenggara Timur	60.106	7.162	408.233	6.959	8.908	491.368
Kalimantan Barat	38.674	7.148	334.667	3.943	9.443	393.875
Kalimantan Tengah	23.192	2.224	165.632	1.715	5.504	198.267
Kalimantan Selatan	34.079	5.215	244.437	2.063	13.980	299.774
Kalimantan Timur	13.956	7.348	284.051	564	10.473	316.392
Sulawesi Utara	11.873	4.101	154.949	2.578	9.538	183.039
Sulawesi Tengah	39.632	4.430	170.989	4.286	8.412	227.749
Sulawesi Selatan	102.700	9.405	567.354	4.177	25.504	709.140
Sulawesi Tenggara	47.941	1.961	170.012	3.168	4.614	227.696
Gorontalo	15.115	1.551	71.438	2.081	3.883	94.068
Sulawesi Barat	26.870	940	82.783	2.382	3.997	116.972
Maluku	11.668	3.066	134.272	3.320	8.658	160.984
Maluku Utara	9.585	1.346	85.498	1.510	3.840	101.779
Papua Barat	3.739	375	66.377	245	3.158	73.894
Papua	83.695	8.443	200.094	1.112	25.698	319.042
Indonesia	1.691.178	523.865	16.460.949	154.239	693.630	19.523.861

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.9.1 Penduduk 10-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Perempuan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	1.063	-	125.525	31	1.509	128.128
Sumatera Utara	14.410	139	374.229	4.078	2.110	394.966
Sumatera Barat	1.744	1.688	132.906	1.775	191	138.304
Riau	2.848	379	158.519	5.084	6.936	173.766
Jambi	550	-	81.456	184	1.095	83.285
Sumatera Selatan	1.589	3.033	201.655	2.792	1.183	210.252
Bengkulu	456	370	48.190	215	-	49.231
Lampung	1.959	181	179.809	4.308	1.249	187.506
Bangka-Belitung	400	120	33.340	524	353	34.737
Kepulauan Riau	1.350	-	46.442	198	2.849	50.839
DKI Jakarta	1.666	-	195.742	-	1.515	198.923
Jawa Barat	6.787	5.644	1098.135	6.437	20.974	1.137.977
Jawa Tengah	8.000	2.446	764.607	4.473	5.951	785.477
D I Y	992	-	66.272	-	1.512	68.776
Jawa Timur	2.646	5.295	856.694	3.769	8.693	877.097
Banten	1.994	1.369	286.407	1.089	5.644	296.503
Bali	6.498	1.478	93.721	274	786	102.757
Nusa Tenggara Barat	1.079	403	124.732	436	519	127.169
Nusa Tenggara Timur	2.800	1.356	149.689	1.966	525	156.336
Kalimantan Barat	301	429	126.890	1.182	1.043	129.845
Kalimantan Tengah	2.098	243	60.827	612	231	64.011
Kalimantan Selatan	1.853	212	97.467	557	981	101.070
Kalimantan Timur	1.063	411	96.117	771	2.186	100.548
Sulawesi Utara	299	-	59.352	456	926	61.033
Sulawesi Tengah	1.575	455	70.902	3.329	1.774	78.035
Sulawesi Selatan	6.300	1.393	204.301	3.040	1.866	216.900
Sulawesi Tenggara	5.160	202	67.683	1.099	518	74.662
Gorontalo	206	106	31.791	453	427	32.983
Sulawesi Barat	1.826	182	34.520	590	288	37.406
Maluku	368	269	50.729	1.120	594	53.080
Maluku Utara	696	-	29.045	368	1.094	31.203
Papua Barat	979	71	23.213	-	484	24.747
Papua	7.199	915	66.663	1.062	12.589	88.428
Indonesia	88.754	28.789	6.037.570	52.272	88.595	6.295.980

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.9.2 Penduduk 13-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014
Perempuan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.723	431	98.332	1.120	285	102.891
Sumatera Utara	24.566	2.368	245.530	4.327	3.254	280.045
Sumatera Barat	4.370	877	95.231	2.517	408	103.403
Riau	2.759	1.357	107.883	5.033	2.864	119.896
Jambi	1.857	436	67.088	823	1.322	71.526
Sumatera Selatan	5.035	509	134.191	7.082	2.115	148.932
Bengkulu	2.596	-	31.015	628	220	34.459
Lampung	3.586	1.260	148.576	8.430	616	162.468
Bangka-Belitung	796	-	22.406	840	275	24.317
Kepulauan Riau	272	-	30.866	118	988	32.244
DKI Jakarta	3.606	1.056	150.454	-	40	155.156
Jawa Barat	17.213	13.398	799.066	22.530	24.925	877.132
Jawa Tengah	13.916	2.855	549.940	9.662	11.500	587.873
D I Y	748	1.008	54.538	1.512	504	58.310
Jawa Timur	15.123	6.752	575.293	14.472	9.099	620.739
Banten	8.108	3.258	187.771	3.844	7.322	210.303
Bali	7.530	366	52.630	527	263	61.316
Nusa Tenggara Barat	7.918	973	84.725	1.001	570	95.187
Nusa Tenggara Timur	6.692	891	107.879	3.185	888	119.535
Kalimantan Barat	2.555	145	82.763	2.884	747	89.094
Kalimantan Tengah	2.585	-	42.446	751	387	46.169
Kalimantan Selatan	2.647	540	60.802	2.221	2.599	68.809
Kalimantan Timur	528	745	71.715	1.575	1.085	75.648
Sulawesi Utara	336	386	35.800	752	1.128	38.402
Sulawesi Tengah	4.236	568	40.920	2.707	539	48.970
Sulawesi Selatan	12.270	1.207	153.338	6.652	2.570	176.037
Sulawesi Tenggara	3.750	-	43.817	1.570	-	49.137
Gorontalo	771	109	16.730	1.199	360	19.169
Sulawesi Barat	2.197	-	21.486	1.681	386	25.750
Maluku	772	108	30.074	1.332	384	32.670
Maluku Utara	1.069	-	24.899	825	727	27.520
Papua Barat	952	27	14.384	470	680	16.513
Papua	12.128	570	41.432	1.893	3.865	59.888
Indonesia	176.210	42.200	4.224.020	114.163	82.915	4.639.508

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.9.3 Penduduk 15-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014
Perempuan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	9.363	3.725	147.253	5.049	3.151	168.541
Sumatera Utara	63.436	15.352	364.037	25.108	4.668	472.601
Sumatera Barat	13.723	4.197	152.811	7.785	1.633	180.149
Riau	12.737	8.834	158.189	18.561	7.042	205.363
Jambi	6.575	2.942	75.178	6.009	4.657	95.361
Sumatera Selatan	18.214	5.922	176.890	26.705	7.337	235.068
Bengkulu	5.538	1.459	50.696	2.834	834	61.361
Lampung	17.429	8.466	182.260	19.955	1.839	229.949
Bangka-Belitung	3.289	1.439	32.019	5.697	187	42.631
Kepulauan Riau	6.029	-	35.547	1.456	618	43.650
DKI Jakarta	17.283	9.080	237.112	5.325	2.895	271.695
Jawa Barat	107.674	92.896	1059.874	90.469	63.718	1414.631
Jawa Tengah	100.561	43.865	702.548	69.391	25.834	942.199
D I Y	7.682	891	75.832	4.844	1.762	91.011
Jawa Timur	82.502	30.901	805.713	80.064	15.854	1015.034
Banten	30.311	27.015	248.455	20.306	24.289	350.376
Bali	16.643	1.618	83.392	5.736	216	107.605
Nusa Tenggara Barat	18.199	1.815	110.190	11.727	1.943	143.874
Nusa Tenggara Timur	26.402	1.528	143.929	11.032	1.664	184.555
Kalimantan Barat	19.572	4.307	123.812	18.383	2.842	168.916
Kalimantan Tengah	8.930	632	56.938	6.466	1.151	74.117
Kalimantan Selatan	11.870	2.083	81.376	11.934	3.393	110.656
Kalimantan Timur	7.289	4.563	102.923	6.932	3.482	125.189
Sulawesi Utara	1.377	3.590	52.914	5.383	2.313	65.577
Sulawesi Tengah	11.224	2.645	62.471	15.151	1.745	93.236
Sulawesi Selatan	29.525	5.864	216.724	23.874	2.964	278.951
Sulawesi Tenggara	12.936	809	59.029	10.141	-	82.915
Gorontalo	2.317	748	28.518	5.359	891	37.833
Sulawesi Barat	7.426	531	34.674	6.114	1.112	49.857
Maluku	3.538	1.315	47.531	5.868	2.019	60.271
Maluku Utara	3.449	448	32.173	4.544	601	41.215
Papua Barat	3.359	534	21.216	2.123	785	28.017
Papua	44.008	1.680	52.462	4.384	5.472	108.006
Indonesia	730.410	291.694	5.814.686	544.709	198.911	7.580.410

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.9.4 Penduduk 10-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014
Perempuan

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	13.149	4.156	371.110	6.200	4.945	399.560
Sumatera Utara	102.412	17.859	983.796	33.513	10.032	1147.612
Sumatera Barat	19.837	6.762	380.948	12.077	2.232	421.856
Riau	18.344	10.570	424.591	28.678	16.842	499.025
Jambi	8.982	3.378	223.722	7.016	7.074	250.172
Sumatera Selatan	24.838	9.464	512.736	36.579	10.635	594.252
Bengkulu	8.590	1.829	129.901	3.677	1.054	145.051
Lampung	22.974	9.907	510.645	32.693	3.704	579.923
Bangka-Belitung	4.485	1.559	87.765	7.061	815	101.685
Kepulauan Riau	7.651	-	112.855	1.772	4.455	126.733
DKI Jakarta	22.555	10.136	583.308	5.325	4.450	625.774
Jawa Barat	131.674	111.938	2957.075	119.436	109.617	3429.740
Jawa Tengah	122.477	49.166	2017.095	83.526	43.285	2315.549
DIY	9.422	1.899	196.642	6.356	3.778	218.097
Jawa Timur	100.271	42.948	2237.700	98.305	33.646	2512.870
Banten	40.413	31.642	722.633	25.239	37.255	857.182
Bali	30.671	3.462	229.743	6.537	1.265	271.678
Nusa Tenggara Barat	27.196	3.191	319.647	13.164	3.032	366.230
Nusa Tenggara Timur	35.894	3.775	401.497	16.183	3.077	460.426
Kalimantan Barat	22.428	4.881	333.465	22.449	4.632	387.855
Kalimantan Tengah	13.613	875	160.211	7.829	1.769	184.297
Kalimantan Selatan	16.370	2.835	239.645	14.712	6.973	280.535
Kalimantan Timur	8.880	5.719	270.755	9.278	6.753	301.385
Sulawesi Utara	2.012	3.976	148.066	6.591	4.367	165.012
Sulawesi Tengah	17.035	3.668	174.293	21.187	4.058	220.241
Sulawesi Selatan	48.095	8.464	574.363	33.566	7.400	671.888
Sulawesi Tenggara	21.846	1.011	170.529	12.810	518	206.714
Gorontalo	3.294	963	77.039	7.011	1.678	89.985
Sulawesi Barat	11.449	713	90.680	8.385	1.786	113.013
Maluku	4.678	1.692	128.334	8.320	2.997	146.021
Maluku Utara	5.214	448	86.117	5.737	2.422	99.938
Papua Barat	5.290	632	58.813	2.593	1.949	69.277
Papua	63.335	3.165	160.557	7.339	21.926	256.322
Indonesia	995.374	362.683	16.076.276	711.144	370.421	18.515.898

Sumber: BPS - Sakemas Agustus 2014

Tabel L- 7.10.1 Penduduk 10-12 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	2.621	666	257.423	31	2.656	263.397
Sumatera Utara	31.062	3.036	769.366	4.694	6.657	814.815
Sumatera Barat	4.767	2.210	272.490	1.909	2.025	283.401
Riau	3.560	1.297	325.714	6.763	15.626	352.960
Jambi	1.136	99	176.516	417	2.755	180.923
Sumatera Selatan	3.574	3.358	413.614	3.303	4.894	428.743
Bengkulu	983	472	98.068	483	433	100.439
Lampung	5.774	1.221	386.189	6.883	3.550	403.617
Bangka-Belitung	729	237	70.545	770	713	72.994
Kepulauan Riau	1.350	-	99.018	1.549	5.318	107.235
DKI Jakarta	1.666	2.652	413.438	-	4.986	422.742
Jawa Barat	10.323	10.542	2268.135	13.290	45.014	2347.304
Jawa Tengah	15.884	5.427	1570.955	6.764	18.843	1617.873
D I Y	992	-	139.397	-	4.142	144.531
Jawa Timur	11.131	11.108	1733.306	5.979	20.582	1782.106
Banten	1.994	6.043	581.181	1.089	15.414	605.721
Bali	8.671	1.478	192.121	1.119	2.107	205.496
Nusa Tenggara Barat	4.002	403	261.128	994	1.253	267.780
Nusa Tenggara Timur	9.044	2.697	314.746	3.015	2.835	332.337
Kalimantan Barat	1.396	429	257.919	1.802	2.746	264.292
Kalimantan Tengah	4.154	560	130.037	612	1.314	136.677
Kalimantan Selatan	4.211	762	198.989	1.437	4.389	209.788
Kalimantan Timur	1.784	533	199.074	1.019	5.733	208.143
Sulawesi Utara	1.304	165	116.079	770	2.347	120.665
Sulawesi Tengah	4.805	1.122	141.120	4.260	4.232	155.539
Sulawesi Selatan	17.598	3.450	432.404	3.854	8.127	465.433
Sulawesi Tenggara	11.436	616	134.947	1.335	1.746	150.080
Gorontalo	680	106	62.181	837	1.242	65.046
Sulawesi Barat	4.486	406	70.801	1.074	2.185	78.952
Maluku	965	728	101.379	1.613	2.972	107.657
Maluku Utara	1.517	233	65.511	686	1.397	69.344
Papua Barat	1.507	71	51.999	-	1.264	54.841
Papua	14.918	1.349	146.451	1.418	23.160	187.296
Indonesia	190.024	63.476	12.452.241	79.769	222.657	13.008.167

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.10.2 Penduduk 13-14 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	6.338	1.891	195.941	1.120	2.315	207.605
Sumatera Utara	50.919	4.678	497.166	6.591	7.040	566.394
Sumatera Barat	8.341	1.656	191.754	3.667	4.068	209.486
Riau	8.523	2.503	222.738	6.200	8.190	248.154
Jambi	4.099	1.851	120.992	936	4.000	131.878
Sumatera Selatan	11.767	3.030	277.471	8.233	7.220	307.721
Bengkulu	4.648	452	63.926	809	1.400	71.235
Lampung	14.443	3.269	282.186	11.919	4.306	316.123
Bangka-Belitung	2.773	50	43.710	914	517	47.964
Kepulauan Riau	699	-	58.401	923	3.538	63.561
DKI Jakarta	4.873	2.896	287.684	-	4.058	299.511
Jawa Barat	32.979	30.650	1622.432	25.133	68.399	1.779.593
Jawa Tengah	38.338	10.418	1094.153	14.597	39.815	1.197.321
D I Y	1.200	1.769	107.665	2.636	2.544	115.814
Jawa Timur	35.138	11.157	1189.521	18.291	24.696	1.278.803
Banten	11.587	8.285	392.419	5.231	17.837	435.359
Bali	15.020	1.320	114.349	793	1.117	132.599
Nusa Tenggara Barat	15.472	1.524	167.942	1.257	1.233	187.428
Nusa Tenggara Timur	16.043	1.360	207.060	5.344	2.758	232.565
Kalimantan Barat	4.629	754	169.811	4.191	3.677	183.062
Kalimantan Tengah	5.873	113	80.749	751	1.016	88.502
Kalimantan Selatan	6.512	1.288	122.477	2.221	6.834	139.332
Kalimantan Timur	1.831	2.453	145.736	1.776	2.847	154.643
Sulawesi Utara	2.365	757	77.613	1.199	2.629	84.563
Sulawesi Tengah	10.434	1.809	86.199	3.659	3.615	105.716
Sulawesi Selatan	29.633	1.675	293.464	7.233	8.262	340.267
Sulawesi Tenggara	12.885	493	87.379	2.034	1.382	104.173
Gorontalo	3.045	571	34.946	1.599	1.241	41.402
Sulawesi Barat	7.887	134	39.312	2.521	758	50.612
Maluku	2.515	619	61.594	1.889	2.497	69.114
Maluku Utara	2.618	400	44.985	1.370	1.650	51.023
Papua Barat	1.681	27	26.467	470	1.491	30.136
Papua	27.186	2.603	87.434	2.304	9.220	128.747
Indonesia	402.294	102.455	8.495.676	147.811	252.170	9.400.406

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.10.3 Penduduk 15-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	28.761	11.156	270.008	5.407	8.237	323.569
Sumatera Utara	175.744	28.495	696.832	29.152	20.303	950.526
Sumatera Barat	39.002	12.365	285.563	9.564	9.476	355.970
Riau	44.366	21.496	299.108	20.351	16.458	401.779
Jambi	26.342	8.925	156.031	7.497	9.230	208.025
Sumatera Selatan	69.071	21.180	351.184	31.399	16.347	489.181
Bengkulu	16.497	2.816	97.554	3.355	3.403	123.625
Lampung	86.906	22.685	351.657	25.592	8.297	495.137
Bangka-Belitung	12.997	4.158	61.994	6.316	2.635	88.100
Kepulauan Riau	9.237	2.790	69.357	2.209	5.184	88.777
DKI Jakarta	31.772	17.669	415.298	5.325	4.698	474.762
Jawa Barat	285.561	224.639	2154.881	107.135	156.080	2928.296
Jawa Tengah	265.012	106.540	1451.176	83.096	88.343	1994.167
D I Y	15.510	1.523	151.592	8.569	3.743	180.937
Jawa Timur	238.510	83.486	1632.128	89.319	70.606	2114.049
Banten	72.649	62.057	521.525	22.000	56.338	734.569
Bali	36.498	3.507	169.987	6.449	1.120	217.561
Nusa Tenggara Barat	52.483	5.881	227.146	13.268	6.377	305.155
Nusa Tenggara Timur	70.913	6.880	287.924	14.783	6.392	386.892
Kalimantan Barat	55.077	10.846	240.402	20.399	7.652	334.376
Kalimantan Tengah	26.778	2.426	115.057	8.181	4.943	157.385
Kalimantan Selatan	39.726	6.000	162.616	13.117	9.730	231.189
Kalimantan Timur	19.221	10.081	209.996	7.047	8.646	254.991
Sulawesi Utara	10.216	7.155	109.323	7.200	8.929	142.823
Sulawesi Tengah	41.428	5.167	117.963	17.554	4.623	186.735
Sulawesi Selatan	103.564	12.744	415.849	26.656	16.515	575.328
Sulawesi Tenggara	45.466	1.863	118.215	12.609	2.004	180.157
Gorontalo	14.684	1.837	51.350	6.656	3.078	77.605
Sulawesi Barat	25.946	1.113	63.350	7.172	2.840	100.421
Maluku	12.866	3.411	99.633	8.138	6.186	130.234
Maluku Utara	10.664	1.161	61.119	5.191	3.215	81.350
Papua Barat	5.841	.909	46.724	2.368	2.352	58.194
Papua	104.926	7.656	126.766	4.729	15.244	259.321
Indonesia	2.094.234	720.617	11.589.308	637.803	589.224	15.631.186

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.10.4 Penduduk 10-17 Tahun Menurut Provinsi dan Jenis Kegiatan Seminggu yang Lalu, 2014

Provinsi	Bekerja	Pengangguran	Sekolah	Mengurus Rumah Tangga	Lainnya	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	37.720	13.713	723.372	6.558	13.208	794.571
Sumatera Utara	257.725	36.209	1963.364	40.437	34.000	2.331.735
Sumatera Barat	52.110	16.231	749.807	15.140	15.569	848.857
Riau	56.449	25.296	847.560	33.314	40.274	1.002.893
Jambi	31.577	10.875	453.539	8.850	15.985	520.826
Sumatera Selatan	84.412	27.568	1042.269	42.935	28.461	1.225.645
Bengkulu	22.128	3.740	259.548	4.647	5.236	295.299
Lampung	107.123	27.175	1020.032	44.394	16.153	1.214.877
Bangka-Belitung	16.499	4.445	176.249	8.000	3.865	209.058
Kepulauan Riau	11.286	2.790	226.776	4.681	14.040	259.573
DKI Jakarta	38.311	23.217	1116.420	5.325	13.742	1.197.015
Jawa Barat	328.863	265.831	6045.448	145.558	269.493	7.055.193
Jawa Tengah	319.234	122.385	4116.284	104.457	147.001	4.809.361
D I Y	17.702	3.292	398.654	11.205	10.429	441.282
Jawa Timur	284.779	105.751	4554.955	113.589	115.884	5.174.958
Banten	86.230	76.385	1495.125	28.320	89.589	1.775.649
Bali	60.189	6.305	476.457	8.361	4.344	555.656
Nusa Tenggara Barat	71.957	7.808	656.216	15.519	8.863	760.363
Nusa Tenggara Timur	96.000	10.937	809.730	23.142	11.985	951.794
Kalimantan Barat	61.102	12.029	668.132	26.392	14.075	781.730
Kalimantan Tengah	36.805	3.099	325.843	9.544	7.273	382.564
Kalimantan Selatan	50.449	8.050	484.082	16.775	20.953	580.309
Kalimantan Timur	22.836	13.067	554.806	9.842	17.226	617.777
Sulawesi Utara	13.885	8.077	303.015	9.169	13.905	348.051
Sulawesi Tengah	56.667	8.098	345.282	25.473	12.470	447.990
Sulawesi Selatan	150.795	17.869	1141.717	37.743	32.904	1.381.028
Sulawesi Tenggara	69.787	2.972	340.541	15.978	5.132	434.410
Gorontalo	18.409	2.514	148.477	9.092	5.561	184.053
Sulawesi Barat	38.319	1.653	173.463	10.767	5.783	229.985
Maluku	16.346	4.758	262.606	11.640	11.655	307.005
Maluku Utara	14.799	1.794	171.615	7.247	6.262	201.717
Papua Barat	9.029	1.007	125.190	2.838	5.107	143.171
Papua	147.030	11.608	360.651	8.451	47.624	575.364
Indonesia	2.686.552	886.548	32.537.225	865.383	1.064.051	38.039.759

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.11.1 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Formal-Informal, 2014

Perkotaan

Provinsi	Kelompok Umur								
	10-12 Tahun			13-14 Tahun			15-17 Tahun		
	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	-	319	319	-	839	839	1.150	1.711	2.861
Sumatera Utara	-	4.182	4.182	789	5.822	6.611	17.156	28.171	45.327
Sumatera Barat	-	1.309	1.309	266	934	1.200	3.922	7.045	10.967
Riau	-	1.703	1.703	471	2.223	2.694	4.204	6.800	11.004
Jambi	-	445	445	-	1.113	1.113	2.359	4.651	7.010
Sumatera Selatan	-	904	904	-	2.759	2.759	5.810	8.885	14.695
Bengkulu	-	117	117	324	885	1.209	1.620	3.307	4.927
Lampung	-	302	302	154	1.294	1.448	4.837	6.893	11.730
Bangka-Belitung	-	172	172	155	437	592	3.117	1.829	4.946
Kepulauan Riau	-	1.350	1.350	-	-	-	3.546	4.252	7.798
DKI Jakarta	-	1.666	1.666	3.315	1.558	4.873	27.582	4.190	31.772
Jawa Barat	380	7.554	7.934	11.702	7.806	19.508	100.749	76.273	177.022
Jawa Tengah	-	4.412	4.412	3.714	6.690	10.404	55.818	44.727	100.545
D I Y	-	-	-	-	654	654	5.239	4.816	10.055
Jawa Timur	453	2.690	3.143	1.177	10.810	11.987	31.306	44.337	75.643
Banten	615	1.379	1.994	3.018	3.315	6.333	34.724	13.145	47.869
Bali	-	1.824	1.824	93	3.236	3.329	8.095	6.979	15.074
Nusa Tenggara Barat	-	1.209	1.209	256	6.106	6.362	3.560	11.598	15.158
Nusa Tenggara Timur	-	681	681	-	1.437	1.437	1.265	2.961	4.226
Kalimantan Barat	-	486	486	322	1.140	1.462	5.786	4.375	10.161
Kalimantan Tengah	64	416	480	-	665	665	2.880	3.372	6.252
Kalimantan Selatan	-	1.036	1.036	1.158	303	1.461	9.721	6.309	16.030
Kalimantan Timur	140	1.132	1.272	128	986	1.114	3.680	7.603	11.283
Sulawesi Utara	124	233	357	178	765	943	1.083	2.149	3.232
Sulawesi Tengah	64	713	777	237	973	1.210	1.674	3.245	4.919
Sulawesi Selatan	-	1.940	1.940	1.146	2.658	3.804	8.600	13.520	22.120
Sulawesi Tenggara	-	1.094	1.094	150	620	770	1.399	4.391	5.790
Gorontalo	-	108	108	133	-	133	1.803	2.026	3.829
Sulawesi Barat	-	1.176	1.176	-	1.585	1.585	716	4.026	4.742
Maluku	-	250	250	58	431	489	599	2.222	2.821
Maluku Utara	-	102	102	-	64	64	-	1.735	1.735
Papua Barat	-	-	-	-	27	27	-	338	338
Papua	-	-	-	50	621	671	802	3.161	3.963
Indonesia	1.840	40.904	42.744	28.994	68.756	97.750	354.802	341.042	695.844

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.11.2 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Formal-Informal, 2014

Perdesaan

Provinsi	Kelompok Umur								
	10-12 Tahun			13-14 Tahun			15-17 Tahun		
	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	64	2.238	2.302	-	5.499	5.499	4.841	21.059	25.900
Sumatera Utara	409	26.471	26.880	1.174	43.134	44.308	12.747	117.670	130.417
Sumatera Barat	-	3.458	3.458	445	6.696	7.141	3.556	24.479	28.035
Riau	-	1.857	1.857	1.073	4.756	5.829	10.313	23.049	33.362
Jambi	243	448	691	637	2.349	2.986	6.886	12.446	19.332
Sumatera Selatan	-	2.670	2.670	606	8.402	9.008	14.637	39.739	54.376
Bengkulu	-	866	866	376	3.063	3.439	1.795	9.775	11.570
Lampung	496	4.976	5.472	278	12.717	12.995	16.888	58.288	75.176
Bangka-Belitung	-	557	557	592	1.589	2.181	3.433	4.618	8.051
Kepulauan Riau	-	-	-	89	610	699	656	783	1.439
DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	2.389	2.389	3.095	10.376	13.471	50.701	57.838	108.539
Jawa Tengah	893	10.579	11.472	467	27.467	27.934	48.306	116.161	164.467
D I Y	-	992	992	-	546	546	3.428	2.027	5.455
Jawa Timur	-	7.988	7.988	1.144	22.007	23.151	25.372	137.495	162.867
Banten	-	-	-	676	4.578	5.254	7.163	17.617	24.780
Bali	-	6.847	6.847	881	10.810	11.691	4.315	17.109	21.424
Nusa Tenggara Barat	-	2.793	2.793	80	9.030	9.110	1.807	35.518	37.325
Nusa Tenggara Timur	-	8.363	8.363	648	13.958	14.606	3.891	62.796	66.687
Kalimantan Barat	158	752	910	253	2.914	3.167	12.155	32.761	44.916
Kalimantan Tengah	-	3.674	3.674	556	4.652	5.208	6.240	14.286	20.526
Kalimantan Selatan	-	3.175	3.175	1.307	3.744	5.051	6.037	17.659	23.696
Kalimantan Timur	-	512	512	67	650	717	904	7.034	7.938
Sulawesi Utara	71	876	947	223	1.199	1.422	2.212	4.772	6.984
Sulawesi Tengah	-	4.028	4.028	60	9.164	9.224	4.630	31.879	36.509
Sulawesi Selatan	432	15.226	15.658	1.801	24.028	25.829	13.837	67.607	81.444
Sulawesi Tenggara	-	10.342	10.342	557	11.558	12.115	4.384	35.292	39.676
Gorontalo	-	572	572	164	2.748	2.912	1.769	9.086	10.855
Sulawesi Barat	-	3.310	3.310	-	6.302	6.302	2.267	18.937	21.204
Maluku	-	715	715	-	2.026	2.026	518	9.527	10.045
Maluku Utara	-	1.415	1.415	95	2.459	2.554	819	8.110	8.929
Papua Barat	-	1.507	1.507	42	1.612	1.654	610	4.893	5.503
Papua	43	14.875	14.918	75	26.440	26.515	370	100.593	100.963
Indonesia	2.809	144.471	147.280	17.461	287.083	304.544	277.487	1.120.903	1.398.390

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.12.1 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Formal-Informal, 2014

Laki-Laki

Provinsi	Kelompok Umur								
	10-12 Tahun			13-14 Tahun			15-17 Tahun		
	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	-	1.558	1.558	-	3.615	3.615	4.960	14.438	19.398
Sumatera Utara	409	16.243	16.652	1.724	24.629	26.353	23.683	88.625	112.308
Sumatera Barat	-	3.023	3.023	-	3.971	3.971	3.929	21.350	25.279
Riau	-	712	712	932	4.832	5.764	10.001	21.628	31.629
Jambi	243	343	586	463	1.779	2.242	7.179	12.588	19.767
Sumatera Selatan	-	1.985	1.985	78	6.654	6.732	15.380	35.477	50.857
Bengkulu	-	527	527	335	1.717	2.052	2.543	8.416	10.959
Lampung	496	3.319	3.815	432	10.425	10.857	14.919	54.558	69.477
Bangka-Belitung	-	329	329	592	1.385	1.977	4.190	5.518	9.708
Kepulauan Riau	-	-	-	89	338	427	2.153	1.055	3.208
DKI Jakarta	-	-	-	765	502	1.267	13.282	1.207	14.489
Jawa Barat	380	3.156	3.536	5.188	10.578	15.766	85.347	92.540	177.887
Jawa Tengah	893	6.991	7.884	1.436	22.986	24.422	53.710	110.741	164.451
D I Y	-	-	-	-	452	452	3.601	4.227	7.828
Jawa Timur	453	8.032	8.485	1.779	18.236	20.015	28.236	127.772	156.008
Banten	-	-	-	1.398	2.081	3.479	22.922	19.416	42.338
Bali	-	2.173	2.173	768	6.722	7.490	6.716	13.139	19.855
Nusa Tenggara Barat	-	2.923	2.923	336	7.218	7.554	3.388	30.896	34.284
Nusa Tenggara Timur	-	6.244	6.244	394	8.957	9.351	2.819	41.692	44.511
Kalimantan Barat	158	937	1.095	-	2.074	2.074	11.714	23.791	35.505
Kalimantan Tengah	-	2.056	2.056	556	2.732	3.288	6.624	11.224	17.848
Kalimantan Selatan	-	2.358	2.358	1.167	2.698	3.865	8.586	19.270	27.856
Kalimantan Timur	-	721	721	67	1.236	1.303	2.922	9.010	11.932
Sulawesi Utara	-	1.005	1.005	401	1.628	2.029	2.872	5.967	8.839
Sulawesi Tengah	-	3.230	3.230	237	5.961	6.198	4.831	25.373	30.204
Sulawesi Selatan	432	10.866	11.298	2.586	14.777	17.363	15.650	58.389	74.039
Sulawesi Tenggara	-	6.276	6.276	707	8.428	9.135	5.387	27.143	32.530
Gorontalo	-	474	474	297	1.977	2.274	2.834	9.533	12.367
Sulawesi Barat	-	2.660	2.660	-	5.690	5.690	1.819	16.701	18.520
Maluku	-	597	597	58	1.685	1.743	1.117	8.211	9.328
Maluku Utara	-	821	821	95	1.454	1.549	578	6.637	7.215
Papua Barat	-	528	528	42	687	729	193	2.289	2.482
Papua	-	7.719	7.719	125	14.933	15.058	982	59.936	60.918
Indonesia	3.464	97.806	101.270	23.047	203.037	226.084	375.067	988.757	1.363.824

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.12.2
Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Formal-Informal, 2014
Perempuan

Provinsi	Kelompok Umur								
	10-12 Tahun			13-14 Tahun			15-17 Tahun		
	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	64	999	1.063	-	2.723	2.723	1.031	8.332	9.363
Sumatera Utara	-	14.410	14.410	239	24.327	24.566	6.220	57.216	63.436
Sumatera Barat	-	1.744	1.744	711	3.659	4.370	3.549	10.174	13.723
Riau	-	2.848	2.848	612	2.147	2.759	4.516	8.221	12.737
Jambi	-	550	550	174	1.683	1.857	2.066	4.509	6.575
Sumatera Selatan	-	1.589	1.589	528	4.507	5.035	5.067	13.147	18.214
Bengkulu	-	456	456	365	2.231	2.596	872	4.666	5.538
Lampung	-	1.959	1.959	-	3.586	3.586	6.806	10.623	17.429
Bangka-Belitung	-	400	400	155	641	796	2.360	929	3.289
Kepulauan Riau	-	1.350	1.350	-	272	272	2.049	3.980	6.029
DKI Jakarta	-	1.666	1.666	2.550	1.056	3.606	14.300	2.983	17.283
Jawa Barat	-	6.787	6.787	9.609	7.604	17.213	66.103	41.571	107.674
Jawa Tengah	-	8.000	8.000	2.745	11.171	13.916	50.414	50.147	100.561
D I Y	-	992	992	-	748	748	5.066	2.616	7.682
Jawa Timur	-	2.646	2.646	542	14.581	15.123	28.442	54.060	82.502
Banten	615	1.379	1.994	2.296	5.812	8.108	18.965	11.346	30.311
Bali	-	6.498	6.498	206	7.324	7.530	5.694	10.949	16.643
Nusa Tenggara Barat	-	1.079	1.079	-	7.918	7.918	1.979	16.220	18.199
Nusa Tenggara Timur	-	2.800	2.800	254	6.438	6.692	2.337	24.065	26.402
Kalimantan Barat	-	301	301	575	1.980	2.555	6.227	13.345	19.572
Kalimantan Tengah	64	2.034	2.098	-	2.585	2.585	2.496	6.434	8.930
Kalimantan Selatan	-	1.853	1.853	1.298	1.349	2.647	7.172	4.698	11.870
Kalimantan Timur	140	923	1.063	128	400	528	1.662	5.627	7.289
Sulawesi Utara	195	104	299	-	336	336	423	954	1.377
Sulawesi Tengah	64	1.511	1.575	60	4.176	4.236	1.473	9.751	11.224
Sulawesi Selatan	-	6.300	6.300	361	11.909	12.270	6.787	22.738	29.525
Sulawesi Tenggara	-	5.160	5.160	-	3.750	3.750	396	12.540	12.936
Gorontalo	-	206	206	-	771	771	738	1.579	2.317
Sulawesi Barat	-	1.826	1.826	-	2.197	2.197	1.164	6.262	7.426
Maluku	-	368	368	-	772	772	-	3.538	3.538
Maluku Utara	-	696	696	-	1.069	1.069	241	3.208	3.449
Papua Barat	-	979	979	-	952	952	417	2.942	3.359
Papua	43	7.156	7.199	-	12.128	12.128	190	43.818	44.008
Indonesia	1.185	87.569	88.754	23.408	152.802	176.210	257.222	473.188	730.410

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.13 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Kelompok Umur, dan Status Formal-Informal, 2014

Provinsi	Kelompok Umur								
	10-12 Tahun			13-14 Tahun			15-17 Tahun		
	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah	Formal	Informal	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Aceh	64	2.557	2.621	0	6.338	6.338	5.991	22.770	28.761
Sumatera Utara	409	30.653	31.062	1.963	48.956	50.919	29.903	145.841	175.744
Sumatera Barat	-	4.767	4.767	711	7.630	8.341	7.478	31.524	39.002
Riau	-	3.560	3.560	1.544	6.979	8.523	14.517	29.849	44.366
Jambi	243	893	1.136	637	3.462	4.099	9.245	17.097	26.342
Sumatera Selatan	-	3.574	3.574	606	11.161	11.767	20.447	48.624	69.071
Bengkulu	-	983	983	700	3.948	4.648	3.415	13.082	16.497
Lampung	496	5.278	5.774	432	14.011	14.443	21.725	65.181	86.906
Bangka-Belitung	-	729	729	747	2.026	2.773	6.550	6.447	12.997
Kepulauan Riau	-	1.350	1.350	89	610	699	4.202	5.035	9.237
DKI Jakarta	-	1.666	1.666	3.315	1.558	4.873	27.582	4.190	31.772
Jawa Barat	380	9.943	10.323	14.797	18.182	32.979	151.450	134.111	285.561
Jawa Tengah	893	14.991	15.884	4.181	34.157	38.338	104.124	160.888	265.012
D I Y	-	992	992	0	1.200	1.200	8.667	6.843	15.510
Jawa Timur	453	10.678	11.131	2.321	32.817	35.138	56.678	181.832	238.510
Banten	615	1.379	1.994	3.694	7.893	11.587	41.887	30.762	72.649
Bali	-	8.671	8.671	974	14.046	15.020	12.410	24.088	36.498
Nusa Tenggara Barat	-	4.002	4.002	336	15.136	15.472	5.367	47.116	52.483
Nusa Tenggara Timur	-	9.044	9.044	648	15.395	16.043	5.156	65.757	70.913
Kalimantan Barat	158	1.238	1.396	575	4.054	4.629	17.941	37.136	55.077
Kalimantan Tengah	64	4.090	4.154	556	5.317	5.873	9.120	17.658	26.778
Kalimantan Selatan	-	4.211	4.211	2.465	4.047	6.512	15.758	23.968	39.726
Kalimantan Timur	140	1.644	1.784	195	1.636	1.831	4.584	14.637	19.221
Sulawesi Utara	195	1.109	1.304	401	1.964	2.365	3.295	6.921	10.216
Sulawesi Tengah	64	4.741	4.805	297	10.137	10.434	6.304	35.124	41.428
Sulawesi Selatan	432	17.166	17.598	2.947	26.686	29.633	22.437	81.127	103.564
Sulawesi Tenggara	-	11.436	11.436	707	12.178	12.885	5.783	39.683	45.466
Gorontalo	-	680	680	297	2.748	3.045	3.572	11.112	14.684
Sulawesi Barat	-	4.486	4.486	0	7.887	7.887	2.983	22.963	25.946
Maluku	-	965	965	58	2.457	2.515	1.117	11.749	12.866
Maluku Utara	-	1.517	1.517	95	2.523	2.618	819	9.845	10.664
Papua Barat	-	1.507	1.507	42	1.639	1.681	610	5.231	5.841
Papua	43	14.875	14.918	125	27.061	27.186	1.172	103.754	104.926
Indonesia	4.649	185.375	190.024	46.455	355.839	402.294	632.289	1.461.945	2.094.234

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.14 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama, 2014

Provinsi	Perkotaan					Perdesaan				
	Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama				Total	Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama				Total
	0	1-14	15-40	>40		0	1-14	15-40	>40	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	307	1.828	1.510	374	4.019	270	15.129	12.732	5.570	33.701
Sumatera Utara	698	13.789	20.030	21.603	56.120	140	98.594	86.589	16.282	201.605
Sumatera Barat	445	4.880	4.804	3.347	13.476	374	18.404	15.166	4.690	38.634
Riau	0	3.949	7.198	4.254	15.401	1.009	7.746	23.400	8.893	41.048
Jambi	0	2.764	2.892	2.912	8.568	0	6.783	12.557	3.669	23.009
Sumatera Selatan	245	8.089	4.177	5.847	18.358	393	14.326	39.034	12.301	66.054
Bengkulu	0	1.731	2.544	1.978	6.253	0	5.256	8.160	2.459	15.875
Lampung	0	2.769	3.991	6.720	13.480	460	30.835	44.170	18.178	93.643
Bangka-Belitung	544	937	1.393	2.836	5.710	465	2.867	4.909	2.548	10.789
Kepulauan Riau	0	1.013	4.867	3.268	9.148	0	615	514	1.009	2.138
DKI Jakarta	0	2.395	7.633	28.283	38.311	0	0	0	0	0
Jawa Barat	2.469	23.184	74.565	104.246	204.464	2.418	20.618	48.908	52.455	124.399
Jawa Tengah	1.653	25.929	26.616	61.163	115.361	5.287	63.243	80.440	54.903	203.873
D I Y	0	2.986	1.697	6.026	10.709	0	3.288	277	3.428	6.993
Jawa Timur	956	25.152	24.952	39.713	90.773	0	79.478	79.590	34.938	194.006
Banten	966	12.309	15.348	27.573	56.196	0	8.619	11.038	10.377	30.034
Bali	418	6.341	8.254	5.214	20.227	234	19.156	13.923	6.649	39.962
Nusa Tenggara Barat	402	11.673	6.281	4.373	22.729	0	21.995	21.248	5.985	49.228
Nusa Tenggara Timur	0	2.739	2.459	1.146	6.344	248	46.070	34.261	9.077	89.656
Kalimantan Barat	60	2.088	5.207	4.754	12.109	844	11.327	22.693	14.129	48.993
Kalimantan Tengah	228	2.481	1.608	3.080	7.397	239	9.493	13.753	5.923	29.408
Kalimantan Selatan	0	5.117	5.060	8.350	18.527	0	8.504	16.874	6.544	31.922
Kalimantan Timur	0	4.062	3.756	5.851	13.669	465	1.534	5.914	1.254	9.167
Sulawesi Utara	0	515	1.812	2.205	4.532	447	1.983	3.843	3.080	9.353
Sulawesi Tengah	0	3.050	2.782	1.074	6.906	1.272	19.461	20.616	8.412	49.761
Sulawesi Selatan	0	6.114	10.679	11.071	27.864	1.079	51.988	46.270	23.594	122.931
Sulawesi Tenggara	424	2.795	3.836	599	7.654	547	30.484	26.469	4.633	62.133
Gorontalo	0	922	1.878	1.270	4.070	264	2.394	6.792	4.889	14.339
Sulawesi Barat	0	4.487	2.352	664	7.503	0	16.678	11.556	2.582	30.816
Maluku	0	696	1.816	1.048	3.560	106	3.787	6.954	1.939	12.786
Maluku Utara	0	765	1.136	0	1.901	95	5.321	6.005	1.477	12.898
Papua Barat	0	70	295	0	365	71	3.497	4.100	996	8.664
Papua	328	864	1.936	1.506	4.634	0	24.093	111.371	6.932	142.396
Indonesia	10.143	188.483	265.364	372.348	836.338	16.727	653.566	840.126	339.795	1.850.214

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.15 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama, 2014

Provinsi	Laki-laki					Perempuan				
	Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama				Total	Jam Kerja Pada Pekerjaan Utama				Total
	0	1-14	15-40	>40		0	1-14	15-40	>40	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Aceh	365	9.852	9.475	4.879	24.571	212	7.105	4.767	1.065	13.149
Sumatera Utara	633	63.781	64.421	26.478	155.313	205	48.602	42.198	11.407	102.412
Sumatera Barat	374	13.435	13.694	4.770	32.273	445	9.849	6.276	3.267	19.837
Riau	828	8.042	21.258	7.977	38.105	181	3.653	9.340	5.170	18.344
Jambi	0	6.180	11.829	4.586	22.595	0	3.367	3.620	1.995	8.982
Sumatera Selatan	638	12.888	32.539	13.509	59.574	0	9.527	10.672	4.639	24.838
Bengkulu	0	3.496	6.842	3.200	13.538	0	3.491	3.862	1.237	8.590
Lampung	460	27.053	38.932	17.704	84.149	0	6.551	9.229	7.194	22.974
Bangka-Belitung	873	2.621	4.744	3.776	12.014	136	1.183	1.558	1.608	4.485
Kepulauan Riau	0	415	811	2.409	3.635	0	1.213	4.570	1.868	7.651
DKI Jakarta	0	502	3.821	11.433	15.756	0	1.893	3.812	16.850	22.555
Jawa Barat	3.593	21.583	81.504	90.509	197.189	1.294	22.219	41.969	66.192	131.674
Jawa Tengah	2.966	53.801	68.811	71.179	196.757	3.974	35.371	38.245	44.887	122.477
D I Y	0	1.955	1.181	5.144	8.280	0	4.319	793	4.310	9.422
Jawa Timur	956	69.707	72.310	41.535	184.508	0	34.923	32.232	33.116	100.271
Banten	966	7.815	20.849	16.187	45.817	0	13.113	5.537	21.763	40.413
Bali	652	11.581	10.914	6.371	29.518	0	13.916	11.263	5.492	30.671
Nusa Tenggara Barat	402	21.144	14.731	8.484	44.761	0	12.524	12.798	1.874	27.196
Nusa Tenggara Timur	248	27.898	24.153	7.807	60.106	0	20.911	12.567	2.416	35.894
Kalimantan Barat	844	7.795	17.286	12.749	38.674	60	5.620	10.614	6.134	22.428
Kalimantan Tengah	239	5.511	11.102	6.340	23.192	228	6.463	4.259	2.663	13.613
Kalimantan Selatan	0	9.156	17.257	7.666	34.079	0	4.465	4.677	7.228	16.370
Kalimantan Timur	178	2.696	6.055	5.027	13.956	287	2.900	3.615	2.078	8.880
Sulawesi Utara	447	1.666	5.340	4.420	11.873	0	832	315	865	2.012
Sulawesi Tengah	1.012	15.440	15.414	7.766	39.632	260	7.071	7.984	1.720	17.035
Sulawesi Selatan	775	37.832	37.183	26.910	102.700	304	20.270	19.766	7.755	48.095
Sulawesi Tenggara	732	21.741	20.726	4.742	47.941	239	11.538	9.579	490	21.846
Gorontalo	264	2.038	7.644	5.169	15.115	0	1.278	1.026	990	3.294
Sulawesi Barat	0	14.954	9.988	1.928	26.870	0	6.211	3.920	1.318	11.449
Maluku	106	2.501	6.859	2.202	11.668	0	1.982	1.911	785	4.678
Maluku Utara	95	3.755	4.525	1.210	9.585	0	2.331	2.616	267	5.214
Papua Barat	0	1.427	1.842	470	3.739	71	2.140	2.553	526	5.290
Papua	328	13.879	62.678	6.810	83.695	0	11.078	50.629	1.628	63.335
Indonesia	18.974	504.140	726.718	441.346	1.691.178	7.896	337.909	378.772	270.797	995.374

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.16 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Partisipasi Sekolah, 2014

Provinsi	Perkotaan				Perdesaan			
	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	-	2.754	1.265	4.019	0	19.620	14.081	33.701
Sumatera Utara	-	30.857	25.263	56.120	2.467	150.225	48.913	201.605
Sumatera Barat	78	7.127	6.271	13.476	443	19.897	18.294	38.634
Riau	-	7.626	7.775	15.401	-	12.775	28.273	41.048
Jambi	-	4.642	3.926	8.568	-	5.979	17.030	23.009
Sumatera Selatan	-	9.028	9.330	18.358	-	17.794	48.260	66.054
Bengkulu	76	4.180	1.997	6.253	-	5.581	10.294	15.875
Lampung	-	7.075	6.405	13.480	899	35.898	56.846	93.643
Bangka-Belitung	172	799	4.739	5.710	-	3.574	7.215	10.789
Kepulauan Riau	-	5.256	3.892	9.148	89	809	1.240	2.138
DKI Jakarta	-	6.826	31.485	38.311	-	-	-	-
Jawa Barat	-	35.439	169.025	204.464	-	26.518	97.881	124.399
Jawa Tengah	-	31.536	83.825	115.361	-	73.230	130.643	203.873
DIY	-	4.092	6.617	10.709	546	2.465	3.982	6.993
Jawa Timur	-	41.547	49.226	90.773	-	67.714	126.292	194.006
Banten	704	14.045	41.447	56.196	-	9.235	20.799	30.034
Bali	-	12.164	8.063	20.227	-	28.757	11.205	39.962
Nusa Tenggara Barat	-	13.629	9.100	22.729	414	30.303	18.511	49.228
Nusa Tenggara Timur	88	3.833	2.423	6.344	1.982	43.119	44.555	89.656
Kalimantan Barat	-	4.181	7.928	12.109	1.331	9.812	37.850	48.993
Kalimantan Tengah	-	3.107	4.290	7.397	-	11.353	18.055	29.408
Kalimantan Selatan	315	2.677	15.535	18.527	-	10.839	21.083	31.922
Kalimantan Timur	-	6.033	7.636	13.669	-	3.519	5.648	9.167
Sulawesi Utara	-	2.407	2.125	4.532	-	2.629	6.724	9.353
Sulawesi Tengah	-	4.559	2.347	6.906	3.441	22.924	23.396	49.761
Sulawesi Selatan	330	13.337	14.197	27.864	2.360	69.262	51.309	122.931
Sulawesi Tenggara	-	5.484	2.170	7.654	225	44.210	17.698	62.133
Gorontalo	-	1.431	2.639	4.070	515	3.384	10.440	14.339
Sulawesi Barat	-	5.177	2.326	7.503	-	16.780	14.036	30.816
Maluku	75	1.811	1.674	3.560	287	5.352	7.147	12.786
Maluku Utara	-	1.579	322	1.901	437	8.427	4.034	12.898
Papua Barat	-	294	71	365	805	4.764	3.095	8.664
Papua	89	2.849	1.696	4.634	49.355	56.355	36.686	142.396
Indonesia	1.927	297.381	537.030	836.338	65.596	823.103	961.515	1.850.214

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.17 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Jenis Kelamin, dan Partisipasi Sekolah, 2014

Provinsi	Laki-laki				Perempuan			
	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total	Tidak/Belum Sekolah	Masih Sekolah	Tidak Sekolah Lagi	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	-	13.688	10.883	24.571	-	8.686	4.463	13.149
Sumatera Utara	1.431	102.090	51.792	155.313	1.036	78.992	22.384	102.412
Sumatera Barat	443	13.966	17.864	32.273	78	13.058	6.701	19.837
Riau	-	10.658	27.447	38.105	-	9.743	8.601	18.344
Jambi	-	6.710	15.885	22.595	-	3.911	5.071	8.982
Sumatera Selatan	-	14.921	44.653	59.574	-	11.901	12.937	24.838
Bengkulu	-	4.314	9.224	13.538	76	5.447	3.067	8.590
Lampung	899	31.344	51.906	84.149	-	11.629	11.345	22.974
Bangka-Belitung	172	2.625	9.217	12.014	-	1.748	2.737	4.485
Kepulauan Riau	89	644	2.902	3.635	-	5.421	2.230	7.651
DKI Jakarta	-	1.666	14.090	15.756	-	5.160	17.395	22.555
Jawa Barat	-	23.446	173.743	197.189	-	38.511	93.163	131.674
Jawa Tengah	-	58.218	138.539	196.757	-	46.548	75.929	122.477
D I Y	-	2.582	5.698	8.280	546	3.975	4.901	9.422
Jawa Timur	-	67.039	117.469	184.508	-	42.222	58.049	100.271
Banten	704	10.540	34.573	45.817	-	12.740	27.673	40.413
Bali	-	18.712	10.806	29.518	-	22.209	8.462	30.671
Nusa Tenggara Barat	-	25.213	19.548	44.761	414	18.719	8.063	27.196
Nusa Tenggara Timur	1.290	29.122	29.694	60.106	780	17.830	17.284	35.894
Kalimantan Barat	1.033	9.073	28.568	38.674	298	4.920	17.210	22.428
Kalimantan Tengah	-	7.318	15.874	23.192	-	7.142	6.471	13.613
Kalimantan Selatan	315	8.435	25.329	34.079	-	5.081	11.289	16.370
Kalimantan Timur	-	3.940	10.016	13.956	-	5.612	3.268	8.880
Sulawesi Utara	-	3.640	8.233	11.873	-	1.396	616	2.012
Sulawesi Tengah	2.535	18.088	19.009	39.632	906	9.395	6.734	17.035
Sulawesi Selatan	2.097	51.166	49.437	102.700	593	31.433	16.069	48.095
Sulawesi Tenggara	143	32.721	15.077	47.941	82	16.973	4.791	21.846
Gorontalo	515	3.091	11.509	15.115	-	1.724	1.570	3.294
Sulawesi Barat	-	15.009	11.861	26.870	-	6.948	4.501	11.449
Maluku	277	4.755	6.636	11.668	85	2.408	2.185	4.678
Maluku Utara	437	5.614	3.534	9.585	0	4.392	822	5.214
Papua Barat	337	1.994	1.408	3.739	468	3.064	1.758	5.290
Papua	22.742	38.031	22.922	83.695	26.702	21.173	15.460	63.335
Indonesia	35.459	640.373	1.015.346	1.691.178	32.064	480.111	483.199	995.374

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

Tabel L- 7.18 Anak 10-17 Tahun yang Bekerja Menurut Provinsi, Tipe Daerah, dan Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan, 2014

Provinsi	Perkotaan						Perdesaan					
	Tidak/blm pernah sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD	SMP	SMA ke atas	Total	Tidak/blm pernah sekolah	Tidak/ belum tamat SD	SD	SMP	SMA ke atas	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
Aceh	-	296	1.272	1.899	552	4.019	0	4.008	11.617	16.076	2.000	33.701
Sumatera Utara	-	4.862	13.595	32.713	4.950	56.120	2.467	28.381	85.509	79.434	5.814	201.605
Sumatera Barat	78	2.025	5.568	4.154	1.651	13.476	443	9.814	16.295	10.843	1.239	38.634
Riau	-	2.438	5.280	5.434	2.249	15.401	-	7.108	17.345	14.927	1.668	41.048
Jambi	-	904	3.864	2.118	1.682	8.568	-	2.900	9.469	9.259	1.381	23.009
Sumatera Selatan	-	4.565	3.054	7.910	2.829	18.358	-	10.572	31.219	18.013	6.250	66.054
Bengkulu	76	117	2.537	2.977	546	6.253	-	2.720	8.196	4.626	333	15.875
Lampung	-	1.510	3.271	5.845	2.854	13.480	899	9.120	32.445	45.244	5.935	93.643
Bangka-Belitung	172	1.320	2.259	1.246	713	5.710	-	3.272	3.916	3.427	174	10.789
Kepulauan Riau	-	1.350	1.789	2.052	3.957	9.148	89	546	1.200	303	-	2.138
DKI Jakarta	-	2.570	17.539	17.614	588	38.311	-	-	-	-	-	-
Jawa Barat	-	17.564	87.701	86.971	12.228	204.464	-	8.059	62.319	51.942	2.079	124.399
Jawa Tengah	-	13.096	28.073	59.291	14.901	115.361	0	18.374	79.923	100.957	4.619	203.873
D I Y	-	-	1.451	7.639	1.619	10.709	546	734	823	4.336	554	6.993
Jawa Timur	-	7.688	25.560	46.692	10.833	90.773	-	21.295	83.117	83.925	5.669	194.006
Banten	704	6.724	16.065	29.877	2.826	56.196	-	1.694	13.769	13.157	1.414	30.034
Bali	-	1.719	5.115	10.642	2.751	20.227	-	6.035	18.850	13.088	1.989	39.962
Nusa Tenggara Barat	-	2.003	9.156	11.168	402	22.729	414	4.283	23.204	20.359	968	49.228
Nusa Tenggara Timur	88	893	2.484	2.395	484	6.344	1.982	21.348	42.930	21.885	1.511	89.656
Kalimantan Barat	-	1.513	6.567	3.418	611	12.109	1.331	9.588	24.074	13.120	880	48.993
Kalimantan Tengah	-	459	3.224	2.401	1.313	7.397	-	7.585	13.958	7.578	287	29.408
Kalimantan Selatan	315	2.296	8.164	5.497	2.255	18.527	-	4.112	15.079	10.291	2.440	31.922
Kalimantan Timur	-	2.786	5.491	4.395	997	13.669	-	2.547	3.372	3.133	115	9.167
Sulawesi Utara	-	489	1.448	1.844	751	4.532	-	1.445	4.846	2.416	646	9.353
Sulawesi Tengah	-	912	2.859	2.920	215	6.906	3.441	11.991	19.291	13.932	1.106	49.761
Sulawesi Selatan	330	4.072	13.080	8.942	1.440	27.864	2.360	24.046	51.014	41.164	4.347	122.931
Sulawesi Tenggara	-	1.526	1.759	4.238	131	7.654	225	12.525	22.846	24.962	1.575	62.133
Gorontalo	-	1.025	1.072	1.973	0	4.070	515	5.563	5.391	2.621	249	14.339
Sulawesi Barat	-	1.769	2.722	2.832	180	7.503	-	8.441	11.851	9.632	892	30.816
Maluku	75	142	1.360	966	1.017	3.560	287	1.912	6.836	3.360	391	12.786
Maluku Utara	-	102	107	1.130	562	1.901	437	1.556	5.038	5.682	185	12.898
Papua Barat	-	27	94	173	71	365	805	3.415	2.148	1.808	488	8.664
Papua	89	840	1.146	1.833	726	4.634	49.355	21.824	45.446	25.235	536	142.396
Indonesia	1.927	89.602	284.726	381.199	78.884	836.338	65.596	276.813	773.336	676.735	57.734	1.850.214

Sumber: BPS - Sakernas Agustus 2014

